

JADWAL

Tanggal Efektif	:	4 Desember 2020	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	16 Desember 2020
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	8 - 11 Desember 2020	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	16 Desember 2020
Tanggal Penjatahan	:	15 Desember 2020	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	17 Desember 2020

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI").



**VICTORIA CARE
INDONESIA**

PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam Bidang Industri Kosmetik (termasuk Pasta Gigi); Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga; Perdagangan Besar Kosmetik; dan Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Puri Indah Financial Tower 10th-11th Floor
Puri Lingkar Dalam Blok T-8
Kembangan, Puri Indah
Jakarta Barat 11610
Telepon : + 6221 - 54368111
Website: <http://www.vci.co.id/>

Lokasi Pabrik

Kawasan Industri Candi Blok 5A No.8
Gatot Subroto Krapyak Ngaliyan
Semarang, Indonesia
Telepon: + 6224 766 33311

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 1.008.000.000 (satu miliar delapan juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 15,027% (lima belas koma nol dua tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp100.800.000.000,- (seratus miliar delapan ratus juta Rupiah).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Victoria Care Indonesia Tbk No. 28 tanggal 25 September 2020, Perseroan melaksanakan program *Employee Stock Allocation* ("ESA") dengan jumlah sebesar 7,778% (tujuh koma tujuh tujuh persen) dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebesar 78.398.000 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan UUPT. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERTUMBUHAN DAN STABILITAS EKONOMI SERTA DAYA BELI KONSUMEN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Victoria Care Indonesia Tbk (yang selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat Direktur Utama No. 001/SKL-DIR/VC/IX/2020 tanggal 1 Oktober 2020 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM") dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI No. S-06987/BEI.PP3/11-2020 tanggal 11 November 2020. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XIII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	6
III. PERNYATAAN UTANG	14
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	21
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	24
VI. FAKTOR RISIKO	45
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	54
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	55
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	55
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	57
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	57
D. IZIN DAN SERTIFIKASI YANG DIMILIKI PERSEROAN	58
E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING	59
E.1. PERJANJIAN – PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	59
E.2. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	60
F. ASET TETAP	72
G. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	81
H. ASURANSI	81
I. PERIZINAN LINGKUNGAN	84
J. STRUKTUR KEPEMILIKAN	85
K. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	86
L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	86
M. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	88
N. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>Good Corporate Governance</i> atau GCG)	91
O. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	101
P. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	102
Q. SUMBER DAYA MANUSIA	102
R. STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	105
S. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	106

T.	KEGIATAN USAHA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	107
T.1.	UMUM	107
T.2.	KEUNGGULAN KOMPETITIF	108
T.3.	STRATEGI PERSEROAN	109
T.4.	KEGIATAN USAHA PERSEROAN	109
T.5.	KOMPETITOR DAN PERSAINGAN USAHA	122
T.6.	PROSPEK USAHA PERSEROAN	122
T.7.	PENGHARGAAN	123
T.8.	KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN	123
T.9.	KETERANGAN TENTANG INDUSTRI	123
IX.	EKUITAS	128
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	129
XI.	PERPAJAKAN	130
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	133
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	135
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	138
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	145
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	152
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	153
XVIII.	LAPORAN KEUANGAN	177

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

- Afiliasi** : Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- Akta No. 28/2020** : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 28 tanggal 25 September 2020, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0066461.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0161751.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 September 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam (a) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0391263 tanggal 25 September 2020, serta (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0391264 tanggal 25 September 2020, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0161751.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 September 2020.
- Akuntan Publik** : Berarti Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
- Anggota Bursa** : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Biro Administrasi Efek atau BAE** : Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Bima Registra.
- Bursa Efek atau BEI** : Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta.
- BNRI** : Berarti Berita Negara Republik Indonesia

Daftar Pemegang Saham (DPS)	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
DPPS	:	Berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham, daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS dan dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Efek	:	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
ESA	:	<i>Employee Stock Allocation</i>
FKPS	:	Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
FPPS	:	Berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan yang disediakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Harga Penawaran	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	:	Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	:	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	:	Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Kemenkumham	:	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.

- KSEI : Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadminstrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
- Manajer Penjatahan : Berarti PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
- Masa Penawaran Umum : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.
- Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
- Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK : Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak 31 Desember 2012.
- Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
- Pemegang Saham : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadminstrasikan dalam:
 - Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - Rekening Efek pada KSEI; atau
 - Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
- Pemegang Saham Utama : Berarti setiap Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
- Pemerintah : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

- Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham : Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Penjamin Emisi Efek : Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, Lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan Pencatatan Bursa Efek : Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00183/BEI/02-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI No. SP-065/SHM/KSEI/0920 tanggal 23 Oktober 2020, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat di kemudian hari.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No 31 tanggal 29 September 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara.

- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau "PPEE" : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No 30 tanggal 29 September 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana disuplemen dan/atau diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 20 tanggal 12 November 2020 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 33 tanggal 26 Nopember 2020, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2., yaitu:
- a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:
 - (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau
 - (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau
 - b. atas dasar pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM juncto POJK No. 7/2017.
- Perseroan : Berarti PT Victoria Care Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Barat.
- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
- POJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- POJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- POJK No. 11/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham tanggal 14 Maret 2017.
- POJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 22 Juni 2017.
- POJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 22 Juni 2017.

- POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
- POJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- POJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- POJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- POJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
- POJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
- POJK No. 9/2018 : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka tanggal 27 Juli 2018.
- POJK No. 15/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020.
- POJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama tanggal 21 April 2020.
- POJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu tanggal 2 Juli 2020.
- PPh : Berarti Pajak Penghasilan.
- Prospektus :: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017.
- Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 23/ 2017.
- Prospektus Ringkas : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
- Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.
- Rupiah atau Rp : Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.

RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebesar 1.008.000.000 (satu miliar delapan juta) saham biasa atas nama yang merupakan sebesar 15,027% (lima belas koma nol dua tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
SKU	:	Berarti singkatan dari <i>Stock Keeping Unit</i> , adalah kode unik yang diberikan kepada setiap produk barang baik yang dibeli maupun dijual oleh suatu perusahaan. Kode unik tersebut merupakan rangkaian angka dan huruf yang mewakili brand, tipe, warna dan ukuran setiap produk.
Surat Kolektif Saham	:	Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang telah ditentukan dalam Prospektus.
Tanggal Pengembalian/ <i>Refund</i>	:	Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran.
UKL-UPL	:	Berarti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
USD	:	Berarti Dollar Amerika Serikat, mata uang resmi Negara Amerika Serikat.



- UU Ketenagakerjaan : Berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279).
- UUPM : Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
- UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756).
- WIB : Berarti Waktu Indonesia Barat (GMT+7.00)

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

GTP : PT Gemilang Tunggal Prakarsa

SSS : PT Sukses Sejati Sejahtera

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta faktor risiko, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Victoria Care Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 32 tanggal 20 April 2006, yang dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00267 HT.01.01-TH.2006 tanggal 8 September 2006, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. 1477/BH 09.01/IX/2006 tanggal 27 September 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98 tanggal 8 Desember 2006, Tambahan No. 12916/2006.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 28 tanggal 25 September 2020, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0066461.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0161751.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 September 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam (a) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0391263 tanggal 25 September 2020, serta (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0391264 tanggal 25 September 2020, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0161751.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 ("**Akta No. 28/2020**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan antara lain adalah melakukan usaha dalam bidang (i) Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap, parfum dan kosmetik; (ii) Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya; dan (iii) Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan yang tidak dapat diklasifikasikan lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Industri kosmetik (termasuk pasta gigi), mencakup usaha pembuatan kosmetik, seperti rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut seperti shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit seperti krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat coklat setelah berjemur, produk untuk kebersihan badan seperti sabun mandi, deodorant, garam mandi dan obat perontok bulu, krim cukur dan kosmetik tradisional. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas, termasuk produk pengkilap gigi dan perekat gigi;
2. Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tissue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan,

seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengkilap dan krim untuk barang dari kulit, pengkilap dan krim untuk kayu, pengkilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok;

3. Perdagangan besar kosmetik, mencakup usaha perdagangan besar kosmetik seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya; dan
4. Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran, mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.

Untuk mendukung kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang berikut:

1. Jasa pengurusan transportasi (JPT), mencakup usaha pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara;
2. Pergudangan dan penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersil;
3. Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta, mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik aset non finansial dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. Kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) aset non finansial yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, *trade mark* dan *service mark*, *brand name*, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian *franchise*/waralaba dan aset non finansial yang tak berwujud lainnya;
4. Industri produk farmasi untuk manusia, mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspense, sabun antiseptic serta benang bedah. Termasuk industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal dan obat kontrasepsi hormonal, industri alat-alat diagnosa medis, termasuk uji kehamilan, industri substansi diagnosa in-vivo radioaktif, industri farmasi bioteknologi dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik;
5. Perdagangan besar farmasi, mencakup usaha perdagangan besar farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan;
6. Perdagangan besar obat tradisional atau jamu, mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu;
7. Industri kertas tissue, mencakup usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, facial tissue, toilet tissue, lens tissue, sapu tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin dan napkin untuk bayi dan cangkir, piring dan baki dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, tampon dan sebagainya dan kertas sigaret dan cork tipping paper; dan
8. Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton, mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file kantor dan barang sejenisnya.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan hampir seluruh kegiatan usaha utama yang diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Namun, pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan hasil produksi dan penjualan oleh Perseroan, maka kegiatan usaha utama Perseroan yang sedang dijalankan saat ini adalah dalam bidang industri kosmetik; industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga; perdagangan besar kosmetik, dan perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.

Kantor Perseroan berlokasi di Jalan Puri Ayu 1, Puri Lingkar Dalam Blok T No. 8, Puri Indah Financial Tower, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 28/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sukses Sejati Sejahtera	5.698.380.000	284.919.000.000	99,97
2. Luhur Dino Herlambang	1.620.000	81.000.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.700.000.000	285.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	4.300.000.000	215.000.000.000	-

3. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

- Jumlah saham yang ditawarkan : sebesar 1.008.000.000 (satu miliar delapan juta) saham baru atau sebesar 15,027% (lima belas koma nol dua tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
- Nilai Nominal : Rp50 (lima puluh) Rupiah per lembar saham.
- Harga Penawaran : Rp100 (seratus Rupiah) yang yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.
- Nilai Emisi : sebesar Rp100.800.000.000,- (seratus miliar delapan ratus juta Rupiah).
- Masa Penawaran Umum : 8 – 11 Desember 2020
- Tanggal Pencatatan di BEI : 17 Desember 2020

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penawaran Umum Perdana Saham

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	500.000.000.000	-	10.000.000.000	500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Sukses Sejati Sejahtera	5.698.380.000	284.919.000.000	99,97	5.698.380.000	284.919.000.000	84,949
2. Luhur Dino Herlambang	1.620.000	81.000.000	0,03	1.620.000	81.000.000	0,024
3. Masyarakat	-	-	-	1.008.000.000	50.400.000.000	15,027
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.700.000.000	285.000.000.000	100,00	6.708.000.000	335.400.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	4.300.000.000	215.000.000.000	-	3.292.000.000	164.600.000.000	-

Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan melalui Penjatahan Saham untuk Karyawan (Employee Stock Allocation atau Program ESA)

Berdasarkan Akta No 28/2020, Program *Employee Stock Allocation* (ESA) atau alokasi saham karyawan ini merupakan program pemberian jatah pasti saham yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada karyawan Perseroan untuk memesan saham dalam Penawaran Umum sebesar 7,778% (tujuh koma tujuh tujuh delapan persen) dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebesar 78.398.000 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu).

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini dan pelaksanaan ESA, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	500.000.000.000	-	10.000.000.000	500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Sukses Sejati Sejahtera	5.698.380.000	284.919.000.000	84,949	5.698.380.000	284.919.000.000	84,949
2. Luhur Dino Herlambang	1.620.000	81.000.000	0,024	1.620.000	81.000.000	0,024
3. Masyarakat	1.008.000.000	50.400.000.000	15,027	929.602.000	46.480.100.000	13,858
4. ESA	-	-	-	78.398.000	3.919.900.000	1,169
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.708.000.000	335.400.000.000	100,00	6.708.000.000	335.400.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.292.000.000	164.600.000.000	-	3.292.000.000	164.600.000.000	-

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar 26% (dua puluh enam persen) akan digunakan untuk pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan, untuk menunjang fasilitas pergudangan Perseroan. Uraian mengenai rencana pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan ini dijelaskan dalam Bab II bagian B.
- Sekitar 74% (tujuh puluh empat persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020 dan 2019, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan 2019 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini

Laporan keuangan tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019 dan 2018, dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjabar, ditandatangani oleh Benediktio Salim, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP 1561).

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Gani Sigiro & Handayani dengan opini tanpa modifikasian, ditandatangani oleh Setiawati Budiman, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP 1316).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Total Aset Lancar	407.033.641.425	389.484.279.280	365.930.060.936	377.186.930.197
Total Aset Tidak Lancar	402.174.730.919	390.075.315.198	251.240.711.689	188.694.616.030
Total Aset	809.208.372.344	779.559.594.478	617.170.772.625	565.881.546.227
Total Liabilitas Jangka Pendek	200.362.668.920	262.628.412.890	291.506.227.153	282.794.649.067
Total Liabilitas Jangka Panjang	99.256.151.902	100.243.567.609	20.363.715.438	18.805.866.592
Total Liabilitas	299.618.820.822	362.871.980.499	311.869.942.591	301.600.515.659
Total Ekuitas	509.589.551.522	416.687.613.979	305.300.830.034	264.281.030.568
Total Liabilitas Dan Ekuitas	809.208.372.344	779.559.594.478	617.170.772.625	565.881.546.227

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 (Tidak Diaudit)	2019	2018	2017
Penjualan neto	617.968.096.221	447.194.198.484	797.791.022.080	594.728.187.831	524.168.376.959
Beban pokok penjualan	(309.219.541.697)	(208.197.506.950)	(368.295.871.126)	(287.161.395.553)	(249.395.449.459)
Laba Bruto	308.748.554.524	238.996.691.534	429.495.150.954	307.566.792.278	274.772.927.500

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 (Tidak Diaudit)	2019	2018	2017
Beban penjualan dan pemasaran	(117.255.701.410)	(103.028.142.284)	(190.177.338.534)	(148.501.537.023)	(122.730.888.662)
Beban umum dan administrasi	(51.674.104.855)	(35.907.554.547)	(68.874.478.563)	(57.588.772.095)	(46.998.732.777)
Pendapatan lainnya	1.239.839.054	686.831.390	1.822.406.379	4.865.478.341	4.346.479.529
Beban lainnya	(1.506.569.336)	(2.024.717.812)	(3.269.519.179)	(1.897.381.716)	(21.248.874)
Laba operasi	139.552.017.977	98.723.108.281	168.996.221.057	104.444.579.785	109.368.536.716
Pendapatan keuangan	9.080.721	28.606.641	14.418.318	162.060.786	171.292.944
Beban keuangan	(11.923.469.874)	(9.633.411.789)	(18.232.594.888)	(15.997.014.215)	(21.038.170.806)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	127.637.628.824	89.118.303.133	150.778.044.487	88.609.626.356	88.501.658.854
Beban pajak penghasilan- neto	(30.558.372.933)	(23.162.428.566)	(39.015.413.947)	(23.294.749.435)	(21.368.522.989)
Laba periode berjalan	97.079.255.891	65.955.874.567	111.762.630.540	65.314.876.921	67.133.135.865
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Laba (rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(2.223.714.270)	(372.128.431)	(501.128.793)	939.896.727	(2.554.336.480)
Pajak penghasilan terkait	489.217.139	93.032.108	125.282.198	(234.974.182)	638.584.120
Penghasilan (rugi) komprehensif lain periode berjalan setelah pajak	(1.734.497.131)	(279.096.323)	(375.846.595)	704.922.545	(1.915.752.360)
Total penghasilan komprehensif periode berjalan	95.344.758.760	65.676.778.244	111.386.783.945	66.019.799.466	65.217.383.505
Laba per lembar saham dasar	17,03	11,57	19,61	11,46	11,78

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 (Tidak Diaudit)	2019	2018	2017
RASIO KINERJA KEUANGAN					
<u>Rasio Likuiditas</u>					
Rasio Kas – <i>Cash Ratio</i>	2,36%	1,24%	1,04%	8,44%	1,63%
Rasio Cepat – <i>Quick Ratio</i>	93,82%	75,45%	60,79%	65,34%	87,20%
Rasio Lancar – <i>Current Ratio</i>	203,15%	158,48%	148,30%	125,53%	133,38%
<u>Rasio Profitabilitas</u>					
Margin Laba Usaha – <i>Operating Profit Margin</i>	22,58%	22,08%	21,18%	17,56%	20,87%
Margin Laba Bersih – <i>Net Profit Margin</i>	15,71%	14,75%	14,01%	10,98%	12,81%
Tingkat Pengembalian Aset – ROA	12,00%	10,42%	14,34%	10,58%	11,86%
Tingkat Pengembalian Modal – ROE	19,05%	17,78%	26,82%	21,39%	25,40%
RASIO SOLVABILITAS					
Rasio Total Liabilitas Terhadap Aset	37,03%	41,38%	46,55%	50,53%	53,30%
Rasio Total Liabilitas Terhadap Ekuitas	58,80%	70,58%	87,08%	102,15%	114,12%
Rasio Utang Berbunga Terhadap Modal	36,28%	39,21%	56,46%	63,32%	77,36%
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset	62,97%	58,62%	53,45%	49,47%	46,70%
RASIO PERTUMBUHAN					
Pendapatan Usaha	38,19%	-	34,14%	13,46%	-
Laba Usaha	41,36%	-	61,80%	-4,50%	-
Laba Bersih	47,19%	-	71,11%	-2,71%	-

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 (Tidak Diaudit)	2019	2018	2017
Laba Bersih Komprehensif	45,17%	-	68,72%	1,23%	-
Total Aset	27,88%	-	26,31%	9,06%	-
Total Liabilitas	14,43%	-	16,35%	3,40%	-
Ekuitas	37,36%	-	36,48%	15,52%	-

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

6. FAKTOR RISIKO

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta daya beli konsumen

Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor konsumsi sebagai penyumbang terbesar komponen Produk Domestik Bruto. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor konsumen maka Perseroan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong peningkatan nilai komponen konsumsi yang selanjutnya akan memperbesar porsi belanja masyarakat. Kondisi ekonomi yang stabil juga akan membantu kegiatan usaha dan prospek bisnis Perseroan karena Perseroan akan dapat melakukan perencanaan usaha dan investasi yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang sehat dan stabil akan membawa dampak yang positif juga kepada Perseroan melalui peningkatan daya beli konsumen atas produk Perseroan dengan semakin besarnya kelompok masyarakat berpendapatan menengah.

B. Risiko Usaha Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

1. Krisis Wabah Kesehatan
2. Risiko Produksi
3. Risiko Ketergantungan atas Pasokan Bahan Baku
4. Risiko terkait Perizinan
5. Risiko Persaingan Usaha
6. Risiko Distribusi
7. Risiko Kecepatan atau keberhasilan peluncuran produk atau merek baru
8. Risiko Perubahan pola konsumsi atas produk kecantikan & perawatan tubuh
9. Risiko Pengendalian mutu terhadap bahan baku dan barang jadi
10. Risiko Pendanaan
11. Risiko Perubahan Teknologi
12. Risiko Sosial dan Ketenagakerjaan

C. Risiko Umum

1. Risiko perubahan kondisi perekonomian secara lokal, regional dan global
2. Litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan hukum
3. Kebijakan Pemerintah
4. Risiko Bencana Alam
5. Risiko perubahan kurs valuta asing (depresiasi nilai tukar rupiah)
6. Ketentuan negara lain atau peraturan internasional
7. Risiko Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia
8. Risiko terkait Lingkungan Hidup

D. Risiko Usaha Yang Berhubungan Dengan Saham

1. Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
2. Likuiditas saham Perseroan
3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

4. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

7. KEUNGGULAN KOMPETITIF

1. Merek yang Telah Dikenal Oleh Konsumen Indonesia
2. Menawarkan Produk yang Beragam untuk Kosmetik, Kecantikan & Perawatan Tubuh
3. Cakupan Distribusi yang Merata Di Indonesia
4. Tim manajemen yang berpengalaman

8. STRATEGI USAHA

1. Melebarkan portofolio produk Perseroan
2. Meningkatkan penjualan melalui channel online dan marketplace yang juga tumbuh secara pesat.
3. Melebarkan peluang penjualan ke pasar global melalui ekspor ke negara-negara berkembang dan juga yang berpenduduk besar seperti negara China.
4. Memperluas dan meningkatkan jaringan distribusi nasional
5. Memperkuat penggunaan dan penerapan teknologi informasi yang mendukung operasional Perseroan
6. Memperbaharui permesinan untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas output produksi

9. PROSPEK USAHA

Dengan adanya pandemik Covid 19 di dunia bahkan di Indonesia, mempengaruhi perekonomian pada umumnya dan juga pasar produk kosmetik, kecantikan dan juga perawatan tubuh. Prospek bisnis kosmetik, kecantikan dan perawatan tubuh di Indonesia masih potensial, dan ini ditunjang dengan semakin banyaknya produk Perseroan yang dijual ke pasar yang sanggup memenuhi kebutuhan konsumen baik itu pasar lokal maupun internasional. Selain itu, perbaikan distribusi Perseroan di luar pulau Jawa menjadi salah satu keberhasilan Perseroan meningkatkan penjualan.

Selain itu, prospek bisnis kosmetik, kecantikan dan perawatan tubuh di Indonesia mempunyai peluang yang masih sangat menjanjikan yang didukung oleh pertumbuhan jumlah penduduk kelas menengah dan golongan milenial yang juga didukung dengan daya beli mereka yang semakin baik. Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan industri kosmetik tahun 2019 mencapai 9%, meningkat dibanding pertumbuhan tahun 2018 sekitar 7,3%. Hal ini antara lain dipicu oleh meningkatnya tren kebutuhan masyarakat terhadap produk kecantikan dan perawatan tubuh. Pemerintah optimistis, industri kosmetik dalam negeri tak hanya tumbuh di pasar domestik, tapi juga di pasar dunia (*sumber: katadata.co.id, 2019*). Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal I 2020, kinerja industri kimia, farmasi dan obat tradisional termasuk sektor kosmetik, mengalami pertumbuhan sebesar 5,59 persen. Bahkan, di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19, kelompok manufaktur ini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa melalui capaian nilai eksportnya yang menembus 317 juta dolar AS pada semester I 2020. Pencapaian tersebut naik 15,2 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (*sumber: republik.co.id, 2020*).

Peluang untuk membidik kelas menengah yang sangat terbuka serta dengan peluang dalam industri kecantikan dan perawatan tubuh di Indonesia yang masih terus bertumbuh, Perseroan optimis dalam menjual produk-produknya bahkan di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19 ini. Perseroan terus berinovasi dalam segala hal baik itu kualitas produk, kemasan dan juga kemudahan dalam mendapatkan produk Perseroan, sehingga konsumen akhir produk Perseroan benar-benar merasakan nilai tambah yang diberikan Perseroan kepada para pelanggannya.

10. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan nilai aset bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyesihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Distribusi tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, distribusi dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan, setelah penyesihan untuk cadangan wajib, mulai tahun buku 2020 yang akan dibagikan tahun 2021. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebesar 1.008.000.000 (satu miliar delapan juta) saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) atau sebesar 15,027% (lima belas koma nol dua tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp100.800.000.000,- (seratus miliar delapan ratus juta Rupiah).

Berdasarkan Akta No 28/2020, Perseroan melaksanakan program ESA dengan jumlah sebesar 7,778% (tujuh koma tujuh tujuh delapan persen) dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebesar 78.398.000 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu). Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



**VICTORIA CARE
INDONESIA**

PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam Bidang Industri Kosmetik (termasuk Pasta Gigi); Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga; Perdagangan Besar Kosmetik; dan Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Puri Indah Financial Tower 10th-11th Floor

Puri Lingkar Dalam Blok T-8

Kembangan, Puri Indah

Jakarta Barat 11610

Telepon : +6221 54368111 (Hunting)

Website: <http://www.vci.co.id/>

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERTUMBUHAN DAN STABILITAS EKONOMI SERTA DAYA BELI KONSUMEN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Berdasarkan Akta No 28/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sukses Sejati Sejahtera	5.698.380.000	284.919.000.000	99,97
2. Luhur Dino Herlambang	1.620.000	81.000.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.700.000.000	285.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	4.300.000.000	215.000.000.000	-

Penawaran Umum Perdana Saham

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	500.000.000.000	-	10.000.000.000	500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Sukses Sejati Sejahtera	5.698.380.000	284.919.000.000	99,97	5.698.380.000	284.919.000.000	84,949
2. Luhur Dino Herlambang	1.620.000	81.000.000	0,03	1.620.000	81.000.000	0,024
3. Masyarakat	-	-	-	1.008.000.000	50.400.000.000	15,027
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.700.000.000	285.000.000.000	100,00	6.708.000.000	335.400.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	4.300.000.000	215.000.000.000	-	3.292.000.000	164.600.000.000	-

Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan melalui Penjatahan Saham untuk Karyawan (Employee Stock Allocation atau Program ESA)

Berdasarkan Akta No 28/2020, Program *Employee Stock Allocation* (ESA) atau alokasi saham karyawan ini merupakan program pemberian jatah pasti saham yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada karyawan Perseroan untuk memesan saham dalam Penawaran Umum sebesar 7,778% (tujuh koma tujuh tujuh delapan persen) dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebesar 78.398.000 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu).

Tujuan Utama Pelaksanaan Program ESA

Tujuan utama Program ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan sehingga dengan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh stakeholders Perseroan. Sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan Program ESA, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Saham Penghargaan untuk pembelian saham akan ditanggung oleh Perseroan yang sumber dananya berasal dari kas Perseroan.

Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti kepada karyawan Perseroan yang memenuhi kualifikasi (selanjutnya disebut "**Peserta Program ESA**"). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 009/SK-DIR/VCII/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Program *Employee Stock Allocation* (ESA) berupa pemberian Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti Karyawan, Perseroan menetapkan jumlah Program ESA adalah sebesar 78.398.000 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan

puluh delapan ribu) saham atau sebesar 7,778% (tujuh koma tujuh tujuh delapan persen) saham dari total Saham Yang Ditawarkan, yang terdiri dari:

- a. Saham Penghargaan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari Program Saham ESA Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
- b. Saham Jatah Pasti sebesar 98,8% (sembilan puluh delapan koma delapan persen) dari Program Saham ESA Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7, yaitu penjatahan pasti dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham Penghargaan

Saham Penghargaan yaitu alokasi saham yang diberikan Perseroan secara cuma-cuma kepada seluruh Peserta Program ESA dengan jumlah sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari Program Saham ESA Yang Ditawarkan. Saham Penghargaan memiliki *Lock-up period* selama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan apabila pada saat *Lock-up period* Peserta Program ESA mengundurkan diri, Peserta Program ESA tidak dapat meneruskan kepemilikan sahamnya dan tidak dapat memperjualbelikan dan/atau mengalihkan setelah periode *Lock-Up* berakhir dan akan dikembalikan kepada Perseroan. Masa *Lock-up* dimulai sejak tanggal Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek.

Saham Jatah Pasti

Saham Jatah Pasti yaitu alokasi dengan jatah pasti yang diberikan Perseroan untuk membeli saham Penawaran Umum oleh Peserta Program ESA sebesar 98,8% (sembilan puluh delapan koma delapan persen) dari Program Saham ESA Yang Ditawarkan. Peserta ESA dapat membeli Saham Jatah Pasti sesuai dengan jumlah alokasi berdasarkan kebijakan internal Perseroan. Harga pelaksanaan ESA untuk saham jatah pasti sama dengan Harga Penawaran. Saham Jatah Pasti memiliki *Lock-up period* selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Peserta Program ESA

Peserta program ESA adalah pegawai Perseroan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pegawai peserta program ESA adalah seluruh pegawai Perseroan yang tercatat aktif bekerja pada tanggal 1 September 2020 yang berstatus:
 - a. Pegawai Organik Perseroan
 - b. Pegawai Terampil
 - c. Pegawai Honorer
2. Karyawan Tetap dengan masa kerja aktif lebih dari atau sama dengan 1 tahun per tanggal 1 September 2020, dengan appraisal score rata-rata atau lebih baik pada tahun 2019
3. Karyawan tetap Perseroan yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja masing-masing pegawai untuk tahun 2019 dan tidak dalam status terkena hukuman (SP1, SP2, dan SP3) pada saat pelaksanaan program ESA.
4. Karyawan tetap Perseroan yang tidak dalam status Cuti dengan Tanggungan Perusahaan (CDTP)
5. Tidak berlaku bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Peserta lain yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham pada Program ESA diluar yang telah ditetapkan diatas, bila diperlukan dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi tersendiri.

Apabila peserta Program ESA tidak memenuhi kriteria/persyaratan yang menyebabkan gugurnya hak Peserta Program ESA pada waktu periode penawaran ESA baik untuk saham penghargaan maupun saham jatah pasti, Perseroan akan melakukan:

- Untuk saham penghargaan : Saham akan dikembalikan ke Perseroan untuk dialihkan ke karyawan lain dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.

- Untuk saham jatah pasti : Saham akan dilepas kembali untuk dijual ke publik bersamaan dengan proses IPO.

Tata Cara Pengalokasian Saham

Periode pemesanan saham jatah pasti oleh peserta ESA dilakukan sebelum masa penawaran awal berakhir. Saham jatah pasti dibayarkan dari Perseroan yang diterima karyawan sesuai dengan ketentuan Perseroan. Sementara untuk saham penghargaan akan diberikan langsung kepada Peserta Program ESA yang telah ditentukan Perseroan tanpa melewati proses pemesanan.

Pelaksanaan Penerbitan Saham

Perseroan akan menerbitkan formulir alokasi saham untuk para karyawan yang berhak mengikuti Program ESA. Formulir penjatahan saham ini akan diteruskan ke Biro Administrasi Efek (BAE) untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar distribusi saham pada tanggal distribusi.

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Aspek Perpajakan Program ESA

Biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Saham Penghargaan akan ditanggung oleh Perseroan, sedangkan biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Saham Jatah Pasti, seluruh biaya dan pajak yang timbul akan ditanggung oleh peserta. Biaya yang perlu dikeluarkan oleh Peserta Program ESA Saham Jatah Pasti untuk memperoleh saham sama dengan Harga Penawaran.

Setelah periode *lock-up* berakhir dan peserta program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau diluar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing peserta program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang *capital gain* yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Ketentuan Program ESA

Dalam Program ESA akan dialokasikan Jatah Pasti untuk membeli Saham kepada Peserta yang berhak sesuai dengan jenjang jabatan dan masa kerja karyawan yang bersangkutan, dan juga *appraisal score* tahun 2019. Saham Jatah Pasti yang dialokasikan kepada Peserta Program ESA tidak bersifat *mandatory*, dengan demikian apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Peserta, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada Peserta Program ESA lain. Apabila Peserta Program ESA lain tidak mengambil sisa saham yang ditawarkan tersebut maka Perseroan dapat menawarkan ke masyarakat. Peserta dapat membeli Saham Jatah Pasti dengan harga Penawaran Umum. Saham yang tidak diserap oleh Peserta ESA tersebut tidak akan dikenakan *lock-up*.

Saham Jatah Pasti diberlakukan *lock-up* selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI. Perseroan tidak menanggung biaya pembelian Saham Jatah Pasti oleh Peserta Program ESA. Jika peserta program ESA mengundurkan diri dari Perseroan selama periode *lock-up*, maka Saham Jatah Pasti masih merupakan kepemilikan peserta program ESA tersebut dan *lock-up* juga masih berlaku sampai periode *lock-up* selesai.

Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti kepada Peserta Program ESA. Peserta wajib menyampaikan pendaftaran sebagai peminat program ESA melalui bagian SDM masing-masing unit kerja/bisnis masing-masing di tempat pegawai peserta ditugaskan Perseroan. Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum dengan jumlah penuh.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini dan pelaksanaan ESA, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	500.000.000.000	-	10.000.000.000	500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Sukses Sejati Sejahtera	5.698.380.000	284.919.000.000	84,949	5.698.380.000	284.919.000.000	84,949
2. Luhur Dino Herlambang	1.620.000	81.000.000	0,024	1.620.000	81.000.000	0,024
3. Masyarakat	1.008.000.000	50.400.000.000	15,027	929.602.000	46.480.100.000	13,858
4. ESA	-	-	-	78.398.000	3.919.900.000	1,169
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.708.000.000	335.400.000.000	100,00	6.708.000.000	335.400.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.292.000.000	164.600.000.000	-	3.292.000.000	164.600.000.000	-

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Saham-saham Perseroan tidak termasuk dalam saham-saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 1.008.000.000 (satu miliar delapan juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 15,027% (lima belas koma nol dua tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 5.700.000.000 (lima miliar tujuh ratus juta) saham atau sebesar 84,973% (delapan puluh empat koma sembilan tujuh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 6.708.000.000 (enam miliar tujuh ratus delapan juta) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI No. S-06987/BEI.PP3/11-2020 tanggal 11 November 2020 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

A. Uraian Singkat

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sekitar 26% (dua puluh enam persen) akan digunakan untuk pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan, untuk menunjang fasilitas pergudangan Perseroan. Uraian mengenai rencana pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan ini dijelaskan dalam bagian B di bawah ini.
- b) Sekitar 74% (tujuh puluh empat persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Saham ini belum direalisasikan oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan untuk mengembangkan fasilitas pergudangan Perseroan dengan menggunakan sekitar 26% (dua puluh enam persen) dari dana Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur di dalam diatur dalam POJK No. 17/2020 karena nilai transaksi adalah lebih kecil dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan (berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020. Namun demikian pembelian aset tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur di dalam POJK No. 42/2020 karena Perseroan berencana melakukan pembelian aset tetap dari yang saat ini dimiliki oleh Tuan Billy Hartono Salim (yang merupakan pihak yang mengendalikan Perseroan).

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,84% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 0,50%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 0,24%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : 0,50%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 2,07%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,67%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,31%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,09%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,06%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;

- Biaya lain-lain 1,47%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya KJPP, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, dan biaya iklan surat kabar.

B. Uraian Pembelian Tanah dan Bangunan

Sebagaimana diuraikan pada bagian A di atas, salah satu rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Saham akan dipergunakan untuk membeli sejumlah bidang tanah dan bangunan yang akan digunakan menjadi fasilitas pergudangan Perseroan. Rincian mengenai rencana pembelian tanah dan bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI PEMBELIAN, PARA PIHAK, DAN OBJEK TRANSAKSI

Objek transaksi	Lahan di Kawasan Industri Candi Blok 5A, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nama (para) Pihak	Perseroan (sebagai Pembeli); dan Billy Hartono Salim (sebagai Penjual).
Status/ Sifat Hubungan Afiliasi	Billy Hartono Salim adalah pihak yang mengendalikan Perseroan.
Penjelasan, Pertimbangan, Alasan pertimbangan pembelian (dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak afiliasi)	Aset yang akan dibeli oleh Perseroan saat ini sudah dipergunakan oleh Perseroan berdasarkan sewa antara Perseroan dan Billy Hartono Salim.
Dokumen transaksi	Akta Pengikatan Jual Beli No. 17 tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat oleh Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara.
Dokumen kepemilikan objek transaksi	Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor: 03088/Ngaliyan.
Nilai transaksi	25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).
Waktu penyelesaian transaksi	Kuartal IV 2020.
Metode penentuan nilai transaksi	Dengan memperhatikan Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Gudang yang dipersiapkan oleh KJPP Iskandar dan Rekan (KJPP yang terdaftar di OJK berdasarkan Surat No.S-774/PM.25/2013 tanggal 27 November 2013 dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Pendaftaran Ulang) STTD.PP-82/PM.2/2019 tanggal 28 September 2018, dengan nomor Laporan No.00414/2.0118-00/PI/04/0463/1/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

2. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN ASET

Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan ("IDR" atau "Penilai" atau "Kami") telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusannya No. 772/KM.1/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-774/PM.25/2013 tanggal 27 November 2013 dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Pendaftaran Ulang) STTD.PP-82/PM.2/2018 tanggal 28 September 2018 sebagai Penilai

Properti/Aset di Pasar Modal. Sesuai dengan penugasan yang diterima, IDR telah melakukan penilaian properti, sebagaimana diuraikan dalam laporan ini.

Berikut adalah ringkasan Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Gudang atas nama BILLY HARTONO SALIM.

A. Objek Penilaian

Obyek penilaian adalah SHGB No. 03088 seluas 5.200 m² dan Bangunan Gudang serta sarana pelengkapannya di Kawasan Industri Candi Blok 5A, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

B. Maksud Dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah untuk memberikan opini independen atas Nilai Pasar untuk setiap properti obyek penilaian dengan tujuan penilaian untuk tujuan Jual Beli (Transfer of Ownership).

C. Tingkat Kedalaman Investigasi

Tingkat kedalaman investigasi dalam melakukan penilaian ini adalah sebagai berikut:

- Penilai tidak melakukan penyelidikan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Terdapat data dan informasi yang relevan yang diambil dari sumber yang layak dan dipercaya.
- Penelaahan, perhitungan dan analisis dapat dilakukan dengan baik tanpa terhalang oleh informasi yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan.
- Untuk tujuan penilaian tersebut, tidak ada pembatasan dalam melakukan inspeksi, penelaahan, perhitungan dan analisis dalam penilaian. Jika terdapat pembatasan akan diungkapkan dalam laporan penilaian.
- Penilai mempertimbangkan kondisi obyek penilaian, namun demikian Penilai tidak berkewajiban untuk memeriksa struktur ataupun bagian-bagian yang tertutup, tidak terlihat dan tidak dapat terjangkau, selain itu Penilai tidak memberikan jaminan bila ada pelapukan rayap, gangguan lainnya atau kerusakan lain yang tidak terlihat. Penilai tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lingkungan dan lainnya kecuali diinformasikan lain, penilaian kami didasarkan pada asumsi bahwa seluruh aspek ini dipenuhi dengan baik. Kondisi-kondisi yang tidak wajar yang tersembunyi yang membuat efek negatif terhadap nilai tidak menjadi tanggung jawab Penilai.
- Penilaian berdasarkan unit penilaian (agregasi) dan/atau berdasarkan kelompok fisik sesuai dayanya.
- Apabila Penilai mengalami keterbatasan akses misalnya tidak dapat melakukan inspeksi atau pada saat inspeksi tidak dapat memasuki obyek penilaian, sehingga Penilai tidak mengetahui mengenai volume/ukuran, spesifikasi teknis dan kondisi obyek penilaian, dimana data mengenai volume/ukuran, spesifikasi teknis dan kondisi obyek penilaian tersebut diperoleh dari Pemberi Tugas, maka Pemberi Tugas bertanggung jawab atas kebenaran data/informasi tersebut. Hasil penilaian dapat berbeda jika data/informasi tersebut tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
- Apabila terdapat batasan tingkat kedalaman investigasi lainnya, misalnya tidak dilakukan inspeksi atau dilakukannya inspeksi secara sampling, akan kami ungkapkan dalam laporan penilaian setiap properti obyek penilaian.

D. Asumsi Dan Asumsi Khusus

Asumsi dan asumsi khusus dalam penilaian ini adalah sebagai berikut :

- Legalitas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian adalah benar dan tidak menyesatkan.

- Data dan informasi yang relevan yang diperoleh dari sumber yang layak adalah benar dan tidak menyesatkan.
- Pemberi Tugas telah memberikan informasi yang lengkap mengenai obyek penilaian dan tidak ada hal-hal yang disembunyikan yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kesimpulan nilai.
- Penilai beranggapan bahwa bagian-bagian properti yang tidak diinspeksi tidak memiliki kerusakan yang berarti dan tidak menyebabkan perubahan nilai.
- Obyek penilaian diasumsikan tidak dibangun dengan material ataupun mengandung material yang bersifat merusak dan berbahaya yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang berpengaruh terhadap kesimpulan nilai.
- Asumsi lain dalam penilaian diungkapkan dalam laporan penilaian.
- Asumsi Khusus adalah asumsi yang berbeda dengan fakta yang sebenarnya pada tanggal penilaian. Jika terdapat asumsi khusus akan diungkapkan dalam laporan penilaian.

E. Kondisi Dan Syarat Pembatas

Asumsi dan asumsi khusus dalam penilaian ini adalah sebagai berikut :

- Penilaian ini bersifat non-desclaimer opinion.
- Kecuali diatur berbeda oleh peraturan dan perundangan yang ada, maka penilaian dan laporan penilaian bersifat rahasia dan hanya ditujukan terbatas untuk Pemberi Tugas dan disajikan untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan penilaian. Penilai tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.
- Penilai melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- Penilai melakukan penelaahan atas status hukum obyek penilaian.
- Penilai tidak melakukan penyelidikan atas legalitas/status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (Fiduciary Duty), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Jika penilaian diperuntukan untuk kepentingan Pasar Modal, data dan informasi dalam penilaian bersumber dari atau divalidasi oleh Asosiasi Profesi Penilai (MAPPI).
- Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan tujuan/kepentingan dari laporan penilaian.
- Data dan informasi yang diterima Penilai dari Pemberi Tugas diasumsikan benar dan dapat dipertanggung jawabkan, antara lain termasuk penunjukkan letak lokasi tempat, spesifikasi jenis dan jumlah aset obyek penilaian dan apabila data dan informasi tersebut tidak benar maka Pemberi Tugas membebaskan Penilai dari tanggung jawab atas hasil penilaian yang tidak tepat dikarenakan kesalahan tersebut.
- Uraian spesifikasi teknis obyek penilaian yang dilaporkan hanya merupakan identifikasi saja dan obyek penilaian yang dinilai merupakan satu kesatuan lengkap.
- Pemberi tugas merujuk kepada seseorang, kelompok atau suatu entitas atau yang mewakilinya atau penasihat profesionalnya yang penugasan penilaiannya dilakukan IDR.
- Pengguna laporan merujuk kepada seseorang, kelompok atau suatu entitas atau yang mewakilinya atau penasihat profesionalnya sebagai pengguna hasil penilaian yang didasarkan dari hasil perikatan penugasan antara IDR dan Pemberi Tugas.
- Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada Penilai seperti yang telah disebutkan dalam laporan penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Pemberi Tugas.

- Gambar, denah ataupun peta yang terdapat dalam laporan ini disajikan hanya untuk kemudahan visualisasi saja. Penilai tidak melaksanakan survey/pemetaan/pengukuran dan tidak bertanggung jawab mengenai hal ini.
- Pemberi Tugas secara tegas menyatakan akan membebaskan IDR dari segala tuntutan ganti rugi dari pihak lain, jika pihak lain menuntut IDR karena penugasan penilaian yang diberikan Pemberi Tugas kepada IDR.
- Laporan ini tidak sah jika tidak dibubuhi tandatangan Pemimpin Rekan/Rekan dan stempel/seal perusahaan KJPP Iskandar dan Rekan serta tidak dapat dipertanggung jawabkan bilamana pemberi tugas tidak melunasi imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini.
- Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu (tingginya tingkat ketidakpastian) sebagai akibat dari adanya Pandemi wabah Covid-19 sehingga pengguna laporan penilaian diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian), khususnya berkenaan dengan perbedaan antara tenggal penilaian dan waktu penggunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi / keuangan.
- Perbedaan kondisi yang mungkin terjadi antara tanggal penilaian dengan waktu penggunaan hasil penilaian dapat menurunkan relevansi opini nilai terhadap kebutuhan pengguna hasil penilaian, dikarenakan adanya perbedaan akses data dan informasi serta asumsi dan analisis penilaian. Apabila pengguna hasil penilaian menemukan kondisi tersebut, disarankan untuk menugaskan Penilai melakukan revidi terhadap penugasan yang telah dilaksanakan dan apabila dimungkinkan dan dibutuhkan, Penilai dapat melakukan penilaian ulang dengan mengulang kembali prosedur penilaian yang sebelumnya dilakukan, secara lebih lengkap. Proses dan prosedur tersebut harus dituangkan dalam penugasan yang berdiri sendiri dan berbeda dengan penugasan penilaian sebelumnya.
- Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari laporan penilaian.

F. Pendekatan Dan Metode Penilaian

Obyek Penilaian dinilai dengan menggunakan Pendekatan Biaya (Cost Approach) dan Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*).

Metode yang digunakan untuk Pendekatan Biaya adalah Metode Biaya Pembuatan/Pengganti Baru (*Reproduction/ Replacement Cost New, RCN*) karena tanah yang di atasnya berdiri bangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Data harga penawaran / transaksi dari property pembanding yang sejenis dan sebanding dengan obyek penilaian tidak tersedia, dan sesuai dengan prinsip kontribusi nilai objek penilaian adalah nilai tanah ditambahkan nilai bangunan. Estimasi nilai pasar tanah diperoleh melalui pendekatan pasar, mengingat harga penawaran / transaksi property pembanding tersedia dan indikasi nilai pasar bangunan diperoleh dengan pendekatan biaya dengan pertimbangan biaya pembuatan / penggantian baru (*Reproduction / Replacement Cost New. RCN*), penyusutan (fisik, fungsi dan ekonomis), umur ekonomis dan kondisi dapat ditentukan. Estimasi nilai diperoleh dengan mengurangi RCN dengan penyusutan.

Metode yang digunakan untuk Pendekatan Pendapatan adalah *Gross Income Multiplier (GIM)* karena obyek penilaian merupakan property yang menghasilkan pendapatan, baik sudah beroperasi maupun belum beroperasi ataupun digunakan sendiri (*owner occupied*), dimana tersedia data pasar penjualan dan sewa property yang sebanding dan sejenis, serta harga sewa obyek penilaian diketahui.

G. Kesimpulan Nilai

Dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan hasil analisis yang telah dilakukan serta pendekatan penilaian yang digunakan, nilai setiap property obyek penilaian adalah sebagai berikut :

Nilai Pasar :

Rp. 24.235.000.000,-
(DUA PULUH EMPAT MILIAR DUA RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Hasil penilaian ini untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaan atau kepentingan yang tercantum di dalam laporan penilaian ini, dan kami tidak mengambil tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas penggunaan laporan ini yang bertentangan dengan komentar, penjelasan, asumsi dan kondisi pembatas yang disebutkan di dalam laporan

3. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA PEMBELIAN

Penilaian kewajaran transaksi dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusannya No. 772/KM.1/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-774/PM.25/2013 tanggal 27 November 2013 dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Pendaftaran Ulang) No. STTD.PPB-33/PM.2/2018 tanggal 28 September 2018 sebagai Penilai Properti/Aset dan Bisnis di Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat **Kewajaran** Rencana Transaksi Pembelian Tanah dan Bangunan Gudang Milik Billy Hartono Salim (BHS) oleh PT Victoria Care Indonesia Tbk (VCI) yang termuat dalam laporan Pendapat Kewajaran Laporan No. 00461/2.0118-00/BS/04/0520/1/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020:

A. Identitas Pihak

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan (VCI) dan Billy Hartono Salim (BHS) dimana VCI sebagai pembeli dan BHS sebagai penjual.

B. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana transaksi pembelian sebidang tanah SHGB No. 03088 seluas 5.200 m2 berikut bangunan gudang serta sarana pelengkap di atasnya milik BHS yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 5A Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan harga Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli No. 17 antara VCI dan BHS tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat oleh Rudy Siswanto, SH Notaris di Jakarta Utara.

C. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan penilaian adalah untuk memberikan pendapat kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Transaksi.

D. Asumsi

- Laporan Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai akhir. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.

E. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas :

1. Nilai dari objek yang ditransaksikan.
2. Dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.
3. Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan rencana transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Melakukan analisis transaksi.
2. Melakukan analisis kualitatif atas rencana transaksi.
3. Melakukan analisis kuantitatif atas rencana transaksi.
4. Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.
5. Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

F. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Hasil analisis atas nilai dari objek yang ditransaksikan adalah rencana nilai transaksi masih dalam kisaran wajar dari nilai yang didapatkan dari hasil penilaian memberikan kesimpulan bahwa rencana nilai transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham adalah dengan pembelian tanah dan bangunan gudang akan memperoleh apresiasi harga dan penghematan beban sewa yang akan meningkatkan laba Perseroan. Dengan demikian dengan dilakukannya transaksi memberikan dampak keuangan yang positif terhadap kepentingan pemegang saham Perseroan.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah Perseroan akan melakukan investasi yang layak dan menguntungkan serta berpotensi meningkatkan laba dari penghematan beban sewa dan akan meningkatkan profitabilitas Perseroan yang akan meningkatkan nilai saham Perseroan. Dengan demikian transaksi menguntungkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa rencana transaksi adalah **wajar** bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

4. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat di dalam Prospektus ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup dan seksama, semua informasi material telah diungkapkan dan tidak terdapat fakta penting lainnya yang dihilangkan yang dapat memberikan informasi yang menyesatkan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa rencana transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam POJK No.42/2020.

5. PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI PEMEGANG SAHAM

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi ini dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat:



Corporate Secretary

PT Victoria Care Indonesia Tbk
Puri Indah Financial Tower 10th-11th Floor
Puri Lingkar Dalam Blok T-8
Kembangan, Puri Indah
Jakarta Barat 11610
Telepon : + 6221 - 54368111
Email: corsec@vci.co.id

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan tanggal 31 Juli 2020 yang diambil dari laporan keuangan per 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan tertanggal 19 Oktober 2020, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Juli 2020, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp299.618.820.822. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	90.805.510.139
Utang usaha	
Pihak ketiga	21.213.503.501
Pihak berelasi	5.233.876.551
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	453.093.006
Pihak berelasi	2.476.811.021
Uang muka pelanggan – pihak ketiga	1.269.670.060
Utang pajak	30.134.096.218
Beban akrual	29.378.227.255
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	5.332.767.596
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank jangka panjang	6.888.969.564
Utang pembiayaan konsumen	5.058.283.375
Liabilitas sewa	2.117.860.634
Total Liabilitas Jangka Pendek	200.362.668.920
Liabilitas Jangka Panjang - setelah dikurang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Utang bank jangka panjang	73.694.313.291
Utang pembiayaan konsumen	5.978.352.881
Liabilitas sewa	313.009.129
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang	19.270.476.601
Total Liabilitas Jangka Panjang	99.256.151.902
TOTAL LIABILITAS	299.618.820.822

Rincian Liabilitas

Liabilitas Jangka Pendek

1. Utang Bank jangka Pendek

Saldo utang Bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp90.805.510.139. Adapun rincian atas saldo tersebut adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Cerukan	
PT Bank Central Asia Tbk	90.805.510.139
Total	90.805.510.139

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 3 Mei 2018, Perseroan menandatangani Perjanjian Kredit No. 16 dengan PT Bank Central Asia Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan memperoleh fasilitas kredit berupa Fasilitas Kredit Lokal (Cerukan) dengan batas kredit sebesar Rp200.000.000.000 untuk keperluan modal kerja. Fasilitas ini telah berakhir pada tanggal 4 Mei 2019 dan dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9,00% per tahun.

Perjanjian ini telah mengalami perubahan yaitu Perubahan Perjanjian Kredit No. 01 pada tanggal 1 Juli 2019, yang mengubah ketersediaan fasilitas ini menjadi sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 dan tingkat bunga diubah menjadi sebesar 9,50% per tahun.

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, beban bunga atas fasilitas ini sebesar Rp6.776.136.070 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Fasilitas ini memiliki persetujuan dan persyaratan yang sama seperti yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit investasi.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan 5 (lima) Hak Milik ("HM") berlokasi di Mekarsari atas nama Billy Hartono Salim, 2 (dua) HGB berlokasi di Ngaliyan atas nama Perseroan, 5 (lima) HGB berlokasi di Semanan atas nama Perseroan, 1 (satu) HGB berlokasi di Kembangan Selatan atas nama PT Antilope Madju Puri Indah, beberapa aset seperti mesin produksi dan peralatan dan jaminan pribadi atas nama Billy Hartono Salim.

Selanjutnya, perjanjian kredit ini telah mengalami beberapa kali perubahan terkait tanggal jatuh tempo, tingkat suku bunga pinjaman dan jaminan

2. Utang Usaha

Saldo utang usaha pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp26.447.380.052. Adapun rincian atas saldo atas utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Pihak ketiga	21.213.503.501
Pihak berelasi	5.233.876.551
Total	26.447.380.052

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Belum jatuh tempo	18.136.145.718
Lewat jatuh tempo	
1 sampai 30 hari	4.993.140.801
31 sampai 60 hari	1.057.729.236
61 sampai 90 hari	934.801.133
Lebih dari 90 hari	1.325.563.164
Total	26.447.380.052

Pada tanggal 31 Juli 2020 tidak terdapat jaminan yang diberikan Perseroan atas utang usaha di atas.

3. Utang pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp30.134.096.218. Adapun rincian atas saldo atas utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan – Pasal 4 (2)	158.912.381
Pajak penghasilan – Pasal 21	424.493.844
Pajak penghasilan – Pasal 23	954.318.918
Pajak penghasilan – Pasal 25	1.149.604.445
Pajak penghasilan – Pasal 29	
Periode 2020	12.456.665.452
Pajak pertambahan nilai	14.990.101.178
Total	30.134.096.218

4. Beban Akrua

Saldo beban akrual pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp29.378.227.255. Adapun rincian atas saldo atas beban akrual adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Promosi	26.910.745.617
Bunga	488.783.114
Listrik, air, dan telepon	264.226.514
Lain-lain	1.714.472.010
Total	29.378.227.255

5. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Jangka Pendek

Saldo liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp5.332.767.596. Adapun rincian atas saldo liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	5.332.767.596
Total	5.332.767.596

6. Utang Bank Jangka Panjang

Saldo utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp80.583.282.855. Berikut ini adalah rincian utang bank jangka panjang :

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk	81.234.871.877
Total	81.234.871.877
Dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	(651.589.022)
Neto	80.583.282.855
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(6.888.969.564)
Bagian jangka panjang	73.694.313.291

PT Bank Central Asia Tbk Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 1 Juli 2019 antara Perseroan dan PT Bank Central Asia Tbk, Perseroan memperoleh beberapa Fasilitas Kredit jangka panjang dengan perincian sebagai berikut:

1. Fasilitas Kredit Investasi 1 (KI1) dengan batas Rp73.000.000.000 dalam rangka pembelian tanah dan bangunan di Puri Indah Financial Tower lantai 10 dan 11 di Jalan Puri Lingkar Dalam blok T8, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Realisasi KI1 maksimum 86% dari surat penawaran PT Antilope Madju Puri Indah, Perseroan pengembang, dengan jumlah maksimum Rp73.000.000.000 (mana yang lebih rendah). Fasilitas ini dibayar secara cicilan bulanan selama sepuluh tahun tanpa masa tenggang sejak penarikan pertama. Fasilitas ini tersedia untuk penarikan dalam waktu enam bulan sejak perjanjian ditandatangani.

Pada tanggal 31 Juli 2020, saldo pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp68.539.324.794.

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, beban bunga atas fasilitas ini sebesar Rp3.559.796.481 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. Fasilitas Kredit Investasi 2 (KI2) dengan batas Rp17.500.000.000 untuk pembiayaan interior, mekanik, listrik, furnitur dan *workstation* di Puri Indah Financial Tower lantai 10 dan 11 di Jalan Puri Lingkar Dalam blok T8, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Realisasi KI2 maksimum 81% dari dokumen pendukung seperti bukti penerimaan/faktur/penagihan dari pemasok atau kontraktor berdasarkan Rencana Anggaran Biaya akhir dengan jumlah maksimum Rp17.500.000.000 (mana yang lebih rendah). Fasilitas ini dibayar secara cicilan bulanan selama tujuh tahun tanpa masa tenggang sejak penarikan pertama. Fasilitas ini tersedia untuk penarikan dalam waktu enam bulan sejak perjanjian ditandatangani.

Pada tanggal 31 Juli 2020, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar Rp12.043.958.061.

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, beban bunga atas fasilitas ini sebesar Rp693.577.959 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan berupa tanah dalam bentuk hak guna bangunan yang berlokasi di Semarang, Jakarta (Semanan), Bali dan Kembangan Selatan, mesin-mesin tertentu dan jaminan pribadi Billy Hartono Salim sebesar Rp344.360.000.000. Jaminan ini bersifat cross collateral dengan fasilitas atas nama PT Natura Pesona Mandiri.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:

- EBITDA dibagi bunga ditambah Cicilan harus lebih dari 1
- Rasio Utang terhadap Ekuitas tidak boleh lebih dari 1
- Rasio lancar harus lebih atau sama dengan 1

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perseroan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

- i. Memperoleh pinjaman dari pihak lain atau bank atau bertindak sebagai penjamin atau menjaminkan aset kepada pihak lain.
- ii. Melakukan akuisisi, merger, likuidasi atau merubah bentuk usaha.
- iii. Mengubah komposisi manajemen atau pemegang saham.
- iv. Membagikan dividen.
- v. Melakukan investasi apa pun yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis.
- vi. Mentransfer/menjual/melepaskan merek Victoria, Miranda, Herborist, Sixsence, Nuface, Iria Goat's Milk dan Secret Garden ke pihak lain.

Fasilitas kredit ini memiliki klausula *Jointly and Severally Borrower* dan *cross defaults* atas nama Perseroan dan PT Natura Pesona Mandiri.

Selanjutnya fasilitas ini dan jaminannya tidak lagi *cross default* dan *cross collateral* berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 31 Agustus 2020.

Melalui Perubahan Perjanjian Kredit nomor 1333/2020 tanggal 8 Oktober 2020, dengan ini telah dirubah beberapa persyaratan negatif dan *financial covenants*, sehingga Perseroan dapat melakukan Penawaran Umum Perdana sepenuhnya.

7. Utang Pembiayaan Konsumen

Berikut ini adalah rincian utang pembiayaan konsumen:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.452.639.412
PT Astra Sedaya Finance	3.974.022.586
PT BCA Finance Indonesia	1.674.851.094
PT Dipo Star Finance	935.123.164
Total	11.036.636.256
Dikurangi bagian jangka pendek	(5.058.283.375)
Bagian jangka panjang	5.978.352.881

Nilai kini dari jadwal pembayaran utang pembiayaan konsumen berdasarkan tahun jatuh tempo adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Pembayaran Utang Pembiayaan Konsumen Minimum	Komponen Bunga	Nilai Kini
Dalam 1 tahun	6.093.633.449	(1.035.350.074)	5.058.283.375
Dalam 2-5 tahun	6.902.117.656	(923.764.775)	5.978.352.881
Total	12.995.751.105	(1.959.114.849)	11.036.636.256

Tingkat bunga per tahun pada 31 Juli 2020 adalah 3,61% - 13,25%.

Kewajiban ini dijamin dengan kendaraan yang dibeli dengan menggunakan hasil dari pinjaman terkait. Perjanjian pembiayaan konsumen membatasi Perseroan, antara lain, untuk menjual dan mengalihkan hak hukum atas aset yang dibeli.

Liabilitas Jangka Panjang

8. Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang

Perseroan memberikan imbalan kerja bagi karyawannya berdasarkan ketentuan penyisihan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Perseroan mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Sentra Jasa Aktuaria, aktuaris independen dalam laporannya tanggal 1 September 2020, dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*.

Asumsi utama yang digunakan untuk menentukan liabilitas imbalan kerja berdasarkan laporan aktuaris adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Tingkat diskonto	4,27% - 8,15%
Tingkat kenaikan gaji	5,00%
Tingkat mortalitas	TMI 2019
Usia pensiun	55 tahun
Tingkat pengunduran diri	6% untuk karyawan usia di bawah 30 tahun dan menurun hingga 0% pada usia 53 tahun
Tingkat kecacatan	10% dari tingkat kematian

Saldo liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp19.270.476.601. Berikut ini adalah rincian liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	15.238.683.191
<u>Perubahan yang dibebankan ke laba rugi</u>	
Biaya jasa kini	1.192.818.852
Beban bunga	627.830.500
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	3.249.788
Beban imbalan kerja karyawan neto	1.823.899.140
<u>Perubahan yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain</u>	
Rugi (laba) aktuarial:	
Perubahan asumsi demografis	7.499.728
Perubahan asumsi keuangan	193.556.097
Penyesuaian pengalaman	2.022.658.445
Sub-total	2.223.714.270
Imbalan kerja yang dibayar	(15.820.000)
Saldo akhir	19.270.476.601

Pada tanggal 31 Juli 2020, perubahan satu poin persentase terhadap tingkat diskonto yang diasumsikan akan memiliki dampak sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Tingkat Diskonto		Tingkat Gaji di Masa Depan	
	1% Kenaikan	1% Penurunan	1% Kenaikan	1% Penurunan
Pengaruh pada nilai kini kewajiban imbalan pasti	(1.659.242.684)	1.924.143.526	2.057.495.715	(1.791.005.128)
Pengaruh pada biaya jasa kini	(114.590.515)	134.568.394	144.106.142	(123.669.911)

Jatuh tempo kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Dalam 12 bulan mendatang	2.580.526.765
Antara 1 sampai 2 tahun	1.213.450.318
Antara 2 sampai 5 tahun	3.099.193.263
Lebih dari 5 tahun	138.663.016.061
Total	145.556.186.407

(dalam Rupiah)

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Juli 2020 adalah 14,59 tahun.

Pinjaman yang diterima Perseroan yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Juli 2020

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menerima pinjaman yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Juli 2020.

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 31 Juli 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 31 JULI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN SERTA TIDAK ADA KELALAIAN DALAM PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020 dan 2019, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan 2019 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019 dan 2018, dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjabar, ditandatangani oleh Benediktio Salim, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP 1561).

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Gani Sigiro & Handayani dengan opini tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Setiawati Budiman, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP 1316).

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 (Tidak Diaudit)	2019	2018	2017
Penjualan neto	617.968.096.221	447.194.198.484	797.791.022.080	594.728.187.831	524.168.376.959
Beban pokok penjualan	(309.219.541.697)	(208.197.506.950)	(368.295.871.126)	(287.161.395.553)	(249.395.449.459)
Laba Bruto	308.748.554.524	238.996.691.534	429.495.150.954	307.566.792.278	274.772.927.500
Beban penjualan dan pemasaran	(117.255.701.410)	(103.028.142.284)	(190.177.338.534)	(148.501.537.023)	(122.730.888.662)
Beban umum dan administrasi	(51.674.104.855)	(35.907.554.547)	(68.874.478.563)	(57.588.772.095)	(46.998.732.777)
Pendapatan lainnya	1.239.839.054	686.831.390	1.822.406.379	4.865.478.341	4.346.479.529
Beban lainnya	(1.506.569.336)	(2.024.717.812)	(3.269.519.179)	(1.897.381.716)	(21.248.874)
Laba operasi	139.552.017.977	98.723.108.281	168.996.221.057	104.444.579.785	109.368.536.716
Pendapatan keuangan	9.080.721	28.606.641	14.418.318	162.060.786	171.292.944
Beban keuangan	(11.923.469.874)	(9.633.411.789)	(18.232.594.888)	(15.997.014.215)	(21.038.170.806)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	127.637.628.824	89.118.303.133	150.778.044.487	88.609.626.356	88.501.658.854
Beban pajak penghasilan- neto	(30.558.372.933)	(23.162.428.566)	(39.015.413.947)	(23.294.749.435)	(21.368.522.989)
Laba periode berjalan	97.079.255.891	65.955.874.567	111.762.630.540	65.314.876.921	67.133.135.865
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Laba (rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(2.223.714.270)	(372.128.431)	(501.128.793)	939.896.727	(2.554.336.480)
Pajak penghasilan terkait	489.217.139	93.032.108	125.282.198	(234.974.182)	638.584.120
Penghasilan (rugi) komprehensif lain periode berjalan setelah pajak	(1.734.497.131)	(279.096.323)	(375.846.595)	704.922.545	(1.915.752.360)
Total penghasilan komprehensif periode berjalan	95.344.758.760	65.676.778.244	111.386.783.945	66.019.799.466	65.217.383.505
Laba per lembar saham dasar	17,03	11,57	19,61	11,46	11,78

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	4.721.480.097	2.744.102.486	24.598.248.037	4.597.496.092
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	25.000.000.000
Piutang Usaha - neto				
Pihak ketiga	178.513.573.765	155.178.433.053	144.316.866.979	135.953.186.081
Pihak berelasi	4.550.252.609	1.636.653.820	3.060.463.831	1.651.866.990
Piutang lain-lain - pihak ketiga	202.508.611	103.106.000	91.136.000	86.115.518
Persediaan	182.872.852.961	178.947.067.421	126.533.196.949	113.733.910.163
Pajak dibayar di muka	-	516.185.145	-	758.799.125
Piutang pihak berelasi	-	-	18.415.160.500	79.310.731.006
Biaya dibayar di muka dan uang muka - bagian lancar	36.172.973.382	50.358.731.355	48.914.988.640	16.094.825.222
Total aset lancar	407.033.641.425	389.484.279.280	365.930.060.936	377.186.930.197
ASET TIDAK LANCAR				
Biaya dibayar di muka dan uang muka - setelah dikurangi bagian lancar	5.471.841.440	21.695.809.007	30.879.708.278	1.200.729.670
Aset tak berwujud - neto	53.556.227.583	50.000.000.000	-	-
Aset tetap - neto	280.095.691.283	280.513.212.364	184.471.018.018	155.069.739.461
Aset hak-guna - neto	24.307.393.407	-	-	-
Properti investasi	30.762.722.484	30.762.722.484	30.762.722.484	27.302.722.484
Aset pajak tangguhan - neto	7.162.090.435	6.208.656.715	4.686.196.309	4.790.417.515
Aset tidak lancar lainnya	818.764.287	894.914.628	441.066.600	331.006.900
Total aset tidak lancar	402.174.730.919	390.075.315.198	251.240.711.689	188.694.616.030
TOTAL ASET	809.208.372.344	779.559.594.478	617.170.772.625	565.881.546.227
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	90.805.510.139	138.955.190.080	181.410.214.771	192.802.313.161
Utang usaha				
Pihak ketiga	21.213.503.501	55.160.936.286	46.897.068.815	38.601.919.457
Pihak berelasi	5.233.876.551	1.710.109.063	1.088.448.770	3.096.119.422
Utang Lain-lain				
Pihak ketiga	453.093.006	1.518.246.132	731.251.455	1.341.796.777
Pihak berelasi	2.476.811.021	-	-	-
Uang muka pelanggan - pihak ketiga	1.269.670.060	-	-	-
Utang kepada pihak berelasi	-	-	-	525.000.000
Utang pajak	30.134.096.218	10.787.539.677	21.156.835.444	19.031.534.548
Beban akrual	29.378.227.255	36.592.655.417	31.665.919.884	19.433.458.880
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	5.332.767.596	6.590.523.066	4.516.127.303	3.751.628.043
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu setahun:				
Utang bank jangka panjang	6.888.969.564	6.637.601.516	-	1.702.757.271
Utang pembiayaan konsumen	5.058.283.375	4.675.611.653	4.040.360.711	2.508.121.508
Liabilitas sewa	2.117.860.634	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	200.362.668.920	262.628.412.890	291.506.227.153	282.794.649.067
Liabilitas Jangka Panjang - setelah dikurang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank jangka panjang	73.694.313.291	77.766.465.987	-	-
Utang pembiayaan konsumen	5.978.352.881	7.238.418.431	7.865.202.921	7.443.293.645
Liabilitas sewa	313.009.129	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang	19.270.476.601	15.238.683.191	12.498.512.517	11.362.572.947
Total Liabilitas Jangka Panjang	99.256.151.902	100.243.567.609	20.363.715.438	18.805.866.592
TOTAL LIABILITAS	299.618.820.822	362.871.980.499	311.869.942.591	301.600.515.659
Ekuitas				
Modal Saham	285.000.000.000	285.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
Uang muka setoran modal	-	-	250.000.000.000	-
Saldo laba	229.862.066.559	135.225.631.885	23.463.001.345	233.148.124.424
Rugi Komprehensif Lain	(5.272.515.037)	(3.538.017.906)	(3.162.171.311)	(3.867.093.856)
TOTAL EKUITAS	509.589.551.522	416.687.613.979	305.300.830.034	264.281.030.568
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	809.208.372.344	779.559.594.478	617.170.772.625	565.881.546.227

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 (Tidak diaudit)	2019	2018	2017
RASIO KINERJA KEUANGAN					
<u>Rasio Likuiditas</u>					
Rasio Kas – <i>Cash Ratio</i>	2,36%	1,24%	1,04%	8,44%	1,63%
Rasio Cepat – <i>Quick Ratio</i>	93,82%	75,45%	60,79%	65,34%	87,20%
Rasio Lancar – <i>Current Ratio</i>	203,15%	158,48%	148,30%	125,53%	133,38%
<u>Rasio Profitabilitas</u>					
Margin Laba Usaha – <i>Operating Profit Margin</i>	22,58%	22,08%	21,18%	17,56%	20,87%
Margin Laba Bersih – <i>Net Profit Margin</i>	15,71%	14,75%	14,01%	10,98%	12,81%
Tingkat Pengembalian Aset – ROA	12,00%	10,42%	14,34%	10,58%	11,86%
Tingkat Pengembalian Modal – ROE	19,05%	17,78%	26,82%	21,39%	25,40%
RASIO SOLVABILITAS					
Rasio Total Liabilitas Terhadap Aset	37,03%	41,38%	46,55%	50,53%	53,30%
Rasio Total Liabilitas Terhadap Ekuitas	58,80%	70,58%	87,08%	102,15%	114,12%
Rasio Utang Berbunga Terhadap Modal	36,28%	39,21%	56,46%	63,32%	77,36%
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset	62,97%	58,62%	53,45%	49,47%	46,70%
RASIO PERTUMBUHAN					
Pendapatan Usaha	38,19%	-	34,14%	13,46%	-
Laba Usaha	41,36%	-	61,80%	-4,50%	-
Laba Bersih	47,19%	-	71,11%	-2,71%	-
Laba Bersih Komprehensif	45,17%	-	68,72%	1,23%	-
Total Aset	27,88%	-	26,31%	9,06%	-
Total Liabilitas	14,43%	-	16,35%	3,40%	-
Ekuitas	37,36%	-	36,48%	15,52%	-

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio	Nilai yang Diperyaratkan dalam perjanjian kredit	Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Juli 2020
Bank BCA		
EBITDA dibagi bunga ditambah Cicilan	>1	10,42
Rasio Utang terhadap Ekuitas	Tidak boleh >1	0,36
Rasio lancar	>1 atau =1	2,03

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020 dan 2019, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan 2019 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019 dan 2018, dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjas, ditandatangani oleh Benediktio Salim, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP 1561).

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Gani Sigiyo & Handayani dengan opini tanpa modifikasian, ditandatangani oleh Setiawati Budiman, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP 1316).

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Victoria Care Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 32 tanggal 20 April 2006, yang dibuat di hadapan Maria Soewana, S.H., Notaris di Pusat, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00267 HT.01.01-TH.2006 tanggal 8 September 2006, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP. 090115122663 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara di bawah agenda No. 1477/BH 09.01/IX/2006 tanggal 27 September 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98 tanggal 8 Desember 2006, Tambahan No. 12916/2006.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta No. 28/2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan antara lain (i) Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik (ii) Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya; dan (iii) perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan yang tidak dapat diklasifikasikan lainnya.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan hampir seluruh kegiatan usaha utama yang diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Namun, pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan hasil produksi dan penjualan oleh Perseroan maka kegiatan usaha utama Perseroan yang sedang dijalankan saat ini adalah dalam Bidang Industri kosmetik; Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga; perdagangan besar kosmetik, dan perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Perseroan telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk tahun periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material berlaku efektif 1 Januari 2020.
Amendemen ini mengklarifikasi definisi materi dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang lebih jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.
- PSAK 71: Instrumen Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020.
PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, berlaku efektif 1 Januari 2020.
PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara *International Accounting Standards Board* ("IASB") dan *Financial Accounting Standards Board* ("FASB"), mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.
- PSAK 73: Sewa, berlaku efektif 1 Januari 2020.
PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 (dua) pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang asetendasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah.

Perseroan telah menerapkan standar Akuntansi baru dan penyesuaian atau amendemen tersebut sejak 1 Januari 2020. Perseroan tidak melakukan penyajian kembali atas informasi komparatif tahun 2019 atas penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" dan PSAK 73 "Sewa", oleh karena itu informasi komparatif tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan informasi keuangan yang disajikan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020. Perbedaan yang timbul dari penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" telah dibebankan ke saldo laba pada tanggal 1 Januari 2020. Sedangkan untuk PSAK 73 "Sewa", Perseroan telah mencatat aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020. Dampak penerapan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan" dan PSAK 73 "Sewa" pada tanggal 1 Januari 2020 di ungkapkan pada Catatan 4 Laporan Keuangan, dampak atas penerapan standar baru dan penyesuaian atau amendemen lainnya tidak material terhadap laporan keuangan interim.

Dampak dari penerapan PSAK 71 terhadap laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2020:

Keterangan	Saldo sebelum penerapan PSAK 71	Klasifikasi dan pengukuran	Kerugian kredit ekspektasian	Saldo setelah penerapan PSAK 71
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	2.744.102.486	-	-	2.744.102.486
Piutang Usaha - neto				
Pihak ketiga	155.178.433.053	-	(3.257.094.956)	151.921.338.097
Pihak berelasi	1.636.653.820	-	-	1.636.653.820
Piutang lain-lain - pihak ketiga	103.106.000	-	-	103.106.000
Persediaan	178.947.067.421	-	-	178.947.067.421
Pajak dibayar di muka	516.185.145	-	-	516.185.145
Biaya dibayar di muka dan uang muka - bagian lancar	50.358.731.355	-	-	50.358.731.355
Total aset lancar	389.484.279.280	-	(3.257.094.956)	386.227.184.324
ASET TIDAK LANCAR				
Biaya dibayar di muka dan uang muka - setelah	21.695.809.007	-	-	21.695.809.007

Keterangan	Saldo sebelum penerapan PSAK 71	Klasifikasi dan pengukuran	Kerugian kredit ekspektasian	Saldo setelah penerapan PSAK 71
dikurangi bagian lancar				
Aset tak berwujud - neto	50.000.000.000	-	-	50.000.000.000
Aset tetap - neto	280.513.212.364	-	-	280.513.212.364
Properti investasi	30.762.722.484	-	-	30.762.722.484
Aset pajak tangguhan - neto	6.208.656.715	-	814.273.739	7.022.930.454
Aset tidak lancar lainnya	894.914.628	-	-	894.914.628
Total aset tidak lancar	390.075.315.198	-	814.273.739	390.889.588.937
TOTAL ASET	779.559.594.478	-	(2.442.821.217)	777.116.773.261
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	138.955.190.080	-	-	138.955.190.080
Utang usaha				
Pihak ketiga	55.160.936.286	-	-	55.160.936.286
Pihak berelasi	1.710.109.063	-	-	1.710.109.063
Utang Lain-lain				
Pihak ketiga	1.518.246.132	-	-	1.518.246.132
Utang pajak	10.787.539.677	-	-	10.787.539.677
Beban akrual	36.592.655.417	-	-	36.592.655.417
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	6.590.523.066	-	-	6.590.523.066
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu setahun:				
Utang bank jangka panjang	6.637.601.516	-	-	6.637.601.516
Utang pembiayaan konsumen	4.675.611.653	-	-	4.675.611.653
Total Liabilitas Jangka Pendek	262.628.412.890	-	-	262.628.412.890
Liabilitas Jangka Panjang - setelah dikurang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank jangka panjang	77.766.465.987	-	-	77.766.465.987
Utang pembiayaan konsumen	7.238.418.431	-	-	7.238.418.431
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang	15.238.683.191	-	-	15.238.683.191
Total Liabilitas Jangka Panjang	100.243.567.609	-	-	100.243.567.609
TOTAL LIABILITAS	362.871.980.499	-	-	362.871.980.499
Ekuitas				
Modal Saham	285.000.000.000	-	-	285.000.000.000
Saldo laba	135.225.631.885	-	(2.422.821.217)	132.782.810.668
Rugi Komprehensif Lain	(3.538.017.906)	-	-	(3.538.017.906)
TOTAL EKUITAS	416.687.613.979	-	(2.442.821.217)	414.244.792.762
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	779.559.594.478	-	(2.442.821.217)	777.116.773.261

Dampak dari penerapan PSAK 73 terhadap laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2020:

Keterangan	Sebelum penyesuaian	Penyesuaian PSAK 73	Setelah penyesuaian
ASET			
Biaya dibayar di muka dan uang muka - bagian lancar	50.358.731.355	(8.126.061.510)	42.232.669.845
Biaya dibayar di muka dan uang muka - setelah dikurangi bagian lancar	21.695.809.007	(16.000.000.000)	5.695.809.007
Aset hak-guna - neto	-	26.759.122.043	26.759.122.043
LIABILITAS			
Liabilitas sewa – jangka pendek	-	(1.881.724.882)	(1.881.724.882)
Liabilitas sewa – jangka panjang	-	(751.335.651)	(751.335.651)

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

Pengembangan kategori produk dan jenis produk yang ditawarkan

Perseroan saat ini menawarkan beragam produk kecantikan & perawatan tubuh kepada pelanggannya terutama yang berada di Indonesia. Pertumbuhan penjualan Perseroan dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan untuk mengembangkan kategori dan jenis produk yang ditawarkan melalui inovasi dan menciptakan pasar untuk kategori/sub-kategori baru. Produk baru yang menarik bagi konsumen dalam aspek penawaran (termasuk kualitas produk), harga dan ketersediaan di pasar telah dan akan terus memiliki dampak signifikan terhadap hasil usaha dan daya saing Perseroan di industri kecantikan & perawatan tubuh di Indonesia. Perseroan bermaksud untuk terus mengedepankan inovasi untuk menangkap peluang-peluang yang ada di pasar seiring dengan perubahan kondisi pasar dan preferensi konsumen untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan Perseroan.

Kekuatan merek yang digunakan untuk produk

Produk-produk kecantikan & perawatan tubuh, termasuk produk Perseroan, dikenal oleh konsumen melalui mereknya yaitu Miranda, Herborist, Victoria, Sixsence, Iria, NuFace, CBD. Merek yang kuat adalah merek yang dikenal dengan baik oleh konsumen dan mempunyai persepsi nilai yang tinggi bagi konsumen dimana hal ini akan mempengaruhi probabilitas produk dengan merek tersebut dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen. Perseroan telah berhasil membangun merek-merek unggulan, yaitu Miranda dan Herborist. Dikarenakan merek Perseroan yang kuat, Perseroan memiliki keyakinan bahwa jumlah konsumen yang membeli produk-produk Perseroan akan terus meningkat, yang berdampak pada pertumbuhan penjualan dan keuntungan Perseroan.

Varian produk yang ditawarkan

Setiap produk Perseroan memiliki besaran keuntungan yang berbeda tergantung pada faktor-faktor seperti bahan baku, beban produksi, penetapan harga produk serta strategi Perseroan dalam memposisikan produk-produk tersebut di dalam kategorinya masing-masing. Komposisi penjualan Perseroan, besaran keuntungan dan laba bervariasi dan akan terus seperti itu seiring dengan berkembangnya keragaman produk Perseroan. Perseroan bermaksud untuk terus mengoptimalkan portofolio produknya seiring dengan perubahan kondisi pasar dan preferensi konsumen untuk memaksimalkan penjualan dan keuntungan Perseroan.

Produktivitas Perseroan

Salah satu faktor kinerja yang terus-menerus dilakukan perbaikannya oleh Perseroan adalah efisiensi dan produktivitas atas *supply chain* dan produksi Perseroan. Target yang dicapai adalah memotong *lead time*, sehingga dengan waktu yang lebih singkat dapat memproduksi jumlah yang sama atau lebih besar. Dengan demikian Perseroan akan dapat lebih banyak menangani jumlah pesanan (*bulk order*) dan melakukan ekspansi sesuai dengan permintaan yang ada. Perseroan terus melakukan modernisasi dari mesin-mesin yang ada dan memutakhirkan sistem produk dengan mengembangkan sistem IT yang dapat mengontrol keseluruhan proses secara terintegrasi dari hulu sampai hilir. Perseroan selalu melakukan perawatan berkala dan peremajaan mesin produksi yang lebih modern, sehingga meningkatkan efisiensi antar proses produksi, meminimalkan waktu yang dibutuhkan, bahan baku yang terbuang, mengurangi jumlah produk akhir yang cacat lebih sedikit. Dengan produktivitas yang lebih baik, serta kualitas produk yang baik dan terus menerus juga bisa dipertahankan merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan usaha Perseroan.

Kelancaran Pasokan Bahan Baku

Kelancaran pasokan bahan baku secara terus menerus sangat menentukan kelancaran proses produksi Perseroan, baik untuk memenuhi permintaan pelanggan maupun untuk persediaan. Perseroan menggunakan 2 (dua) sumber pasokan bahan baku yaitu dari pemasok dalam negeri dan pemasok luar negeri. Penurunan pasokan atau kenaikan biaya bahan baku dapat mengganggu usaha Perseroan serta mengurangi pendapatan dan keuangan Perseroan apabila kelancaran proses produksi Perseroan tidak mencapai output secara maksimal.

Kemampuan Memperoleh Pembiayaan Dengan Biaya Modal Yang Murah

Perseroan dalam membiayai usahanya, selain menggunakan modal sendiri juga menggunakan pinjaman dari bank dan lembaga pembiayaan. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan dengan biaya modal (cost of fund) yang murah merupakan faktor penting.

Kegiatan Pemasaran

Untuk memperbesar pangsa pasar bagi produk-produk Perseroan dan penetrasi produk Perseroan kepada masyarakat, diperlukan kegiatan pemasaran yang efektif dan efisien. Dalam 5 (lima) tahun terakhir Perseroan melakukan aktivitas promosi dengan mengikuti kegiatan pameran-pameran, baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri. Perseroan melakukan juga kegiatan promosi baik itu promosi melalui iklan di media elektronik dan media cetak serta jejaring media sosial. Perseroan juga telah mengembangkan situs dan *online shop* melalui <https://oemahherborist.co.id> untuk mempromosikan semua produk yang dimiliki Perseroan serta pelanggan dapat belanja langsung melalui situs *online shop* Perseroan.

Kondisi Persaingan Usaha

Sektor industri produk kecantikan & perawatan tubuh memiliki tingkat persaingan yang ketat karena merupakan sektor yang menarik bagi pelaku industri kecantikan & perawatan tubuh mengingat besarnya populasi Indonesia yang sedang meningkat daya belinya. Dalam hal ini kemampuan Perseroan untuk dapat menjual dan memasarkan produknya terus dikembangkan dalam strategi jangka pendek, menengah dan panjang, hal ini telah diterapkan oleh Perseroan dengan konsisten dan berkesinambungan. Manajemen Perseroan secara strategis dan dinamis menerapkan strategi kuat untuk mengantisipasi persaingan usaha, berinovasi pada produk, mengikuti perkembangan tren dan konsumen, memperkuat produk dan merek yang sudah ada dan meluncurkan produk dan merek baru yang berpotensi, serta terus memperluas jaringan pemasaran dan distribusi yang efisien. Perseroan juga bermaksud melebarkan sayap bisnisnya dengan memasuki segmen-segmen baru dan mengembangkan produk baru untuk terus memenangkan persaingan yang ada saat ini dan kedepannya.

Kondisi ekonomi, politik dan sosial

Kegiatan usaha Perseroan dapat meningkat dengan adanya perbaikan pada kondisi ekonomi, politik dan sosial di Indonesia. Perbaikan ekonomi secara keseluruhan akan meningkatkan kemampuan daya beli konsumen dimana hal ini akan memberikan dampak positif kepada Perseroan yang bergerak di bidang kecantikan & perawatan tubuh. Kondisi politik dan sosial yang stabil juga akan meningkatkan keyakinan konsumen untuk membelanjakan penghasilannya.

4. ANALISIS OPERASI PER SEGMENT

Pendapatan Usaha per Segmen dan Kontribusinya terhadap Penjualan neto Perseroan

Tabel berikut ini menggambarkan rincian penjualan neto Perseroan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Perawatan Tubuh dan Antiseptik	342.561.680.634	385.926.260.373	301.443.722.131	252.674.736.610
% terhadap penjualan neto	55,4%	48,4%	50,7%	48,2%
Perawatan Rambut	298.227.366.782	437.770.703.380	309.363.352.012	284.734.688.075
% terhadap penjualan neto	48,3%	54,9%	52,0%	54,3%
Lain-lain	565.361.234	6.015.290.617	7.349.237.009	3.333.426.732
% terhadap penjualan neto	0,1%	0,8%	1,2%	0,6%
Total	641.354.408.650	829.712.254.370	618.156.311.152	540.742.851.417
Rabat dan bonus yang tidak dapat dialokasikan	(23.386.312.429)	(31.921.232.290)	(23.428.123.321)	(16.574.474.458)
% terhadap penjualan neto	-3,8%	-4,0%	-3,9%	-3,2%
Jumlah Penjualan Neto	617.968.096.221	797.791.022.080	594.728.187.831	524.168.376.959

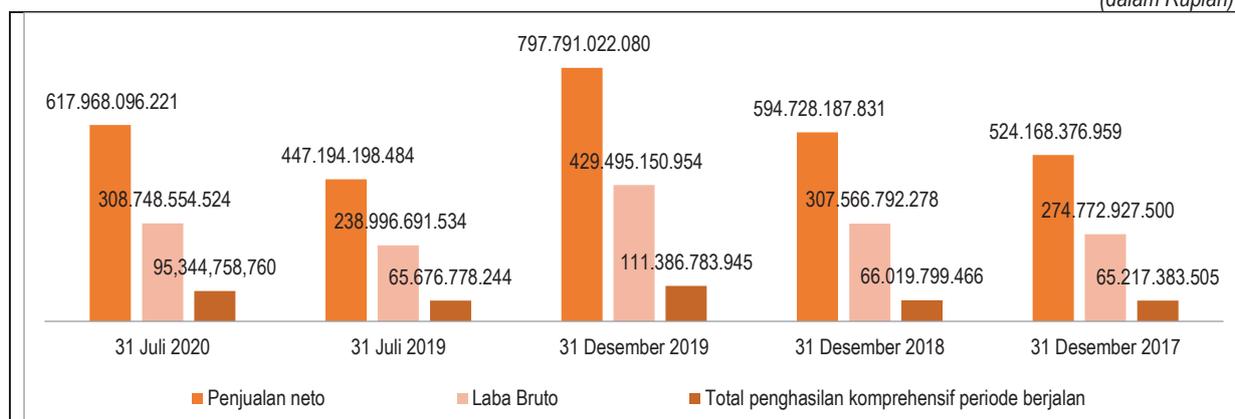
Sejalan dengan pertumbuhan penjualan neto Perseroan, produksi produk-produk Perseroan didukung dengan pertumbuhan tingkat produksi Perseroan yang mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Perseroan mengalami pertumbuhan tingkat produksi dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 23% dan tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 26%.

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

5. ANALISIS KINERJA KEUANGAN

Analisis keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 & 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)



(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 (Tidak Diaudit)	2019	2018	2017
Penjualan neto	617.968.096.221	447.194.198.484	797.791.022.080	594.728.187.831	524.168.376.959
Beban pokok penjualan	(309.219.541.697)	(208.197.506.950)	(368.295.871.126)	(287.161.395.553)	(249.395.449.459)
Laba Bruto	308.748.554.524	238.996.691.534	429.495.150.954	307.566.792.278	274.772.927.500
Beban penjualan dan pemasaran	(117.255.701.410)	(103.028.142.284)	(190.177.338.534)	(148.501.537.023)	(122.730.888.662)
Beban umum dan administrasi	(51.674.104.855)	(35.907.554.547)	(68.874.478.563)	(57.588.772.095)	(46.998.732.777)
Pendapatan lainnya	1.239.839.054	686.831.390	1.822.406.379	4.865.478.341	4.346.479.529
Beban lainnya	(1.506.569.336)	(2.024.717.812)	(3.269.519.179)	(1.897.381.716)	(21.248.874)
Laba operasi	139.552.017.977	98.723.108.281	168.996.221.057	104.444.579.785	109.368.536.716
Pendapatan keuangan	9.080.721	28.606.641	14.418.318	162.060.786	171.292.944
Beban keuangan	(11.923.469.874)	(9.633.411.789)	(18.232.594.888)	(15.997.014.215)	(21.038.170.806)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	127.637.628.824	89.118.303.133	150.778.044.487	88.609.626.356	88.501.658.854
Beban pajak penghasilan- neto	(30.558.372.933)	(23.162.428.566)	(39.015.413.947)	(23.294.749.435)	(21.368.522.989)
Laba periode berjalan	97.079.255.891	65.955.874.567	111.762.630.540	65.314.876.921	67.133.135.865
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Laba (rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(2.223.714.270)	(372.128.431)	(501.128.793)	939.896.727	(2.554.336.480)
Pajak penghasilan terkait	489.217.139	93.032.108	125.282.198	(234.974.182)	638.584.120
Penghasilan (rugi) komprehensif lain periode berjalan setelah pajak	(1.734.497.131)	(279.096.323)	(375.846.595)	704.922.545	(1.915.752.360)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 (Tidak Diaudit)	2019	2018	2017
Total penghasilan komprehensif periode berjalan	95.344.758.760	65.676.778.244	111.386.783.945	66.019.799.466	65.217.383.505
Laba per lembar saham dasar	17,03	11,57	19,61	11,46	11,78

Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019

Penjualan Neto

Penjualan neto Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 617.968.096.221, mengalami peningkatan sebesar Rp170.773.897.737 atau sebesar 38,2% dari penjualan neto Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp 447.194.198.484. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penjualan produk hand sanitizer selama masa pandemi Covid-19 untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

Penjualan neto ini, terutama berasal dari 2 segmen usaha, yaitu (i) perawatan tubuh sebesar Rp 342.561.680.634 (55,4%) dan (ii) perawatan rambut sebesar Rp 298.227.366.782 (48,3%). Peningkatan penjualan di segmen perawatan tubuh berasal dari peningkatan penjualan produk Herborist Minyak Zaitun, sedangkan di segmen perawatan rambut utamanya pada produk pewarna rambut (hair color) mengalami pertumbuhan yang signifikan juga yang disebabkan karena selama masa pandemik dimana banyak pembatasan sosial di banyak kota, membuat konsumen loyal maupun konsumen baru yang ingin mengisi waktunya di rumah dengan melakukan kegiatan mewarna rambut sendiri di rumah, dan ini menjadi kebiasaan baru sejak masyarakat merasa kuatir untuk mengunjungi salon kecantikan dan rambut.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp309.219.541.697, mengalami peningkatan sebesar Rp 101.022.034.747 atau sebesar 48,5% dari beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban produksi seperti pemakaian bahan baku dan bahan pembungkus seiring dengan peningkatan penjualan.

Beban Operasional

Beban operasional Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp169.196.536.547, mengalami kenaikan sebesar Rp28.922.953.294 atau sebesar 20,6% dari Beban operasional Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan beban penjualan dan pemasaran serta beban umum dan administrasi.

Beban penjualan dan pemasaran untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 mengalami kenaikan sebesar 13,8% dibandingkan beban penjualan dan pemasaran untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019, yang disebabkan oleh kenaikan biaya iklan dan promosi untuk menunjang penjualan produk Perseroan.

Beban umum dan administrasi untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 mengalami kenaikan sebesar 43,9% dibandingkan beban umum dan administrasi untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019, yang disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan kompensasi karyawan lainnya serta beban penyusutan gedung kantor.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp30.558.372.933, mengalami kenaikan sebesar Rp7.395.944.367 atau sebesar 31,9% dari beban pajak penghasilan Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019. Hal ini disebabkan

karena kenaikan penghasilan kena pajak Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019.

Laba Periode Berjalan

Laba periode berjalan Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp97.079.255.891, mengalami kenaikan sebesar Rp31.123.381.324 atau sebesar 47,2% dari laba periode berjalan Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019. Kenaikan laba periode berjalan Perseroan tersebut seiring dengan kenaikan penjualan dan laba operasi Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019.

Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Total penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 95.344.758.760, mengalami kenaikan sebesar Rp29.667.980.516 atau sebesar 45,2% dari total penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019. Hal ini disebabkan karena kenaikan laba periode berjalan Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penjualan Neto

Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp797.791.022.080, mengalami peningkatan sebesar Rp203.062.834.249 atau sebesar 34,1% dari penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp594.728.187.831. Hal ini terutama disebabkan oleh penjualan produk-produk baru yang dipasarkan oleh Perseroan untuk melengkapi varian/bauran produk yang sudah ada.

Penjualan neto ini, terutama berasal dari 2 segmen usaha, yaitu (i) perawatan tubuh sebesar Rp385.926.260.373 (48,4%) dan (ii) perawatan rambut sebesar Rp437.770.703.380 (54,9%).

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp368.295.871.126, mengalami peningkatan sebesar Rp81.134.475.573 atau sebesar 28,3% dari beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban produksi seperti pemakaian bahan baku dan bahan pembungkus seiring dengan peningkatan penjualan.

Beban Operasional

Beban operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp260.498.929.897, mengalami kenaikan sebesar Rp57.376.717.404 atau sebesar 28,2% dari beban operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan beban penjualan dan pemasaran serta beban umum dan administrasi.

Beban penjualan dan pemasaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp41.675.801.511 atau sebesar 28,1% dibandingkan beban penjualan dan pemasaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang disebabkan oleh kenaikan biaya promosi untuk menunjang penjualan produk Perseroan.

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp11.285.706.468 atau sebesar 19,6% dibandingkan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan kompensasi karyawan lainnya, beban penyusutan, biaya perjalanan bisnis.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp39.015.413.947, mengalami kenaikan sebesar Rp15.720.664.512 atau sebesar 67,5% dari beban pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan karena kenaikan penghasilan kena pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Periode Berjalan

Laba Periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 111.762.630.540, mengalami kenaikan sebesar Rp46.447.753.619 atau sebesar 71,1% dari laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan laba tahun berjalan Perseroan tersebut seiring dengan kenaikan penjualan dan laba operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 111.386.783.945, mengalami kenaikan sebesar Rp 45.366.984.479 atau sebesar 68,7% dari total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan tersebut seiring dengan kenaikan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Penjualan Neto

Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp594.728.187.831 mengalami peningkatan sebesar Rp70.559.810.872 atau sebesar 13,5% dari penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp524.168.376.959. Hal ini terutama disebabkan peningkatan penjualan kepada pihak ketiga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 13,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjualan neto ini, terutama berasal dari 2 segmen usaha, yaitu (i) perawatan tubuh sebesar Rp301.443.722.131 (50,7%) dan (ii) perawatan rambut sebesar Rp309.363.352.012 (52,0%).

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp287.161.395.553, mengalami peningkatan sebesar Rp37.765.946.094 atau sebesar 15,1% dari beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban produksi seperti pemakaian bahan baku dan bahan pembungkus seiring dengan peningkatan penjualan.

Beban Operasional

Beban operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp203.122.212.493, mengalami kenaikan sebesar Rp37.717.821.709 atau sebesar 22,8% dari beban operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan beban operasional tersebut, terutama karena peningkatan beban penjualan dan pemasaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp25.770.648.361 atau sebesar 21,0%, yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan beban iklan dan promosi.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp23.294.749.435, mengalami kenaikan sebesar Rp1.926.226.446 atau sebesar 9,0% dari beban pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan karena

kenaikan penghasilan kena pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Laba Periode Berjalan

Laba periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp65.314.876.921, mengalami penurunan sebesar Rp1.818.258.944 atau sebesar 2,7% dari laba periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan laba periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 tersebut disebabkan oleh kenaikan beban pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

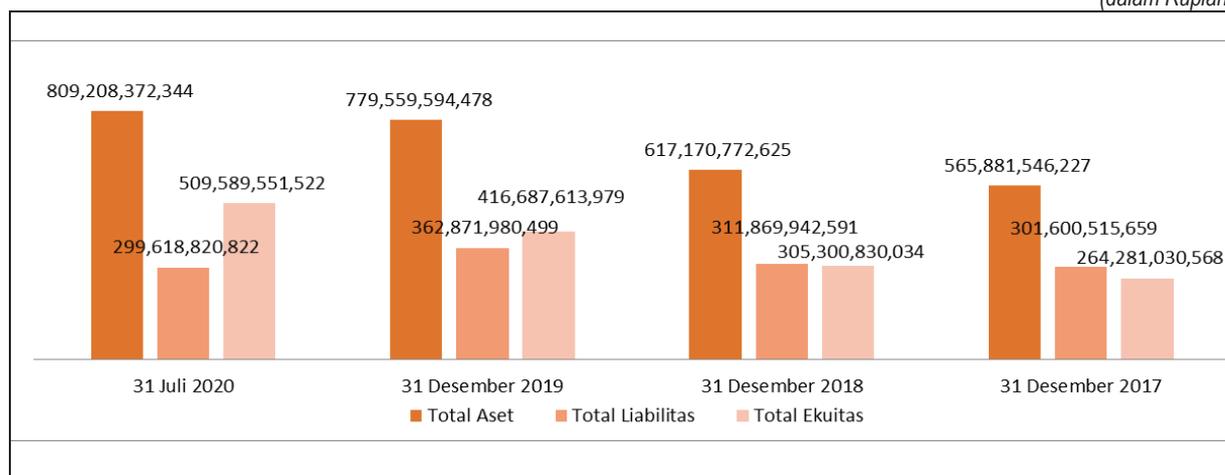
Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Total penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp66.019.799.466, mengalami kenaikan sebesar Rp802.415.961 atau sebesar 1,2% dari total penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan oleh adanya penghasilan komprehensif lain yang berasal dari laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja.

6. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

Berikut adalah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 serta 31 Desember 2019, 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017:

(dalam Rupiah)



6.1. ASET

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	4.721.480.097	2.744.102.486	24.598.248.037	4.597.496.092
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	25.000.000.000
Piutang Usaha - neto				
Pihak ketiga	178.513.573.765	155.178.433.053	144.316.866.979	135.953.186.081
Pihak berelasi	4.550.252.609	1.636.653.820	3.060.463.831	1.651.866.990
Piutang lain-lain - pihak ketiga	202.508.611	103.106.000	91.136.000	86.115.518
Persediaan	182.872.852.961	178.947.067.421	126.533.196.949	113.733.910.163
Pajak dibayar di muka	-	516.185.145	-	758.799.125
Piutang pihak berelasi	-	-	18.415.160.500	79.310.731.006
Biaya dibayar di muka dan uang muka - bagian lancar	36.172.973.382	50.358.731.355	48.914.988.640	16.094.825.222
Total aset lancar	407.033.641.425	389.484.279.280	365.930.060.936	377.186.930.197
ASET TIDAK LANCAR				
Biaya dibayar di muka dan uang muka - setelah dikurangi bagian lancar	5.471.841.440	21.695.809.007	30.879.708.278	1.200.729.670

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Aset tak berwujud - neto	53.556.227.583	50.000.000.000	-	-
Aset tetap - neto	280.095.691.283	280.513.212.364	184.471.018.018	155.069.739.461
Aset hak-guna - neto	24.307.393.407	-	-	-
Properti investasi	30.762.722.484	30.762.722.484	30.762.722.484	27.302.722.484
Aset pajak tangguhan - neto	7.162.090.435	6.208.656.715	4.686.196.309	4.790.417.515
Aset tidak lancar lainnya	818.764.287	894.914.628	441.066.600	331.006.900
Total aset tidak lancar	402.174.730.919	390.075.315.198	251.240.711.689	188.694.616.030
TOTAL ASET	809.208.372.344	779.559.594.478	617.170.772.625	565.881.546.227

Posisi tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Total Aset

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp809.208.372.344, meningkat sebesar Rp29.648.777.866 atau sebesar 3,8% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp779.559.594.478. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo piutang usaha dan aset takberwujud pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan tanggal 31 Desember 2019.

Kenaikan saldo piutang usaha pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp26.248.739.501 atau sebesar 16,7%, dimana kenaikan tersebut seiring dengan kenaikan penjualan untuk 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020. Kenaikan saldo aset takberwujud pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp3.556.227.583 atau sebesar 7,1%, yang disebabkan adanya penambahan perangkat lunak atau *software* komputer untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Aset Lancar

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp407.033.641.425, meningkat sebesar Rp17.549.362.145 atau 4,5% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp389.484.279.280. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo piutang usaha pada tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp26.248.739.501 atau sebesar 16,7% jika dibandingkan dengan saldo piutang usaha tanggal 31 Desember 2019, dimana kenaikan saldo piutang usaha tersebut seiring dengan kenaikan penjualan untuk 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp402.174.730.919, meningkat sebesar Rp12.099.415.721 atau 3,1% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp390.075.315.198. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo aset takberwujud pada tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp3.556.227.583 atau sebesar 7,1% jika dibandingkan dengan saldo aset takberwujud tanggal 31 Desember 2019, dimana kenaikan tersebut karena adanya penambahan perangkat lunak atau *software* komputer untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Total Aset

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp779.559.594.478, meningkat sebesar Rp162.388.821.853 atau 26,3% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp617.170.772.625. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo aset tidak lancar tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp138.834.603.509 atau sebesar 55,3% dibandingkan tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp389.484.279.280, meningkat sebesar Rp23.554.218.344 atau 6,4% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp365.930.060.936. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo persediaan sebesar Rp52.413.870.472 atau sebesar 41,4%, terutama karena peningkatan persediaan barang jadi.

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp390.075.315.198, meningkat sebesar Rp138.834.603.509 atau 55,3% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp251.240.711.689. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo aset tetap dan aset takberwujud Perseroan, masing-masing sebesar 52,1% dan 100,0%. Peningkatan saldo aset tetap tanggal 31 Desember 2019, disebabkan adanya penambahan aset tetap bangunan, sedangkan peningkatan saldo aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2019, disebabkan adanya pembelian hak atas merek dagang.

Posisi tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017

Total Aset

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp617.170.772.625, meningkat sebesar Rp51.289.226.398 atau 9,1% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp565.881.546.227. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo aset tidak lancar sebesar Rp62.546.095.659 atau sebesar 33,1%.

Aset Lancar

Total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp365.930.060.936, menurun sebesar Rp11.256.869.261 atau 3,0% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp377.186.930.197. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pelunasan saldo piutang pihak berelasi

Aset Tidak Lancar

Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp251.240.711.689, meningkat sebesar Rp62.546.095.659 atau 33,1% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp188.694.616.030. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap.

6.2. LIABILITAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	90.805.510.139	138.955.190.080	181.410.214.771	192.802.313.161
Utang usaha				
Pihak ketiga	21.213.503.501	55.160.936.286	46.897.068.815	38.601.919.457
Pihak berelasi	5.233.876.551	1.710.109.063	1.088.448.770	3.096.119.422
Utang Lain-lain				
Pihak ketiga	453.093.006	1.518.246.132	731.251.455	1.341.796.777
Pihak berelasi	2.476.811.021	-	-	-
Uang muka pelanggan - pihak ketiga	1.269.670.060	-	-	-
Utang kepada pihak berelasi	-	-	-	525.000.000
Utang pajak	30.134.096.218	10.787.539.677	21.156.835.444	19.031.534.548
Beban akrual	29.378.227.255	36.592.655.417	31.665.919.884	19.433.458.880
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	5.332.767.596	6.590.523.066	4.516.127.303	3.751.628.043
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu setahun:				
Utang bank jangka panjang	6.888.969.564	6.637.601.516	-	1.702.757.271
Utang pembiayaan konsumen	5.058.283.375	4.675.611.653	4.040.360.711	2.508.121.508
Liabilitas sewa	2.117.860.634	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	200.362.668.920	262.628.412.890	291.506.227.153	282.794.649.067
Liabilitas Jangka Panjang - setelah dikurang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank jangka panjang	73.694.313.291	77.766.465.987	-	-
Utang pembiayaan konsumen	5.978.352.881	7.238.418.431	7.865.202.921	7.443.293.645
Liabilitas sewa	313.009.129	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang	19.270.476.601	15.238.683.191	12.498.512.517	11.362.572.947
Total Liabilitas Jangka Panjang	99.256.151.902	100.243.567.609	20.363.715.438	18.805.866.592
TOTAL LIABILITAS	299.618.820.822	362.871.980.499	311.869.942.591	301.600.515.659

Posisi tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp299.618.820.822, menurun sebesar Rp63.253.159.677 atau 17,4% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp362.871.980.499. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya saldo liabilitas jangka pendek sebesar 23,7%.

Liabilitas Jangka Pendek

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp200.362.668.920, menurun sebesar Rp62.265.743.970 atau sebesar 23,7% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp262.628.412.890. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo utang bank jangka pendek dan saldo utang usaha tanggal 31 Juli 2020, karena adanya pembayaran atas saldo tersebut kepada pihak bank dan pemasok oleh Perseroan.

Liabilitas Jangka Panjang

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp 99.256.151.902, menurun sebesar Rp987.415.707 atau sebesar 1,0% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp100.243.567.609. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank dan utang sewa pembiayaan jangka panjang.

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Total Liabilitas

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp362.871.980.499, meningkat sebesar Rp51.002.037.908 atau 16,4% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp311.869.942.591. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai Liabilitas jangka panjang sebesar Rp79.879.852.171.

Liabilitas Jangka Pendek

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp262.628.412.890 menurun sebesar Rp28.877.814.263 atau 9,91% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp291.506.227.153. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo utang bank jangka pendek tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp42.455.024.691, karena adanya pembayaran atas saldo tersebut kepada pihak bank oleh Perseroan.

Liabilitas Jangka Panjang

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp100.243.567.609, meningkat sebesar Rp79.879.852.171 atau sebesar 392,3% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 20.363.715.438. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp77.766.465.987.

Posisi tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017

Total Liabilitas

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp311.869.942.591, meningkat sebesar Rp10.269.426.932 atau sebesar 3,4% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp301.600.515.659. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan saldo liabilitas jangka pendek sebesar Rp8.711.578.086 dan peningkatan saldo liabilitas jangka panjang sebesar Rp1.557.848.846.

Liabilitas Jangka Pendek

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp291.506.227.153 meningkat sebesar Rp8.711.578.086 atau 3,1% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp282.794.649.067. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo beban akrual sebesar Rp12.232.461.004 atau sebesar 62,9%.

Liabilitas Jangka Panjang

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp20.363.715.438 meningkat sebesar Rp1.557.848.846 atau 8,3% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp18.805.866.592. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo liabilitas imbalan kerja karyawan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.135.939.570.

6.3 EKUITAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Ekuitas				
Modal Saham	285.000.000.000	285.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
Uang muka setoran modal	-	-	250.000.000.000	-
Saldo laba	229.862.066.559	135.225.631.885	23.463.001.345	233.148.124.424
Rugi Komprehensif Lain	(5.272.515.037)	(3.538.017.906)	(3.162.171.311)	(3.867.093.856)
TOTAL EKUITAS	509.589.551.522	416.687.613.979	305.300.830.034	264.281.030.568

Posisi tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp509.589.551.522, meningkat sebesar Rp92.901.937.543 atau sebesar 22,3% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp416.687.613.979. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar Rp94.636.434.674 seiring dengan peningkatan laba periode berjalan Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp416.687.613.979, meningkat sebesar Rp111.386.783.945 atau sebesar 36,5% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp305.300.830.034. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba seiring dengan peningkatan laba tahun berjalan Perseroan tahun 2019 sebesar Rp111.762.630.540 atau sebesar 476,3% dibandingkan tahun 2018.

Posisi tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp305.300.830.034, meningkat sebesar Rp41.019.799.466 atau 15,5% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp264.281.030.568. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya uang muka setoran modal dari pemegang saham Perseroan.

7. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Berikut adalah tingkat arus kas Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 (Tidak Diaudit)	2019	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari pelanggan	604.722.033.002	437.720.896.927	787.273.886.347	582.262.831.021	509.367.531.579
Pembayaran kepada pemasok	(324.578.587.077)	(202.895.490.556)	(386.013.890.720)	(274.421.783.156)	(237.591.100.602)
Pembayaran untuk kegiatan usaha	(90.081.019.373)	(83.877.160.969)	(141.994.973.459)	(163.713.564.275)	(77.931.605.032)
Pembayaran kepada karyawan	(82.780.629.379)	(68.266.935.174)	(115.645.473.402)	(94.424.207.742)	(72.370.825.982)
Penerimaan dari (pembayaran untuk):					
Pajak penghasilan	(24.218.231.639)	(35.425.210.853)	(50.601.348.172)	(16.895.694.453)	(18.223.592.657)
Lainnya	(527.575.278)	(1.541.736.330)	(3.197.120.206)	(1.890.993.638)	1.661.985.627
Kas Neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	82.535.990.256	45.714.363.045	89.821.080.388	30.916.587.757	104.912.392.933
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap	(9.646.728.470)	(7.501.918.711)	(34.284.986.385)	(34.055.298.818)	(29.886.727.065)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 (Tidak Diaudit)	2019	2018	2017
Pembelian perangkat lunak	(3.710.846.174)	-	-	-	-
Perolehan aset hak guna	(61.111.111)	-	-	-	-
Penerimaan dari penjualan aset tetap	72.350.000	1.500.000	1.102.500.000	1.037.000.000	440.720.000
Pencairan (penempatan) deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	25.000.000.000	(25.000.000.000)
Pembelian merek dagang	-	-	(43.857.150.534)	-	-
Penerimaan (pembayaran) piutang kepada pihak berelasi	-	-	18.415.160.500	60.895.570.506	(53.629.485.667)
Penambahan uang muka merek dagang	-	-	-	(6.142.849.466)	-
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(13.346.335.755)	(7.500.418.711)	(58.624.476.419)	46.734.422.222	(108.075.492.732)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan dari utang bank jangka pendek	-	-	-	-	25.000.000.000
Penerimaan utang bank jangka panjang	-	-	13.138.863.340	-	-
Pembayaran beban bunga	(11.763.666.368)	(9.398.200.231)	(16.836.900.065)	(15.871.288.333)	(19.938.863.404)
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(3.062.466.715)	(2.478.272.118)	(4.771.775.573)	(3.684.114.040)	(3.486.950.008)
Pembayaran utang bank jangka panjang	(3.881.688.933)	-	(770.912.531)	(1.702.757.271)	(6.811.029.080)
Pembayaran liabilitas sewa	(354.774.933)	-	-	-	-
Pembayaran provisi utang bank	-	(125.000.000)	(1.355.000.000)	-	(1.006.530.000)
Pembayaran utang bank jangka pendek	-	-	-	(75.000.000.000)	-
Pembayaran dividen kas	-	-	-	(25.000.000.000)	-
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(19.062.596.949)	(12.001.472.349)	(10.595.724.829)	(121.258.159.644)	(6.243.372.492)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	50.127.057.552	26.212.471.985	20.600.879.140	(43.607.149.665)	(9.406.472.291)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	(136.211.087.594)	(156.811.966.734)	(156.811.966.734)	(113.204.817.069)	(103.798.344.778)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	(86.084.030.042)	(130.599.494.749)	(136.211.087.594)	(156.811.966.734)	(113.204.817.069)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE TERDIRI DARI:					
Kas dan setara kas	4.721.480.097	2.981.641.847	2.744.102.486	24.598.248.037	(4.597.496.092)
Cerukan	(90.805.510.139)	(133.581.136.596)	(138.955.190.080)	(181.410.214.771)	(117.802.313.161)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	(86.084.030.042)	(130.599.494.749)	(136.211.087.594)	(156.811.966.734)	(113.204.817.069)

Industri kosmetik, kecantikan, dan perawatan tubuh umumnya tidak tunduk pada fluktuasi permintaan musiman, karena konsumen cenderung membeli produk kosmetik, kecantikan, dan perawatan tubuh secara konsisten sepanjang tahun, sehingga tidak ada pola tertentu atas arus kas Perseroan. Untuk produk perawatan rambut (*hair care*) terutama produk *hair color* dengan merek "Miranda" menjelang hari raya dan saat liburan penjualannya akan meningkat, sehingga terdapat peningkatan cukup tinggi atas arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi berupa penerimaan dari penjualan, sedangkan arus kas yang digunakan untuk operasi dan yang diperoleh dari pendanaan akan meningkat 3 bulan sebelum periode hari raya dan liburan tersebut, yang terutama digunakan untuk meningkatkan persediaan untuk antisipasi penjualan periode tersebut serta melakukan program promosi terkait.

Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi di periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp82.535.990.256, meningkat sebesar Rp36.821.627.211 atau 80,5% jika dibandingkan dengan periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp45.714.363.045. Kenaikan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan dari pelanggan pada periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp604.722.033.002. Kenaikan penerimaan dari pelanggan seiring dengan adanya peningkatan penjualan yang disebabkan oleh adanya penjualan produk hand sanitizer selama masa pandemi Covid-19 selama periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp13.346.335.755, meningkat sebesar Rp5.845.917.044 atau 77,9% jika dibandingkan dengan periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp7.500.418.711. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, antara lain berasal dari perolehan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp9.646.728.470 dan penambahan perangkat lunak atau software komputer untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan sebesar Rp3.710.846.174.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp19.062.596.949, meningkat sebesar Rp7.061.124.600 atau 58,8% jika dibandingkan dengan periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp12.001.472.349. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tersebut, antara lain digunakan untuk pembayaran beban bunga sebesar Rp11.763.666.368 dan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp3.881.688.933 yang disebabkan dengan adanya pinjaman jangka panjang Kredit Investasi I di bulan Oktober 2019 dan Kredit Investasi II di bulan Desember 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp89.821.080.388, meningkat sebesar Rp58.904.492.631 atau 190,5% jika dibandingkan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp30.916.587.757. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp787.273.886.347. Kenaikan penerimaan dari pelanggan seiring dengan peningkatan penjualan neto Perseroan yang terutama disebabkan oleh penjualan produk-produk baru yang dipasarkan oleh Perseroan

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp58.624.476.419, menurun sebesar Rp105.358.898.641 atau 225,4% jika dibandingkan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp46.734.422.222. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berasal dari pembelian hak atas merek dagang sebesar Rp43.857.150.534. Pembelian hak atas merek dagang ini bertujuan agar merek- merek dagang yang diproduksi dan dipasarkan oleh Perseroan telah secara legal terdaftar dan dimiliki oleh Perseroan.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.595.724.829, menurun sebesar Rp110.662.434.815 atau 91,3% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp121.258.159.644. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berasal dari penerimaan utang bank jangka panjang sebesar Rp13.138.863.340. Penerimaan utang bank jangka panjang ini digunakan Perseroan untuk pembiayaan interior, mekanik, listrik, furnitur dan workstation pada kantor Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp30.916.587.757, menurun sebesar Rp73.995.805.176 atau 70,5% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp104.912.392.933. Penurunan arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari aktivitas operasi berasal dari pembayaran kepada pemasok sebesar Rp274.421.783.156 dan pembayaran untuk kegiatan usaha sebesar Rp163.713.564.275, hal tersebut seiring dengan peningkatan beban penjualan dan pemasaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan beban iklan dan promosi.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang diperoleh dari kegiatan investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp46.734.422.222 naik sebesar Rp154.809.914.954 atau 143,2% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp(108.075.492.732). Kenaikan arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi terutama karena adanya pembayaran piutang dari pihak berelasi sebesar Rp60.895.570.506.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp121.258.159.644 meningkat sebesar Rp115.014.787.152 atau 1842,2% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp6.243.372.492. Kenaikan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan berasal dari pembayaran utang bank sebesar Rp 76.702.757.271.

8. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan metode pendekatan berikut ini:

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 (Tidak Diaudit)	2019	2018	2017
Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset	37,03%	41,38%	46,55%	50,53%	53,30%
Rasio Total Kewajiban Terhadap Ekuitas	58,80%	70,58%	87,08%	102,15%	114,12%
Rasio Utang Berbunga Terhadap Modal	36,28%	39,21%	56,46%	63,32%	77,36%
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset	62,97%	58,62%	53,45%	49,47%	46,70%

Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Rasio profitabilitas dihitung dengan menggunakan metode pendekatan berikut ini:

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 (Tidak Diaudit)	2019	2018	2017
Margin Laba Usaha – Operating Profit Margin	22,58%	22,08%	21,18%	17,56%	20,87%

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 (Tidak Diaudit)	2019	2018	2017
Margin Laba Bersih – <i>Net Profit Margin</i>	15,71%	14,75%	14,01%	10,98%	12,81%
Tingkat Pengembalian Aset – ROA	12,00%	10,42%	14,34%	10,58%	11,86%
Tingkat Pengembalian Modal – ROE	19,05%	17,78%	26,82%	21,39%	25,40%

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan metode pendekatan berikut ini:

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 (Tidak Diaudit)	2019	2018	2017
RASIO KINERJA KEUANGAN					
Rasio Kas – <i>Cash Ratio</i>	2,36%	1,24%	1,04%	8,44%	1,63%
Rasio Cepat – <i>Quick Ratio</i>	93,82%	75,45%	60,79%	65,34%	87,20%
Rasio Lancar – <i>Current Ratio</i>	203,15%	158,48%	148,30%	125,53%	133,38%

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penerimaan piutang dari pelanggan dan setoran pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama dari fasilitas kredit Bank BCA.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit, dimana PT Bank BCA memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk tujuan pembelian bahan baku dan modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

9. INVESTASI BARANG MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk investasi pada aset tetap. Investasi barang modal Perseroan adalah belanja modal aset tetap, berupa tanah, bangunan dan prasarana, kendaraan, perlengkapan kantor, peralatan pabrik, dan peralatan laboratorium dengan total sebesar Rp12.630.910.960 per tanggal 31 Juli 2020.

Berikut ini adalah perkembangan investasi barang modal Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

ASET TETAP (PENAMBAHAN)	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Biaya Perolehan				
<u>Kepemilikan Langsung</u>				
Tanah	-	-	10.533.600.000	8.525.909.601
Bangunan dan prasarana	1.134.249.977	88.921.102.020	14.725.605.197	16.414.088.923
Kendaraan	3.398.913.820	6.454.276.784	8.719.550.000	2.644.500.000
Perlengkapan Kantor	5.109.554.208	11.380.264.373	3.231.262.560	3.788.826.671
Peralatan pabrik	2.988.192.955	2.560.772.203	1.818.586.385	1.929.176.690
Peralatan laboratorium	-	-	564.732	3.204.564
Total Biaya Perolehan	12.630.910.960	109.316.415.380	39.029.168.874	33.305.706.449

Sehubungan dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sekitar 26% (dua puluh enam persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan, untuk menunjang fasilitas pergudangan Perseroan. Berikut keterangan mengenai pembelian aset tetap tersebut:

Objek transaksi	Lahan di Kawasan Industri Candi Blok 5A, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nama (para) Pihak	Perseroan (sebagai Pembeli); dan Billy Hartono Salim (sebagai Penjual).
Status/ Sifat Hubungan Afiliasi	Billy Hartono Salim adalah pihak yang mengendalikan Perseroan.
Penjelasan, Pertimbangan, Alasan pertimbangan pembelian (dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak afiliasi)	Aset yang akan dibeli oleh Perseroan saat ini sudah dipergunakan oleh Perseroan berdasarkan sewa antara Perseroan dan Billy Hartono Salim.
Dokumen transaksi	Akta Pengikatan Jual Beli No. 17 tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat oleh Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara.
Dokumen kepemilikan objek transaksi	Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor: 03088/Ngaliyan.
Nilai transaksi	25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).
Waktu penyelesaian transaksi	Kuartal IV 2020.
Metode penentuan nilai transaksi	Dengan memperhatikan Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Gudang yang dipersiapkan oleh KJPP Iskandar dan Rekan (KJPP yang terdaftar di OJK berdasarkan Surat No.S-774/PM.25/2013 tanggal 27 November 2013 dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Pendaftaran Ulang) STTD.PP-82/PM.2/2019 tanggal 28 September 2018, dengan nomor Laporan No.00414/2.0118-00/PI/04/0463/1/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

Selain dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material.

10. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

11. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN KEUANGAN

Ketidakpastian Makroekonomi

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, telah terjadi penyebaran virus Covid-19 ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia yang menyebabkan ketidakpastian makro ekonomi sehubungan dengan volatilitas nilai tukar mata uang asing, harga dan permintaan. Perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar, jumlah persediaan atau situasi lainnya di luar kendali Perseroan. Peningkatan jumlah infeksi virus Covid -19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan operasi Perseroan. Perseroan akan terus memantau hal ini dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang.

Perubahan Perjanjian Utang Bank

Berdasarkan Akta Notaris Stefanus Yuwono Tedjosaputro, S.T., S.H., MBA., M.SIS., M.Kn., M.H., No. 100 tanggal 31 Agustus 2020, Perseroan menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk terkait perpanjangan ketersediaan fasilitas-fasilitas kredit sampai dengan tanggal 4 November 2021 dengan pokok perubahan lainnya sebagai berikut:

- Perubahan jaminan fasilitas kredit menjadi 2 (dua) HGB berlokasi di Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah atas nama Perseroan, 5 (lima) HGB berlokasi di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat atas nama Perseroan, 1 (satu) HGB berlokasi di Kembangan Selatan atas nama PT Antilope Madju Puri Indah (yang terkait dengan unit kantor Perseroan), beberapa aset seperti mesin produksi dan peralatan, semua stok barang berupa barang jadi sebesar Rp50.000.000.000 yang ada di Kawasan Industri Candi Blok V A Nomor 8, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah dan perubahan jumlah jaminan pribadi atas nama Billy Hartono Salim menjadi sejumlah Rp281.390.000.000.
- Perubahan suku bunga fasilitas kredit Rekening Koran (lokal) menjadi 8,75% per tahun.
- Pemisahan kewajiban utang yang dimiliki PT Natura Pesona Mandiri kepada BCA dari perjanjian kredit Perseroan dengan BCA.

Persetujuan Bersyarat dari Bank terkait Penawaran Umum Perdana saham (Initial Public Offering (“IPO”)) dan Pembagian Dividen

Terkait rencana penawaran perdana saham, melalui surat nomor 4976/KWII-SMG/2020 tanggal 24 September 2020, Perseroan telah memperoleh persetujuan bersyarat dari PT Bank Central Asia Tbk atas permohonan Perseroan mengenai perubahan status kelembagaan Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan penarikan dividen sebesar 40% dari laba bersih tahun berjalan 2020 sebelum status kelembagaan Perseroan berubah menjadi perusahaan terbuka. Persetujuan ini akan berlaku efektif apabila Perseroan menandatangani perubahan perjanjian kredit dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal surat persetujuan dari bank.

Pada tanggal 8 Oktober 2020, Perseroan menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit No. 1333/2020 dengan PT Bank Central Asia Tbk yang berlaku efektif sejak 9 Oktober 2020, dengan perubahan-perubahan sebagai berikut:

- a. Penambahan ketentuan perjanjian kredit sebagai berikut:
 - Memberitahukan secara tertulis kepada PT Bank Central Asia Tbk maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS yang mengubah pemegang saham mayoritas dan pengendali serta susunan pengurus kunci.
 - Membuat dan melaksanakan kebijakan pembagian dividen Perseroan selaku perusahaan publik sesuai dengan persetujuan dan keputusan RUPS Perseroan.
 - Mempertahankan pengendalian dan kepemilikan saham dalam Perseroan minimal sebesar 51% (lima puluh satu persen) secara langsung atau tidak langsung oleh keluarga Bapak Billy Hartono Salim.
- b. Perubahan kondisi dimana Perseroan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

- Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, likuidasi dan mengubah status kelembagaan, kecuali perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka yang telah disetujui oleh PT Bank Central Asia Tbk.
- Mengalihkan atau menjual seluruh merek produk Perseroan (Victoria, Miranda, Herborist, Sixsence, Nuface dan Iria Goat's Milk) ke pihak lain.

Berdasarkan rapat Direksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 12 Oktober 2020, Perseroan akan membagikan dividen tunai dari saldo laba Perseroan sebesar Rp25.000.000.000 kepada seluruh pemegang saham Perseroan pada tanggal tersebut. Dividen tunai ini telah dibayarkan Perseroan kepada seluruh pemegang saham pada tanggal 15 Oktober 2020.

Pengoperan Merek Dagang

Berdasarkan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 22 tanggal 21 September 2020, Perseroan mengadakan perjanjian pengalihan merek dagang *Omah Herborist, FHM, Fajari, Body Scent, Beauty Cafe, dan Basic* dari PT Natura Pesona Mandiri sebesar total Rp27.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 24 tanggal 21 September 2020, Perseroan mengadakan perjanjian pengalihan merek dagang Herborist (beda kategori produk merek dagang yang sudah dimiliki Perseroan sebelumnya) dari PT Natura Pesona Mandiri sebesar total Rp3.000.000.000.

Perubahan Perjanjian Sewa Gudang dengan Billy Hartono Salim

Pada tanggal 12 Oktober 2020, Perseroan dan Billy Hartono Salim menandatangani Adendum 1 Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 65 tanggal 28 Februari 2019, dengan perubahan-perubahan sebagai berikut:

- Mengubah jangka waktu perjanjian sewa, yang sebelumnya sampai dengan 27 Desember 2028, menjadi sampai dengan 27 Desember 2028 atau diakhiri dengan pemberitahuan tertulis 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pengakhiran masa sewa yang dikehendaki oleh Perseroan.
- Dalam hal Perseroan mengakhiri perjanjian sewa menyewa sebelum berakhirnya masa sewa dengan pemberitahuan tertulis, Billy Hartono Salim diwajibkan untuk mengembalikan uang sewa yang telah dibayarkan oleh Perseroan yang akan dihitung secara proporsional atas masa sewa yang belum digunakan oleh Perseroan.
- Apabila perjanjian sewa menyewa ini berakhir, Perseroan wajib menyerahkan kembali segala sesuatu yang disewakannya kepada Billy Hartono Salim dalam keadaan kosong dan terpelihara baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa sewa. Atas setiap hari keterlambatan, Perseroan akan dikenakan denda sebesar Rp3.000.000 per hari, maksimal 14 hari sejak dikenakan denda hari pertama.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 17 tanggal 12 Oktober 2020, Perseroan melakukan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan milik Billy Hartono Salim, pihak berelasi, dengan sertifikat hak guna bangunan di kecamatan Ngaliyan, Jawa Tengah seluas 5.200 m² dengan harga Rp25.000.000.000. Pembayaran atas tanah dan bangunan tersebut harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat pada akhir bulan Desember 2020. Tanah dan bangunan tersebut akan diserahkan kepada Perseroan pada saat harga jual belinya telah dibayar lunas oleh Perseroan. Bangunan tersebut akan digunakan sebagai gudang persediaan Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Harga Saham yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh nilai investasinya. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan yang telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dimulai dari risiko utama yang dapat memberikan dampak paling besar hingga risiko yang dapat memberikan dampak yang paling kecil.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta daya beli konsumen

Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar komponen Produk Domestik Bruto menurut pengeluaran, yaitu sebesar 58,14% pada triwulan 1 tahun 2020 (sumber: bps.go.id). Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor konsumen maka Perseroan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong peningkatan nilai komponen konsumsi yang selanjutnya akan memperbesar porsi belanja masyarakat. Kondisi ekonomi yang stabil juga akan membantu kegiatan usaha dan prospek bisnis Perseroan karena Perseroan akan dapat melakukan perencanaan usaha dan investasi yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang sehat dan stabil akan membawa dampak yang positif juga kepada Perseroan melalui peningkatan daya beli konsumen atas produk Perseroan dengan semakin besarnya kelompok masyarakat berpendapatan menengah.

Untuk itu Perseroan harus selalu siap untuk mengantisipasi melemahnya daya beli masyarakat pada umumnya dengan selalu menghadirkan program-program yang meringankan beban konsumen seperti program potongan harga maupun program pemberian hadiah berupa kupon belanja.

B. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan. Risiko-risiko yang menurut Perseroan harus dikelola dengan baik adalah sebagai berikut:

Krisis Wabah Kesehatan

Munculnya wabah-wabah penyakit menular seperti coronavirus COVID-19 virus influenza H1N1, flu burung atau penyakit serupa lainnya, dapat mengurangi permintaan produk Perseroan, berdampak pada mitra ritel Perseroan sehingga membatasi kemampuan konsumen untuk membeli produk Perseroan dan sebaliknya memiliki efek samping material terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan kinerja operasional Perseroan. Efek samping seperti ini bisa cepat dan tak terduga.

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (“WHO”) telah menetapkan penyebaran wabah virus corona (“Covid-19”) sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perseroan serta pelanggan dan pemasok Grup. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perseroan. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan

yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk memberantas ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perseroan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perseroan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya.

Perseroan mengantisipasi hal tersebut di atas dengan menambah lini produk Perseroan yaitu memproduksi dan menjual produk-produk terkait kesehatan rumah tangga yang memang sangat dibutuhkan pada saat pandemi terjadi.

Risiko Produksi

Perseroan memiliki proses produksi terintegrasi yang dimulai dari hulu sampai dengan produk jadi di sisi hilir. Dalam hal terjadi gangguan, permasalahan teknis, atau kerusakan mesin, atau gangguan listrik, maka akan menghambat proses produksi, sehingga akan berpengaruh pada kinerja operasional yang ada. Mesin produksi merupakan salah satu kunci vital suksesnya kegiatan produksi Perseroan. Rusaknya mesin produksi akan menghambat jalannya proses produksi dan berdampak pada kinerja Perseroan. Di sisi lainnya, penerapan teknologi mesin terbaru mempengaruhi efektivitas dan efisiensi jalannya proses produksi. Teknologi mesin yang tidak terkini menjadikan Perseroan tidak kompetitif dalam hal daya saing kualitas produk maupun biaya produksi. Aspek ketepatan waktu produksi menjadi hal penting yang selalu dijaga oleh Perseroan selama ini.

Perseroan selalu memastikan bahwa rangkaian proses produksi yang terintegrasi tidak terhambat atau berhenti akibat kerusakan mesin dan Perseroan selalu melakukan pemeliharaan mesin-mesin secara berkala dan memastikan pasokan suku cadang mesin-mesin tersedia dengan menyediakan cadangan suku cadang perawatan rutin.

Risiko Ketergantungan atas Pasokan Bahan Baku

Penggunaan bahan baku dan bahan pendukung mewakili porsi beban pokok pendapatan yang signifikan. Bahan baku utama yang digunakan dalam produk kosmetik meliputi *base cream*, pewangi, dan alkohol. Apabila salah satu pemasok Perseroan gagal menyediakan bahan baku dan bahan pendukung dalam jumlah yang memadai di masa mendatang, Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh bahan baku pengganti dari pemasok lain dalam waktu singkat atau sama sekali. Perseroan mungkin terpaksa membeli bahan baku dari pemasok berbeda yang mengharuskan Perseroan membayar pada harga yang tidak masuk secara komersial atau menyediakan bahan baku dengan kualitas yang tidak sesuai dengan standar Perseroan. Setiap potensi gangguan pasokan bahan baku dan bahan pendukung dapat memperlambat jadwal produksi dan pengiriman untuk produk-produk yang relevan, sehingga dapat menyebabkan kehilangan konsumen dan pendapatan. Selain itu, harga pasar untuk bahan baku dan bahan pendukung dapat berfluktuasi secara signifikan karena berbagai faktor. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat meneruskan setiap kenaikan biaya bahan baku dan bahan pendukung kepada konsumen, dan setiap fluktuasi harga pasar bahan baku dan bahan pendukung yang substansial dapat meningkatkan beban Perseroan secara material dan berdampak terhadap profitabilitas Perseroan. Terjadinya salah satu hal tersebut di atas dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Perseroan menerapkan kebijakan *non-single supplier*, dengan rata-rata minimal ada 2 *supplier* sehingga risiko terputusnya pasokan dapat diminimalisir. Selain itu untuk mengantisipasi pasokan bahan baku yang membutuhkan waktu yang relatif lama, maka Perseroan menyediakan secara cukup persediaan bahan baku menyesuaikan dengan waktu lama pengiriman untuk masing-masing *supplier*.

Risiko Terkait Perizinan

Perseroan disyaratkan untuk memperoleh, memperbaharui dan/atau mempertahankan berbagai persetujuan, lisensi dan izin untuk operasi, termasuk mendapatkan izin kegiatan usaha dan izin operasional yang sesuai dari instansi pemerintah terkait untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Ketidakmampuan untuk mendapatkan atau mempertahankan persetujuan ataupun perizinan dapat mempengaruhi kegiatan usaha atau operasi Perseroan secara negatif dan komersial serta Perseroan dapat dikenakan sanksi atas hal tersebut. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan semua persetujuan,

lisensi dan izin yang diperlukan yang dimiliki oleh Perseroan pada saat ini atau yang mungkin diperlukan di masa depan, atau bahwa sanksi tidak akan dikenakan sebagai akibat dari kegagalan untuk memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan persetujuan, lisensi dan izin yang dibutuhkan.

Perseroan selalu melengkapi semua persyaratan baik itu administrasi maupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehingga perijinan tetap dapat diperoleh dan dipertahankan, dan diperbarui sesuai peraturan terbaru.

Risiko Persaingan Usaha

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi produk kecantikan & perawatan tubuh di mana produk-produk ini merupakan produk yang relatif mudah untuk diproduksi sehingga *entry barrier* terhadap industri ini relatif rendah dan terdapat potensi untuk mengundang hadirnya pemain baru yang mana pada gilirannya dapat menjadi pesaing bagi Perseroan.

Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimilikinya yakni dengan terus menerus melakukan inovasi terhadap produk-produk baik dari sisi kualitas maupun harga yang selama ini dikembangkannya, upaya menjaga kualitas produk-produk unggulan, berinovasi dalam mengembangkan produk-produk baru, memasarkan produk, dan membangun citra perusahaan/merek, serta mencermati karakteristik konsumen dan peta persaingan di Indonesia, maka akan terdapat potensi di mana para pelanggan Perseroan tersebut akhirnya menggunakan produk-produk yang diproduksi oleh pesaing Perseroan. Produk Perseroan bersaing dengan merek lain yang banyak diiklankan. Persaingan dalam pasar kecantikan & perawatan tubuh didasarkan pada harga produk, kualitas produk dan kemasan, nilai yang dirasakan dan kualitas merek, inovasi, kehadiran dan visibilitas di outlet-outlet, kegiatan promosi, iklan, e-commerce dan kegiatan lainnya. Perseroan tidak dapat memprediksi waktu dan skala tindakan pesaingnya di bidang ini atau apakah pesaing baru akan muncul di pasar kecantikan & perawatan tubuh, termasuk pesaing yang menawarkan produk yang sebanding dengan harga yang lebih menarik. Selain itu, terobosan teknologi lebih lanjut, dalam penawaran produk baru oleh pesaing, dan kekuatan serta keberhasilan program pemasaran pesaing dapat menghambat pertumbuhan Perseroan dan penerapan strategi bisnisnya Perseroan.

Jika Perseroan lalai dalam melakukan upaya-upaya tersebut, dan tidak menjaga/meningkatkan kinerja perusahaan untuk tetap dapat bersaing dengan kompetitor di industri, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Usaha-usaha Perseroan dalam mengelola risiko ini adalah Perseroan harus selalu aktif dan kreatif untuk menghadirkan produk-produk yang dibutuhkan konsumen dan juga aktif mengadakan *Focus Group Discussin* (FGD) untuk membahas trend kosmetik dan perawatan tubuh yang baru yang bisa di produksi oleh Perseroan. Perseroan juga aktif melakukan riset pasar dengan memanfaatkan jaringan internal maupun eksternal seperti dengan pemasok dan retailer sehingga selalu ter-update dengan informasi pasar yang ada.

Risiko Distribusi

Jaringan distribusi yang efektif dan efisien merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan produk konsumsi di negara seperti Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki wilayah yang sangat luas. Proses pendistribusian produk mendukung keberhasilan penjualan kecantikan & perawatan tubuh untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut mudah dilihat dan tersedia bagi konsumen yang berminat untuk mencari dan membelinya. Jaringan distribusi yang baik juga tergantung dari operasi logistik yang terdiri dari proses pengiriman dan penanganan persediaan produk di jalur distribusi tersebut.

Gangguan atas jaringan distribusi dan atau kegiatan logistik akan menghambat tibanya produk ke lokasi tujuan sesuai dengan potensi pasar yang sudah dipelajari dan direncanakan sehingga Perseroan akan kehilangan potensi penjualan atas produk tersebut. Selain itu, hal ini akan mempengaruhi ketersediaan produk di lokasi tujuan yang dapat mengakibatkan konsumen kecewa dan memberikan peluang kepada pesaing untuk mengisi kekosongan produk tersebut. Jadi apabila kegiatan logistik dan jaringan distribusi mengalami gangguan maka dapat membawa dampak negatif kepada kinerja usaha dan keuangan Perseroan.

Perseroan bekerja sama dengan distributor-distributor lokal yang ada di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Ambon untuk membantu distribusi produk Perseroan. Selain itu Perseroan rutin mengevaluasi kinerja distributornya untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan yang diharapkan.

Risiko Kecepatan atau keberhasilan peluncuran produk atau merek baru

Sebagai perusahaan di bidang produk kecantikan & perawatan tubuh, Perseroan selalu berusaha untuk berinovasi dalam menghasilkan dan menawarkan produk-produk baru kepada masyarakat luas, baik dengan menggunakan merek yang sudah ada maupun menciptakan merek baru. Produk baru yang diluncurkan bisa merupakan produk di kategori yang sudah digarap oleh Perseroan maupun di kategori baru. Peluncuran produk atau merek baru merupakan salah satu sumber pertumbuhan penjualan dan kegiatan usaha Perseroan. Dalam peta persaingan yang semakin ketat dan semakin dinamisnya perubahan perilaku konsumen, maka Perseroan dituntut untuk mengikuti dinamika persaingan industri ini dengan secara berkala meluncurkan produk atau merek baru. Akan tetapi, peluncuran produk atau merek baru juga membutuhkan investasi dan atau pendanaan yang cukup besar, yaitu sejak proses penelitian, persiapan produksi, konsep pemasaran sampai dengan biaya iklan dan promosi.

Apabila Perseroan lambat dalam menghasilkan produk atau merek baru yang menarik bagi konsumen atau jika produk atau merek baru yang diluncurkan tidak berhasil maka Perseroan memiliki risiko lambatnya pertumbuhan penjualan dan bahkan dapat mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan Perseroan.

Riset pasar rutin dilakukan oleh Perseroan dengan mengirimkan tim pemasaran ke pameran-pameran yang ada di dalam negeri maupun luar negeri untuk bisa lebih cepat mendapatkan gambaran produk-produk yang laku di pasaran, dan jalur birokrasi internal disederhanakan sehingga mulai dari gagasan produk, pemilihan bahan baku, bahan kemas, penentuan harga jual sampai tanggal peluncuran produk.

Risiko Perubahan pola konsumsi atas produk kecantikan & perawatan tubuh

Masyarakat dan konsumen produk kecantikan & perawatan tubuh semakin hari semakin terbuka terhadap informasi dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi/digital dan teknologi kecantikan & perawatan tubuh juga menawarkan semakin beragamnya pilihan produk kecantikan & perawatan tubuh dan cara belanja produk-produk tersebut. Masyarakat dan konsumen juga semakin sadar akan aspek kesehatan, keamanan produk untuk digunakan dan pengaruh kualitas/jenis produk yang digunakan kondisi kesehatan dan perawatan tubuh konsumen. Hal-hal ini semua akan mempengaruhi aspirasi, pilihan dan kecenderungan konsumsi para konsumen. Perseroan harus selalu waspada untuk mengamati dan beradaptasi atas perkembangan-perkembangan di berbagai bidang yang mempengaruhi pola konsumsi konsumen. Keberhasilan Perseroan yang berkelanjutan tergantung pada kemampuannya untuk mengantisipasi, mengukur, dan bereaksi secara tepat waktu dan hemat biaya terhadap tren industri dan perubahan preferensi dan sikap konsumen terhadap produk kecantikan & perawatan tubuh.

Apabila Perseroan tidak cermat dalam mengantisipasi atau salah melakukan tindakan penyesuaian atas kegiatan usaha, produk yang ditawarkan dan cara beroperasinya, maka hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan dapat mengalami kesulitan.

Perseroan harus terus mengedepankan aspek keamanan atas produk yang dijual. Sehingga dengan kesadaran konsumen akan produk-produk yang aman untuk di gunakan, maka produk-produk Perseroan akan tetap menjadi pilihan konsumen.

Risiko pengendalian mutu terhadap bahan baku dan barang jadi

Kualitas produk yang dijual oleh Perseroan merupakan aspek penting bagi kesuksesan kegiatan usaha Perseroan. Pengelolaan kendali mutu yang konsisten sangat bergantung pada keefektifan dari sistem pengendalian mutu, yang juga bergantung pada sejumlah faktor seperti desain dari sistem pengendalian mutu Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk memastikan bahwa para karyawan mengikuti kebijakan dan petunjuk dari sistem pengendalian mutu tersebut. Sistem pengendalian mutu Perseroan terutama terdiri dari tindakan pengendalian mutu terhadap bahan baku, pengendalian proses, kondisi ruangan dan lingkungan proses, serta pengendalian mutu produk akhir. Namun, tidak ada jaminan bahwa sistem pengendalian mutu

Perseroan akan terbukti efektif setiap saat. Setiap kegagalan atau keusangan dari sistem pengendalian mutu Perseroan dapat berdampak merugikan dan material terhadap reputasi, kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.

Perseroan mempunyai divisi QC (*Quality Control*) dan QA (*Quality Assurance*) yang memastikan bahwa produk-produk Perseroan diproduksi dan telah lulus pengecekan mutu dari team QC dan QA. Team QA juga memastikan bahwa semua proses produksi sudah di jalankan baik dan benar sesuai dengan kaidah CPKB.

Risiko Pendanaan

Perseroan mungkin tidak mampu untuk memperoleh pendanaan, tidak diperpanjang atau dapat diperpanjang namun memiliki pembatasan-pembatasan yang tidak menguntungkan Perseroan di masa mendatang baik untuk mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk investasi baru, perkiraan belanja modal dan kebutuhan modal kerja. Pendanaan yang diperoleh Perseroan dapat mengandung pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi operasional Perseroannya seperti:

- membatasi kemampuannya membayarkan dividen atau mewajibkannya untuk meminta persetujuan atas pembayaran dividen;
- meningkatkan kerentanannya terhadap kondisi ekonomi dan industri yang secara umum merugikan;
- membatasi kemampuannya menjalankan rencana pertumbuhannya;
- mewajibkannya untuk menyisihkan sebagian besar dari arus kasnya dari kegiatan operasional untuk pembayaran hutangnya, dan dengan demikian mengurangi ketersediaan arus kasnya untuk mendanai belanja modal, kewajiban modal kerja dan tujuan perusahaan umum lainnya; dan membatasi fleksibilitasnya dalam merencanakan, atau menanggapi terhadap, perubahan usaha dan industrinya.

Apabila Perseroan tidak mampu untuk memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang menguntungkan bagi Perseroan maka hal tersebut dapat berdampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, profitabilitas, hasil operasional dan kemampuannya untuk melaksanakan strategi pertumbuhannya.

Risiko Perubahan Teknologi

Di zaman yang serba digital, mengikuti perkembangan teknologi sangatlah penting. Kegiatan usaha Perseroan yang banyak berhubungan langsung dengan konsumen, Perseroan harus selalu mengikuti perkembangan cara pembelian konsumen yang berhubungan erat dengan *online shop* yang saat ini mempermudah konsumen dalam mendapatkan produk-produk yang diinginkan. Kehadiran Perseroan melalui situs *online shop* Oemah Herborist serta profil Oemah Herborist di e-commerce Indonesia, diharapkan dapat mempermudah konsumen dalam mendapatkan produk-produk Perseroan.

Selain itu, Perseroan selalu memperbarui sistem teknologi informasi internal dari waktu ke waktu, dari sisi perangkat lunak, perangkat keras, dan yang terpenting sumber daya manusia yang terlibat. Gangguan dalam sistem dapat menyebabkan ketidakefisienan serta dapat menghambat proses operasional Perseroan. Penyebab gangguan antara lain adanya kemungkinan diserang oleh virus, jaringan yang terputus, dan juga gangguan yang terjadi karena kesalahan operator. Gangguan pada sistem teknologi Perseroan dapat berdampak material terhadap kegiatan operasional Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan secara berkala memperbarui sistem teknologi informasi Perseroan sebagai tindakan preventif dalam menghadapi resiko atas penggunaan dan perubahan teknologi.

Risiko Sosial dan Ketenagakerjaan

Industri Perseroan sampai saat ini masih merupakan industri padat karya, dimana Perseroan mempekerjakan ratusan karyawan dalam membantu pengoperasian mesin dan menjadi bagian proses produksi itu sendiri. Selain itu dengan beroperasinya pabrik secara terus menerus, serta kemungkinan adanya limbah, maka terdapat kemungkinan adanya gangguan sosial kepada masyarakat sekitar. Hal tersebut memiliki risiko untuk menimbulkan gejolak sosial dan potensi masalah ketenagakerjaan. Apabila terdapat silang pendapat antara manajemen dengan masyarakat sekitar mengenai dampak dari pencemaran, serta adanya tuntutan pekerja melalui aksi pemogokan kerja dan unjuk rasa, maka hal ini dapat mengganggu proses produksi Perseroan. Ketidakkampuan Perseroan menjaga iklim sosial yang kondusif dan aspek hubungan ketenagakerjaan dapat mempengaruhi kelancaran produksi dan pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

Risiko perubahan kondisi perekonomian secara lokal, regional dan global

Menurunnya kondisi ekonomi dunia sejak tahun 2008 memberikan dampak buruk terhadap kinerja ekonomi global, yang mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga yang melambat dan lemahnya investasi dikarenakan hilangnya permintaan eksternal dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi tersebut memberikan pengaruh terhadap kegiatan usaha dan konsumen Indonesia, yang dapat mengakibatkan berkurangnya permintaan terhadap produk-produk konsumen. Penurunan kondisi ekonomi di Indonesia di masa depan dapat pula menyebabkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar negara berkembang dan lainnya, atau faktor lainnya, seperti kondisi ekonomi global yang semakin memburuk, dapat meningkatkan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan menghambat atau menyebabkan penurunan tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kenaikan volatilitas tersebut maupun penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan hukum

Perseroan, atau setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari waktu ke waktu dapat menjadi pihak dalam litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan yang timbul dari kegiatan usaha sehari-hari. Keterlibatan dalam litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan dapat mengalihkan perhatian manajemen dan menghabiskan waktu dan sumber daya lainnya. Lebih lanjut, setiap litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan yang awalnya kurang penting dapat meningkat dikarenakan keterlibatan berbagai faktor, seperti fakta dan situasi kasus, kemungkinan menang atau kalah, nilai moneter yang dipertaruhkan dan pihak yang berkepentingan, dan faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan kasus tersebut menjadi penting bagi Perseroan.

Lebih lanjut, publisitas negatif dari litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan dapat merusak reputasi Perseroan dan berdampak merugikan terhadap citra merek dan produk. Selain itu, apabila suatu putusan diberikan kepada Perseroan, Perseroan dapat diwajibkan untuk membayar kerugian moneter yang signifikan, menanggung kewajiban lain, dan menangguk atau mengakhiri kegiatan usaha atau proyek Perseroan. Sebagai akibatnya, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Risiko Bencana Alam

Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah termasuk negara yang seringkali mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan lainnya. Ketika suatu lahan yang dikuasai oleh Perseroan mengalami suatu bencana, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kegiatan Perseroan.

Kejadian geologi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lain di setiap kota berpenduduk besar di Indonesia dapat mengganggu ekonomi dan menurunkan kepercayaan investasi, serta dapat properti ataupun merusak infrastruktur, utilitas dan akses transportasi logistik sehingga dapat mengganggu kegiatan usaha persewaan Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha.

Risiko perubahan kurs valuta asing (depresiasi nilai tukar rupiah)

Saat ini, seluruh transaksi Perseroan dilaksanakan dalam mata uang Rupiah. Jika kedepannya Perseroan perlu melakukan transaksi jenis apapun dalam mata uang asing, maka pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang tersebut akan memiliki dampak terhadap kinerja keuangan Perseroan. Perseroan akan memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Perubahan kurs valuta asing tersebut dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dari arus kas, aset, maupun kewajiban. Dengan demikian, Perseroan akan berkemungkinan mengalami kerugian pada sisi aset dan arus kas masuk bila mata uang melemah terhadap kurs valuta asing.

Sampai dengan terbitnya Prospektus ini, Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai karena Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tidak memiliki dampak yang material dan masih dapat dikelola (*manageable*) oleh Perseroan serta tidak adanya transaksi dalam mata uang asing pada pendapatan Perseroan.

Ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Risiko terkait ketentuan negara lain atau peraturan internasional akan mempengaruhi kinerja ekspor dan impor. Jika suatu negara mengeluarkan peraturan yang berdampak *negative* terhadap ekspor dan impor, maka akan mempengaruhi permintaan akan produk Perseroan yang berdampak terhadap kinerja Perseroan.

Risiko Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan standar perdagangan, perindustrian dan lingkungan hidup yang diawasi oleh berbagai macam instansi pemerintah di Indonesia seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah daerah yang ditunjuk oleh masing-masing instansi pemerintah tersebut untuk menjalankan pengendalian dan pengawasan kegiatan Perseroan. Bahwa peraturan perundang-undangan pada umumnya dapat mempengaruhi penetapan harga dan permintaan atau distribusi produk Perseroan. Akibatnya, setiap ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan standar tersebut termasuk penegakannya dapat mengganggu/memperlambat kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan baik, diminta pertanggungjawaban dan dikenakan biaya untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hukum, peraturan dan/atau standar yang mengaturnya. Selain itu, peraturan perundang-undangan dapat juga sewaktu-waktu berubah berdasarkan kebijakan pemerintah, perubahan iklim, perkembangan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya serta perubahan pada pergerakan dan daya beli masyarakat.

Risiko terkait Lingkungan Hidup

Proses manufaktur produk Perseroan meliputi penanganan, produksi dan penggunaan zat atau senyawa yang dapat dianggap beracun atau berbahaya dalam ketentuan peraturan di bidang lingkungan hidup. Perseroan terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perlindungan lingkungan hidup, termasuk ketentuan terkait pembuangan limbah cair dan/atau limbah padat serta pembuangan senyawa berbahaya dalam proses manufaktur, dan dapat terikat pada ketentuan yang serupa di yurisdiksi lain di masa mendatang. Selain itu, Perseroan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk perawatan dan pembuangan limbah-limbah tersebut. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan hidup yang ada saat ini maupun di masa mendatang dan pertanggungjawaban yang mungkin timbul dari pembuangan limbah cair dan/atau padat, serta senyawa berbahaya, dapat menambah beban Perseroan dan memiliki dampak merugikan terhadap profitabilitas Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku sepenuhnya setiap saat. Setiap pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan tersebut dapat menyebabkan denda yang substansial, sanksi kriminal, pencabutan izin usaha, penutupan fasilitas produksi dan kewajiban untuk mengambil langkah-langkah perbaikan, dimana hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Perseroan juga dapat menghadapi pertanggungjawaban perdata untuk dugaan cedera atau kerusakan properti yang disebabkan paparan senyawa atau bahan berbahaya di fasilitas produksi Perseroan atau senyawa yang dihasilkan atau ditangani oleh Perseroan. Tuntutan tersebut dapat menjadi substansial dan berdampak material dan merugikan terhadap bisnis dan hasil operasional Perseroan.

Lebih lanjut, Pemerintah dapat mengambil langkah untuk menerapkan peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat. Dikarenakan adanya kemungkinan perubahan peraturan yang tidak diantisipasi, biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk lingkungan hidup di masa mendatang dapat berbeda secara substansial dari yang diantisipasi saat ini. Setiap perubahan peraturan lingkungan hidup dapat menyebabkan Perseroan untuk melakukan belanja modal yang substansial untuk memasang, mengganti, memperbaharui atau menambah peralatan pengendalian pencemaran, mengambil langkah-langkah perlindungan tambahan dan langkah lainnya terhadap potensi kontaminasi atau cedera yang disebabkan bahan-bahan berbahaya, atau melakukan perubahan operasional untuk membatasi dampak merugikan atau potensi dampak merugikan terhadap lingkungan hidup. Apabila biaya-biaya tersebut menjadi sangat mahal, Perseroan dapat terpaksa untuk membatasi atau menghentikan kegiatan

manufaktur obat-obatan tertentu. Selain itu, apabila Perseroan dikenakan pertanggungjawaban terkait lingkungan hidup dalam jumlah signifikan, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

D. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau Pasar Modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti kerjasama/aliansi strategis, *Joint Operation*, *Joint Venture* atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan

Likuiditas saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan Pasar Modal di negara-negara maju, Pasar Modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di Pasar Modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan Pasar Modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan

Setelah Penawaran Umum Perdana, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, pada umumnya dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi

kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali telah dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan:

- menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;
- memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan
- menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana Pemegang Saham Pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan Peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2020 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017. Laporan keuangan tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019 dan 2018, dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja yang ditandatangani oleh Benediktio Salim, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP 1561) dengan opini Tanpa Modifikasian dengan paragraf penjas.

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Gani Sigiyo & Handayani dengan opini tanpa modifikasian, ditandatangani oleh Setiawati Budiman, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP 1316).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Victoria Care Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 32 tanggal 20 April 2006, yang dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00267 HT.01.01-TH.2006 tanggal 8 September 2006, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP. 090115122663 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. 1477/BH 09.01/IX/2006 tanggal 27 September 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98 tanggal 8 Desember 2006, Tambahan No. 12916/2006.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 28 tanggal 25 September 2020, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0066461.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0161751.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 September 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam (a) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0391263 tanggal 25 September 2020, serta (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0391264 tanggal 25 September 2020, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0161751.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 September 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan antara lain adalah melakukan usaha dalam bidang (i) Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap, parfum dan kosmetik; (ii) Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya; dan (iii) Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan yang tidak dapat diklasifikasikan lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

1. Industri Kosmetik (termasuk pasta gigi), mencakup usaha pembuatan kosmetik, seperti rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut seperti shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit seperti krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur, produk untuk kebersihan badan seperti sabun mandi, deodorant, garam mandi dan obat perontok bulu, krim cukur dan kosmetik tradisional. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas;
2. Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tissue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengkilap dan krim untuk barang dari kulit, pengkilap dan krim untuk kayu, pengkilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok;
3. Perdagangan besar kosmetik mencakup usaha perdagangan besar kosmetik seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya; dan

4. Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.

Kegiatan usaha penunjang:

1. Jasa pengelolaan transportasi (JPT), yang mencakup usaha pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara;
2. Pergudangan dan penyimpanan, yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersil;
3. Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta, yang mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik aset non finansial dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. Kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) aset non finansial yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, *trade mark* dan *service mark*, *brand name*, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian *franchise/waralaba* dan aset non finansial yang tak berwujud lainnya;
4. Industri produk farmasi untuk manusia, yang mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen Kesehatan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspense, sabun antiseptic serta benang bedah. Termasuk industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal dan obat kontrasepsi hormonal, industri alat-alat diagnosa medis, termasuk uji kehamilan, industri substansi diagnosa in-vivo radioaktif, industri farmasi bioteknologi dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik;
5. Perdagangan besar farmasi, yang mencakup usaha perdagangan besar farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan;
6. Perdagangan besar obat tradisional atau jamu, yang mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu;
7. Industri kertas tissue, yang mencakup usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, facial tissue, toilet tissue, lens tissue, sapu tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin dan napkin untuk bayi dan cangkir, piring dan baki dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, tampon dan sebagainya dan kertas sigaret dan cork tipping paper; dan
8. Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton, yang mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file kantor dan barang sejenisnya.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan hampir seluruh kegiatan usaha utama yang diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Namun, pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan hasil produksi dan penjualan oleh Perseroan maka kegiatan usaha utama Perseroan yang sedang dijalankan saat ini adalah dalam bidang industri kosmetik (termasuk pasta gigi); industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga; perdagangan besar kosmetik, dan perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.

Kantor Perseroan berlokasi di Jalan Puri Ayu 1, Puri Lingkar Dalam Blok T No. 8, Puri Indah Financial Tower, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak tahun 2017 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perubahan dalam struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2019, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran No. 60, tanggal 31 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004390.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019 serta telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0014096.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019, yang menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan menyetujui dan memutuskan untuk meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan/disetor dalam Perseroan menjadi sebesar Rp285.000.000.000,00 dimana setoran modal tersebut berasal dari kapitalisasi saldo laba per tanggal 31 Desember 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	285.000	285.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sukses Sejati Sejahtera	284.919	284.919.000.000	99,97
2. Luhur Dino Herlambang	81	81.000.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	285.000	285.000.000.000	100.00

- Berdasarkan Akta No. 28/2020 yang menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan menyetujui dan memutuskan memberikan persetujuan atas (i) peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp285.000.000.000 (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dan (ii) pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk setiap saham menjadi Rp50,00 (lima puluh Rupiah) untuk setiap saham dan (iii) pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan masing-masing saham dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) serta (iv) selanjutnya penawaran/penjualan saham baru yang dikeluarkan dari simpanan/portepel tersebut kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta) saham baru atau sebanyak-banyaknya 15,56% (lima belas koma lima puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah penawaran umum, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, termasuk peraturan OJK dan peraturan BEI di Indonesia. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Saham ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sukses Sejati Sejahtera	5.698.380.000	284.919.000.000	84,949
2. Luhur Dino Herlambang	1.620.000	81.000.000	0,024
3. Masyarakat	1.008.000.000	50.400.000.000	15,027
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.708.000.000	335.400.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.292.000.000	164.600.000.000	-

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2006	Didirikan sebagai perusahaan manufaktur dengan produk awal Victoria Body Scent dan Miranda Hair Color

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2008	Peresmian fasilitas pabrik baru bersertifikat GMP (<i>Good Manufacturing Practices</i>) di Semarang. Luncurkan beberapa kategori produk baru.
2009	Meluncurkan Lulur Tradisional Bali dengan merek Herborist
2013	Meluncurkan "Oemah Herborist", toko dengan konsep wisata edukasi dan pengalaman berbelanja untuk mempromosikan lini produk Herborist. "Oemah Herborist" artinya rumah Herborist, terletak di dalam area pabrik dimana pelanggan dapat mengunjungi pabrik dan melihat seluruh proses produksi dari semua produk Victoria Care Indonesia. Oemah Herborist memamerkan koleksi produk kecantikan <i>vintage</i> dan tradisional Indonesia dari seluruh daerah di Indonesia.
2015	Merek Herborist resmi mendapatkan sertifikasi Halal untuk produk Minyak Zaitun (<i>Olive Massage Oil</i>). Miranda Hair Color juga menjadi produk pemimpin pasar berdasarkan laporan tahunan pasar <i>Top Brand</i> .
2017	Produk Minyak Zaitun (<i>Olive massage oil</i>) Perseroan memenangkan " <i>Top Brand Award</i> " untuk konsistensi, kualitas dan pengakuan kepuasan konsumen. Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh Frontier Consulting Group, sebuah perusahaan konsultan pemasaran ternama dan terkemuka di Indonesia.
2018	Memulai penjualan secara <i>online</i> di bawah toko Oemah Herborist Official, yang menjual produk Perseroan melalui beberapa platform <i>e-commerce</i> seperti Shopee dan lainnya.
2019	Setelah 12 tahun perjalanan bisnis, Perseroan melakukan <i>re-branding</i> perusahaan dengan logo baru dan relokasi Kantor Pusat untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Pada tahun ini, Perseroan menambah 1 mesin baru untuk produk perawatan rambut
2020	Perseroan melakukan implementasi sistem Oracle dan penambahan 1 mesin baru untuk produk perawatan rambut.

D. IZIN DAN SERTIFIKASI YANG DIMILIKI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
1.	Izin Usaha Industri ("IUI")	IUI No. 530/007/IUI/IV/2008 tanggal 11 April 2008, dikeluarkan oleh Kepala BKPM Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah (BKPM PB & A) Kota Semarang (untuk Industri Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ("PKRT")).	Perseroan memiliki kapasitas produksi sejumlah 112.200.000 <i>pieces</i> per tahun. IUI Perseroan berlaku pula sebagai Tanda Daftar Gudang ("TDG") Perseroan untuk gudang atau tempat penyimpanan seluas 9.900m ² yang berada di kompleks usaha industri yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri. IUI Perseroan berlaku selama Perseroan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
2.	Izin Usaha Industri Perluasan ("IUI Perluasan")	IUI Perluasan No. 530/012/BPPT/IUI/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang atas nama Walikota Semarang (untuk Industri Kosmetik dan PKRT).	Perseroan memiliki kapasitas produksi PKRT sejumlah 40.000.000 <i>pieces</i> per tahun dan kapasitas produksi kosmetik sejumlah 140.400.000 <i>pieces</i> per tahun. IUI Perluasan Perseroan berlaku pula sebagai TDG Perseroan untuk gudang atau tempat penyimpanan seluas 25.176m ² yang berada di kompleks usaha industri yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri. IUI Perluasan Perseroan berlaku selama Perseroan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan	SIUP diterbitkan pada tanggal 5 September 2019 oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta (untuk Perdagangan Besar Kosmetik dan/atau PKRT).	SIUP Perseroan telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Izin Produksi Kosmetika	Izin Produksi Kosmetika No. FP.02.02/IV/379/2017	Berdasarkan Izin Produksi Kosmetika,

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
	atau Sertifikat Produksi Kosmetika	tanggal 7 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.	Perseroan dapat memproduksi bentuk dan jenis kosmetika: cair, cairan kental, krim, gel, dan padat (sabun). Izin berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
5.	Sertifikat CPKB	Sehubungan dengan Izin Produksi Kosmetik, Perseroan telah memperoleh beberapa Sertifikat CPKB, yang dikeluarkan oleh Kepala BPOM.	Setiap Sertifikat CPKB berlaku selama 5 tahun sejak tanggal diterbitkan (seluruhnya sejak tanggal 7 Juli 2017).
6.	Izin Edar Kosmetika	Izin Edar Kosmetika berupa notifikasi yang diterbitkan oleh Kepala BPOM untuk seluruh produk - produk kosmetika yang diedarkan oleh Perseroan.	Setiap notifikasi berlaku selama 3 tahun sejak tanggal diterbitkan (yakni sejak tahun 2017 sampai dengan 2020) dan dapat diperpanjang.
7.	Angka Pengenal Importir – Produsen (“API-P”) dan Nomor Induk Kepabeanaan (“NIK”)	API-P dan NIK sebagai pemilik NIB dengan No. 9120303700755 tanggal 5 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	API-P dan NIK berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	Surat Keterangan Ekspor (“SKE”) Kosmetik	SKE untuk beberapa produk kosmetik berupa <i>Certificate of Free Sale</i> , yang diterbitkan oleh BPOM untuk keperluan ekspor.	Berlaku paling lama untuk jangka waktu 2 (dua) tahun (seluruhnya sejak tanggal 26 November 2019).
9.	Sertifikat Halal	Sertifikat Halal No. 15150015000515 yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah untuk berbagai produk Kosmetik dan PKRT.	Sertifikat Halal berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan (seluruhnya sejak tanggal 5 September 2020).
10.	Sertifikat Produksi PKRT	Sertifikat Produksi PKRT No. FK.01.03/VI/336-e/2020 tanggal 19 Maret 2020 dan Persetujuan No. FK.01.03/VI/1129-e/2020 tanggal 31 Juli 2020, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.	Berdasarkan Sertifikat Produksi PKRT, Perseroan dapat memproduksi jenis PKRT: pewangi, antiseptika dan desinfektan, tissue dan kapas, sediaan untuk mencuci, pembersih, dan pestisida rumah tangga. Izin berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
11.	Izin Edar PKRT	Izin Edar PKRT yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk seluruh produk - produk PKRT yang diedarkan oleh Perseroan.	Setiap Izin Edar PKRT memiliki masa berlaku yang berbeda-beda paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan (sekitar sejak 2019 sampai dengan 2020).

E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

E.1. PERJANJIAN – PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan Pihak Terafiliasi, antara lain sebagai berikut:

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai
Perjanjian Penunjukan Distributor					
1.	Perjanjian Penunjukan Distributor Produk PT Natura Pesona Mandiri Nomor tanggal 31 Januari 2020.	PT Natura Pesona Mandiri dan Perseroan.	PT Natura Pesona Mandiri menunjuk Perseroan untuk menjadi distributor untuk menjual dan mendistribusikan produk-produk dari PT Natura Pesona Mandiri dengan merek “Bali Boat”, “Secret Garden”, dan “Bali Dancer”.	1 Januari 2020 – 31 Desember 2020. Perjanjian akan diperpanjang apabila jangka waktu telah berakhir.	Tidak ditentukan secara khusus bergantung pada jumlah produk yang didistribusikan.

No	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai
2.	Perjanjian Penunjukan Distributor Produk PT Natura Pesona Mandiri tanggal 2 Maret 2020.	PT Natura Pesona Mandiri dan Perseroan	PT Natura Pesona Mandiri menunjuk Perseroan untuk menjadi distributor untuk menjual dan mendistribusikan produk-produk dari PT Natura Pesona Mandiri dengan merek "Secret Clean".	1 Maret 2020 – 31 Desember 2020. Perjanjian akan diperpanjang apabila jangka waktu telah berakhir.	Tidak ditentukan secara khusus bergantung pada jumlah produk yang didistribusikan.
Perjanjian Produksi Kosmetik					
3.	Perjanjian Kerja Sama Tanggal 5 Maret 2020.	PT Natura Pesona Mandiri dan Perseroan	Perseroan berkewajiban untuk memproduksi produk berupa hand sanitizer 60ml dan liquid 100ml dengan merek "Secret Clean".	6 Maret 2020 – 6 Maret 2025.	Tidak ditentukan secara khusus bergantung pada jumlah produk yang diproduksi.
Perjanjian Sewa Menyewa					
4.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 65 tanggal 28 Februari 2019 (sebagaimana diubah dengan Addendum Akta Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 12 Oktober 2020).	Billy Hartono Salim dan Perseroan	Perseroan menyewa bangunan gudang seluas 5.200m ² milik Billy Hartono Salim yang terletak di Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Berlaku mundur sejak 28 Desember 2018 – 27 Desember 2028	Rp20.000.000.000

Sifat dari perjanjian dan/atau transaksi tersebut adalah terkait kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha Perseroan, dan dijalan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas secara keseluruhan dilakukan secara wajar (*arm's length*). Kewajaran tersebut diukur dari laba kotor (*gross margin*) Perseroan yang akan menghasilkan laba kotor (*gross margin*) yang kurang lebih sama apabila transaksi tersebut tidak dilakukan dengan pihak afiliasi.

Sehubungan dengan perjanjian dan/atau transaksi antara Perseroan dan PT Natura Pesona Mandiri, PT Natura Pesona Mandiri merupakan afiliasi dari Perseroan karena PT Natura Pesona Mandiri dan Perseroan secara bersama-sama dimiliki oleh PT Gemilang Tunggal Prakarsa (yang dikendalikan oleh Billy Hartono Salim dan keluarga). Selain itu, Billy Hartono Salim juga menjabat sebagai Direktur baik di PT Natura Pesona Mandiri dan Perseroan.

E.2. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian-Perjanjian Kredit

- a. Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 3 Mei 2018 antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA") sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 1 Juli 2019, Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 100 tanggal 31 Agustus 2020, dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1333/2020 tanggal 8 Oktober 2020 ("Perjanjian Kredit BCA").

No.	Ketentuan	Keterangan
1.	Objek Perjanjian dan Penggunaan Dana	Pemberian Fasilitas Pinjaman Rekening Koran ("PRK"), Fasilitas Kredit Investasi I ("KI I"), dan Fasilitas Kredit Investasi II ("KI II"), bersama dengan PRK dan KI I disebut sebagai "Fasilitas Kredit" dari BCA kepada Perseroan, untuk tujuan sebagai berikut: a. PRK digunakan untuk modal kerja; dan b. KI I dan KI II untuk membiayai pekerjaan interior, <i>mechanical electrical</i> dan pembelian <i>furniture & workstation</i> di kantor Puri Indah financial Tower Lantai 10 dan Lantai 11, Jalan Lingkar Dalam Blok T8, Kembangan Selatan, Jakarta Barat.
2.	Nilai Perjanjian	Fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan adalah dalam bentuk sebagai berikut: 1. PRK sampai jumlah setingginya-tingginya sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah); 2. KI I dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp73.000.000.000 (tujuh puluh tiga miliar Rupiah); dan 3. KI II dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp17.500.000.000 (tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah).
3.	Bunga dan Provisi atau Komisi	1. Perseroan wajib membayar bunga sebesar a. 9,5% per tahun, yang dihitung dari Utang yang timbul dari PRK; b. 8,62% per tahun, yang berlaku tetap (<i>fixed</i>) selama 3 tahun sejak 1 Juli 2019, yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan untuk KI I; dan c. 10,75% per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan untuk KI II. 2. Perseroan wajib membayar provisi atau komisi kepada BCA sebesar: a. 0,25% per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Kredit, untuk PRK; b. 1% sekali bayar yang dihitung dari jumlah Fasilitas Kredit, untuk KI I; dan c. 0,5% sekali bayar yang dihitung dari jumlah Fasilitas Kredit, untuk KI II.
4.	Jangka Waktu Ketersediaan Penarikan Fasilitas	Jangka waktu ketersediaan penarikan fasilitas PRK telah berakhir pada tanggal 4 Agustus 2019, dan fasilitas KI I dan KI II telah berakhir pada tanggal 1 Januari 2020.
5.	Jaminan	Berbagai bidang tanah, (termasuk yang terkait dengan unit kantor Perseroan), sejumlah mesin, stok barang yang dikuasai oleh Perseroan, beserta Jaminan Pribadi oleh Billy Hartono Salim.
6.	Jatuh Tempo	Jatuh tempo pembayaran PRK akan berakhir pada tanggal 4 November 2021. Jatuh Tempo pembayaran KI I adalah bulanan dimulai dari tanggal 7 Oktober 2019 yang akan berakhir pada tanggal 7 Oktober 2029. Jatuh Tempo pembayaran KI II adalah bulanan, yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
7.	Ketentuan Pelunasan Lebih Awal	Apabila Perseroan melakukan pembayaran kembali yang dipercepat selama masa <i>fixed rate</i> , Perseroan wajib membayar kepada BCA biaya pelunasan lebih awal sebesar 2% dari jumlah yang dilunasi lebih awal, khusus untuk fasilitas Kredit Investasi I.
8.	Keterlambatan	Jika Perseroan lalai membayar karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya, maka Perseroan wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar: a. 6% di atas suku bunga yang berlaku bagi fasilitas kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun; dan b. 3% di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam valuta asing dari waktu ke waktu per tahun.
9.	Jangka Waktu	Tidak diatur secara khusus (namun akan tetap berlaku sampai pelunasan pembayaran kredit pinjaman PRK, KI I, dan KI II).
10.	Pembatasan / Ketentuan yang Dilarang	Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau dalam batas waktu penarikan Fasilitas Kredit dari PRK, KI I, dan KI II, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA: a. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain; b. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-sehari; c. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi, serta mengubah status kelembagaan, kecuali perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka yang telah disetujui oleh BCA; d. mendapat tambahan pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya; e. menjadi penjamin untuk pihak ketiga;

No.	Ketentuan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> f. menjaminkan aset Perseroan untuk fasilitas kredit yang diperoleh pihak manapun; g. melakukan investasi yang tidak berhubungan dengan aktivitas usaha; dan h. mengalihkan / menjual / melepaskan seluruh merek produk Perseroan (Victoria, Miranda, Herborist, Sixsence, Nuface, dan Iria Goat's Milk) ke pihak lain.
11.	Keadaan Cidera Janji	<p>Satu atau lebih dari tindakan peristiwa tersebut di bawah ini merupakan kejadian kelalaian / cidera janji:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kelalaian Perseroan untuk membayar utang sebagaimana ditentukan dalam Fasilitas Kredit; b. Perseroan lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan dalam Pasal 12 Perjanjian Kredit BCA (hal-hal yang wajib dilaksanakan Perseroan) dan Pasal 13 Perjanjian Kredit BCA (hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan Perseroan) atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit BCA dan/atau lalai berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat antara Perseroan dan BCA atau pihak lain, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat kemudian hari; c. pemberi agunan dan/atau penjamin ("Penjamin") melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen jaminan; d. Perseroan menggunakan Fasilitas Kredit yang menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya; e. Menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, bonafidas dan solvabilitas Perseroan dan/atau Penjamin mundur sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi Perseroan dan/atau Penjamin dalam melakukan pembayaran utang; f. Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau Penjamin mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau Penjamin; g. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau Penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau Penjamin dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit BCA dan/atau dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan; h. Agunan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena suatu hal yang berakhir penguasaannya; i. Suatu persetujuan yang dibuat Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau Penjamin kepada BCA, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan yang tercantum dalam pasal 11 Perjanjian Kredit BCA, atau agunan yang diserahkan terbukti tidak benar; j. Perseroan dan/atau Penjamin terlibat dalam perkara di pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan Perseroan dan/atau Penjamin wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk melakukan pembayaran utang; k. Perseroan dan/atau Penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan ijin usaha Perseroan dan/atau Penjamin dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau Penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit BCA; l. Perseroan dan/atau Penjamin meninggal dunia (dalam hal Perseroan dan/atau penjamin bukan berbentuk badan); dan m. Perseroan dan/atau Penjamin dibubarkan atau dilikuidasi (apabila Perseroan dan/atau penjamin berbentuk badan).
12.	Pengalihan	BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan, memindahkan atau mengalihkan dengan cara apapun sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban BCA dalam memberikan Fasilitas Kredit kepada Lembaga keuangan, bank atau kreditor lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan.

b. Akta Perjanjian Kredit No. 44 Tanggal 26 September 2013 antara Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Kantor Cabang Khusus Jakarta ("**BRI**") ("**Perjanjian Kredit BRI 1**").

No.	Ketentuan	Keterangan
1.	Objek Perjanjian dan Penggunaan Dana	Pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (" KPR ") kepada Perseroan untuk pembelian 3 (tiga) unit Apartemen The Windsor, berlokasi di Puri Indah, Kelurahan Kembang Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.
2.	Nilai Perjanjian	Fasilitas KPR yang diberikan kepada Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp 6.695.000.000 (enam miliar enam ratus sembilan puluh lima Juta Rupiah).
3.	Bunga dan Provisi atau	Perseroan wajib membayar bunga kredit sebesar 8,5% per tahun <i>fixed</i> 5 (lima) tahun

No.	Ketentuan	Keterangan
	Komisi	pertama dan untuk selanjutnya mengikuti suku bunga <i>counter rate</i> KPR BRI. Perseroan wajib membayar provisi 0,5% dari Fasilitas KPR atau sebesar Rp33.475.000 (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).
4.	Jatuh Tempo	Jatuh tempo pembayaran dimulai dari tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kredit BRI 1 (tanggal 26 September 2013) dan akan berakhir pada tanggal 26 September 2023.
5.	Ketentuan Pelunasan Lebih Awal	a. Pelunasan lebih awal hanya dapat dilakukan setelah kredit berjalan 6 (enam) bulan sejak realisasi; b. Pelunasan di awal (seluruh atau sebagian) pada masa <i>fixed interest rate</i> dikenakan <i>penalty</i> sebesar 5% dari dana yang disetorkan ditambah bunga berjalan; dan c. Pelunasan di awal (seluruh atau sebagian) setelah masa <i>fixed rate</i> dikenakan <i>penalty</i> sebesar 3% dari dana yang disetorkan ditambah bunga berjalan.
6.	Keterlambatan	Apabila terjadi tunggakan dan keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakan denda sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku.
7.	Jangka Waktu Kredit	KPR wajib dilunasi oleh Perseroan dalam jangka waktu 120 bulan atau 10 tahun dan harus dilunasi selambat-lambatnya 26 September 2023.
8.	Jaminan	Perseroan memberikan jaminan kepada BRI berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama sebesar Rp 8.368.750.000 (delapan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan 3 (tiga) Surat Pemesanan apartemen The Windsor pada tanggal 18 Maret 2013, Lantai 58 terdiri dari unit nomor 1583 seluas 83,57m ² , unit nomor 1585 seluas 102,43m ² dan unit nomor 1586 seluas 149m ² , serta satu dan lainnya berikut segala apa yang ditanam dan berdiri di atas tanah tersebut baik apa yang sekarang telah ada maupun yang akan ada didirikan yang menurut sifat, guna dan peruntukannya atau menurut penetapan undang-undang.
9.	Pembatasan / Ketentuan yang Dilarang	Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau dalam batas waktu penarikan Fasilitas Kredit dari KPR, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini : a. menggunakan fasilitas kredit yang diberikan di luar maksud dan tujuan pemberiannya termasuk untuk hal-hal yang bersifat spekulasi dan atau penanaman dana pada bank lain dan/atau pasar uang dan/atau lembaga keuangan lainnya; dan b. memindah tangankan, menyewakan, menjual agunan tanpa seijin tertulis dari BRI.
10.	Keadaan Cidera Janji	Tidak diatur secara khusus.
11.	Pengalihan	BRI diberikan kuasa oleh Perseroan untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan, membebani/memindahbukukan rekening tabungan, dan atau rekening lain Perseroan yang ada di BRI untuk pembayaran hutang pokok, bunga, kredit, bunga tunggakan, denda/penalty, premi asuransi, biaya-biaya notaris dan biaya yang timbul karena pelaksanaan Perjanjian Kredit BRI 1. Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau dalam batas waktu penarikan Fasilitas Kredit dari KPR, Perseroan tidak diperkenankan untuk memindah tangankan, menyewakan, menjual agunan tanpa seijin tertulis dari BRI.

- c. Akta Perjanjian Kredit No. 177 Tanggal 28 Maret 2014 antara Perseroan dan BRI berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit dari BRI No. B.55-KCK/SUBSKK/KBJ/03/2014 ("**Perjanjian Kredit BRI 2**").

No.	Ketentuan	Keterangan
1.	Objek Perjanjian dan Penggunaan Dana	Pemberian KPR kepada Perseroan untuk pembelian 2 (dua) unit Apartemen The Windsor, berlokasi di Puri Indah, Kelurahan Kembang Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.
2.	Nilai Perjanjian	Fasilitas KPR yang diberikan kepada Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp 3.193.665.254,- (tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).
3.	Bunga dan Provisi atau Komisi	Perseroan wajib membayar bunga kredit sebesar 9,5% per tahun <i>fixed 2</i> (dua) tahun pertama dan untuk selanjutnya mengikuti suku bunga <i>counter rate</i> KPR BRI. Perseroan wajib membayar provisi sebesar 1% dari Fasilitas KPR atau sebesar Rp31.936.653 (tiga

No.	Ketentuan	Keterangan
		puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga Rupiah).
4.	Jatuh Tempo	Jatuh tempo pembayaran dimulai dari tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kredit BRI 2 (tanggal 28 Maret 2014) yang akan berakhir pada tanggal 28 Maret 2024.
5.	Ketentuan Pelunasan Lebih Awal	a. Pelunasan lebih awal hanya dapat dilakukan setelah kredit berjalan 6 (enam) bulan sejak realisasi; dan b. Pelunasan awal (seluruh atau sebagian) pada masa <i>fixed interest rate</i> , dikenakan <i>penalty</i> sebesar 2% (dua) persen, dan pada masa suku bunga counter tidak dikenakan <i>penalty</i> .
6.	Keterlambatan	Apabila terjadi tunggakan dan keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakan denda sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku.
7.	Jangka Waktu Kredit	Kredit wajib dilunasi oleh Perseroan dalam jangka waktu 120 bulan atau 10 tahun dan harus dilunasi selambat-lambatnya 28 Maret 2024.
8.	Jaminan	Perseroan memberikan jaminan kepada BRI berupa sebagian dari sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 5031/Kembangan Selatan, yang terletak di Propinsi Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan, setempat dikenal sebagai Jalan Puri Indah Blok S, Apartemen The Windsor Lantai 57 yang terdiri dari Unit No. 1571, Type 2BR, Luas Semi Gross 111 m ² dan Unit Nomor 1572, Type 1BR, Luas Semi Gross 113 m ² , yang mana bidang tanah tersebut yang sedang proses pemecahan dan balik nama ke atas nama PT Victoria Care Indonesia dan akan dilakukan pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama untuk Unit nomor 1571 sebesar Rp 1.978.218.991,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu Rupiah) dan Unit Nomor 1572 sebesar Rp 2.013.862.576,- (dua miliar tiga belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah).
9.	Pembatasan / Ketentuan yang Dilarang	Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau berlangsungnya Perjanjian Kredit BRI 2 agunan/jaminan yang telah diserahkan tidak diperkenankan untuk disewakan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain serta perubahan bentuk peruntukannya tanpa sepengetahuan dari BRI.
10.	Keadaan Cidera Janji	Tidak diatur secara khusus.
11.	Pengalihan	Tidak diatur secara khusus.

2. Perjanjian Distributor

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian penunjukan distributor dengan 30 distributor di Indonesia (“**Distributor**”), untuk memasarkan produk Perseroan di wilayah Indonesia dengan ketentuan dalam perjanjian sebagai berikut:

No.	Ketentuan	Keterangan
1.	Objek Perjanjian / Maksud dan Tujuan	Perseroan menunjuk sebagai distributor untuk menjual dan mendistribusikan produk Perseroan.
2.	Status Keagenan atau Kedistributoran	Distribusi eksklusif, hanya sebatas apabila target penjualan dan/atau kewajiban dari Distributor terpenuhi.
3.	Nilai Perjanjian	Tidak diatur secara khusus, hanya berdasarkan target bulanan yang disetujui oleh kedua belah Pihak.
4.	Wilayah Pemasaran	Provinsi atau Kota di Indonesia.
5.	Hak dan Kewajiban	Perseroan Perseroan berkewajiban antara lain sebagai berikut: a. Perseroan menyediakan produk untuk kepentingan Distributor sesuai dengan pesanan dari Distributor kepada Perseroan; b. Perseroan akan melakukan promosi yang sesuai dengan memperhatikan saran dari Distributor dan dengan anggaran yang besarnya disesuaikan

No.	Ketentuan	Keterangan
		<p>dengan kebijakan umum Perseroan; dan</p> <p>c. Perseroan tidak menunjuk Distributor lain dalam wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah distribusi Distributor apabila target penjualan dan/atau kewajiban Distributor terpenuhi.</p> <p>Distributor Distributor berkewajiban antara lain sebagai berikut :</p> <p>a. Mencapai target penjualan produk Perseroan (yang akan disampaikan secara terpisah namun masih menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sesuai dengan yang telah ditentukan atas kesepakatan Perseroan dan Distributor);</p> <p>b. Bekerja sama dengan Perseroan dalam membantu memajukan usaha-usaha Distributor; dan</p> <p>c. Mengatur pesanan produk sesuai kebutuhan sehingga dapat menghindari terjadinya pengembalian produk layak jual.</p>
6.	Ketentuan Harga	Tidak diatur secara khusus.
7.	Keterlambatan	Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh Distributor kepada Perseroan sehubungan dengan hasil penjualan produk Perseroan, maka Perseroan berhak memberitahukan keterlambatan pembayaran tersebut kepada bank penjamin dan berhak memohon kepada bank penjamin untuk melakukan pemblokiran atas bank garansi atas nama Distributor yang telah diberikan Distributor.
8.	Jangka Waktu	seluruh perjanjian distribusi tersebut masih berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan.
9.	Pembatasan-pembatasan / Ketentuan yang Dilarang	<p>Distributor tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dalam hal :</p> <p>a. Mengalihkan hak dan kewajiban atas Perjanjian Distributor Distributor ini kepada pihak ketiga manapun;</p> <p>b. Menggunakan merek dari produk Perseroan untuk tujuan di luar Perjanjian Distributor Distributor;</p> <p>c. Menjual produk dari Perseroan di luar wilayah distribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung;</p> <p>Pelanggaran atas ketentuan di atas mengakibatkan Perseroan secara sepihak dapat menghentikan distribusi produk kepada Distributor.</p>
10.	Keadaan Cidera Janji	Tidak diatur secara khusus.
11.	Pengalihan	Perjanjian Distribusi Distributor tidak memberikan hak mewakili / substitusi dan/atau bertindak selaku kuasa untuk melimpahkan penunjukan tersebut kepada pihak lain dan/atau ahli warisnya.

3. Perjanjian Terkait Ekspor dan Distribusi Internasional

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian penunjukan distributor dengan 4 distributor/pembeli di luar wilayah Indonesia ("**Distributor**"), untuk memasarkan produk Perseroan di negara Jepang, Brunei Darussalam, Timor Timur, dan China, yaitu sebagai berikut: PT Surya Indotama Ekspres, Shafima Trading Company, One-Lin Brothers, Unipessoal, LDA, dan Marchberries International Pte, Ltd.

4. Perjanjian dengan Retailer dan/atau Konsinyasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani 13 perjanjian dengan pengecer/konsinyasi untuk memasarkan produk Perseroan ke konsumen akhir, dengan rincian masing-masing pihak sebagai berikut: PT Midi Utama Indonesia, PT Cimory Dairy Shop, PT Indomarco Prismatama, PT Sumber Alfaria Trijaya; PT Ritel Bersama Nasional; PT Sarinah (Persero); PT Social Bella Indonesia; Yogya/Griya; PT Alun Alun Indonesia Kreasi; PT Lion Super Indo; PT Supra Boga Lestari; dan PT Hero Supermarket, Tbk.

5. Perjanjian Kerja Sama Produksi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan 4 (empat) produsen untuk kerjasama produksi sebagian produk yang dijual oleh Perseroan.

6. Perjanjian E-Commerce

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup / Ketentuan Penting	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Beli Putus tanggal 7 Januari 2020.	PT Shopee International Indonesia ("Shopee") dan Perseroan.	Shopee membeli beberapa produk dari Perseroan, yang mana produk tersebut akan dijual kembali oleh Shopee kepada pembeli melalui <i>platform</i> .	7 Januari 2020 – 7 Januari 2021
2.	Perjanjian Supplier - Konsinyasi tanggal 23 Desember 2019 sebagaimana terakhir diubah oleh Addendum 1 Perjanjian Pemasok tanggal 18 Februari 2020	PT Social Bella Indonesia ("Sociolla")	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan Sociolla untuk menampilkan, mempromosikan dan menjual produk Perseroan melalui <i>website</i> Sociolla atau jalur distribusi <i>online</i> lainnya yang dimiliki oleh sociolla.	23 Desember 2019 – 23 Desember 2020. Perseroan akan melakukan perpanjangan atas jangka waktu perjanjian.

7. Perjanjian Teknologi Pembayaran

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup / Ketentuan Penting	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Go-Pay Nomor DAB: 275/DAB/GO-PAY/Offline/JKT/BD/PKS /VI/2019 tanggal 28 Juni 2019	PT Dompot Anak Bangsa ("DAB") dan Perseroan.	Para Pihak melaksanakan kerja sama dalam hal pemanfaatan layanan "Go-Pay" milik DAB di Gerai milik Perseroan.	7 Januari 2020 – 7 Januari 2021

8. Perjanjian Sewa Menyewa

Sampai dengan tanggal prospektus ini, Perseroan telah menandatangani 47 perjanjian sewa menyewa dengan berbagai pihak untuk keperluan penyewaan gedung, toko, gudang, dan/atau gerai. Adapun ringkasan dari perjanjian-perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup / Ketentuan Penting	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 22 tertanggal 22 April 2019	Wahyu Indri Pratiwi	Perseroan menyewa sebuah bangunan rumah tempat tinggal di atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, seluas 316m ² , berdasarkan SHM No. 1488, tercatat atas nama Wahyu Indri Pratiwi.	1 Mei 2019 - 1 Mei 2021.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 001/SEWA-VCI/BDG-TSK/I/2019 tertanggal 1 Januari 2019	Mohammad Mahrus	Perseroan menyewa sebidang tanah dan bangunan termasuk di dalamnya fasilitas listrik dan air, yang terletak di Jl. Rajawali, Kelurahan Setiaratu, seluas 486m ² , berdasarkan SHM 01071, tercatat atas nama Mira Irawati, yang dimana transaksi telah mendapatkan persetujuan tertulis tanggal 1 Januari 2019 dari Mira Irawati selaku istri dari Mohammad Mahrus .	1 Januari 2019 - 31 Desember 2020. Perseroan tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 001/SEWA-VCI/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018	Mirny Merrifiandy	Perseroan menyewa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Villa Bogor FF 2-2, Ciparigi Bogor Utara.	1 Januari 2019 - 31 Desember 2020. Perseroan tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian.

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup / Ketentuan Penting	Jangka Waktu
4.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 08 tertanggal 29 Agustus 2017	Drs. Yoga Perdana	Perseroan menyewa sebidang tanah dan bangunan dengan luas 1.400 m ² dengan fasilitas listrik, air, 2 (dua) saluran telepon, berdasarkan SHM 6842/Desa Padasambian, terletak di Jalan Kebo Iwa Nomor 11, Denpasar Bali.	1 September 2017 - 15 Desember 2020. Perseroan sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian.
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 666/R&H/DPM/PJ/CL/VII/19 tertanggal 16 Agustus 2019	PT Wijaya Pratama Raya	Perseroan menyewa Unit toko dengan nomor unit IU 07 di lantai 1 (satu) dengan luas sebesar 11.54m ² nett area terletak di DP Mall Semarang.	3 Oktober 2019 - 2 Oktober 2020 Perseroan sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian.
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 52 tertanggal 25 Oktober 2019	PT Seminyak Square	Perseroan menyewa 1 (satu) Unit Toko yaitu toko nomor A7 seluas 60m ² , berikut turutannya dan fasilitasnya yang terletak di Bangunan Semintang Square Toko Unit A-07, Jalan Kayu Jati, Lingkungan Basang Kasa, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.	21 Januari 2020 - 21 Januari 2025.
7.	Surat Persetujuan Sewa Menyewa Mal Ciputra Semarang Nomor CS-FL/FF-H/Herborist/19-MKT tertanggal 24 Oktober 2019	PT Ciputra Semarang	Perseroan menyewa unit toko yang berada di lantai 1 (satu) Unit H dengan luas 2M x 2M = 4m ² terletak di Mal Ciputra, Semarang.	20 Januari 2020 - 19 Januari 2021.
8.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 5251/2019 tertanggal 22 Oktober 2019	Tjokorda Bagus Ari Wiryanan	Perseroan menyewa sebuah bangunan toko dengan bidang tanah seluas 556m ² di Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, atas nama Cok Raka.	1 Desember 2019 - 31 November 2022.
9.	Akta Perjanjian Pengalihan Hak Sewa Nomor 31 tertanggal 21 Oktober 2019	Anak Agung Ketut Agus Suardika	Anak Agung Ketut Agus Suardika telah menyewa dari Tuan I Ketut Mustara dan Tuan I Wayan Budiana, selaku ahli waris dari I Wayan Cekung 3 (tiga) Unit rumah toko, berikut semua turutan, bagian dan halamannya, seluas 405 m ² dari sebidang tanah hak milik 1472/Kelurahan Seminyak, yang menurut Surat Ukur tertanggal 15 Mei 2012 Nomor 01354/SEMINYAK/2012, seluas 540m ² , terletak di Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, terdaftar atas nama I Wayan Cakug,	5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan <i>grace period</i> selama 3 (tiga) bulan sehingga berakhir pada tanggal 21 Januari 2025.
10.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Island Mal Matahari Puri-Daan Mogot Nomor MM/184/VII/2020 tertanggal 20 Agustus 2020	PT Fajar Surya Perkasa	Perseroan menyewa unit toko di lantai 1 (satu) dengan ukuran 2x2 7m ² , terletak di Mal Matahari Puri-Daan Mogot.	1 Februari 2020 - 28 Februari 2022.
11.	Perjanjian Sewa Menyewa Island Plaza Ambarrukmo Nomor 0064/PSM-IS/MKT/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 (diperpanjang melalui Konfirmasi Persetujuan Perpanjangan Sewa Counter Nomor 0549/EXT/MKT/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020).	PT Putera Mataram Mitra Sejahtera	Perseroan menyewa unit sewa dengan No. Unit R2 berada di lantai Ground Floor dengan luas 6m ² yang terletak di Plaza Ambarrukmo.	21 November 2020 - 20 Februari 2021.
12.	Surat Penawaran Sewa Nomor	PT Lestari Mahadibya	Perseroan menyewa ruang sewa di Unit No. 2F - IC 06B yang berada di Lantai 2	12 bulan.

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup / Ketentuan Penting	Jangka Waktu
	006/LD/SMS/ISLAND/HL//20 - Rev 1 tertanggal 11 Februari 2020		Summarecon Mall Serpong ("SMS") dengan estimasi luas sebesar 6.04m ² yang terletak di SMS.	
13.	Perjanjian Sewa Menyewa Counter Nomor 030/CBBI - Bayfront Mall/Counter/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019	PT Citra Buana Batam Industri	Perseroan menyewa 1 (satu) Unit Counter yang berlokasi di Lantai 1 (satu) nomor Unit 12 (#01-12) di Bayfront Mall seluas 9m ²	8 Januari 2020 - 7 Januari 2021.
14.	Proposal Sewa Menyewa - Manhattan Timu Square Medan Ref. 029. MoU-MTS/VCI/XII/2019 tertanggal 6 Desember 2019	Manhattan Time Square	Perseroan menyewa Unit Toko di Manhattan Time Square.	1 Februari 2020 - 31 Januari 2021.
15.	Konfirmasi Penggunaan Area Promosi (Kiosk) Nomor 01/CL/OTL-P/TH/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019.	PT Pakuwon Jati	Penyewa menyewa kiosk yang berada di Tunjangan Plaza III Lantai 4 (empat) Depan Jayanata, di Unit ruangan terbuka PC-K-4-09 dengan luas 1,5 x 2,4 M ¹ .	23 Desember 2019 - 27 Desember 2020. Perseroan tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian.
16.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 17 tertanggal 9 Oktober 2019.	I Ketut Badra	Perseroan menyewa bangunan ruko berikut segala turutannya, berdiri di atas dua bidang tanah yaitu tanah dengan SHM Nomot 1070/Desa Ubud, seluas 13m ² dan sebidang tanah dengan SHM Nomor 672/Desa Ubud, seluas 21 m ² yang terletak di Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali.	18 November 2019 - 18 November 2024.
17.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 0507/PAL/PA-PSM/VII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019.	PT Plaza Adika Lestari	Perseroan menyewa ruang sewa yang terletak di Plaza Atrium Lantai Lower Ground Unit PLA-CTR-LG-000-0010-00 dengan luas 6.40m ² .	9 September 2019 - 9 September 2021.
18.	Surat Persetujuan Sewa Nomor Ref. PMF/L/0110/08-19/Herborist/LetterOfIntent tertanggal 27 Agustus 2019.	Plaza Medan Fair	Perseroan menyewa ruang sewa yang berada di Lantai 3 (tiga) # Island IU3 Plaza Medan Fair, dengan luas ruang sewa 32m ² .	11 November 2019 sampai dengan waktu yang ditentukan.
19.	Akta Perjanjian Pengalihan Hak Sewa Nomor 56 tertanggal 28 November 2018.	Huang Szu Feng	Huang Szu Feng memindahkan dan menyerahkan hak sewa aras bangunan toko berukuran 4.275 M x 6.40 M, yang terletak di Puri Saren Kangen Ubud, Lingkungan Ubud Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali kepada Perseroan.	1 Desember 2018 - 2 Januari 2023.
20.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha Tangcity Mall Nomor 060/PAKAR/PSM/HERBORIST/VCI/XII/18 tertanggal 18 Desember 2018.	PT Pancakarya Griyatama	Perseroan menyewa 1 (satu) unit Casual Lease di Tangcity Mall, yang terletak di Lantai 1 (satu) A0001-CL, dengan luas ±4.20m ² .	23 Februari 2019 - 22 Februari 2021.
21.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 54 tertanggal 27 Maret 2019.	Sowfian Chendana	Perseroan menyewa sebuah bangunan rumah dan toko (Ruko) yang dilengkapi dengan aliran listrik sebesar 1.300 Warr, air ledeng, telepon dan gas alam yang terletak di Jalan Kesambi Raya No. 89, Cirebon, seluas 455m ² .	1 April 2019 - 1 April 2021.
22.	Perjanjian Sewa Menyewa	Zaenal Arifin	Perseroan menyewa sebidang tanah di	2 November 2019 - 2

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup / Ketentuan Penting	Jangka Waktu
	Nomor 13 tertanggal 26 November 2019.		atasnya terdapat bangunan yang terletak di Jawa Timur, Kota Kediri, Kecamatan Pesantren, Kelurahan Tosaren, SHM Nomor 2088 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Maret 2012 No. 11/Tosaren/2012, seluas 354m ² .	November 2021.
23.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 001/SEWA-VCI/BDG-BDG2/I/2020 tertanggal 1 Februari 2020.	Mimin Yuniar	Perseroan menyewa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sayang Blok Sawahlenang Kavling No. B/5, berdasarkan SHM No. 02565, sesuai dengan Gambar Situasi tanggal 27 Mei 1996, seluas 153m ² terdaftar atas nama Mimin Yuniar. Berikut bangunan yang berdiri di atasnya, infrastruktur dan bagian-bagian yang bersangkutan.	1 Februari 2020 - 31 Januari 2021.
24.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan tertanggal 1 Juli 2019.	Imam Prasetyo	Perseroan menyewa tanah dan bangunan yang terletak dan beralamatkan di Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan SHM Nomor 913, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 12 Januari 2006, No. 00531/2006 yang seluas 948m ² .	1 Juli 2019 - 31 Juli 2021.
25.	Perjanjian Sewa Banguna tertanggal 1 Agustus 2020.	Agustinus Tri Suryanto	Perseroan menyewa tanah dan bangunan yang terletak dan beralamatkan di Jalan Pekarangan, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah berdasarkan SHM Nomor 04044 tertanggal 28 April 2009 yang seluas 209m ² ,	1 Agustus 2020 - 31 Juli 2022.
26.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan tertanggal 23 Desember 2019.	Agustina Ayu Widayanti	Perseroan menyewa tanah dan bangunan yang terletak dan beralamatkan di Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan SHM No. 2169, seluas 467m ² .	1 Januari 2020 - 31 Desember 2021.
27.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Nomor 010/VCI/HRGA-PKS/BO-SMG/V/2020 tertanggal 20 Mei 2020.	Syakir Alkhusna Arista	Perseroan menyewa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Jawa Tengah dan beralamatkan di Jalan Ki Surontoko Barat RT 001 RW 11, Pekalongan Timur, Jawa Tengah sesuai dengan SHM No. 00658 dengan luas tanah 455m ² dan luas tanah 585m ² .	1 Juni 2020 - 31 Mei 2022.
28.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Rumah tertanggal 1 April 2020.	Mahfud	Perseroan menyewa tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Karulisan RT. 01/RW 07 Kel Kasemen Kec. Serang - Banten, terbuat dari atap genteng, dinding, tembok, lantai keramik, 2 lantai, berikut turutannya. Bangunan mana didirikan di atas tanah milik Mahfud.	1 April 2020 - 31 Maret 2021.
29.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Rumah tertanggal 29 Juli 2020.	Dwi Wicaksono	Perseroan menyewa bangunan depo yang terletak di Jalan Bukit Tinggi M 458 RT 006, RW 10, Cinere, Depok, terbuat dari genteng, tembok, lantai keramik, 1 lantai, berikut turut-turutannya. Bangunan didirikan di atas tanah milik Dwi Wicaksono.	29 Juli 2020 - 29 Juli 2021.

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup / Ketentuan Penting	Jangka Waktu
30.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tertanggal 3 Desember 2019.	Seojanti Soebadi	Perseroan menyewa bangunan gudang seluas 1.500m ² yang berdiri di atas 2 bidang tanah masing-masing seluas 1.244 m ² dan seluas 616m ² beserta turut-turutannya, terletak di Jawa Tengah, Semarang, Ngaliyan, Kelurahan Banbankerep, dikenal sebagai Kawasan Industri Candi Blok 8.G/14.	1 Januari 2020 - 1 Januari 2021.
31.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 003/SEWA-VCI/BDG-SMI/XI/2020 tertanggal 1 November 2020.	Hesri Mintawati	Perseroan menyewa tanah dan bangunan yang terletak di di Perum. Tanjung Sari Jalan Khatulistiwa Blok C No.08, Kecamatan Gubung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 381 dan 514, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 14-09-1998 (14 September 1998), No. 249/KarangTengah/1998, yang seluas 266 M ² ,	1 November 2020 - 31 Oktober 2022..
32.	Perjanjian Sewa No. 001/SEWA-VCI/BDG//2018 tertanggal 22 Januari 2019.	Dra. Parsia Sandy	Perseroan menyewa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ciseureuh atau dikenal dengan Komplek Sadang Sari Indah Blok E No. 8 Sadang Sari, Kel. Cisereuh Purwakarta, seluas 240m ² .	22 Januari 2019 - 21 Januari 2021.
33.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/SEWA-VCI/VII/2019 bulan Juli 2019.	Yuliana	Perseroan menyewa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cisadane RT 003, RW 15 Desa Adiarsa Barat-Karawang Barat.	1 September 2019 - 3 Agustus 2021.
34.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan tanggal 1 April 2020	Abdur Rohman dan Perseroan	Perseroan menyewa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Honggosoco RT. 003 RW. 002, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus, Kecamatan Jekulo, Desa Honggosoco. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2466 dan sesuai dengan gambar situasi atau Surat Ukur No. 6664/honggosoco/2005 tertanggal 27 Juni 2005 seluas 196m ² terdaftar atas nama Abdur Rohman bin Nurhadi.	1 April 2020 - 31 Maret 2022.
35.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 093/PJCR-P/PSM/16/09/19 tertanggal 16 September 2019.	Jap Tjuk Jin	Perseroan menyewa 1 (satu) Unit ruko yang terletak di Mutiara Taman Palembang Blok B7 No. 50, Jakarta Barat, 2,5 Lantai, bukti kepemilikan SHGB No. 6513.	17 September 2019 - 17 September 2021
36.	Perjanjian Sewa Menyewa No. S591/9/2020 tanggal 21 September 2020.	SSIM	Perseroan menyewa tempat usaha SSIM untuk memperjuangkan produk Perseroan yang berada di cabang SSIM sebagai berikut: 1. DHI; 2. Fatmawati; 3. BTC; 4. BCP; dan 5. Bintaro.	19 Oktober 2020 – 10 Januari 2021.
37.	Perjanjian Sewa Menyewa No. S581/9/2020 tanggal 17 September 2020.	PT Sinar Sahabat Inti Makmur ("SSIM")	Perseroan menyewa tempat usaha SSIM untuk memperjuangkan produk Perseroan yang berada di cabang SSIM sebagai berikut: 1. Kalideres; 2. BCP; 3. Bintarto; dan 4. Ciledug.	21 September 2020 – 13 Desember 2020. Perseroan sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian untuk cabang Kalideres dan Ciledug. Cabang BCP dan Bintaro telah diperpanjang sampai dengan 10 Januari

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup / Ketentuan Penting	Jangka Waktu
				2021.
38.	Perjanjian Kerja Sama Sewa End Gondola Nomor 024-7/22/10/2020/Cj-01 tanggal 22 Oktober 2020.	PT Harja Gunatama Lestari.	Perseroan menyewa tempat <i>display</i> di toko HGL yang beralamat di Jl. Cijerah No. 90 Bandung.	1 Oktober 2020 – 31 Desember 2020. Perseroan akan memperpanjang jangka waktu perjanjian.
39.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 190/TT/P/TB/7/20 tertanggal 30 Juni 2020	PT Tip Top (“TipTop”)	Perseroan menyewa bagian dari tempat usaha Tiptop untuk menjual produk Perseroan, yang berada di: <ul style="list-style-type: none"> a. Jl. Balai Pusataka Timur 35, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur; b. Jl. R.E Martadinata RT. 004 RW 005, Cipayung, Ciputat, Tangerang Banten; c. Jl. Raya Serang Km. 4 Perumahan Taman Cibodas, Cibodas Jatiuwung, Tangerang; d. Jl. Pahlawan Revolusi No. 25G, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur; e. Jl. Tole Iskandar RT/RW. 006/001, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok; f. Jl. Jatirahayu No. 30 RT/RW. 007/003, Jatirahayu Pondok Melati, Kotamadya Bekasi; g. Jl. Mustika Jaya - Lambangsari No. 99 Tambunan Selatan, Bekasi. <p>(“Tempat Usaha TipTop”)</p>	1 Juli 2020 - 31 Desember 2020. Perseroan sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian.
40.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 202/TT/P/PG/7/20 tertanggal 30 Juni 2020	TipTop	Perseroan menyewa bagian dari Tempat Usaha TipTop untuk menjual produk Perseroan.	1 Juli 2020 - 31 Desember 2020. Perseroan sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian.
41.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 228/TT/P/CP/7/20 tertanggal 30 Juni 2020	TipTop	Perseroan menyewa bagian dari Tempat Usaha TipTop untuk menjual produk Perseroan.	1 Juli 2020 - 31 Desember 2020. Perseroan sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian.
42.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 229/TT/P/DP/7/20 tertanggal 30 Juni 2020	TipTop	Perseroan menyewa bagian dari Tempat Usaha TipTop untuk menjual produk Perseroan.	1 Juli 2020 - 31 Desember 2020. Perseroan sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian.
43.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 238/TT/P/DP/7/20 tertanggal 30 Juni 2020	TipTop	Perseroan menyewa bagian dari Tempat Usaha TipTop untuk menjual produk Perseroan.	1 Juli 2020 - 31 Desember 2020. Perseroan sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian.
44.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 240/TT/P/CP/7/20 tertanggal 30 Juni 2020	TipTop	Perseroan menyewa bagian dari Tempat Usaha TipTop untuk menjual produk Perseroan.	1 Juli 2020 - 31 Desember 2020. Perseroan sedang dalam proses

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup / Ketentuan Penting	Jangka Waktu
				perpanjangan jangka waktu perjanjian.
45.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 166/TT/P/CM/7/20 tertanggal 30 Juni 2020 dengan Tip Top	TipTop	Perseroan menyewa bagian dari Tempat Usaha TipTop untuk menjualkan produk Perseroan.	1 Juli 2020 - 31 Desember 2020. Perseroan sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian.
46.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 275/TT/P/R/7/20 tertanggal 30 Juni 2020 dengan Tip Top	TipTop	Perseroan menyewa bagian dari Tempat Usaha TipTop untuk menjualkan produk Perseroan.	1 Juli 2020 - 31 Desember 2020. Perseroan sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian.
47.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 299/TT/P/DP/7/20 tertanggal 30 Juni 2020 dengan Tip Top	TipTop	Perseroan menyewa bagian dari Tempat Usaha TipTop untuk menjualkan produk Perseroan.	1 Juli 2020 - 31 Desember 2020. Perseroan sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian.

F. ASET TETAP

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki dan menguasai aset tetap, berupa tanah dan bangunan di atas tanah tersebut. Adapun rincian bukti penguasaan tanah dan bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Daftar Aset Tetap yang dimiliki Perseroan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penetapan Pemberian Hak/ Tanggal Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Keterangan
1.	SHGB No. 9223/ Pondok Kelapa	19 November 2018	Gang Kumpi RT.002 RW.03, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	442	30 tahun sejak Tanggal Penetapan Pemberian Hak	Diperoleh melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 52/2018 tertanggal 10 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Nia Kurniasih S.H. Digunakan Perseroan untuk penyimpanan sementara (Depo).
2.	SHGB No. 8643/ Semanan	13 Desember 2017	Jalan Semanan Megah 2, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	22	13 Desember 2037	Diperoleh melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 23/2017 tertanggal 15 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Rianto, S.H. Terdapat pembebanan Hak Tanggungan peringkat pertama untuk BCA berdasarkan Akta Hak Tanggungan No. 279/2018 tanggal 11 Juli 2018. Digunakan Perseroan untuk kantor cabang.
3.	SHGB No. 8645/ Semanan	13 Desember 2017	Jalan Semanan Megah 2, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI	70	13 Desember 2037	Diperoleh melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 24/2017 tertanggal 15 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Rianto, S.H.

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penetapan Pemberian Hak/ Tanggal Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Keterangan
			Jakarta			<p>Terdapat pembebanan Hak Tanggungan peringkat pertama untuk BCA berdasarkan Hak Tanggungan No. 281/2018 tanggal 11 Juli 2018.</p> <p>Digunakan Perseroan untuk kantor cabang.</p>
4.	SHGB No. 8646/ Semanan	13 Desember 2017	Jalan Semanan Megah 2, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	2.186	13 Desember 2037	<p>Diperoleh melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 25/2017 tertanggal 15 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Rianto, S.H.</p> <p>Terdapat pembebanan Hak Tanggungan peringkat pertama untuk BCA berdasarkan Hak Tanggungan No. 282 2018 tanggal 11 Juli 2018.</p> <p>Digunakan Perseroan untuk kantor cabang.</p>
5.	SHGB No. 363 Kelurahan Belakang Pondok	16 November 2018	Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat	93	15 November 2038	<p>Diperoleh melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 215/2018 tertanggal 18 Desember 2018 dibuat di hadapan Anna Ninif Zuryani, SH.</p> <p>Belum digunakan Perseroan.</p>
6.	SHGB No. 8644/ Semanan	13 Desember 2017	Jalan Semanan Megah Raya, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	435	13 Desember 2037	<p>Diperoleh melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 27/2017 tertanggal 15 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Rianto, S.H.</p> <p>Terdapat pembebanan Hak Tanggungan peringkat pertama untuk BCA berdasarkan Hak Tanggungan No. 280/2018 tanggal 11 Juli 2018.</p> <p>Digunakan Perseroan untuk kantor cabang.</p>
7.	SHGB No. 8647/Semanan	13 Desember 2017	Jalan Semanan Megah Raya, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	21	13 Desember 2037	<p>Diperoleh melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 26/2017 tertanggal 15 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Rianto, S.H.</p> <p>Terdapat pembebanan Hak Tanggungan peringkat pertama untuk BCA berdasarkan Hak Tanggungan No. 283/2018 tanggal 11 Juli 2018.</p> <p>Digunakan Perseroan untuk kantor cabang.</p>
8.	SHGB No. 9222/ Pondok Kelapa	19 November 2018	Jalan Swakarsa III No.13, RT 0011 RW.03, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi	271	30 tahun sejak Tanggal Penetapan Pemberian Hak	<p>Diperoleh melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/2018 tertanggal 10 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Nia Kurniasih S.H.</p> <p>Digunakan Perseroan untuk</p>

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penetapan Pemberian Hak/ Tanggal Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Keterangan
			DKI Jakarta			penyimpanan sementara (Depo)
9.	SHGB No. 6466	26 April 2004	Jalan Lingkar Luar Kamal Raya Perum Perumnas Blok A/2 No.17, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	68	25 April 2024	Diperoleh melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 590/2018 tertanggal 10 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Nia Kurniasih S.H. SHGB berada di atas HPL No. 1 Kelurahan Cengkareng Timur tanggal 13 Desember 2018. Digunakan Perseroan untuk tempat pelatihan pegawai sebagai pembekalan pegawai dalam penjualan produk.
10.	SHGB No. 00069/ Margasuka	17 Oktober 2018	Kelurahan Margasuka, RT 02. RW.07 Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung Wilayah Tegallega Provinsi Jawa Barat	1.090	16 Oktober 2048	Diperoleh melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 31/2018 tertanggal 19 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Wawan Irawan S.H., M.Kn. Digunakan Perseroan untuk kantor cabang.
11.	SHGB No. 6467	26 April 2004	Jalan Lingkar Luar Kamal Raya Perum Perumnas Blok A/2 No.18, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	68	25 April 2024	Diperoleh melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 591/2018 tertanggal 10 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Makmur Tridharma, S.H. Digunakan Perseroan untuk tempat pelatihan pegawai sebagai pembekalan pegawai dalam penjualan produk.
12.	SHGB No. 03086	18 September 2006	Jl. Candi Blok 5A, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kotamadya Semarang Provinsi Jawa Tengah	12.500	14 Juli 2028	Diperoleh melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 619/2017 tertanggal 7 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Maria Dwi Hartati, S.H., M.Kn. Terdapat pembebanan Hak Tanggungan peringkat pertama untuk BCA berdasarkan Hak Tanggungan No. 404/2018 tanggal 4 Juni 2018. Digunakan Perseroan untuk kantor cabang.
13.	SHGB No. 3177	28 September 2009	Kawasan Industri Candi No.5A, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kotamadya Semarang Provinsi Jawa Tengah	12.688	4 Agustus 2029	Diperoleh melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 618/2017 tertanggal 7 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Maria Dwi Hartati, S.H., M.Kn. Terdapat pembebanan Hak Tanggungan peringkat pertama untuk BCA berdasarkan Hak Tanggungan No. 405/2018 tanggal 4 Juni 2018.

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penetapan Pemberian Hak/ Tanggal Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Keterangan
						Digunakan Perseroan untuk kantor cabang.

b. Daftar Aset Tetap yang dikuasai Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

No.	Perjanjian	Lokasi	Luas (m ²)	Keterangan
1.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower Nomor SPP/OFF-131/1001/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit 1001 di Puri Indah Financial Tower.	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±191,29	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan PT Antilope Madju Puri Indah selaku pengembang ("AMPI"), No 4161/AMPI-RE/HK/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 ("Surat Keterangan AMPI 4161"), menyatakan bahwa pengurusan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun ("SHMSRS") sedang dalam proses permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijamin kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>
2.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower Nomor SPP/OFF-132/1002/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit 1002 di Puri Indah Financial Tower.	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±129,66	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4161, menyatakan bahwa SHMSRS sedang dalam proses permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijamin kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>
3.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower Nomor SPP/OFF-133/1003/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit 1003 di Puri Indah Financial Tower.	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±222,13	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4161, menyatakan bahwa SHMSRS sedang dalam proses permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijamin kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>

No.	Perjanjian	Lokasi	Luas (m ²)	Keterangan
4.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower Nomor SPP/OFF-134/1005/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit 1005 di Puri Indah Financial Tower.	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±125,63	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4161, menyatakan bahwa SHMSRS sedang dalam proses permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijamin kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>
5.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower Nomor SPP/OFF-135/1006/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit 1006 di Puri Indah Financial Tower.	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±125,63	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4161, menyatakan bahwa SHMSRS sedang dalam proses permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijamin kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>
6.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower Nomor SPP/OFF-136/1007/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit 1007 di Puri Indah Financial Tower.	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±161,53	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4161, menyatakan bahwa SHMSRS sedang dalam proses permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijamin kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>
7.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower Nomor SPP/OFF-137/1008/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit 1008 di Puri Indah Financial Tower.	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±125,63	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4161, menyatakan bahwa SHMSRS sedang dalam proses permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijamin kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>
8.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta	±225,45	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4161,</p>

No.	Perjanjian	Lokasi	Luas (m ²)	Keterangan
	Nomor SPP/OFF-138/1009/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit 1009 di Puri Indah Financial Tower.	Barat, Provinsi DKI Jakarta		<p>menyatakan bahwa SHMSRS sedang dalam proses permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijaminan kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>
9.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower Nomor SPP/OFF-139/1010/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit 1010 di Puri Indah Financial Tower.	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±119,64	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4161, menyatakan bahwa SHMSRS sedang dalam proses permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijaminan kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>
10.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower Nomor SPP/OFF-140/1011/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit 1011 di Puri Indah Financial Tower.	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±112,05	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4161, menyatakan bahwa SHMSRS sedang dalam proses permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijaminan kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>
11.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower Nomor SPP/OFF-141/1012/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit 1012 di Puri Indah Financial Tower.	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±34,96	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4161, menyatakan bahwa SHMSRS sedang dalam proses permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijaminan kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>
12.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower Nomor SPP/OFF-142/1101/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±191,29	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4161, menyatakan bahwa SHMSRS sedang dalam proses</p>

No.	Perjanjian	Lokasi	Luas (m ²)	Keterangan
	1101 di Puri Indah Financial Tower.			<p>permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijaminan kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>
13.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower Nomor SPP/OFF-143/1102/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit 1102 di Puri Indah Financial Tower.	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±129,66	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4161, menyatakan bahwa SHMSRS sedang dalam proses permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijaminan kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>
14.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower Nomor SPP/OFF-144/1103/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit 1103 di Puri Indah Financial Tower.	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±222,13	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4161, menyatakan bahwa SHMSRS sedang dalam proses permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijaminan kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>
15.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower Nomor SPP/OFF-146/1106/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit 1106 di Puri Indah Financial Tower.	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±125,63	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4161, menyatakan bahwa SHMSRS sedang dalam proses permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijaminan kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>
16.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower Nomor SPP/OFF-147/1107/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit 1107 di Puri Indah Financial Tower.	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±161,53	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4161, menyatakan bahwa SHMSRS sedang dalam proses permohonan penerbitan akta</p>

No.	Perjanjian	Lokasi	Luas (m ²)	Keterangan
				<p>pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijamin kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>
17.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower Nomor SPP/OFF-148/1108/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit 1108 di Puri Indah Financial Tower.	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±125,63	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4161, menyatakan bahwa SHMSRS sedang dalam proses permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijamin kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>
18.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower Nomor SPP/OFF-149/1109/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit 1109 di Puri Indah Financial Tower.	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±225,45	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4161, menyatakan bahwa SHMSRS sedang dalam proses permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijamin kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>
19.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower Nomor SPP/OFF-150/1110/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit 1110 di Puri Indah Financial Tower.	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±119,64	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4161, menyatakan bahwa SHMSRS sedang dalam proses permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijamin kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>
20.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower Nomor SPP/OFF-151/1111/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit 1111 di Puri Indah Financial Tower.	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±112,05	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4161, menyatakan bahwa SHMSRS sedang dalam proses permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan</p>

No.	Perjanjian	Lokasi	Luas (m ²)	Keterangan
				<p>estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijaminan kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>
21.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor di Puri Indah Financial Tower Nomor SPP/OFF-145/1105/IV/2019 tanggal 18 April 2019, pembelian unit 1105 di Puri Indah Financial Tower.	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±125,63	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4161, menyatakan bahwa SHMSRS sedang dalam proses permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.</p> <p>b. Unit ini dijaminan kepada BCA untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</p>
22.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen <i>The Windsor</i> Nomor SPP/WIN-197/1583/IX/2013 tanggal 26 September 2013, pembelian unit nomor 1583 di apartemen <i>the Windsor</i> .	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±83,57	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan dari AMPI No. 4162/AMPI-RE/HK/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 ("Surat Keterangan AMPI 4162"), menyatakan bahwa pengurusan SHMSRS atas nama AMPI telah selesai dan akan dilakukan proses akta jual beli.</p> <p>b. Unit ini dijaminan kepada BRI untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BRI 1.</p>
23.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen <i>The Windsor</i> Nomor SPP/WIN-198/1585/IX/2013 tanggal 26 September 2013, pembelian unit nomor 1585 di apartemen <i>the Windsor</i>	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±102,43	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4162, menyatakan bahwa pengurusan SHMSRS atas nama AMPI telah selesai dan akan dilakukan proses akta jual beli.</p> <p>b. Unit ini dijaminan kepada BRI untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BRI 1.</p>
24.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen <i>The Windsor</i> Nomor SPP/WIN-199/1586/IX/2013 tanggal 26 September 2013, pembelian unit nomor 1586 di apartemen <i>the Windsor</i>	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±149	<p>a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4162, menyatakan bahwa pengurusan SHMSRS atas nama AMPI telah selesai akan dilakukan proses akta jual beli.</p> <p>b. Unit ini dijaminan kepada BRI untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BRI 1.</p>

No.	Perjanjian	Lokasi	Luas (m ²)	Keterangan
25.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen <i>The Windsor</i> Nomor SPP/WIN-222/1571/III/2014 tanggal 28 Maret 2014, pembelian unit nomor 1571 di apartemen <i>the Windsor</i>	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±111	a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4162, menyatakan bahwa pengurusan SHMSRS atas nama AMPI telah selesai akan dilakukan proses akta jual beli. b. Unit ini dijaminan kepada BRI untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BRI 2.
26.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen <i>The Windsor</i> Nomor SPP/WIN-223/1572/III/2014 tanggal 28 Maret 2014, pembelian unit nomor 1572 di apartemen <i>the Windsor</i>	Blok S, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	±113	a. Berdasarkan Surat Keterangan AMPI 4162, menyatakan bahwa pengurusan SHMSRS atas nama AMPI telah selesai akan dilakukan proses akta jual beli. b. Unit ini dijaminan kepada BRI untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BRI 2.

G. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa 25 merek berdasarkan sertifikat sebagai berikut:

No.	Nama Merek	Tanggal Pendaftaran Awal	Jangka Waktu Berlaku Merek	Kelas	Nomor Sertifikat Merek/ Nomor Permohonan Pendaftaran
1.	Sixsence	20 Juli 2012	17 Oktober 2022	3	IDM000362913
2.	Sixsence	4 Juli 2013	17 Oktober 2022	5	IDM000390364
3.	Victoria	13 Desember 2011	1 Februari 2021	3	IDM000342562
4.	Herborist	24 Juli 2012	6 Desember 2021	3	IDM000363199
5.	Herborist	4 Juni 2018	22 Februari 2027	35	IDM000621519
6.	Herborist	25 Juli 2008	15 Desember 2026	35	IDM00170539
7.	Herborist	15 April 2015	23 November 2022	44	IDM000470827
8.	Herborist	21 Januari 2020	11 April 2026	5	IDM000666804
9.	Iria	24 Agustus 2009	19 Januari 2029	3	IDM000216216
10.	Miranda	21 Agustus 2009	31 Januari 2028	3	IDM000216124
11.	Miranda	26 Juli 2020	14 September 2030	3	IDM000244079
12.	Nuface	20 Juli 2012	2 Mei 2022	3	IDM000362689
13.	Nuface	18 Juli 2012	27 Maret 2028	5	IDM000362166
14.	Nuface	22 Oktober 2009	27 Maret 2028	32	IDM000224145
15.	Nuface	2 Juni 2010	1 Agustus 2028	44	IDM000250150
16.	CBD	28 Desember 2018	4 Agustus 2027	3	IDM000637400
17.	FHM	5 Oktober 2009	15 Agustus 2027	3	IDM000218888
18.	Fajari	26 Juli 2020	16 Agustus 2030	3	IDM000334095
19.	Beauty Cafe	31 Mei 2018	22 Februari 2027	35	IDM000621150
20.	Beauty Cafe	9 Juli 2008	27 November 2026	35	IDM000168436
21.	Body Scent	19 April 2013	15 Desember 2026	35	IDM000240864
22.	Body Scent	31 Mei 2018	22 Februari 2027	35	IDM000621151
23.	Basic	24 Januari 2006	29 Juli 2023	3	IDM000062966
24.	Omah Herborist	19 Mei 2016	30 Januari 2024	35	IDM000531685
25.	Omah Herborist	28 Juni 2019	30 Januari 2024	44	IDM000646747

H. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mengadakan perjanjian asuransi dengan beberapa perusahaan asuransi yang rincian perjanjiannya adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi	Obyek Pertanggungan	Penanggung	Tertanggung	Nomor Polis	Masa Berlaku
1.	Asuransi Semua Risiko Properti	Komplek Pergudangan Sinar Gedangan Blok B-2, Jl. Raya Wedi Betro Gedangan Gemurung, Sidoarjo, Jawa Timur	PT Asuransi Wahana Tata	PT Victoria Care Indonesia	024.4050.201.2020.000437.00	20 Juni 2020 – 20 Juni 2021
2.	Asuransi Gempa Bumi	Puri Indah Finance Tower Lantai 10, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, Kembangan, Puri Indah, Jakarta Barat	PT Asuransi Wahana Tata	PT Victoria Care Indonesia	024.4050.202.2020.000054.00	17 September 2020 – 17 September 2021
3.	Asuransi Gempa Bumi	Jalan Kamal Raya Outer Ring Road Mutiara Taman Palem Blok A-2 No. 17, Cengkareng, Jakarta Barat	PT Asuransi Wahana Tata	PT Victoria Care Indonesia	024.4050.202.2020.000059.00	10 Oktober 2020 – 10 Oktober 2021
4.	Asuransi Semua Risiko Properti	Kawasan Industri Candi Blok VA No. 8, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah (SHGB No. 03086)	PT Asuransi Astra Buana	PT Bank Central Asia, Tbk cabang Semarang qq PT Natura Pesona Mandiri qq PT Victoria Care Indonesia	012000070313	25 April 2020 – 25 April 2021
5.	Asuransi Gempa Bumi	Kawasan Industri Candi Blok VA No. 8, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah (SHGB No. 03086).	PT Asuransi Astra Buana	PT Victoria Care Indonesia	012000070315	25 April 2020 – 25 April 2021
6.	Asuransi Semua Risiko Properti	Kawasan Pergudangan Semanan Megah Blok D No. 10C-D, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat (SHGB Nomor 8643, 8644, 8645, 8645, 8647).	PT Asuransi Astra Buana	PT Bank Central Asia, Tbk cabang Semarang qq PT Natura Pesona Mandiri qq PT Victoria Care Indonesia	012000072441	30 Mei 2020 – 30 Mei 2021
7.	Asuransi Gempa Bumi	Kawasan Pergudangan Semann Megah Blok D No. 10C-D, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat (SHGB Nomor 8643, 8644, 8645, 8645, 8647).	PT Asuransi Astra Buana	PT Victoria Care Indonesia	012000072423	30 Mei 2020 – 30 Mei 2021
8.	Asuransi Semua Risiko Properti	Jl. Swakarsa III No. 60-A Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur	PT Asuransi Wahana Tata	PT Victoria Care Indonesia	024.4050.201.2019.000837.00	23 Desember 2019 – 23 Desember 2020
9.	Asuransi Semua Risiko Properti dan Asuransi Gempa Bumi	Kawasan Candi Blok VA No. 1 Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.	PT Asuransi Astra Buana	PT Victoria Care Indonesia	012000072940	24 Juni 2020 – 24 Juni 2021
10.	Asuransi Gempa Bumi	Puri Indah Financial Tower Lantai 10 & 11, Jalan Pun Lingkar Dalam Blok T8, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.	PT Asuransi Wahana Tata	PT Victoria Care Indonesia	024.1050.202.2020.000003.00	28 Februari 2020 – 28 Februari 2021
11.	Asuransi Semua Risiko Properti	Puri Indah Financial Tower Lantai 10 & 11, Jalan Pun Lingkar Dalam Blok T8, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat	PT Asuransi Wahana Tata	PT Victoria Care Indonesia	024.1050.201.2020.000080.00	28 Februari 2020 – 28 Februari 2021
12.	Asuransi Semua Risiko Properti	Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Komplek Mutiara Taman Palem Blok B-7 No. 50.	PT Asuransi Astra Buana	PT Victoria Care Indonesia	012000067949	14 Januari 2020 – 14 Januari 2021

No.	Jenis Asuransi	Obyek Pertanggungan	Penanggung	Tertanggung	Nomor Polis	Masa Berlaku
13.	Asuransi Semua Risiko Properti	Jalan Kamal Raya Outer Ring Road Mutiara Taman Palembang Blok A-2 No. 17, Cengkareng, Jakarta Barat.	PT Asuransi Wahana Tata	PT Victoria Care Indonesia	024.4050.201.2019.00 0656.00	10 Oktober 2020 – 10 Oktober 2021
14.	Asuransi Semua Risiko Properti dan Asuransi Gempa Bumi	Kawasan Industri Candi, Jalan Gatot Subroto 8G/14, Semarang, Jawa Tengah.	PT Asuransi Astra Buana	PT Victoria Care Indonesia	012000067955	30 Januari 2020 – 30 Januari 2021
15.	Asuransi Semua Risiko Properti dan Asuransi Gempa Bumi	Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Komplek Mutiara Taman Palembang Blok B-7 No. 50, Cengkareng, Jakarta Barat	PT Asuransi Astra Buana	PT Victoria Care Indonesia	012000067949	14 Januari 2020 – 14 Januari 2021
16.	Asuransi Semua Risiko Properti	Komplek Cibolerang Kav. 62 No. 203, RT 003/09, Margasuka Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat.	PT Asuransi Wahana Tata	PT Victoria Care Indonesia	024.4050.201.2020.00 0438.00	10 Oktober 2020 – 10 Oktober 2021
17.	Asuransi Gempa Bumi	Kawasan Industri Candi Blok VA No. 010, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.	PT Asuransi Astra Buana	PT Victoria Care Indonesia	012000068980	20 Maret 2020 – 20 Maret 2021
18.	Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Kebo Iwa Nomor 11, Denpasar Bali; Kelurahan Padasambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat. Bali; 2. Jl. Letjend Sutoyo, Perum PTP 27 Jember No. 46, Kec. Sumber Sari. Jember Jawa Timur; 3. Jl. Mauni, Bangsal, Pesantren, Kediri; 4. Jl. Sebuksu No. 26 RT 06/08 Kel Bunulrejo Kecamatan Blimbing, Malang Jawa Timur Telp. 0341 – 474306; 5. Jl. Krapyak No. 10 RT 01 RW 10. Kartosura. Sukoharjo, Jawa Tengah; 6. Desa Honggosoco No.2 RT 002 RW.002 Kecamatan Jekulo Kudus, Jawa Tengah; 7. Jln. Kesambi Raya No. 59. Cirebon, Jawa Barat; 8. Jln. Rajawali RT 002/RW 002. Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum. Kota Tasikmalaya; 9. Desa Sidomulyo Kec Godean Kabupaten Sleman. DI Yogyakarta; 10. Villa Bogor Indah FF 2-2 Ciparigi, Bogor Utara; 11. Jl. Cisadane RT 003 RW 15 Desa Adiarsa 	PT Asuransi Wahana Tata	PT Victoria Care Indonesia	024.4050.201.2020.00 0614.00	17 September 2020 – 17 September 2021

No.	Jenis Asuransi	Obyek Pertanggungan	Penanggung	Tertanggung	Nomor Polis	Masa Berlaku
		barat Karawang Barat; 12. Jl. Ki Surontoko Barat No. 11 RT 001 RW. 11. Pekalongan Timur, Jawa Tengah; 13. Jalan Surdono, Kelurahan Josenan, Kecamatan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur; 14. Perum Tanjung Sari Permai Blok C No. 8-06. Jl. Khatulistiwa RT 14 RW 04. Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Putri, Sukabumi; 15. Komplek Sadang Sari Indah Blok E No. 8 Sadang Sari, Kelurahan Ciseureuh, Purwakarta; 16. SHM Nomor 151/2017, Kecamatan Kasemun, Kota Serang, Provinsi Banten; 17. Komplek IKOPIN jln. Kolonel Ahamad Syam RT. 02 RW 04 Blok B No. 5 Desa Saya Kecamatan Jatinangor. Sumedang; 18. Jln Bukit Tinggi M 458 RT 036/10 Cinere Depok; 19. Perumahan Bumi Prayudan Blok N No. 1 RT 010/004 Kel Martoyudan Kec Martoyudan Kab. Magelang, Jawa Tengah.				
19.	Asuransi Kesehatan Kumpulan Smile Medicare	a. Juru Rawat Pribadi; b. Penyewaan Alat-alat c. Biaya Pembedahan; d. Konsultasi Dokter Spesialis di Rumah Sakit; e. Biaya sebelum dan sesudah perawatan rumah sakit.	PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, Tbk	PT Victoria Care Indonesia	08402202000164	1 September 2020 – 31 Agustus 2021

I. PERIZINAN LINGKUNGAN

Perseroan telah menetapkan komitmennya dalam rangka memenuhi seluruh persyaratan dan peraturan tentang lingkungan hidup dengan mengimplementasikan seluruh prosedur dan persyaratan pengelolaan lingkungan yang ditetapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Perseroan tunduk dan patuh terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan dan diterapkan di fasilitas produksi yang dimiliki. Untuk itu Perseroan telah memperoleh (a) Izin Lingkungan dan juga pengesahan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dari Kepala Bapedalda Kota Semarang No.660.1/366/21/2008 tertanggal 13 Mei 2008 terkait dengan kegiatan industri yang dilakukan pada pabrik Perseroan di Semarang beserta (b) Persetujuan Rencana Pengelolaan

Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Rinci dari PT Indo Permata Usahatama selaku pengelola Kawasan Industri Candi No. 02/SK.IPU/XI/20 Tahun 2020 tertanggal 24 November 2020, dan (c) SPPL No. 83/K17/31.7308.1006.04.010.K.2a.b/1.774.15/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 terkait dengan kegiatan perdagangan. Perseroan memiliki keyakinan bahwa telah mematuhi seluruh aspek material yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan lingkungan di Indonesia.

Fasilitas pabrik yang dimiliki Perseroan telah mendapatkan beberapa perizinan di bidang lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh antara lain Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang sebagai berikut:

- Nomor : 660.3 / 73 / B.III / I / 2019 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
- Nomor : 1647 / 660.3 / B.III / VII / 2020 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Domestik;
- Nomor : 1481 / 660.3 / BI / VI / 2020 tentang Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- Nomor : 503 / 3256 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah.

Selain itu, Perseroan juga telah bekerjasama dengan PT Teknotama Lingkungan Internusa untuk membantu Perseroan dalam melakukan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memantau harian, bulanan, triwulanan dan/atau setiap enam bulan sekali. Jenis limbah yang dihasilkan fasilitas pabrik yang dimiliki perseroan berupa limbah padat dan cair. Dalam penanganan jenis limbah ini Perseroan selalu memantau dengan melakukan sampling dan uji harian limbah cair guna rutin memenuhi ketentuan yang berlaku serta merujuk pada dokumen UPL-UJKL. Hasil uji tersebut dilakukan rekapitulasi setiap bulan dan dilaporkan secara triwulan.

Untuk upaya penataan pengelolaan lingkungan dilakukan pengukuran tingkat kebisingan dan emisi udara terhadap cerobong boiler dan genset di lingkungan pabrik yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan 6 (enam) bulan sekali. Perseroan memiliki ambang batas tingkat pencemaran yang tidak melebihi dari batas baku mutu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

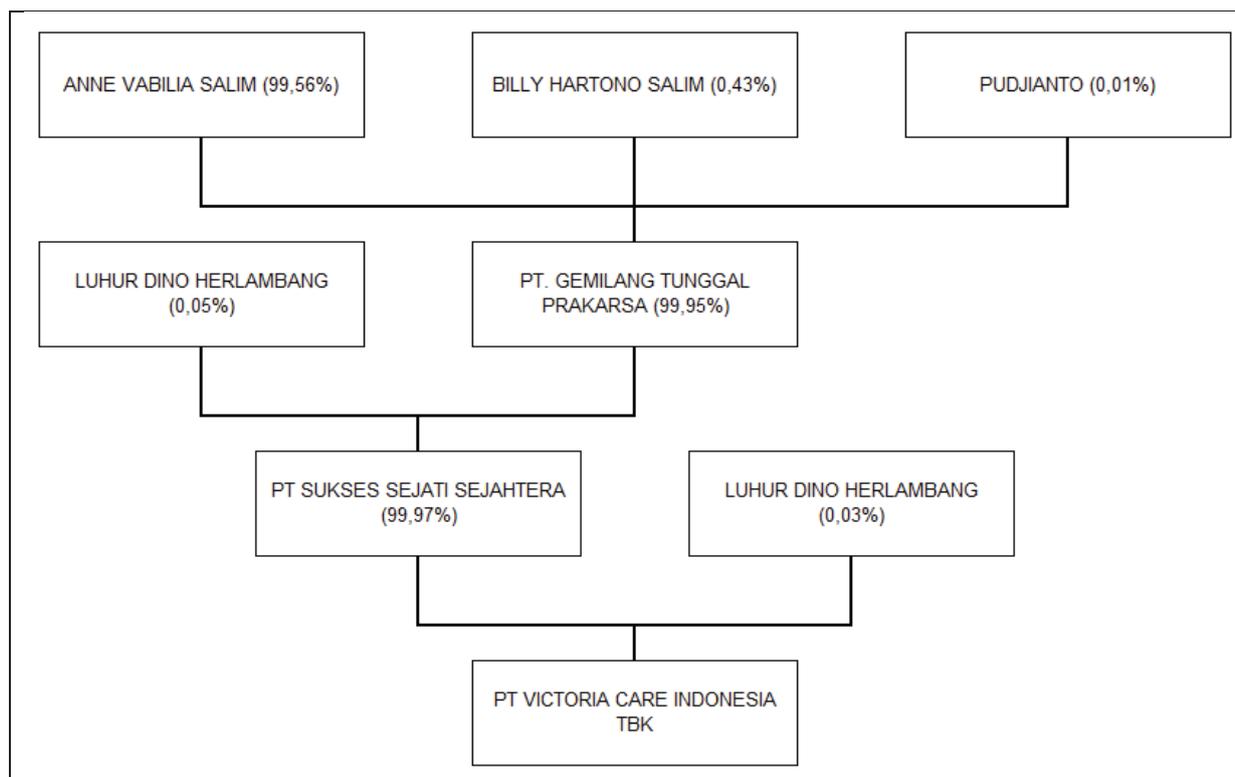
Upaya komitmen Perseroan terhadap pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dibuktikan dengan kepesertaan perseroan dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper) tingkat Nasional yang ditetapkan pemerintah.

Penghargaan Proper tersebut tertuang dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.1049/Menlhk/Setjen/ PKL.4/12/2019 dan Surat dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.38/SET/HRST/WAS.8/2020 dengan mendapatkan Peringkat Biru untuk masa penilaian 2018-2019 setelah proper Biru dari penilaian sebelumnya periode 2016-2017 dan 2017-2018; sedangkan untuk 2019-2020 sedang proses penilaian.

Biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2019, 2018, dan 2017 adalah sebesar Rp379.045.322, Rp138.515.900, dan Rp102.163.500.

J. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur kepemilikan Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah Billy Hartono Salim dan *ultimate beneficial owner* Perseroan adalah Anne Vabilia Salim.

K. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan juga merangkap jabatan di perusahaan-perusahaan di bawah ini:

Nama	Perseroan	SSS	GTP
Billy Hartono Salim	DU	DU	DU
Sumardi Widjaja	D	--	-
Rosid Sujono	D	-	-
Henny Soetanto	D	-	-
Luhur Dino Herlambang	KU	D	-
Luhur Iwan Hemadi	K	K	-
Drs. Herbudianto	KI	-	-

Keterangan:
 KU : Komisaris Utama
 KI : Komisaris Independen
 K : Komisaris
 DU : Direktur Utama
 D : Direktur

L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Sukses Sejati Sejahtera ("SSS")

Pada tanggal Prospektus ini, SSS adalah pemilik/pemegang 5.698.380.000 saham dalam Perseroan atau mewakili 99,97% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dan merupakan pemegang saham pengendali dari Perseroan.

Riwayat Singkat SSS

SSS didirikan dengan nama PT Sukses Sejati Sejahtera sesuai dengan Akta Pendirian No. 32 tanggal 8 November 2007, yang dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-05593 HT.01.01-TH.2007 tanggal 6 Desember 2007 ("**Akta Pendirian SSS**").

Sejak pendirian, Anggaran Dasar SSS sebagaimana terdapat di dalam Akta Pendirian SSS telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran No. 32 tanggal 27 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019698.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 5 March 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0045462.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 5 Maret 2020 (“**Akta SSS No. 32/2020**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha SSS

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta SSS No. 32/2020, maksud dan tujuan SSS adalah (i) Industri kosmetik (termasuk pasta gigi); dan (ii) Perdagangan besar kosmetik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SSS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

1. Industri kosmetik (termasuk pasta gigi), yang mencakup usaha pembuatan kosmetik, seperti rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut seperti shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit seperti krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat coklat setelah berjemur, produk untuk kebersihan badan seperti sabun mandi, deodorant, garam mandi dan obat perontok bulu, krim cukur dan kosmetik tradisional. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas; dan
2. Perdagangan besar kosmetik, yang mencakup usaha perdagangan besar kosmetik seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SSS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 175 tanggal 20 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0020702 tanggal 31 Maret 2015, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0037934.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Gemilang Tunggal Prakarsa	1.999	999.500.000	99,95
2. Luhur Dino Herlambang	1	500.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SSS

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SSS yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran SSS No. 32 tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0364895 tanggal 25 Agustus 2020, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0139302.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Luhur Iwan Hernadi

Direksi

Direktur Utama : Billy Hartono Salim
Direktur : Luhur Dino Herlambang

M. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta No. 28/2020 sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Luhur Dino Herlambang
Komisaris : Luhur Iwan Hernadi
Komisaris Independen : Drs. Herbudianto

Direksi

Direktur Utama : Billy Hartono Salim
Direktur : Sumardi Widjaja
Direktur : Rosid Sujono
Direktur : Henny Soetanto

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Luhur Dino Herlambang, Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, 43 tahun.

Lahir di Semarang, 1 Februari 1977. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2020.

Sebelumnya menjabat di Kosmetika Alam Pesona Mandiri - Brand Manager (2001-2004), Unza Vitalis – Brand Manager (2004-2007), Victoria Care Indonesia – Manajer Pemasaran (2007-2014), Victoria Care Indonesia – Direktur (2014-2020).

Meraih gelar Sarjana Hospitality Management pada tahun 2000 dari RMIT, Australia.



Luhur Iwan Hernadi, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Lahir di Semarang, 23 Mei 1969. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020.

Sebelumnya menjabat di PT Grand Pacific Tamara Finance - Marketing Officer (1992-1994), PT Karya Asri Perdana Mandiri - Assistant Marketing Manager (1994-1996), PT Charotama Utama (International Business Solutions) - Installation Specialist (1996-1997), PT Astra International Tbk - Internal Consultant (1997-1998), American Express Bank - Workforce Planner (1998-2000), PT Panin Bank Indonesia Tbk - National Call Center Manager (2000-2010), Bank ICBC Indonesia -Team Leader E Banking (2010-2018).

Meraih gelar Sarjana Bachelor of Business Administration pada tahun 1992 dari Harding University, Amerika Serikat.

Drs. Herbudianto, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 64 tahun.



Lahir di Jakarta, 9 September 1956. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020.

Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Mulia Boga Raya Tbk (sejak 2019), Anggota Komite Audit PT Gowa Makasar Tourism Development Tbk (sejak 2018), Anggota Komite Audit PT Siloam International Hospital Tbk (sejak 2017), Anggota Komite Audit PT Mega Manunggal Property Tbk (sejak 2015), Anggota Komite Audit PT Soechi Lines Tbk (sejak 2014), Anggota Komite Audit PT Wismilak Intimakmur Tbk (sejak 2013), Komisaris Independen PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (sejak 2015), Komisaris Independen PT Lenox Pasifik Investama Tbk (d/h PT Lippo Securities Tbk) (sejak 2013).

Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) (1991–2012).

Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada tahun 1984 dari Universitas Gajahmada, Yogyakarta.

Direksi

Billy Hartono Salim , Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 60 tahun.



Lahir di Semarang, 19 Mei 1960. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2010.

Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Natura Pesona Mandiri (2016-sekarang).

Sebelumnya menjabat di Kantor Akuntan Publik Joseph Susilo Jakarta – Auditor (1982-1985), PT Petro Win–NL Sperry Sun Jakarta (group dari Houston-Texas) – Finance & Accounting Manager (1986 – 1989), PT. Karya Asri Perdana Mandiri Jakarta – Direktur Utama (1989-1996), PT Kosmetika Alam Pesona Mandiri Jakarta – Direktur Utama (1997-2005), PT Unza Vitalis Jakarta – Direktur Utama (2005-2007).

Meraih gelar Sarjana Muda jurusan Akuntansi pada tahun 1983 dari Akademi Akuntansi Jayabaya.

Sumardi Widjaja, Direktur Penjualan dan Pemasaran

Warga Negara Indonesia, 49 tahun.



Lahir di Bandung, 26 Maret 1971. Menjabat sebagai Direktur Penjualan dan Pemasaran Perseroan sejak tahun 2019.

Sebelumnya menjabat di PT Bunas Finance Indonesia, Tbk. – Deputy Branch Manager Cabang Bandung (1995 – 1999), PT. Tegar Prima Nusantara Bandung – Marketing Manager (1999- 2001), PT Vitalis Indonesia – Branch Manager, Cabang Bandung (2001-2005), PT Unza Vitalis – Marketing Support Manager (2005 – 2007) , Perseroan – GM Penjualan dan Pemasaran (2007-2019).

Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada tahun 1994 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung.



Rosid Sujono, Direktur Produksi
Warga Negara Indonesia, 54 tahun.

Lahir di Gisting, Lampung Selatan, pada 5 Oktober 1966. Menjabat sebagai Direktur Produksi Perseroan sejak tahun 2019.

Sebelumnya menjabat sebagai penanggung jawab produksi di PT Industri Jamu Borobudur (1990-2002), dan Manajer R&D PT Kosmetika Alam Pesona Mandiri (2002-2005), Perseroan – Deputy Direktur Produksi (2005-2019)

Meraih gelar Sarjana Farmasi pada tahun 1989 dari Universitas Gajah Mada dan Magister Manajemen pada tahun 2015 dari Universitas Semarang .



Henny Soetanto, Direktur Keuangan
Warga Negara Indonesia, 45 tahun.

Lahir di Jakarta, 29 Mei 1975. Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2019.

Sebelumnya menjabat di Prasetio, Utomo & Co, Public Accounting Firm – Senior Auditor (1997-2002), PT Kosmetika Alam Pesona Mandiri Group - Finance & Accounting Manager (2002-2005), PT Unza Vitalis - Accounting Manager (2005-2008), Perseroan – GM Keuangan (2005-2019)

Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada tahun 1997 dari Universitas Tarumanegara.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan (sebagaimana dimaksud di dalam UUPM) di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Perseroan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham setiap tahunnya. Dasar penetapan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya dari para anggota Dewan Komisaris adalah berdasarkan RUPS.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 5.473.428.951.

N. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*Good Corporate Governance* atau GCG)

Tata Kelola Perusahaan (GCG) adalah dasar komitmen Perseroan untuk menerapkan prinsip-prinsip dari GCG ke dalam seluruh kegiatan yang dilakukan, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- b. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organisasi perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara efisien dan efektif.
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- d. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen/lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Perseroan berupaya sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas penerapan dari praktik terbaik GCG secara konsisten dan berkesinambungan dalam kegiatan usahanya untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Selain itu, penerapan GCG di Perseroan juga dilaksanakan dalam kegiatan usaha sehari-hari, seperti:

a. **Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)**

Pemegang saham Perseroan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Perseroan melalui pengambilan keputusan dalam RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Prinsip ini diterapkan Perseroan, antara lain, dengan cara-cara berikut ini:

1. Perseroan memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham;
2. seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam RUPS Tahunan; dan
3. ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perseroan paling sedikit selama 1 (satu) tahun.

b. **Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor**

Perseroan harus terus meningkatkan peran dan partisipasi pemegang saham atau investor melalui komunikasi yang efektif dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Komunikasi tersebut bermanfaat untuk mengetahui harapan dan pandangan dari pemegang saham atau investor, serta memperoleh saran dan masukan demi kepentingan dan kesinambungan usaha Perseroan.

Prinsip ini diterapkan Perseroan, antara lain, dengan cara-cara berikut ini:

1. Perseroan memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor; dan
2. Perseroan mengungkapkan kebijakan komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor dalam situs web.

c. **Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris**

Keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris yang ideal harus mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan umum atas Perseroan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara profesional, efektif, dan independen. Upaya penguatan keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris tersebut dilakukan melalui penentuan jumlah dan komposisi yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan Perseroan, sehingga dapat membangun kepercayaan dari para stakeholder

Prinsip ini diterapkan, antara lain, dengan cara-cara berikut ini:

1. penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan; dan
2. penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perseroan.

d. **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.**

Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris mencakup antara lain strategi dan rencana penting perusahaan, integritas laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, pelaporan dan keterbukaan informasi, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan.

Dewan Komisaris harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite. Komite dimaksud diantaranya adalah Komite Audit, sebagaimana yang telah diwajibkan pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Prinsip ini diterapkan, antara lain, dengan cara-cara berikut ini:

1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris;
2. kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan;
3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan;
4. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Audit dapat menyusun suatu kebijakan dan panduan terkait dengan audit, kepatuhan serta pengaduan; dan
5. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.

e. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi

Keanggotaan dan komposisi Direksi yang ideal harus mencerminkan pelaksanaan fungsi pengurusan Perseroan secara profesional, efektif, dan efisien. Upaya penguatan keanggotaan dan komposisi Direksi tersebut dapat dilakukan melalui penentuan jumlah dan komposisi yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan Perseroan, sehingga dapat membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Prinsip ini diterapkan, antara lain, dengan cara-cara berikut ini:

1. penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perseroan serta efektifitas dalam pengambilan keputusan;
2. penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perseroan;
3. Dewan Komisaris menentukan Indikator Performa Kinerja (KPI) dari Direksi Perseroan; dan
4. anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.

f. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas pengurusan oleh Direksi mencakup, antara lain efektivitas dan efisiensi sumber daya, pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, pengelolaan berkelanjutan (*sustainability*), komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan pemegang saham termasuk melalui sekretaris perusahaan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi dilakukan demi pengurusan Perseroan yang efisien.

Prinsip ini diterapkan, antara lain, dengan cara-cara berikut ini:

1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi;
2. kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perseroan;
3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

g. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan

Tata kelola perusahaan yang baik harus mencakup keseluruhan aspek penting dalam Perseroan. Disamping itu, tata kelola perusahaan yang baik juga harus mampu mengenali peran, dan membutuhkan

kerja sama dari para pemangku kepentingan dalam menciptakan kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Prinsip ini bisa diterapkan, antara lain, dengan cara-cara berikut ini:

1. Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*;
2. Perseroan memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti-fraud*;
3. Perseroan memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor;
4. Perseroan memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur;
5. Perseroan memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*;
6. Perseroan memiliki kebijakan *Level of Authority* dan *Policy* terkait *accounting*, *treasury*, *procurement*, dan *tax* (pajak);
7. Perseroan memiliki kebijakan terkait dengan transaksi afiliasi dan transaksi yang memiliki benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal; dan
8. Perseroan memiliki kebijakan skema pemberian bonus perusahaan dan insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.

h. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu mengenai semua informasi penting perusahaan termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengendalian, dan tata kelola Perseroan.

Prinsip ini diterapkan antara lain dengan cara-cara berikut ini:

1. Perseroan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi;
2. Laporan Tahunan Perseroan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan melalui pemegang saham utama dan pengendali.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan standar tertinggi merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dalam memberikan dukungan kepada kegiatan Perseroan dan meletakkan dasar yang kuat untuk ekspansi pengembangan usaha di masa yang akan datang. Dimana sedini mungkin Perseroan menyampaikan informasi material yang perlu diketahui publik, baik melalui media massa, laporan berkala, maupun media-media lainnya. Menjaga kewajaran operasional Perseroan dengan menerapkan keseimbangan kepentingan individu atau perusahaan dengan pemangku kepentingan dan terutama juga masyarakat umum. Dan dalam menjaga akuntabilitas, Perseroan selalu menjaga agar Laporan Triwulan, Laporan Auditor Independen dan Laporan Tahunan dapat disampaikan secara wajar, benar dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang terkait dan juga kepada publik melalui media massa pada setiap semesternya.

Selanjutnya, dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen, Corporate Secretary, Unit Audit Internal dan Komite Audit.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar yang berlaku, Dewan Komisaris mempunyai tugas utama untuk mengawasi jalannya pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, dan memberi nasihat kepada Direksi apabila diperlukan. Selama 1 (satu) tahun terakhir, Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan wewenang dengan baik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Akta no.28/2020, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan, kantor dan halaman yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,

surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas, surat berharga dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi wajib untuk memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris. Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dapat memimpin RUPS.

Dalam 1 tahun terakhir Dewan komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 30/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dapat dilihat secara lebih rinci pada Bab XIV.

RAPAT DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaannya dapat mengadakan rapat lebih dari 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan secara berkala atau sesuai kebutuhan.

Dalam 1 (satu) tahun terakhir, Dewan Komisaris Perseroan telah mengadakan 6 kali rapat dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh anggota Direksi.

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris Gabungan dengan mengundang Direksi untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial Perseroan.

RAPAT DAN KEHADIRAN DIREKSI

Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Dalam 1 (satu) tahun terakhir, Direksi Perseroan telah mengadakan 12 kali rapat dan dihadiri oleh seluruh anggota seluruh anggota Direksi.

PROGRAM PELATIHAN DIREKSI

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, selama tahun 2020 Direksi Perseroan telah mengikuti program-program pelatihan sebagai berikut:

Nama Direksi	Tanggal Pelatihan	Tema Pelatihan	Penyelenggara
Billy Hartono Salim	11 – 12 Feb 2020	Funding Growth Trough IPO	EY Assurance, Tax, Transaction and advisory services
	6 Okt 2020	Business Revamp “Overcoming Uncertainty trough knowledge”	BCA
Henny Soetanto	11 – 12 Feb 2020	Funding Growth Trough IPO	EY Assurance, Tax, Transaction and advisory services

Nama Direksi	Tanggal Pelatihan	Tema Pelatihan	Penyelenggara
	6 Okt 2020	Business Revamp "Overcoming Uncertainty trough knowledge"	BCA
Sumardi Widjaja	11 – 12 Feb 2020	Funding Growth Trough IPO	EY Assurance, Tax, Transaction and advisory services
	15 Juni 2020	Transforming Your Business with Technology at Speed	EY Indonesia Business Development
	17 - 19 Juni 2020	Integrated Marketing Communication In Digital Era (O2O - Strategic Offline and Online IMC)	Marketing Academy by Frontier
Rosid Sujono	8 Agustus 2020	Prinsip Pelayanan Kefarmasian dan Edukasi Penggunaan Obat di masa Pandemi Covid 19	Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kota Magelang Jawa Tengah
	6 Sep 20	Kesehatan Kulit dan Peran Apoteker di Era Pandemi Covid 19	Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Grobogan Jawa Tengah
	8 Okt 2020	Pengenalan Sertifikasi Halal	LPPOM MUI Pusat

SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 007/SK-DIR/VCI/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Direksi Perseroan telah menyetujui pengangkatan Alfonso Sheila Widyatna sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014. Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi pada alamat berikut di bawah ini:

Corporate Secretary
PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK
 Puri Indah Financial Tower 10th-11th Floor
 Puri Lingkar Dalam Blok T-8
 Kembangan, Puri Indah
 Jakarta Barat 11610
 Telepon : + 6221 54368111
 Website: <http://www.vci.co.id/>

Adapun secara umum tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah:

1. bertanggung jawab terhadap penyusunan strategi dan kebijakan perusahaan Perseroan terkait struktur dan mekanisme GCG, berdasarkan prinsip-prinsip GCG dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta etika berusaha secara konsisten dan berkelanjutan;
2. memastikan bahwa pengelolaan Perseroan dan administrasi pengambilan keputusan di dalam Perseroan dilakukan dengan mematuhi peraturan tentang keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik;
3. bertindak selaku *liaison officer* dan bertanggung jawab menyampaikan informasi tindakan perusahaan (*corporate action*) Perseroan kepada regulator yang berkepentingan dalam rangka kepatuhan dan *government relations* yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara *goodwill* Perseroan dimata regulator berdasarkan kepatutan dan etika bisnis dan kepada pemangku kepentingan yang relevan;
4. bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan informasi material dan relevan terkait Perseroan serta kelancaran komunikasi pada waktu yang tepat, berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan antara Perseroan dengan pemangku kepentingan/*stakeholder* dan mengkaji seluruh informasi tersebut termasuk dampak hukumnya dan mempersiapkan informasi tersebut secara cermat mungkin yang akan dikomunikasikan kepada *stakeholder* terkait, termasuk mengembangkan strategi komunikasi Perseroan secara efektif sejalan dengan tujuan dan sasaran Perseroan serta sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari *stakeholders*;
5. memastikan pengelolaan, menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS;
6. memastikan penyelenggaraan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris agar sesuai dengan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bapepam-LK dan peraturan terkait lainnya;

7. mengikuti perkembangan peraturan-peraturan penyelenggaraan perusahaan, ketenagakerjaan, Pasar Modal dan menjamin pemutakhiran informasi serta memberi masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi peraturan tersebut beserta peraturan pelaksanaannya berikut pengadministrasiannya;
8. mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) dengan memastikan Laporan Pelanggaran ditindaklanjuti oleh *Compliance Officer* dan menyampaikan hasil tindak lanjut Laporan Pelanggaran kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham;
9. membangun terbentuknya citra perusahaan yang positif oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Perseroan;
10. menjamin penatalaksanaan *office of the board* yang mencakup pemastian ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang didukung dengan memastikan kehadiran peserta rapat agar kuorum dapat tercapai sehingga keputusan yang dihasilkan kredibel;
11. mempersiapkan pelaksanaan dan mengkoordinasikan RUPS dan berbagai tindakan korporasi dengan berkoordinasi dengan unit-unit terkait maupun pihak eksternal;
12. memastikan tindakan koreksi terhadap setiap hasil temuan pada ranah yang merupakan tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan;
13. mengkoordinasikan penyelenggaraan aktivitas Perseroan yang terkait dengan program tanggung jawab sosial Perseroan;
14. memberikan saran-saran kepada Dewan Komisaris dan Direksi apabila diperlukan dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung Dewan Komisaris dan Direksi meliputi korespondensi, protokoler dan kelogistikan yang terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pada penyelenggaraan kegiatan perusahaan (*corporate event*);

Berikut adalah keterangan singkat terkait profil Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Sebelumnya pernah menjabat sebagai HR Operation and Engagement, PT Dynamo Media Network/Kumbaran (2018-2019), Human Resource Business Partner, PT Sale Stock Indonesia (2017-2018), Head of People Policy, Administration and Employee Desk, PT Sale Stock Indonesia (2016-2017), Marketing, Sales & Business Development Division Head, PT. Mustika Manis Utama (2014-2016), HCM, GA, HES and Legal Division Head, PT Mustika Manis Utama (2012-2014), HRD, GA and Legal Manager, PT. Victoria Care Indonesia (2010-2012), Senior Legal and HRD Officer, PT. Angkasa Indah Mitra (2008-2010), Corporate Secretary and Legal Officer, PT. Jakarta Setiabudi International Tbk (2006-2008), Legal Officer, PT Bank Mayapada International Tbk (2005-2006).

PELATIHAN UNTUK CORPORATE SECRETARY

Selama tahun 2017-2020 Perseroan belum melaksanakan pelatihan untuk *Corporate Secretary*.

KOMITE AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/VCI/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Pembentukan Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan telah membentuk Komite Audit dalam rangka memenuhi POJK No. 55/2015, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite : Drs. Herbudianto
Anggota : 1. Yustinus Linardi Ridjab
2. Wardiman Wijaya

Yustinus Linardi Ridjab

- Warga Negara Indonesia
- Usia 44 tahun
- Pengalaman kerja :

Saat ini menjabat sebagai Partner Konsultan Pajak pada CV. JSA Management. Sebelumnya menjabat sebagai Supervisor Production Planning Inventory Control pada PT Ateja Tritunggal Corporation (1999-2000).

Wardiman Wijaya

- Warga Negara Indonesia
- Usia 48 tahun
- Pengalaman kerja :

Saat ini menjabat sebagai Komite Audit di Perseroan. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur di PT Finzone Prima Solusindo (2019 – Sekarang), Senior Manager di PT Mitra Konsultan (2014 – 2019), Manager Pengendalian Internal Tanada Group (2014), Financial Controller di Vision Group (2006-2013), Manager Pengendalian Internal dan Corporate Finance di Yuwono Group (2003-2006) dan sebagai Manager Akuntansi di Ristia Group (2001-2003)

Pengangkatan para anggota Komite Audit ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 28 September 2018, dan akan berakhir pada tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima sejak tanggal 25 September 2020, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) tanggal 28 September 2020, yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

Komite Audit mempunyai tugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen di Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa; mendiskusikan rencana audit yang meliputi sifat dan ruang lingkup audit; menelaah kecukupan pemeriksaan dengan mempertimbangkan semua risiko penting; dan memastikan koordinasi bila ditugaskan lebih dari 1 (satu) akuntan publik;
5. menelaah perencanaan, pelaksanaan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal maupun eksternal; menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, termasuk apabila terdapat dugaan adanya kesalahan keputusan rapat Direksi atau penyimpangan pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
6. apabila diperlukan, Komite dapat melakukan pemeriksaan baik oleh Komite Audit sendiri maupun dengan menugaskan pihak ketiga. Laporan tersebut harus diserahkan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan;
7. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan, yaitu dalam hal terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Perseroan;
8. membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dengan:
 - (a) mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan internal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - (b) memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas fungsi kepatuhan Perseroan; memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan, pemberhentian serta penilaian kinerja Kepala Unit Audit Internal (SKAI); menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
9. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.

Kewenangan Komite Audit:

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit berwenang untuk:

1. mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan yang diperlukan;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan Perseroan termasuk Direksi dan/atau Senior Eksekutif/Officer dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, serta akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite;
3. dapat melibatkan pihak independen di luar Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit Perseroan dibentuk pada 28 September 2020, sehingga sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum pernah melaksanakan Rapat Komite Audit.

Sejak dibentuknya Komite Audit, Perseroan belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan.

UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERN)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/SK-DIR/VCI/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Pembentukan Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal, dengan susunan Unit Audit Internal sesuai dengan POJK No. 56/2015, yakni sebagai berikut:

Ketua Komite : David Wilyanto
Anggota : Lokita Elisabeth Cecilia

Pengangkatan para anggota Unit Audit Internal ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 28 September 2020, dan akan berakhir pada tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima sejak tanggal 25 September 2020, dengan tidak mengurangi hak Direksi untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal (Internal Audit Charter) tanggal 28 September 2020, yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal:

1. menyusun dan melaksanakan rencana Unit Audit Internal tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada seluruh tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. bekerja sama dengan Komite Audit;
8. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9. melaksanakan pemeriksaan khusus, apabila diperlukan.

Kewenang Unit Audit Internal:

Dalam pelaksanaan tugasnya, Unit Audit Internal berwenang untuk:

1. Akses yang menyeluruh, bebas, relevan dan tidak terbatas atas seluruh catatan, properti fisik dan karyawan yang terkait dengan pelaksanaan tugas apapun, dengan tanggung jawab mutlak atas kerahasiaan dan keamanan catatan dan informasi;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, dan Direksi, serta anggota dari Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, dan Direksi;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan/atau insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
4. Berkoordinasi tentang kegiatannya dengan Auditor Eksternal;
5. Meminta atau memperoleh dukungan dari karyawan internal Perseroan atau pihak luar, jika dibutuhkan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
6. Menentukan topik audit, jadwal, ruang lingkup pekerjaan, prosedur dan teknik, dan mengalokasikan sumber daya guna mencapai tujuan audit dengan berkonsultasi kepada Komite Audit dan Direktur Utama;
7. Melakukan audit atas tindak lanjut dan perbaikan yang dilakukan oleh auditee;
8. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Fungsi Audit Internal anak Perseroan dengan periode sekali dalam triwulanan (atau lebih jika diperlukan) untuk memperoleh informasi terbaru mengenai rencana audit, temuan audit signifikan dan aktivitas mereka;
9. Melakukan audit atau penelaahan terhadap anak Perseroan sesuai dengan rencana Audit Internal dan/atau ketika diperlukan atau ditugaskan oleh Komite Audit, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Direksi Perseroan. Selama audit, Unit Audit Internal memiliki wewenang seperti yang telah disebutkan pada nomor 1 sampai dengan 7 di atas; dan
10. Melakukan penilaian terhadap efektivitas fungsi audit Internal pada entitas anak Perseroan (jika ada).

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/VCI/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Pembentukan Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka memenuhi POJK No. 34/ 2014, dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua Komite : Drs. Herbudianto
Anggota : 1. Luhur Dino Herlambang
 2. Luhur Iwan Hernadi

Pengangkatan sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berlaku efektif sejak 28 September 2020 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 28 September 2020, yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

1. terkait dengan fungsi Nominasi dan Remunerasi:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, besaran dan struktur atas remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang akan menjadi bagian dari Laporan Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan dan kemudian ditetapkan dalam RUPS;
 - b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

- d. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - f. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - g. melakukan tugas-tugas lain selain yang disebutkan diatas yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2. dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
- a. menyusun komposisi jabatan dan proses nominasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan proses evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. membantu Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehingga mendapat masukan dan merancang pengembangan atas kompetensi anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun dalam mempersiapkan suksesi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. mengajukan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - e. Perseroan dapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk berpartisipasi dalam mengusulkan kriteria calon Direksi dan Dewan Komisaris.
3. dalam melaksanakan fungsi Remunerasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
- a. menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Struktur remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan tunjangan yang bersifat tetap atau variabel;
 - e. Dalam penyusunan kebijakan, besaran, dan struktur remunerasi sebagaimana dimaksud di atas, hal-hal berikut ini harus diperhatikan: (i) remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya; (ii) tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan; (iii) target dan kinerja masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan (iv) keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel; dan
 - f. Kebijakan, besaran, dan struktur remunerasi akan dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang sekali dalam setahun.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi:

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya lainnya pada Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan yang dikonsolidasi (jika ada) berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko terkait tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
3. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diangkat pada pada 28 September 2020, sehingga sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum pernah melaksanakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sejak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

O. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan. Dengan visi mewujudkan tanggung jawab sosial Perseroan yang baik untuk mewujudkan visi, Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perseroan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

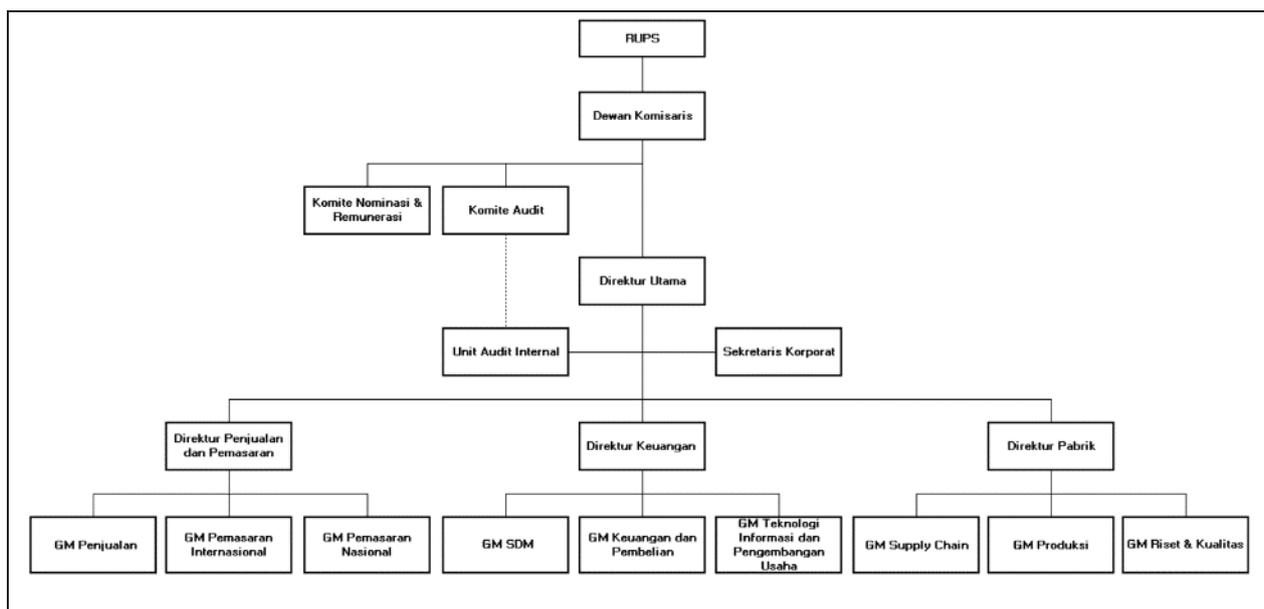
Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud apresiasi dan upaya pendekatan diri kepada komunitas dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut merupakan bentuk investasi Perseroan untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dalam hal kelangsungan usaha. Dengan misi menjalankan program CSR yang mampu memberikan dampak yang berkelanjutan kepada stakeholders kegiatan CSR Perseroan mencakup program aksi donor darah yang rutin diikuti dan juga bantuan produk kesehatan untuk Rumah Sakit, Pemerintah Provinsi.

Secara umum, pelaksanaan program CSR Perseroan telah mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2016 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pada dasarnya, pelaksanaan CSR ini dirancang dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berprinsip memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengabaikan hak generasi mendatang.

No.	Jenis Kegiatan	Penerima	Tanggal Penyerahan	Nilai Nominal CSR	Keterangan
1.	Penyerahan bantuan hand sanitizer	Dinkes Propinsi Jawa Tengah	23 Maret 2020	120.893.940	
2.	Penyerahan bantuan Hand Sanitizer	RSPAD Angkatan Darat	02-Apr-20	39.248.342	
3.	Penyerahan bantuan Hand Sanitizer	Pemda Bali	08-Apr-20	42.893.940	
4	Penyerahan bantuan Hand Sanitizer	RS Hasan Sadikin Bandung	17-Apr-20	42.893.940	
5	Penyerahan bantuan Hand Sanitizer	Wisma Atlet	22-Apr-20	54.485.455	
6	Penyerahan bantuan Hand Sanitizer	Pemprov Jatim	12-May-20	30.223.485	
7	Penyerahan bantuan Hand Sanitizer	RS di Jawa Tengah	14-May-20	25.392.804	RS Kariadi, Bhakti Wiratama, Willian Booth, St. Elisabeth, Permata Medika Ngaliyan, Tugu Rejo, Colombia Asia, Banyumanik, dr Aminogondohutomo, Krmt wongso negoro, Bhayangkara, Sultan Agung
8	Penyerahan bantuan Hand Sanitizer dan hand soap	Polda Jatim	24-Jun-20	46.243.091	

Perseroan juga rutin mengadakan kegiatan donor darah bersama karyawan pabrik di Semarang sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang.

P. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



Q. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi perusahaan, maka mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat dicapai pendayagunaan Sumber Daya Manusia secara optimal.

Dalam rangka menunjang pengembangan SDM, Perseroan melakukan program pelatihan kerja yang rutin dilakukan setiap tahun, seperti;

1. Memberikan kesempatan pengembangan diri dan pengembangan karir kepada seluruh karyawan:
 - a. Mempromosikan dan mendorong semangat kerja karyawan untuk dapat mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan bidang kerjanya sehingga mendukung perkembangan dan peningkatan karirnya.
 - b. Memberikan dukungan kepada karyawan untuk mengikuti program pengembangan yang dilaksanakan oleh perusahaan baik di dalam maupun di luar.
 - c. Meninjau peningkatan kompetensi karyawan setelah mengikuti pelatihan.
2. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan ide, saran dan masukan bagi pengembangan bisnis Perseroan.
3. Menetapkan dan melaksanakan skema penilaian yang adil dan membuat pedoman penilaian karyawan.

Komposisi Karyawan

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan untuk periode tahun yang berakhir per tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 menurut jenjang pendidikan, jenjang manajemen, jenjang usia, dan status hubungan kerja:

Komposisi Pegawai Menurut Status Hubungan Kerja

Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2017	2018	2019	2020
Pegawai Tetap	203	317	393	433
Pegawai Tidak Tetap	1.232	1.572	1.830	1.722
Jumlah	1.435	1.889	2.223	2.155

Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2017	2018	2019	2020
S2	3	4	5	7
S1	154	191	248	278
D3	55	78	90	91
D2	1	1	3	3
D1	4	6	8	14
SMA (atau setara)	1.185	1.572	1.825	1.721
< SMA	33	37	44	41
Jumlah	1.435	1.889	2.223	2.155

Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2017	2018	2019	2020
> 50 tahun	16	19	19	32
41 – 50	78	117	146	151
31 – 40	376	452	525	540
21 – 30	788	1.005	1.158	1.170
<21	177	296	375	262
Jumlah	1.435	1.889	2.223	2.155

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2017	2018	2019	2020
Pria	572	654	777	840
Wanita	863	1.235	1.446	1.315
Jumlah	1.435	1.889	2.223	2.155

Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2017	2018	2019	2020
Manajemen	125	137	153	174
Staff	395	438	482	586
Non-Staff	915	1.314	1.588	1.395
Jumlah	1.435	1.889	2.223	2.155

Komposisi Pegawai Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2017	2018	2019	2020
Operasional	934	1.259	1.483	1.391
Pabrik	347	464	550	558
Engineering	16	16	15	18

Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2017	2018	2019	2020
Keuangan dan Akuntansi	101	107	120	134
Human Resources	37	43	55	54
Jumlah	1.435	1.889	2.223	2.155

Komposisi Pegawai Menurut Lokasi Usaha

Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2017	2018	2019	2020
Jakarta Head Office	106	136	176	196
Jakarta	302	383	397	400
Semarang	559	731	889	826
Denpasar	83	134	215	175
Bandung	136	160	165	191
Surabaya	249	345	381	367
Jumlah	1.435	1.889	2.223	2.155

Kegiatan operasional Perseroan tidak bergantung kepada seorang atau beberapa karyawan yang memiliki keahlian khusus.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing kecuali sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 349 Tahun 2019 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Berikut komponen remunerasi/fasilitas yang diterima oleh karyawan yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Remunerasi/Fasilitas
1	Insentif
2	Tunjangan Hari Raya
3	Tunjangan Pajak
4	Tunjangan Penempatan/Relokasi
5	Uang Perjalanan Dinas
6	Upah Kerja Lembur
7	Tunjangan Transportasi
8	Pakaian Seragam dan/atau Pakaian Kerja
9	Tunjangan Makan
10	BPJS Ketenagakerjaan
11	BPJS Kesehatan
12	Asuransi Kesehatan untuk rawat inap
13	Tunjangan Kesehatan untuk rawat jalan
14	Bantuan duka cita
15	Bantuan suka cita (Perkawinan pertama yang sah menurut hukum)
16	Tunjangan Operasional (BBM, Sewa dan pemeliharaan kendaraan bermotor)
17	Tunjangan Tempat Tinggal

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Salah satu aset Perseroan yang sangat berharga adalah sumber daya manusia (SDM), oleh karena itu Perseroan menyadari akan posisi strategis SDM yang dimiliki dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat di masa mendatang. Program pengembangan SDM di lingkungan Perseroan dimulai dengan proses perekrutan karyawan yang dilaksanakan dengan memperhatikan asas kesetaraan dan kualifikasi dari setiap kandidat yang mengirimkan aplikasi untuk posisi pekerjaan yang ditawarkan Perseroan. Program pengembangan SDM juga ditempuh melalui pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas dan kualitas SDM.

R. STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

ASPEK K3

Perseroan menjadikan aspek K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) menjadi aspek yang sangat penting, karena sebagai industri yang berada dibawah pengawasan Badan POM dan yang telah menerapkan *GMP Kosmetik/CPKB* (Cara Produksi Kosmetika Yang Baik) maka aspek sanitasi dan higiene perorangan menjadi aspek penting untuk melindungi produk yang dihasilkan. Hal ini terlihat dari pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) mulai dari saat rekrutmen sampai ketika karyawan sudah bekerja, dimana setiap karyawan di pabrik harus menggunakan alat pelindung diri lengkap sesuai dengan lokasi bekerja, seperti penggunaan sarung tangan, cap kepala, masker, sepatu khusus atau sepatu dengan covernya yang ke semua itu demi menjaga dan melindungi karyawan dan juga produk yang dihasilkan. Perseroan juga menerapkan kebijaksanaan yang sama kepada siapapun yang memasuki area pabrik untuk tidak merokok, hal ini untuk melindungi seluruh karyawan terkait aspek keselamatan dan kesehatan kerja, karena salah satu proses produksinya mengandung kadar tinggi alkohol yang tentu sangat rawan dengan adanya api. Terkait produk yang mengandung alkohol tersebut dilakukan proteksi mulai dari tangki penyimpanan, pipa pipa saluran menuju ruang produksi, semua dilakukan penanganan dan perawatan secara teratur.

Perseroan menerapkan aspek ketenagakerjaan dan K3, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan Kerja tanggal 27 April 2018, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Perseroan telah menunjukkan komitmen dalam aspek K3, melalui manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan / HSE (*health, safety & environmental*) :

1. dengan membentuk departemen HSE
2. membentuk tim K3, yang secara terus menerus bekerja untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, pelatihan, penerapan dan pengawasan pelaksanaan K3
3. continuous improvement system K3

Beberapa hal terkait dengan penerapan K3 :

1. Membuat SOP dan instruksi kerja K3 yang diintegrasikan dengan penerapan *GMP Kosmetik* (CPKB)
2. Membuat program pelatihan, *monitoring* dan pelaksanaannya terkait dengan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan serta mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan seluruh proses produksi dan mengendalikannya serta melakukan perbaikan terus menerus
3. Menjadikan kebijakan kebersihan, kenyamanan, keamanan tempat kerja sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari program penerapan K3
4. Menyediakan dan mewajibkan setiap karyawan dan pengunjung menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan tempat kerjanya masing masing sesuai dengan standar K3 di perseroan.
5. Menerapkan sistem pemberian penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) terkait dengan penerapan sistem K3 dalam rangka memacu dan memotivasi seluruh karyawan untuk menerapkannya

Kegiatan rutin tim K3

1. Melakukan rapat rutin seminggu sekali sebagai evaluasi mingguan pelaksanaan program K3
2. Melakukan review bulanan terkait pelaksanaan program K3

3. Melakukan identifikasi masalah K3 dan lingkungan di semua sektor untuk dicarikan solusinya
4. Melakukan audit internal penerapan sistem K3 untuk memastikan bahwa seluruh SOP sudah diimplementasikan dan sebagai bahan untuk *continuous improvement*
5. Melaporkan hasil audit internal ke jajaran direksi terkait unjuk kerja pelaksanaan penerapan K3 dan membuat program *Corrective* dan *Preventive Action*
6. Sosialisasi program program K3 melalui email, spanduk, banner, pengumuman pengumuman, briefing rutin mingguan. Penempatan ateri sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan tempatnya yang akan memudahkan seluruh karyawan dapat membaca dan memahaminya, termasuk dalam hal ini karyawan baru yang dilakukan briefing khusus agar mengerti dan memahami seluruh aspek K3.

Sosialisasi ini juga diberikan kepada pengunjung, vendor dan tamu minimal HSE introduction.

1. Pelatihan pelatihan seperti pelatihan pemadam kebakaran penggunaan APAR, demonstrasi hydrant, pelatihan sanitasi dan hygiene dan seluruh aspek K3.
2. Sebagai tambahan K3 juga menjadi penggerak program 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) secara korporat.

Pada tahun 2015, Perseroan pertama kali mengelola keselamatan dan kesehatan kerja dengan menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 dan OHSAS 18001;2007. Penerapan SMK3 dan OHSAS 18001 diuji oleh badan sertifikasi independen yaitu Sucofindo International Certification Services (SICS) dan keberhasilannya ditunjukkan dengan Certificate No. OSH 01328 untuk OHSAS 18001;2007 yang dikeluarkan oleh SICS dan Piagam Penghargaan Reg. SMK3 32015 SK untuk SMK3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan mendapatkan Bendera Emas.

Dalam pengelolaan K3, Perseroan mengintegrasikan elemen elemen dalam SMK3 dengan klausul klausul dalam OHSAS 18001 agar proses pengelolaannya berjalan efisien. Untuk memenuhi regulasi regulasi K3 saat ini Perseroan telah memiliki *Inhouse Clinic* lengkap dengan *ambulance* yang beroperasi 24 jam dan *Fire Brigade* dengan mobil Pemadam Kebakaran berkapasitas 400 liter, & pengelolaan kotak P3K.

Program pokok dalam mengelola K3 adalah tercapainya *Zero Accident*. Usaha yang dilakukan untuk mencapai target *Zero Accident* meliputi :

- Penyusunan dokumen pengelolaan K3
- *Safety Induction* terhadap seluruh orang yang bekerja dan beraktifitas di dalam area Perseroan
- *Safety Patrol* untuk menjaga keselamatan seluruh orang bekerja
- Sosialisasi tentang K3
- Menjaga komitmen *Top Management* dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pencapaian program *Zero Accident* sampai sampai bulan Juni 2017 adalah jumlah jam kerja aman mencapai 26,16 juta jam kerja yang dicapai dalam 623 hari aman. Pencapaian ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, rata-rata terjadi satu *fatality* setiap tahunnya dengan hari kerja aman sebanyak 366 hari.

Usaha meningkatkan pengelolaan K3 terus dilakukan dengan secara konsisten menjaga implementasi OHSAS 18001 dan kepatuhan terhadap SMK3. Saat ini sedang dalam proses pengembangan yang sedang berjalan adalah :

- Pengelolaan alat pelindung diri (APD) secara terpusat secara korporat. Proses ini termasuk mempersiapkan gudang khusus APD. Dengan proses pengelolaan APD terpusat diharapkan akan memperbaiki pengelolaan APD seperti pendataan pemakaian APD, ketepatan penggunaan jenis APD, distribusi APD dan lain lain.
- Pengembangan keahlian Inspektor K3 sebagai pengawas keselamatan dan kesehatan pekerja.
- Pengembangan personil K3 sebagai tenaga profesional K3.

S. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan

dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

T. KEGIATAN USAHA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

T.1. UMUM

Pendiri Perseroan pada awalnya merintis bisnis dengan mendirikan sebuah perusahaan distribusi produk kosmetik, kecantikan dan perawatan tubuh pada tahun 1988, dan pada tahun 2007 berhasil mendirikan Perseroan sebagai perusahaan manufaktur yang memproduksi produk-produknya sendiri. Saat ini, Perseroan merupakan produsen produk kosmetik, kecantikan dan perawatan tubuh terkemuka di Indonesia, yang menyediakan produk untuk pasar Indonesia dan juga mengekspor ke negara lain. Perseroan menawarkan rangkaian produk yang lengkap termasuk diantaranya lulur, body butter, minyak zaitun, *lotion*, sabun, masker wajah, vitamin rambut, pewarna rambut, sampo, dan lain-lain.

Saat ini kontribusi utama Perseroan berasal dari pasar Indonesia, namun Perseroan juga mulai memasuki pasar Internasional dengan mengekspor ke negara-negara sasaran seperti Brunei, Pakistan, Jepang, dan China. Secara lokal, produk Perseroan dijual melalui toko *offline* maupun *online*, pengecer tradisional dan modern, dan *e-commerce*.

Diresmikan pada tahun 2007, Perseroan mengumumkan dimulainya pengoperasian pabrik dan fasilitas sendiri di atas lahan seluas 12.500 m² yang berlokasi di Semarang. Dimulai dengan sekitar 300 pekerja, pabrik terdiri dari bagian Produksi, bagian riset dan pengembangan (*R&D*), dan bagian kontrol kualitas (*QC*), didukung oleh standarisasi fasilitas produksi yang tinggi untuk mesin dan laboratoriumnya. Pabrik Perseroan juga telah mendapatkan sertifikasi *GMP (Good Manufacturing Process)* dari BPOM untuk memastikan setiap produk yang diproduksi dan diproses memenuhi standar kualitas lokal dan internasional.

Perseroan menyadari peran utama produk konsumen dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam persiapannya, Perseroan memperkuat kapasitas internal melalui penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur Teknologi Informasi serta peningkatan permodalan dan perluasan lini produk dan pasar.

Kantor Perseroan berlokasi di Puri Indah Financial Tower lantai 10-11, Puri Lingkar Dalam Blok T-8, Kembangan, Puri Indah, Jakarta Barat 11610. Keterangan mengenai kantor-kantor cabang Perseroan adalah sebagai berikut:

NO	UNIT/SUB UNIT/CABANG	ALAMAT UNIT/SUB UNIT/CABANG	PROVINSI
1	Kantor Pusat	Puri Indah Financial Tower (PIFT) Lantai 10-11, Puri Lingkar Dalam Blok T-8	DKI Jakarta
2	Kantor Jakarta Barat	Komplek Pergudangan Semanan Megah, Jl. Daan Mogot KM 18 Blok D No. 3	DKI Jakarta
3	Kantor Cabang Bandung	Bumi Panyileukan I.2, RT.001 RW.008, Cipadung Kidul, Panyileukan, Bandung, Jawa Barat	Jawa Barat

NO	UNIT/SUB UNIT/CABANG	ALAMAT UNIT/SUB UNIT/CABANG	PROVINSI
4	Kantor Cabang Semarang	Kawasan Industri Candi Gatot Soebroto Krapyak Blok 5A No.10	Jawa Tengah
5	Kantor Cabang Surabaya	Komplek Pergudangan Sinar Gedangan, Jl. Raya Betro Blok B – 02	Jawa Timur
6	Kantor Cabang Denpasar	Jalan Sedap Malam No. 169, Kesiman, Denpasar Timur, Denpasar, Bali	Bali

T.2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan sebagai sebuah badan usaha memiliki beberapa keunggulan kompetitif untuk keberlangsungan usahanya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan di antaranya adalah:

- **Merek yang Telah Dikenal Oleh Konsumen Indonesia**

Merek unggulan Perseroan yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia diantaranya adalah Herborist dan Miranda, terbukti dari penghargaan yang diterima oleh Perseroan dari Top Brand Awards sejak 2017 untuk kedua merek tersebut. Produk dari Perseroan memiliki standar kualitas yang tinggi dan bersertifikat Halal. Perseroan terus mengembangkan kemampuannya dalam memprediksi dan memenuhi permintaan konsumen, hal ini membuat Perseroan sanggup menciptakan portofolio merek yang dikenal dan dipercaya konsumen. Dengan terus mengembangkan produk-produk baru untuk memperluas portofolio produknya, Perseroan yakin bahwa merek-merek yang dimilikinya dapat menjadi semakin kuat dan menciptakan loyalitas dari konsumen terhadap produk-produk Perseroan.

- **Menawarkan Produk yang Beragam untuk Kosmetik, Kecantikan & Perawatan Tubuh**

Melalui 7 merek yang dimiliki oleh Perseroan yaitu Herborist, Miranda, Victoria, Sixsence, Victoria Iria, Nuface, dan CBD, Perseroan menawarkan produk-produk yang beragam untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Perseroan menawarkan rangkaian produk termasuk diantaranya lulur, *body butter*, minyak zaitun, lotion, sabun, masker wajah, vitamin rambut, pewarna rambut, sampo, dan lain-lain. Strategi R&D serta produksi yang diterapkan Perseroan memberikan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan dan mempercepat peluncuran produk baru. Kemampuan yang dimiliki Perseroan ini telah membantu Perseroan untuk menanggapi dengan cepat tren-tren baru yang terjadi di pasar serta menyesuaikan dengan perubahan pola konsumen.

- **Cakupan Distribusi yang Merata Di Indonesia**

Perseroan memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, didukung oleh 5 cabang eksklusif Perseroan di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Bali. Perseroan menerapkan logistik dari hulu ke hilir sehingga memiliki biaya logistik yang kompetitif dan melalui saluran perdagangan yang dimilikinya, Perseroan dapat memanfaatkan kemampuan pedagang lokal untuk meningkatkan penjualan. Perseroan memiliki 30 distributor di seluruh Indonesia, yang mencakup setiap pulau utama Indonesia. Untuk gerai, produk Perseroan dijual melalui lebih dari 60.000 pengecer tradisional, lebih dari 9.000 pengecer modern, lebih dari 3.000 pedagang grosir tradisional, dan lain-lain. Keunggulan Perseroan dalam distribusi terutama kedekatan dengan pedagang lokal, memberikan keuntungan bagi Perseroan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya terutama produk-produk dari luar negeri.

- **Tim manajemen yang berpengalaman**

Tim manajemen Perseroan memiliki keahlian di bidang manufaktur dan produk perawatan tubuh, dan telah berpengalaman di seluruh aspek kegiatan usaha Perseroan. Perseroan berkeyakinan kekuatan manajemen dan karyawan Perseroan sangat berperan penting dalam pelaksanaan strategi Perseroan di masa akan datang.

Selain itu, Perseroan memiliki sejumlah karyawan inti yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan operasional Perseroan, termasuk dalam hal pelayanan konsumen, sehingga membuat Perseroan mampu menawarkan solusi yang kompetitif dan produk yang berkualitas. Dengan komitmen dan pengalaman yang dimiliki, tim manajemen dan karyawan Perseroan telah mengembangkan bisnis Perseroan selama ini.

T.3. STRATEGI PERSEROAN

Perseroan bermaksud untuk mengambil manfaat dari kesempatan peluang bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang untuk menjadi pemain utama di industri kosmetik, kecantikan, dan perawatan tubuh dalam hal pangsa pasar. Strategi utama bisnis Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Melebarkan portofolio produk Perseroan**
Perseroan akan terus melebarkan portofolio produknya dengan menambah range produk kesehatan dan kebersihan untuk menghadapi era pasca pandemi (*'new normal'*), memperkuat posisi sebagai salah satu leader di produk hair care dan melengkapi range produk skin care yang masih menunjukkan potensi pertumbuhan cukup baik di masa depan.
- **Meningkatkan penjualan melalui channel online dan marketplace yang juga tumbuh secara pesat.**
- **Melebarkan peluang penjualan ke pasar global melalui ekspor ke negara-negara berkembang dan juga yang berpenduduk besar seperti negara China.**
- **Memperluas dan meningkatkan jaringan distribusi nasional**
Perseroan akan terus mengembangkan dan memperkuat jaringan distribusi, baik dengan strategi horizontal (dengan menambah jumlah toko) dan juga strategi vertikal (melengkapi jenis produk yang sudah dijual di toko-toko). Selain itu Perseroan juga menambah titik-titik distribusi di area-area di Indonesia yang belum dicakup oleh Perseroan.
- **Memperkuat penggunaan dan penerapan teknologi informasi yang mendukung operasional Perseroan**
- **Memperbaharui permesinan untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas output produksi**

T.4. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Victoria Care Indonesia pada tahun 2006, merupakan produsen produk kosmetik, kecantikan dan perawatan tubuh terkemuka di Indonesia. Perusahaan memiliki dan mengoperasikan sebuah fasilitas produksi di Semarang, dengan lini produksi yang mampu menghasilkan produk-produk *liquid, cream, body scrub, lotion, perfume*, dan sabun.

Perseroan menawarkan rangkaian produk termasuk diantaranya lulur, *body butter*, minyak zaitun, *lotion*, sabun, masker wajah, vitamin rambut, pewarna rambut, shampo, dan lain-lain. Perseroan menjual produk-produknya menjadi 7 merek utama, yaitu:

- *Herborist*
Di bawah merek ini Perseroan menjual produk-produk lulur tradisional, sabun pembersih kewanitaan, sabun beras, sabun sere, *virgin coconut oil*, variasi produk minyak zaitun, variasi produk *aloe vera*, variasi produk *frangipani, natural body scent, body butter*, dan parfum.
- *Miranda*
Di bawah merek ini Perseroan menjual produk-produk pewarna rambut, shampo pewarna rambut, vitamin rambut, serum rambut, variasi produk Keratin, *hair mask, pomade*, dan *cream* pewarna rambut.
- *Victoria*
Di bawah merek ini Perseroan menjual berbagai jenis pewangi tubuh, seperti *eau de cologne, eau de toilette, body scent, hand & body lotion*, dan *shower cream*.
- *Sixsence*
Di bawah merek ini Perseroan menjual berbagai jenis pewangi tubuh untuk segmen remaja.
- *Iria*
Di bawah merek ini Perseroan menjual berbagai jenis perlengkapan mandi dan perawatan tubuh dengan bahan baku susu kambing (*goat milk essence*).
- *Nuface*

Di bawah merek ini Perseroan menjual produk-produk masker perawatan wajah (*facial sheet mask*) dan kapas kecantikan.

- **CBD**

Di bawah merek ini Perseroan menjual produk-produk perawatan dan pewarna rambut yang ditujukan khusus untuk pemakaian *hairstylist* profesional.

4.1. BRAND DAN PRODUK PERSEROAN

HERBORIST



Herborist adalah merek produk perawatan tubuh untuk wanita dengan konsep natural namun modern yang awalnya terinspirasi dari budaya perawatan tubuh tradisional di Bali hingga berkembang ke perawatan tubuh lainnya seperti lotion, minyak pijat, perawatan mandi, produk wewangian hingga perawatan muka. Dikemas secara praktis dan modern, juga diproduksi menggunakan peralatan terkini dengan standar kualitas tinggi

Brand Herborist terbagi atas beberapa kategori produk yaitu perawatan kulit dan tubuh, perawatan wajah, perawatan rambut, perawatan spa.

Tabel berikut ini menyajikan ilustrasi beberapa produk yang tersedia di bawah merek Herborist per tanggal 30 Juli 2020.

Merek/Produk	Citra Produk	Tahun Peluncuran	Target Segmen
Lulur Tradisional		2008	Wanita 18 – 35 Tahun
Minyak Zaitun		2011	Wanita 18 – 35 Tahun

Merek/Produk	Citra Produk	Tahun Peluncuran	Target Segmen
Aloe Vera Gel		2018	Wanita 18 – 35 Tahun

VICTORIA

Victoria

FRAGRANCE BODY CARE

Victoria adalah merek produk perawatan dan wewangian tubuh dengan konsep trendy dan modern untuk wanita yang praktis. Diciptakan untuk memenuhi kebutuhan wanita generasi muda yang aktif berkarya dan gemar bersosialisasi, Produk- produk dari Victoria selalu mempunyai ciri khas wewangian yang trendy sehingga cocok untuk menambah kepercayaan serta pendamping kegiatan sehari-hari bagi para wanita milenial dari para pelajar di sekolah hingga wanita karir.

Brand Victoria terdiri atas kategori *Fragrance* dan *Bodycare*.

Tabel berikut ini menyajikan ilustrasi beberapa produk yang tersedia di bawah merek Victoria per tanggal 30 Juli 2020.

Merek/Produk	Citra Produk	Tahun Peluncuran	Target Segmen
Body Scent Hijab		2019	Wanita 18 – 35 Tahun
Eau De Toilette		2019	Wanita 25 – 40 Tahun
Eau De Cologne		2019	Wanita 18 – 35 Tahun

MIRANDA

MIRANDA®

HAIR CARE

Miranda adalah merek produk perawatan rambut masa kini yang sudah exist dan dikenal luas di masyarakat Indonesia, terdiri dari produk pewarna rambut, perawatan rambut dan juga styling rambut untuk digunakan wanita dan pria. Pewarna rambut Miranda menjadi sangat dikenal cepat oleh para konsumen karena menyediakan beragam warna pilihan yang menarik juga hasil warna yang baik, mudah digunakan juga dengan harga yang terjangkau hingga bisa digunakan oleh siapapun yang ingin tampil dengan gaya rambut yang milenial dan trendi. Dengan produk yang makin beragam maka kini Miranda mulai ingin mengembangkan pasar ke market yang lebih luas dengan penyediaan produk salon dan professional.

Brand Miranda terbagi atas 3 (tiga) kategori produk yaitu *Coloring*, *Styling*, dan *Treatment*.

Tabel berikut ini menyajikan ilustrasi beberapa produk yang tersedia di bawah merek Miranda per tanggal 30 Juli 2020.

Merek/Produk	Citra Produk	Tahun Peluncuran	Target Segmen
Hair Color		2007	Pria/Wanita 15-35 Tahun
Pomade		2017	Pria 15-35 Tahun
Vitamin Rambut		2018	Wanita 15-35 Tahun

SIXSENCE



Sixsence adalah sub brand dari produk Victoria yang merupakan merek produk wewangian yang ditargetkan untuk remaja masa kini yang penuh aktifitas. Wewangian sixsence menawarkan pilihan aroma manis dan ceria yang sesuai dengan gaya hidup remaja yang dinamis.

Tabel berikut ini menyajikan ilustrasi beberapa produk yang tersedia di bawah merek Sixsence by Victoria per tanggal 30 Juli 2020.

Merek/Produk	Citra Produk	Tahun Peluncuran	Target Segmen
Eau de Cologne		2016	Wanita 13 – 18 Tahun

Iria

Victoria

Iria

Iria juga merupakan bagian dari merek Victoria yang menyediakan produk pembersih tubuh dan perawatan kulit dengan kandungan susu kambing (Goat Milk) yang terkenal khasiatnya untuk penampilan dan kecantikan kulit. Produk perawatan yang disediakan meliputi body lotion, sabun mandi, body scrub dengan kandungan ekstrak susu kambing yang dapat memberikan dan menjaga kelembapan kulit lebih baik.

Tabel berikut ini menyajikan ilustrasi beberapa produk yang tersedia di bawah merek Victoria Iria per tanggal 30 Juli 2020.

Merek/Produk	Citra Produk	Tahun Peluncuran	Target Segmen
Face Soap		2011	Wanita 18 – 35 Tahun
Body Lotion & Shower Cream		2018	Wanita 25 - 40 Tahun

NUFACE

nuface 뉴 페이스®

NuFace adalah merek produk perawatan kulit wajah dan perlengkapannya dengan menggunakan konsep Korea Origin yang terkenal sebagai salah satu pusat trend produk kecantikan dunia. Produk masker wajah Nuface merupakan salah satu pelopor berkembangnya trend penggunaan masker wajah yang praktis dan kini telah memperbanyak pilihan jenis masker wajah berbahan lembut (sheet mask) yang dapat disesuaikan dengan jenis kebutuhan kulit yang berbeda, dan menyediakan juga kapas pembersih berkualitas baik untuk wajah.

Tabel berikut ini menyajikan ilustrasi beberapa produk yang tersedia di bawah merek Nuface per tanggal 30 Juli 2020.

Merek/Produk	Citra Produk	Tahun Peluncuran	Target Segmen
Face Cotton		2012	Wanita 18 – 35 Tahun
Face Mask		2016	Wanita 18 – 35 Tahun
Face Mask		2016	Wanita 18 – 35 Tahun

CBD (Creative Beauty Dazzle) Professional

CBD®
CREATIVE BEAUTY DAZZLE
 PROFESSIONAL

CBD Professional merupakan merk terbaru dari perseroan, CBD menyediakan berbagai produk pewarna, pelurus dan perawatan rambut premium untuk para profesional dan salon-salon. Produk pewarna rambut Color Max diformulasikan dengan bahan berkualitas tinggi dan tahan lama dari eropa untuk memenuhi kebutuhan para expertise salon untuk dapat menghasilkan warna dan texture rambut yang sempurna. Sedangkan rangkaian Smooth Power adalah produk pelurus rambut fenomenal yang dapat digunakan untuk jenis rambut sesulit apapun hingga mendapatkan hasil rambut yang lurus dan indah.

Tabel berikut ini menyajikan ilustrasi beberapa produk yang tersedia di bawah merek CBD per tanggal 30 Juli 2020.

Merek/Produk	Citra Produk	Tahun Peluncuran	Target Segmen
Pelurus Rambut		2019	Salon Profesional
ColorMax		2019	Salon Profesional

OEMAH HERBORIST



Pada tahun 2013, Perseroan membuka “Oemah Herborist”, sebuah konsep wisata edukasi dan toko pengalaman berbelanja untuk mempromosikan lini produk Herborist. “Oemah Herborist” berarti rumah dari Herborist, terletak di dalam area pabrik Perseroan dimana pelanggan dapat mengunjungi pabrik dan melihat seluruh proses produksi dari semua produk Perseroan. Oemah Herborist memamerkan koleksi produk kecantikan *vintage* dan tradisional dari seluruh daerah di Indonesia.



Sumber: Perseroan

Pada tahun 2018, Perseroan memulai bisnis online di bawah nama Oemah Herborist Official, yang menjual produk Perseroan sendiri melalui platform *marketplace* online antara lain seperti Shopee serta melalui toko online Perseroan sendiri yaitu <https://oemahherborist.co.id/>.

4.2. INOVASI PRODUK

Perseroan percaya bahwa proses inovasi Perseroan terus dilakukan dengan pengalaman Perseroan di industri kecantikan & perawatan tubuh yang didukung oleh keunggulan kompetitif Perseroan dibandingkan kompetitor akan menjadi hal yang penting yang akan mendukung Perseroan dalam memenangkan pangsa pasar di industri kecantikan & perawatan tubuh. Siklus inovasi yang dilakukan Perseroan menggunakan pendekatan yang berpusat pada konsumen sehingga dapat memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk mengembangkan Produk baru yang sukses. Salah satu bentuk inovasi Perseroan dalam mengembangkan Produk baru adalah meluncurkan berbagai workshop, yang salah satunya sering diadakan oleh Perseroan di Pabrik Perseroan di Semarang, dimana dengan adanya workshop tersebut akan membuat Perseroan semakin dekat dengan konsumen dan lebih mengetahui consumer behaviour serta feedback mereka terhadap produk-produk Perseroan. Strategi inovasi Perseroan didukung oleh beberapa komponen utama yang memungkinkan Perseroan untuk secara konsisten dapat memberikan produk baru yang sukses kepada retailer dan konsumen:

1. Cermin dan Nilai Brand: Persepsi konsumen terhadap Brand produk Perseroan; sangat penting sebagai cerminan image, value serta komitmen perusahaan untuk menjaga kualitas produk. Image customer sangat kuat terhadap produk perusahaan contoh nya di produk miranda hair colour.
2. Ide Produk yang unik: Inspirasi untuk produk baru Perseroan berasal dari berbagai sumber, termasuk para pakar di bidang kecantikan & perawatan tubuh yang berada di garis depan dalam menghadapi dinamika tren dan mengumpulkan wawasan secara real-time tentang produk-produk di industri kecantikan & perawatan tubuh. Setiap tahunnya Perseroan akan menugaskan beberapa pekerja di bagian pengembangan produk dan marketing untuk menghadiri seminar/workshop/study dan event-event besar kecantikan & perawatan tubuh di luar negeri agar mendapat insight, konsep dan trend produk terbaru. Selain itu juga Perseroan juga harus mempelajari preferensi konsumen lokal untuk menyesuaikan konsep sesuai dengan selera Indonesia . Kombinasi informasi tentang terkait hal ini, memungkinkan Perseroan untuk menghasilkan sejumlah besar ide produk yang layak untuk diteruskan ke tim pengembangan produk Perseroan.
3. Pengembangan Produk yang Terintegrasi: Tim pengembangan produk Perseroan, termasuk, ahli penelitian dan pengembangan (*research & development*) serta desainer kreatif, bekerja sama dalam memastikan proses pembuatan produk berjalan dengan baik serta dapat diterima oleh konsumen
4. Feedback dari Konsumen serta mitra retail: Hubungan kerjasama yang baik antara Perseroan dengan mitra ritel memungkinkan Perseroan untuk secara selektif menguji coba produk baru dan ekstensi lini produk dengan retailer sebelum melaksanakan peluncuran produk yang lebih mainstream dan komprehensif. Dialog dua arah yang dilakukan ini memungkinkan Perseroan memproses feedback retailer dan mencapai validasi pasar sebelum melakukan peluncuran produk baru
5. Jaringan distribusi yang kuat dan luas: Jaringan distribusi memiliki peranan yang signifikan dalam model bisnis perseroan. Saat ini Perseroan sudah memiliki jaringan yang kuat yang tersebar dari Sumatera sampai dengan Papua. Perseroan juga akan bekerja sama dengan jaringan distributor retail yang mempunyai counter/outlet di pusat perbelanjaan sehingga dengan cepat menaikkan Brand Awareness dan juga meningkatkan availability produk dan distribusi produk secara merata di seluruh Indonesia.

4.3. MITRA RITEL DAN JARINGAN DISTRIBUSI

Perseroan membangun hubungan yang kuat dan dalam waktu yang relatif lama dengan mitra ritel dan distributor internasional. Perseroan juga terus membangun jaringan distribusi untuk produk baru yang kuat dan secara teratur mengevaluasi potensi peningkatan produk-produk *existing* Perseroan. Fokus Perseroan secara umum adalah peningkatan distribusi, peningkatan penempatan produk di outlet-outlet dan peningkatan jumlah ruangan rak pada mitra ritel Perseroan. Perseroan mempunyai tim penjualan khusus

yang menjaga hubungan dengan mitra ritel Perseroan secara berkelanjutan. Produk Perseroan juga tersedia di saluran e-commerce seperti Shopee.

1. Mitra ritel

Produk telah terdistribusi di seluruh jaringan modern outlet seperti Indomaret, Alfamart, Guardian, Watson, Century dan juga modern lokal di semua area di Indonesia seperti Hari-hari, Tip top, Naga, Yogya, Borma, Asia, ADA, Luwes, Mirota, Laris, RITA, Bravo, Roxy, Tiara, Suzuya, Mode Group. Selain itu juga telah terdistribusi di hampir semua toko kosmetik, grosir dan retail di seluruh area Indonesia dari Aceh sampai Merauke.

2. E-commerce

Produk Perseroan dijual langsung kepada konsumen secara online melalui *marketplace* online seperti Shopee. Sementara konsumen dapat membeli produk Perseroan melalui berbagai alternatif online, produk dalam kategori Perseroan biasanya dibeli di *outlet*, dimana konsumen dapat menelusuri, menyentuh dan mencium produk sebelum membuat keputusan pembelian. Namun, E-commerce juga memungkinkan untuk menyediakan konsumen membeli dengan berbagai macam produk. Perseroan percaya akan dapat meningkatkan porsi penjualan online melalui online dengan berbagai kategori produk seiring dengan perpindahan perilaku konsumen pada belanja online.

3. Jejaring distribusi

Perseroan menjual produknya secara nasional dan internasional di lebih dari 30 wilayah provinsi di Indonesia melalui jaringan distribusi Perseroan dan penjualan ke luar negeri seperti Jepang, Brunei, Timor Timur, China, Papua New Guinea, Yemen, Hongkong, Malaysia melalui distributor pihak ketiga. Distributor pihak ketiga untuk luar negeri tersebut membeli produk Perseroan sesuai kebutuhan. Tidak ada direktur, manajemen kunci maupun pemegang saham Perseroan yang berelasi dengan atau memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam distributor Perseroan.

Grafik di bawah ini menunjukkan geografi nasional tempat produk Perseroan dijual per 31 Desember 2019:



Sumber: Perseroan

Para distributor pihak ketiga membeli produk Perseroan sebagai agen dan menjual produk-produk tersebut kepada pelanggan ritel dan grosir melalui berbagai jalur. Distributor Perseroan membayar harga pembelian yang telah ditentukan sebelumnya untuk produk-produk Perseroan dan menjual produk-produk tersebut kepada peritel dan penjual grosir pada harga jual yang telah ditentukan sebelumnya. Model distribusi tersebut memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan paparan konsumen yang lebih luas terhadap merek Perseroan serta cakupan jejak geografis yang lebih luas. Model tersebut juga memungkinkan Perseroan meraih manfaat dari peningkatan pendapatan tanpa harus mengeluarkan biaya investasi dan menghadapi risiko persediaan yang terkait dengan pendirian kehadiran Perseroan secara langsung di wilayah-wilayah tersebut.

Perseroan secara teratur meninjau dan mengoptimalkan bauran distributor Perseroan untuk mencapai pendapatan penjualan yang optimal dan senantiasa berupaya mempertahankan hubungan baik dengan distributor Perseroan. Tergantung pada skala dan wilayah geografis masing-masing distributor, Perseroan menugaskan anggota tim penjualan Perseroan untuk bekerja sama dengan distributor dengan memberikan dukungan untuk meningkatkan penjualan produk Perseroan.

4. Jejaring outlet

Jejaring outlet Perseroan meliputi group outlet Key Account Nasional, modern outlet lokal, toko kosmetik, wholesaler, retail, salon supplier, salon, apotik, *baby shop*, counter dan outlet di mall.

5. Rencana pengembangan jejaring outlet dan distribusi

Kedepannya, Perseroan akan mencoba menjual produk-produk Perseroan melalui institusi meliputi rumah sakit, klinik, perkantoran, mal, hotel, restoran, kios rokok dan kerjasama dengan distributor jaringan *direct selling*.

4.4. RANTAI PASOKAN DAN OPERATIONAL

Perseroan memiliki rantai pasokan yang sangat fleksibel dan didorong oleh permintaan yang dirancang untuk memaksimalkan efisiensi, menjaga jaminan kualitas, dan memastikan produk diproduksi sesuai dengan standar yang diperlukan.

1. Bahan Baku & Kemasan

Bahan baku utama yang digunakan Perseroan untuk menghasilkan produknya yaitu bahan baku *base cream*, pewangi, dan alkohol. Selain bahan baku utama, ada juga kemasan utama yang digunakan untuk menghasilkan produknya yaitu botol dan *pot plastic*. Perseroan membeli seluruh bahan baku dan kemas dari supplier Indonesia kecuali untuk sebagian botol plastik yang diimpor.

Bahan baku utama Perseroan terdiri dari:

- *Base Cream*
Merupakan bahan baku utama untuk menghasilkan produk cream. Pembelian bahan ini dilakukan ke beberapa supplier untuk menjamin pasokan tidak berhenti agar produksi bisa berjalan sesuai yang diinginkan dengan pengaturan ketepatan waktu pengirimannya.
- Pewangi
Pewangi merupakan bahan baku terbesar ke-dua yang digunakan untuk memberikan bau wangi seluruh produk kosmetik yang dihasilkan. Pembelian bahan baku pewangi ini dilakukan di dalam Indonesia, hal ini dilakukan agar proses pembelian bisa berjalan dengan cepat dan waktu tunggu (*lead time*) tidak terlalu lama, apalagi bahan pewangi ini bersifat spesifik untuk masing-masing produknya, sehingga memerlukan jaminan pasokan yang tepat waktu juga.
- Alkohol
Alkohol merupakan komponen bahan baku utama Perseroan ketiga, yang digunakan untuk pelarut produk kosmetik. Perseroan mendapatkan pasokan alkohol dari pihak ketiga di Indonesia.

Perseroan memiliki beberapa pemasok untuk sebagian besar produk Perseroan dan Perseroan percaya bahwa Perseroan memiliki kemampuan untuk mengganti pemasok tanpa gangguan yang signifikan terhadap operasi jika ada perubahan yang diperlukan. Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap suatu perusahaan pemasok secara spesifik.

2. Proses Manufaktur

Proses manufaktur produk Perseroan berpusat di pabrik Perseroan yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Untuk saat ini Perseroan baru memiliki 1 (satu) pabrik dengan *utilization rate* 68%. Terdapat juga produk Perseroan yang bekerjasama dengan produsen pihak ketiga yang tentunya sudah memenuhi standar kualitas produk Perseroan. Perseroan telah menyelaraskan diri dengan produsen pihak ketiga ini

yang memiliki kapasitas yang cukup untuk mendukung kebutuhan produk Perseroan dengan biaya yang tetap kompetitif

Proses produksi Produk Perseroan terbagi atas 4 tahapan utama yaitu:

- i. **Penimbangan**
Proses penimbangan dilakukan sebagai awal proses formulasi produk, dimana dilakukan dengan mengacu kepada formula standar dalam system yang tertuang dalam *Batch Record card (BRC)* dan dalam setiap tahap penimbangan dilakukan cek oleh petugas *Quality Control* untuk menjamin dan memastikan kebenaran dan jumlah bahan yang ditimbang.
- ii. **Mixing**
Proses mixing adalah proses pencampuran bahan bahan sesuai dengan standar proses yang tertuang di dalam BRC, mulai dari urutan pencampuran, proses pemanasan jika diperlukan sampai dihasilkan produk yang homogen, dan semua tahap proses tersebut diawasi oleh petugas *Quality Control* (“QC”) untuk memastikan dan menjamin produk setengah jadi yang dihasilkan sesuai standar yang ditetapkan. Proses ini sangat kritikal sehingga perlu pengawasan ketat dan cek laboratorium sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya.
- iii. **Filling**
Proses *filling* dan *capping* adalah proses pengisian kedalam kemasan sesuai standar yang tertuang dalam BRC, mulai dari urutan proses sampai selesainya tahap pengisian sampai penutupan yang mengacu kepada standar yang ditetapkan. Proses ini dilakukan setelah ada release dari QC dan setiap tahap pengisian dilakukan pengawasan oleh QC untuk menjamin isi produk sesuai standar yang ditetapkan baik kebenaran isi, jumlah dan kejernihan produk. Sebelum dilakukan proses ini maka kemasan yang akan dilakukan pengisian dilakukan labelling terlebih dahulu, sehingga proses pengisian sesuai dan tepat dengan kemasan yang diperlukan.
- iv. **Packing**
Proses pengemasan adalah proses akhir dari proses produksi. Aktivasinya adalah melakukan proses pengemasan sekunder sesuai dengan standar yang ditetapkan yang tertuang dalam BRC, dan prosesnya diawasi oleh QC agar kemasan sekunder yang digunakan sesuai dengan produknya serta jumlah per karton sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Manajemen Persediaan dan Logistik

Perseroan mempertahankan tingkat persediaan bahan baku yang bervariasi jumlahnya, tergantung pada rencana penjualan, jenis bahan baku, sumber pasokan, dan lokasi pabrik.

Persediaan barang jadi Perseroan terdiri dari produk yang akan dikirimkan kepada atau diambil oleh distributor Perseroan. Perseroan membuat estimasi volume produksi untuk barang jadi dan mempertahankan tingkat persediaan berdasarkan perkiraan penjualan Perseroan. Perseroan memantau dan menilai kinerja penjualan produk yang terkait dengan ketat sehingga Perseroan dapat menyesuaikan bauran produk dan rencana produksi yang terkait. Perseroan biasanya mempertahankan tingkat persediaan yang aman untuk barang jadi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pasokan.

Semua produk jadi Perseroan dikirim dari pabrik ke pergudangan Perseroan kemudian akan dilakukan pengiriman untuk memenuhi pesanan mitra ritel dan outlet-outlet Perseroan. Untuk pesanan internasional, produk Perseroan dikirim ke pelabuhan Jakarta untuk kemudian dikirim ke distributor internasional Perseroan di masing-masing negara.

4. Quality Control

Perseroan memiliki pekerja yang didedikasikan untuk memenuhi aspek kepatuhan terhadap peraturan dan kualitas untuk membantu memastikan semua bahan dapat dilacak dan semua produk mengandung

komposisi yang diberi label pada produk jadi. Perseroan memiliki program jaminan kualitas komprehensif yang memberi Perseroan visibilitas ke dalam kualitas produk Perseroan selama siklus produksi.

Semua bahan baku dan komponen kemasan, yang disuplai pihak ketiga semua dilakukan inspeksi incoming saat kedatangan sesuai dengan standar pemeriksaan dan untuk produk jadi, dilakukan pengujian kompatibilitas dan stabilitas. Tim pengembangan produk Perseroan juga menyelesaikan pengujian produk jadi secara berkala melalui tahap pengembangan produk. Perseroan juga bekerja sama dan telah mendapatkan sertifikat GMP Kosmetik (CPKB) dan ijin edar dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia) terkait kepatuhan terhadap semua proses produksi untuk menjamin mutu produk Perseroan. Selain itu Perseroan juga telah mendapatkan sertifikasi Halal dari LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) dimana hal ini sangat penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim. Sehingga dengan adanya sertifikasi CPKB dari BPOM dan MUI membuat kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk Perseroan meningkat.

4.5. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Perseroan menggunakan strategi pemasaran berbasis kinerja dan hemat biaya. Sebagian besar anggaran pemasaran Perseroan digunakan di outlet-outlet Perseroan dan kemitraan dengan *retailer* tertentu dengan menambah banyaknya produk yang di display di rak-rak penjualan *retailer* untuk mendorong konsumen menyadari eksistensi produk Perseroan dan membeli Produk Perseroan. Perseroan juga menggunakan berbagai saluran pemasaran dan media untuk mengembangkan koneksi konsumen Perseroan, menghasilkan kesadaran terhadap merek Perseroan dan mendorong permintaan konsumen dan mitra *retailer* terhadap produk Perseroan.

Dalam strategi pemasaran, Perseroan selalu menempatkan pelanggan baik konsumen juga mitra *retailer* sebagai prioritas dan cepat beradaptasi dalam mengikuti perkembangan tren industri kecantikan & perawatan tubuh serta terus mengembangkan dan memperkuat jaringan distribusi dengan strategi horizontal yaitu menambah jumlah *outlet* dan mitra *retailer* juga strategi vertikal yaitu dengan melengkapi item produk yang sudah di jual di outlet dan mitra *retailer*, serta menambah titik-titik distribusi (area).

Perseroan selalu melakukan terobosan inovasi dalam aktivitas promosi dan marketing. Sebagian besar pekerjaan pemasaran dilakukan oleh tim pemasaran *in-house* Perseroan yang merancang dan memproduksi bahan penjualan, strategi media sosial untuk menumbuhkan basis konsumen yang berkembang melalui kehadiran media sosial ini, iklan dan kemasan untuk masing-masing merek Perseroan.

Tabel berikut ini menunjukkan penjualan produk Perseroan berdasarkan segmen-segmennya:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Perawatan Tubuh dan Antiseptik	342.561.680.634	385.926.260.373	301.443.722.131	252.674.736.610
% terhadap penjualan neto	55,4%	48,4%	50,7%	48,2%
Perawatan Rambut	298.227.366.782	437.770.703.380	309.363.352.012	284.734.688.075
% terhadap penjualan neto	48,3%	54,9%	52,0%	54,3%
Lain-lain	565.361.234	6.015.290.617	7.349.237.009	3.333.426.732
% terhadap penjualan neto	0,1%	0,8%	1,2%	0,6%
Total	641.354.408.650	829.712.254.370	618.156.311.152	540.742.851.417
Rabat dan bonus yang tidak dapat dialokasikan	(23.386.312.429)	(31.921.232.290)	(23.428.123.321)	(16.574.474.458)
% terhadap penjualan neto	-3,8%	-4,0%	-3,9%	-3,2%
Jumlah Penjualan Neto	617.968.096.221	797.791.022.080	594.728.187.831	524.168.376.959

Industri kosmetik, kecantikan, dan perawatan tubuh umumnya tidak tunduk pada fluktuasi permintaan musiman, karena konsumen cenderung membeli produk kosmetik, kecantikan, dan perawatan tubuh secara konsisten sepanjang tahun. Untuk produk perawatan rambut (*hair care*) terutama produk *hair color* dengan merek "Miranda" menjelang hari raya dan saat liburan, penjualannya akan meningkat tajam. Sehingga antisipasi persediaan dan juga program promosi harus disiapkan mengantisipasi hal tersebut.

Seluruh aset produktif Perseroan berada di Indonesia. Tabel berikut menyajikan penjualan berdasarkan lokasi pelanggan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Jawa	473.105.561.950	604.282.224.720	479.010.751.094	492.278.354.014
Luar Jawa	369.411.319.340	506.521.972.245	365.298.286.345	245.620.213.486
Ekspor	2.588.782.416	2.271.855.569	650.448.470	297.545.430
<i>Penjualan Bruto</i>	<i>845.105.663.706</i>	<i>1.113.076.052.534</i>	<i>844.959.485.909</i>	<i>738.196.112.930</i>
Dikurangi				
Diskon dan retur penjualan	(203.751.255.056)	(283.363.798.164)	(226.803.174.757)	(197.453.261.513)
Rabat dan bonus	(23.386.312.429)	(31.921.232.290)	(23.428.123.321)	(16.574.474.458)
Jumlah Penjualan Neto	617.968.096.221	797.791.022.080	594.728.187.831	524.168.376.959

4.6. PENGEMBANGAN PRODUK, RISET DAN INOVASI

Perseroan secara berkesinambungan melakukan inovasi dan pengembangan produk untuk memenuhi perubahan kebutuhan dan selera pelanggan. Perseroan memantau tren inovasi produk dengan saksama melalui pengujian dan analisis berkesinambungan atas selera dan preferensi kastemer/konsumen serta produk-produk baru yang dipasarkan para pesaing Perseroan dan berupaya memberikan respons yang tepat waktu atas tren tersebut. Perseroan mengandalkan studi konsumen, kuesioner, riset pasar, wawancara kelompok dan umpan balik dari konsumen ritel untuk membantu mempercepat laju penggunaan produk dan teknologi Perseroan oleh pelanggan.

Proses pengembangan produk dan riset saat ini dilakukan oleh tim riset dan pengembangan produk internal berdasarkan suatu kerangka kerja pengembangan produk yang terstruktur rapi dan ketat. Tim riset dan pengembangan menggunakan masukan yang diberikan oleh bagian pemasaran dan penjualan untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru di industri. Perseroan mempertimbangkan budaya dan gaya hidup lokal yang beragam sebelum mengembangkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar Perseroan. Perseroan juga senantiasa mengevaluasi pasar untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tren yang sedang digandrungi pasar, dan meninjau desain kemasan, iklan dan presentasi produk-produk Perseroan yang telah ada untuk mengidentifikasi perbaikan dan optimisasi yang mungkin dapat dilakukan.

Mengingat kebutuhan konsumen senantiasa berubah, Perseroan bekerja keras untuk tetap selangkah lebih maju dari perkembangan kebutuhan konsumen dan untuk memperkenalkan produk-produk yang inovatif secara berkesinambungan. Setiap pengembangan produk baru harus melalui berbagai standar pengujian sebelum mendapatkan formula dan persetujuan registrasi oleh BPOM.

Tim inti riset dan pengembangan ("R&D") Perseroan terdiri dari beberapa tenaga ahli di bidangnya dan juga diperkuat oleh tenaga lulusan farmasi dan juga apoteker yang memang berpengalaman di bidang riset produk-produk kosmetik dan perawatan tubuh. Tim R&D Perseroan berhasil menciptakan konsep sabun mandi batang berbahan alami seperti beras, sere, aloe vera, dan zaitun. Selain itu tim R&D Perseroan juga di tahun 2020 berhasil menciptakan terobosan dalam pembuatan produk berbasis kesehatan dan antiseptic, terbukti Perseroan dengan sukses mengeluarkan produk parfum antiseptic yang belum dimiliki oleh kompetitor Perseroan dan

bukan hanya itu, Perseroan juga menjual produk parfum antiseptic untuk helm dan juga untuk perlengkapan sholat, yang mana hal ini belum dilakukan oleh kompetitor.

Tim R&D Perseroan juga rutin mengadakan FGD (*Focus Group Discussion*), baik itu di jalankan sendiri oleh Perseroan maupun berkerjasama dengan supplier mitra kerja Perseroan seperti dengan supplier pemasok parfum (*Fragrance House*) maupun dengan supplier bahan baku. Perseroan secara rutin mendapatkan informasi terkini mengenai trend bahan baku maupun trend produk dari berbagai negara baik di Asia, Eropa, maupun Amerika, sehingga team R&D dan Marketing dapat bersama-sama mengolah data dan informasi yang diperoleh untuk di implementasikan menjadi produk baru untuk Perseroan. Selain itu, team R&D selalu rutin melakukan penelitian akan bahan-bahan baku alami yang ada di Indonesia yang dapat dijadikan salah satu bahan baku untuk pengembangan produk-produk kosmetik dan perawatan tubuh yang dimiliki Perseroan dengan cara mengutus team R&D untuk mengikuti seminar-seminar dan juga menghadiri pameran-pameran di dalam dan luar negeri untuk melihat trend produk dan juga hal-hal yang baru dari bahan baku yang bisa di kembangkan untuk kebutuhan internal Perseroan.

Biaya yang telah dikeluarkan Perseroan untuk kegiatan riset dan pengembangan adalah sebesar Rp2.826.127.516, Rp4.315.783.884 dan Rp11.976.089.921 masing-masing pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

T.5. KOMPETITOR DAN PERSAINGAN USAHA

Produk-produk kosmetik, kecantikan dan perawatan tubuh Perseroan diposisikan untuk dapat bersaing di segala kalangan baik pria dan wanita, segala usia dan semua kelas sosial. Perseroan berkeyakinan bahwa merek-merek Perseroan merupakan merek-merek unggulan. Perseroan juga berkomitmen untuk terus melakukan inovasi-inovasi produk unik dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan konsumennya. Dengan demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa produk-produk Perseroan akan mampu bersaing secara kompetitif di kosmetik, kecantikan dan perawatan tubuh di Indonesia.

T.6. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Dengan adanya pandemik Covid 19 di dunia bahkan di Indonesia, mempengaruhi perekonomian pada umumnya dan juga pasar produk kosmetik, kecantikan dan juga perawatan tubuh. Prospek bisnis kosmetik, kecantikan dan perawatan tubuh di Indonesia masih potensial, dan ini ditunjang dengan semakin banyaknya produk Perseroan yang dijual ke pasar yang sanggup memenuhi kebutuhan konsumen baik itu pasar lokal maupun internasional. Selain itu, perbaikan distribusi Perseroan di luar pulau Jawa menjadi salah satu keberhasilan Perseroan meningkatkan penjualan.

Selain itu, prospek bisnis kosmetik, kecantikan dan perawatan tubuh di Indonesia mempunyai peluang yang masih sangat menjanjikan yang didukung oleh pertumbuhan jumlah penduduk kelas menengah dan golongan milenial yang juga didukung dengan daya beli mereka yang semakin baik. Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan industri kosmetik tahun 2019 mencapai 9%, meningkat dibanding pertumbuhan tahun 2018 sekitar 7,3%. Hal ini antara lain dipicu oleh meningkatnya tren kebutuhan masyarakat terhadap produk kecantikan dan perawatan tubuh. Pemerintah optimistis, industri kosmetik dalam negeri tak hanya tumbuh di pasar domestik, tapi juga di pasar dunia (*sumber: katadata.co.id, 2019*). Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal I 2020, kinerja industri kimia, farmasi dan obat tradisional termasuk sektor kosmetik, mengalami pertumbuhan sebesar 5,59 persen. Bahkan, di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19, kelompok manufaktur ini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa melalui capaian nilai ekspornya yang menembus 317 juta dolar AS pada semester I 2020. Pencapaian tersebut naik 15,2 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (*sumber: republik.co.id, 2020*).

Peluang untuk membidik kelas menengah yang sangat terbuka serta dengan peluang dalam industri kecantikan dan perawatan tubuh di Indonesia yang masih terus bertumbuh, Perseroan optimis dalam menjual produk-produknya bahkan di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19 ini. Perseroan terus berinovasi dalam segala hal baik itu kualitas produk, kemasan dan juga kemudahan dalam mendapatkan produk Perseroan, sehingga konsumen akhir produk Perseroan benar-benar merasakan nilai tambah yang diberikan Perseroan kepada para pelanggannya.

T.7. PENGHARGAAN

Berikut ini adalah daftar Penghargaan yang diperoleh Perseroan :

No	Tahun	Penghargaan / Kategori	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2017	Top Brand	Top Brand Award	Frontier Marketing
2	2018	Top Brand	Top Brand Award	Frontier Marketing
3	2019	Top Brand	Top Brand Award	Frontier Marketing
4	2020	Top Brand	Top Brand Award	Frontier Marketing

T.8. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dalam hal produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Hingga saat ini, tidak terdapat risiko khusus terkait dengan modal kerja yang terbatas yang akan membuat Perseroan tidak dapat secara maksimal menjalankan kegiatan usahanya yang dapat menyebabkan timbulnya risiko integritas di hadapan para pelanggan, serta dengan terbatasnya modal kerja Perseroan sehingga menjadi tidak leluasa untuk melakukan ekspansi Perseroan ke depannya.

Dampak pandemi global COVID-19 bagi pasar domestik dan pasar global telah menimbulkan tantangan baru bagi Perseroan, seiring dengan adanya penurunan daya beli masyarakat dan permintaan pasar di hampir seluruh sektor bisnis di global, tentunya hal ini akan berpengaruh bagi bisnis Perseroan. Terlepas dari kondisi tersebut, Perseroan tetap melakukan kegiatan operasional, manajemen dan administratif untuk melaksanakan produksi dan penjualan produk-produk Perseroan.

Dampak pandemi COVID-19 bagi kinerja keuangan Perseroan adalah tidak optimalnya potensi yang seharusnya didapat dari sisi pendapatan akibat terbatasnya akses terhadap produk-produk Perseroan terutama di toko-toko ritel offline. Perseroan dapat mengoptimalkan penjualan produk secara *online*, baik melalui situs *online shop* Perseroan maupun situs *e-commerce* lainnya selama pandemi COVID-19 sehingga tetap dapat menjaga kinerja keuangan yang positif.

T.9. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

Makroekonomi Indonesia

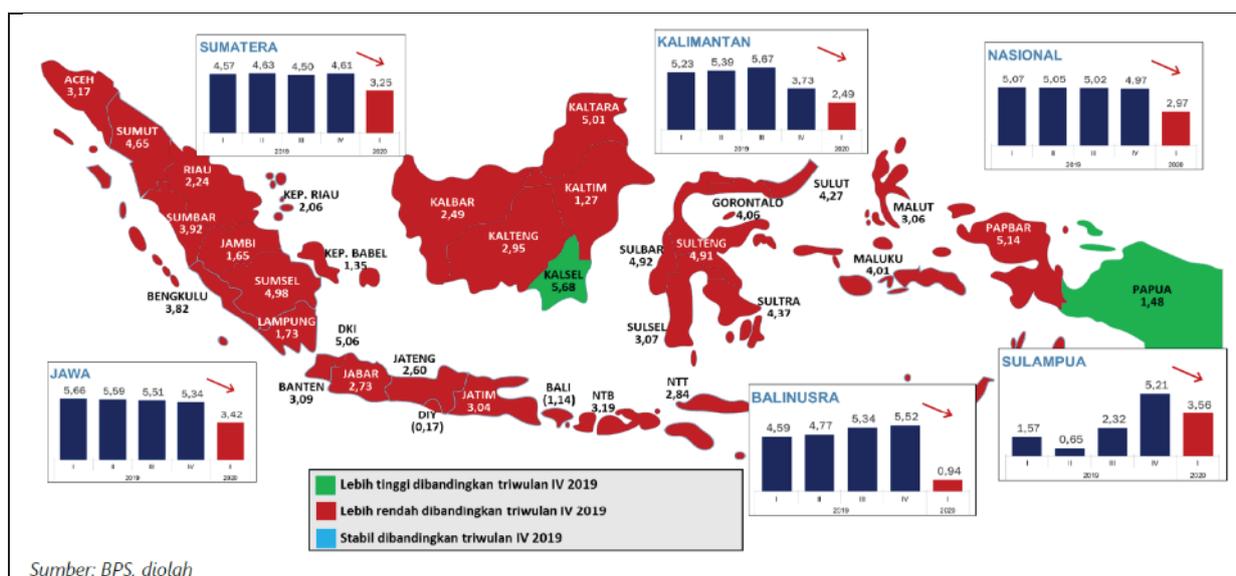
(Sumber : Publikasi Bank Indonesia Mei 2020 dan publikasi Badan Pusat Statistik 2020)

COVID-19 mulai menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2020. Perekonomian nasional tumbuh 2,97% (yoy) pada triwulan I 2020, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh menurunnya kinerja pertumbuhan ekonomi di hampir seluruh daerah, kecuali Kalimantan Selatan dan Papua. Menurunnya kinerja ekonomi di berbagai daerah terutama dipengaruhi oleh permintaan domestik, terutama konsumsi swasta dan investasi. Konsumsi swasta melambat di seluruh wilayah, terutama dipengaruhi oleh dampak pembatasan aktivitas sosial-ekonomi dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Demikian halnya dengan kinerja investasi bangunan yang terindikasi melemah di sebagian besar wilayah, meski di Sumatera dan Sulampua masih dapat mencatat level pertumbuhan yang cukup tinggi. Kinerja investasi nonbangunan juga terindikasi melambat di sebagian besar wilayah, meski tertahan oleh Sumatera dan Sulampua sebagaimana tercermin dari pertumbuhan impor barang modal yang masih positif. Di sisi lain, konsumsi pemerintah membaik terutama terjadi di wilayah Jawa karena didorong meningkatnya belanja bantuan sosial dan subsidi, meski rendahnya realisasi dana transfer pusat ke daerah.

Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan I-2020 atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 2.703,07 triliun. PDB tersebut naik 2,97 persen dibanding PDB atas dasar harga konstan 2010 pada triwulan yang sama tahun 2019 (*y-to-y*), dan secara *q-to-q* turun 2,41 persen. Sementara itu, PDB atas dasar harga berlaku triwulan I-2020 mencapai Rp3.922,61 triliun dengan sektor Industri Pengolahan sebagai penyumbang PDB terbesar (19,98 persen), yang diikuti oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,20 persen) dan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (12,84 persen).

Dari sisi pengeluaran, PDB triwulan I-2020 tersebut utamanya masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan proporsi 58,14 persen, sedangkan untuk pembentukan modal tetap bruto dan ekspor barang dan jasa masing-masing sekitar 31,91 persen dan 17,43 persen. Bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2019 atas dasar harga konstan 2010, pengeluaran konsumsi rumah tangga naik 2,84 persen, pembentukan modal tetap bruto naik 1,70 persen dan ekspor barang dan jasa naik 0,24 persen.

Di sisi lapangan usaha (LU), kinerja LU perdagangan dan industri pengolahan di hampir semua wilayah menghadapi tekanan dari permintaan domestik yang menurun. Secara umum, kinerja LU perdagangan melambat di semua wilayah sejalan dengan perlambatan permintaan domestik dan pembatasan aktivitas masyarakat terkait COVID-19. Melemahnya permintaan domestik dan global juga mengakibatkan aktivitas industri di hampir seluruh wilayah menurun, kecuali Kalimantan. Kinerja industri Kalimantan yang tumbuh lebih baik ditopang program implementasi B30, peningkatan produksi industri karet, industri pupuk, serta perbaikan produksi kilang minyak. LU pertanian juga melambat di semua wilayah, kecuali Sumatera, karena faktor cuaca menyebabkan pergeseran masa panen tanaman pangan.



Realisasi inflasi pada akhir triwulan I 2020 di seluruh daerah masih tetap rendah dan sejalan dengan sasaran inflasi nasional 3,0%+1%. Secara nasional, inflasi IHK pada triwulan I 2020 tercatat 2,96% (yoy), masih relatif rendah meski sedikit lebih tinggi dibandingkan akhir tahun 2019 yang sebesar 2,72% (yoy). Perkembangan inflasi pada triwulan I 2020 dipengaruhi oleh peningkatan inflasi *volatile food* (VF) yang merata di seluruh daerah di tengah terkendalinya inflasi inti dan menurunnya inflasi *administered prices* (AP). Tekanan inflasi VF dipengaruhi oleh kenaikan harga berbagai komoditas hortikultura, seperti aneka bawang dan aneka cabai. Di sisi lain, terkendalinya inflasi inti dan penurunan inflasi AP dipengaruhi terjangkarnya ekspektasi inflasi, melambatnya permintaan domestik pada saat pandemi COVID-19, serta penurunan tarif angkutan udara sesuai pola siklikal di periode low season awal tahun yang disertai penurunan harga BBM nonsubsidi seiring dengan penurunan harga minyak dunia.

Pandemi COVID-19 diperkirakan menekan perekonomian global dan memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020. Penurunan pertumbuhan ekonomi global mengakibatkan volume perdagangan dunia mengalami kontraksi, diikuti menurunnya harga komoditas dan harga minyak. Dengan kondisi tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 diperkirakan turun sejalan dengan dampak COVID-19. Secara

spasial perlambatan ekonomi diperkirakan terjadi di hampir seluruh wilayah, kecuali Sulampua. Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik yang hanya terjadi di Sulampua diperkirakan ditopang oleh produksi tembaga yang mulai pulih pasca transisi tambang, serta kinerja produksi hilirisasi nikel. Di sisi eksternal, tekanan terhadap kinerja ekspor diperkirakan masih cukup berat di seluruh wilayah, terutama di Balinusra yang sangat tergantung pada ekspor jasa dari aktivitas pariwisata. Sementara dari sisi domestik, pembatasan aktivitas masyarakat untuk mitigasi penyebaran COVID-19 diperkirakan menahan dorongan konsumsi swasta dan investasi, termasuk dengan kemungkinan penundaan beberapa event berskala besar seperti Pemilihan Kepala Daerah, dan Pekan Olah Raga Nasional XIX (PON), serta penyesuaian sejumlah rencana investasi, baik oleh Pemerintah maupun pelaku usaha. Pembatasan aktivitas masyarakat juga mengakibatkan dorongan konsumsi pada periode hari besar keagamaan nasional (HBKN), terutama di triwulan II 2020, tidak setinggi pola normalnya di seluruh wilayah. Pemulihan ekonomi di berbagai daerah diperkirakan mulai berangsur terlihat pada triwulan III 2020.

Secara keseluruhan, respons kebijakan fiskal menjadi kunci untuk menahan perlambatan lebih dalam akibat pelemahan permintaan domestik dan ekspor di seluruh wilayah pada 2020. Guna menanggulangi dampak sosial ekonomi COVID-19, Pemerintah Pusat maupun Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk tetap menjaga daya beli serta tingkat kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dari kenaikan alokasi anggaran APBN dan APBD untuk bantuan sosial. Peran bantuan sosial sangat penting, khususnya dalam mendorong tingkat konsumsi masyarakat yang berada di kelas bawah atau "*bottom of the pyramid*". Kebijakan Pemerintah untuk mengakselerasi dan memperluas penyaluran bantuan sosial secara non tunai akan menjadikan kebijakan ini lebih efisien dan efektif. Selain itu, program ini juga berdampak besar untuk memperluas akses keuangan mengingat jumlah penerima program bansos dan subsidi sangatlah besar.

Industri Kosmetik Indonesia

(Sumber : Publikasi eibn.org, 2019)

Saat ini orang Indonesia lebih sadar akan citra dan *fashion* pribadi daripada sebelumnya. Dan untuk semua kategori kosmetik seperti produk perawatan rambut, perawatan kulit, makeup, wewangian dan kebersihan, 75% wanita Indonesia lebih menyukai produk kecantikan yang dibuat dengan bahan alami. Pelanggan Indonesia pada umumnya juga lebih tertarik pada merek-merek asing dan sejenisnya dari pada lokal.

Di Indonesia, perawatan pribadi dan kosmetik dijual melalui berbagai media antara lain toko khusus, toko obat, *department store*, supermarket, pemasaran langsung (*Multi Level Marketing/MLM*), klinik perawatan kulit, dan salon kecantikan. Namun tren terkini menunjukkan bahwa produk kosmetik Indonesia yang dipasarkan melalui media sosial meraih pangsa pasar yang cukup besar. Ada juga tren oleh produsen untuk membuat produknya tampil dan terasa lebih premium bagi konsumen. Produk ini menasar pasar *masstige* ("*mass*" dan "*prestige*") yang merupakan zona pasar kosmetik terbesar di Indonesia dan diantisipasi akan tetap memiliki pertumbuhan yang kuat. Produk *Masstige* mengacu pada produk yang "lebih mahal daripada produk yang diproduksi secara massal, tetapi lebih terjangkau dibandingkan dengan produk *prestige*".

Kosmetik impor terutama menasar penduduk kelas ekonomi menengah ke atas dan didominasi produk dari Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Sedangkan produk dari Thailand, Korea Selatan, dan Malaysia khusus menasar kelas menengah. Adapun produk-produk yang diproduksi di Indonesia tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk ekspor dengan tujuan antara lain negara-negara ASEAN, Afrika dan Timur Tengah. Bahkan beberapa merek pabrikan lokal kini mencoba merambah Australia dan Amerika Latin. Bisnis kosmetik di nusantara telah dinikmati oleh beberapa pemain brand nasional seperti Mustika Ratu, Wardah dan Sariayu Martha Tilaar. Selain itu, ada juga brand internasional yang menanamkan modal di pabrik lokal seperti Unilever, Mandom dan L'Oréal. Merek terkenal internasional lainnya yang masuk dan mendistribusikan produknya di Indonesia antara lain dari Eropa, Amerika, Jepang dan Korea Selatan sejalan dengan kecenderungan konsumen Indonesia yang lebih memilih merek global atau trend budaya populer. Merek-merek lokal yang lebih kecil seperti Make Over, PAC, Polka, Rollover Reaction, BLP, Mizzu, ESQA Cosmetics dan Mineral Botanica juga menunjukkan penjualan yang menjanjikan yang berarti merek-merek Made-in-Indonesia dapat berjuang dalam persaingan yang ketat dan berhasil mendapatkan porsi pasarnya. share terutama di sektor make-up.

Peluang besar ada di sektor kosmetik Indonesia karena pasar domestik yang besar dan terus berkembang, biaya produksi yang kompetitif dan preferensi konsumen terhadap merek internasional dan produk buatan Indonesia. Kendati demikian, tantangan di sektor ini juga masih tetap ada seperti adanya produk ilegal dan halal serta kendala teknis lainnya yang meliputi kesiapan infrastruktur untuk verifikasi, sinkronisasi dengan standar internasional dan lembaga sertifikasi serta SDM lokal.

Sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia dengan Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari USD 1 triliun dan tingkat pertumbuhan PDB sebesar 5,17% (BPS, 2018), penduduk muda negara Indonesia dilaporkan semakin menghasilkan lebih banyak uang dari tahun ke tahun. Dari kelompok ini, perempuan secara khusus mengalami peningkatan angka pekerjaan dari 46% penduduk usia kerja menjadi 52% dalam satu dekade (*ecommerceiq.asia, 2017*). Terlepas dari perlambatan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga produk, perempuan Indonesia terus membeli banyak produk kecantikan. Sejalan dengan tren tersebut, produk kosmetik telah menjadi kebutuhan primer kaum wanita Indonesia yang pada umumnya menjadi incaran utama industri kosmetik dunia. Namun seiring dengan perkembangan saat ini, industri kosmetik nasional juga mulai berinovasi menyasar laki-laki dan anak-anak.

Total penjualan domestik produk kecantikan dalam negeri mencapai Rp11 triliun atau USD 818 juta pada 2015 berdasarkan data Kementerian Perindustrian. Sementara itu, sebagaimana dilaporkan dalam Eurocham position paper 2018, industri kosmetik Indonesia mengalami peningkatan nilai dari sekitar Rp 15 Triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 355,4 Triliun pada tahun 2017. Kontribusi terbesar berasal dari produk rambut (35,8%) diikuti oleh produk kulit (31,7%), riasan (10,5%), wewangian (7,2%) dan kebersihan (14,8%).

Laju perkembangan industri kosmetik di seluruh Indonesia juga menunjukkan tanda positif. Selama tahun 2016-17, industri kosmetik tumbuh 20%, 3-4 kali lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan permintaan pasar domestik dan ekspor (*cnnindonesia.com, 2018*) Nilai ekspor pada tahun itu adalah sebesar USD 517 juta merupakan peningkatan sebesar 9% dibandingkan tahun sebelumnya dengan tujuan utama negara-negara ASEAN, Afrika dan Timur Tengah. Sementara pada 2018, ekspor kosmetik dan perlengkapan mandi Indonesia mencapai 1,67 miliar USD dan diperkirakan akan meningkat menjadi 1,81 miliar USD pada 2019 (*gbgindonesia.com, 2019*)

Negara ini memiliki 12-15% dari seluruh populasi di kisaran pendapatan menengah ke atas. Konsumen yang sebagian besar tinggal di kota besar ini mampu membeli produk impor kelas atas. Untuk populasi kelompok tertentu ini, kualitas yang baik, citra merek, dan tren teratas/terbaru adalah beberapa parameter penting sebelum membeli produk impor kelas atas. Secara statistik, Indonesia telah menyaksikan pertumbuhan pesat pusat perbelanjaan selama 10 tahun terakhir. Di ibu kota Jakarta, lebih dari 100 pusat perbelanjaan telah terdaftar. Lebih dari 10% di antaranya ditujukan untuk produk impor kelas atas atau mewah. Hal ini memberikan peluang besar bagi merek Eropa yang dianggap mahal tetapi hadir dengan kualitas terbaik dan status tertentu sehingga sangat diminati.

Regulasi halal khususnya telah memberikan peluang baru bagi industri kosmetik nasional. Tidak hanya memberikan merek lokal keunggulan kompetitif atas merek global di pasar domestik, namun juga memungkinkan produsen kosmetik bersertifikasi halal berbasis lokal membangun kehadiran mereka di ceruk pasar luar negeri. Misalnya, raksasa kosmetik Prancis L'Oréal di Indonesia sudah memiliki pabrik bersertifikat halal, yang memasok pasar domestik dan kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar produk dijual dengan merek Garnier, mulai dari pembersih wajah hingga krim pencerah kulit yang disetujui halal.

Industri kosmetik Indonesia tetap menarik bagi investor asing dan domestik. Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 270 juta pada tahun 2020, prospek industri kosmetik di ekonomi terbesar Asia Tenggara ini masih sangat cerah untuk tahun-tahun mendatang. Penyebabnya antara lain karena masyarakat Indonesia semakin sadar akan kesehatannya serta kosmetik semakin menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Kementerian Perindustrian memproyeksikan nilai industri kosmetik Indonesia dalam waktu dekat mencapai Rp 100 triliun dari angka yang tercatat pada 2017 sebesar Rp 46,4 triliun.

Konsumen terbesar produk kosmetik di Indonesia adalah masyarakat yang berdomisili di kota besar, namun masyarakat pedesaan juga menunjukkan antusias yang tinggi terhadap produk kosmetik. Indonesia memiliki populasi besar yang PDB per kapita-nya meningkat, sehingga terjadi peningkatan jumlah konsumen berpenghasilan menengah dan kaya. Melihat potensi industri kosmetik dalam negeri, pemerintah Indonesia menempatkan industri ini sebagai salah satu industri prioritas dalam Rencana Pembangunan Nasional Industri hingga tahun 2019. Oleh karena itu, kosmetik telah diberi peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini melibatkan pengembangan industrialisasi substitusi impor (saat ini sebagian besar bahan baku untuk sektor kosmetik masih perlu diimpor), dengan tujuan untuk membuka banyak lapangan kerja bagi pekerja lokal. Modal asing dan domestik sangat dipergiat di sektor ini.

Dengan jumlah penduduk yang besar dengan daya beli yang relatif baik, Indonesia telah menjadi salah satu negara tujuan ekspor. Studi terbaru menunjukkan bahwa dalam dekade mendatang, Indonesia diperkirakan akan berada di peringkat 5 atau bahkan 3 pasar terbesar di kawasan Asia Pasifik. Tidak hanya pasar yang bagus untuk produk kosmetik impor, Pemerintah Indonesia ingin Indonesia menjadi tempat yang baik untuk memproduksinya. Terdapat beberapa pabrik raksasa nasional/internasional yang ada di tanah air seperti PT L'Oréal Indonesia, PT Mandom Indonesia Tbk, PT Paragon Technology and Innovation, PT Martina Berto Tbk, PT. Mustika Ratu Tbk dan PT. Unilever Indonesia Tbk. Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah telah menerapkan berbagai insentif untuk meningkatkan ekspor kosmetik khususnya ke negara tetangga kawasan ASEAN, negara Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin bahkan Australia.

Prospek positif industri kosmetik Indonesia mengakibatkan semakin banyaknya merek lokal yang masuk ke pasar, sehingga berdampak pada lanskap persaingan yang semakin ketat. Namun menarik untuk dicatat bahwa sebagian besar konsumen Indonesia suka mencoba merek baru terutama merek asing (atau setidaknya terdengar / terlihat seperti merek asing). Namun, jika mereka merasa nyaman dengan merek tertentu, kemungkinan besar ia tidak akan beralih ke merek lain. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk berinovasi dan menyusun strategi dengan baik dalam upaya meningkatkan pangsa pasarnya.

Menyikapi maraknya produk kosmetik impor, perusahaan kosmetik lokal memang gencar mengedukasi konsumen bahwa kosmetik luar negeri belum tentu cocok untuk jenis kulit tropis yang dimiliki kebanyakan orang Indonesia. Selain itu, produsen kosmetik lokal mulai memperbaiki kemasan & desain produk serta distribusi yang merupakan beberapa kelemahan utama produk kosmetik dalam negeri.

Industri halal di Indonesia selama ini dipandang sebagai tambang emas bagi banyak investor. Total 14% populasi Muslim dunia memang ada di Indonesia. Di antara 250 juta orang, sekitar 88% di antaranya adalah Muslim. Pada 2017, sekitar 1,8 miliar Muslim telah mengambil alih 24% dari populasi global. Ini adalah populasi agama besar yang tumbuh paling cepat.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.

SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DILUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas yang berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Laporan keuangan tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019 dan 2018, dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas, ditandatangani oleh Benediktio Salim, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP 1561).

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Gani Sigirow & Handayani dengan opini tanpa modifikasian, ditandatangani oleh Setiawati Budiman, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP 1316).

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Ekuitas				
Modal Saham	285.000.000.000	285.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
Uang muka setoran modal	-	-	250.000.000.000	-
Saldo laba	229.862.066.559	135.225.631.885	23.463.001.345	233.148.124.424
Rugi Komprehensif Lain	(5.272.515.037)	(3.538.017.906)	(3.162.171.311)	(3.867.093.856)
TOTAL EKUITAS	509.589.551.522	416.687.613.979	305.300.830.034	264.281.030.568

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebesar 1.008.000.000 (satu miliar delapan juta) saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) atau sebesar 15,027% (lima belas koma nol dua tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp100.800.000.000,- (seratus miliar delapan ratus juta Rupiah).

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

(dalam Rupiah)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Uang muka setoran modal	Saldo laba	Rugi komprehensif lain	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas Menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Juli 2020	285.000.000.000	-	229.862.066.559	(5.272.515.037)	509.589.551.522
Penawaran Umum perdana saham sebanyak 1.008.000.000 saham	50.400.000.000	-	-	-	50.400.000.000
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2020 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	335.400.000.000	-	229.862.066.559	(5.272.515.037)	559.989.551.522

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan nilai aset bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyesihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Distribusi tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, distribusi dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2020. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Sebelumnya, Perseroan pernah membagikan dividen pada tahun 2018, berdasarkan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 6 tanggal 10 September 2018, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai yang berasal dari laba bersih tahun 2016 sebesar Rp25.000.000.000 yang telah dibayar penuh pada bulan Desember 2018.

XI. PERPAJAKAN

A. PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

- Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengean Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagaiberikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

B. PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (Beneficial Owner) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Tax Residence dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangani pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak.

C. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

I. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian yang lengkap diantara para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian ini baik dibuat secara lisan maupun secara tertulis, yang dibuat secara tegas ataupun yang dibuat secara tidak langsung, berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menyatakan tidak pernah membuat perjanjian lain sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan berjanji dan mengikat diri tidak akan membuat perjanjian apapun baik dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat secara notariil, sehubungan dengan Penawaran Umum, yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Apabila terdapat perjanjian/ pernyataan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini maka yang berlaku mengikat para pihak adalah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan		
		Saham	Nilai (Rp)	(%)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK				
1.	PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	1.008.000.000	100.800.000.000	100%
TOTAL		1.008.000.000	100.800.000.000	100%

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

II. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan tanggal 18-24 Nopember 2020.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp100 sampai dengan Rp110 setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;

- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri kecantikan dan perawatan tubuh di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham perusahaan sejenis di pasar sekunder yang sahamnya sudah tercatat di bursa efek regional.

Selain faktor-faktor tersebut diatas, dalam menentukan harga, digunakan juga metode analisa komparatif *Price to earning* rasio. Dalam melakukan analisa komparatif tersebut, Perseroan mempertimbangkan *Price to Earning* rasio dari perusahaan sejenis yang sahamnya sudah tercatat di bursa efek regional yang memiliki jumlah aset, pendapatan dan laba bersih relatif serupa dengan Perseroan sebagai acuan yang kemudian akan dibandingkan dengan Perseroan sesuai dengan estimasi laba Perseroan dimasa yang akan datang.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (“EY”)

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 7th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

STTD	:	STTD AP-619/PM.2/2018 tanggal 16 November 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1561
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan	:	Surat Perikatan 0053/PSS/09/2020 tanggal 2 September 2020 dan Surat Perikatan 0143/PSS/09/2020 tanggal 7 September 2020

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. KONSULTAN HUKUM

Witara Cakra Advocates (WCA)

Sampoerna Strategic Square, North Tower, Level 17,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan 12930

STTD	:	STTD.KH-92/PM.2/2018 tanggal 14 Mei 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200817
Pedoman Kerja	:	Standard Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Keputusan HKHPM KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 <i>juncto</i> Surat Edaran HKHPM No. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 tentang Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.
Surat Penunjukan	:	024A/SKL/HRD/VC1/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020.

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1.	PT Medikaloka Hermina Tbk	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi	2020
2.	PT Diamond Food Indonesia Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2020
3.	PT Mulia Boga Raya Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2019
4.	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2018

3. NOTARIS

Notaris Rudy Siswanto, SH

Jl. Parang Tritis I Nomor 18 Ancol
Jakarta Utara

STTD : STTD.N-131/PM.2/2018
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan : No.20/NOT/RS/VIII/2020

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra

Satrio Tower, 9th Floor A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi
Jakarta Selatan 12950

Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja : Undang Undang Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang Berlaku.
Surat Penunjukan : Berdasarkan proposal No. 479/BIMA/BID/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer

Penjataan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjataan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (“SKS”), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1	PT Sky Energy Indonesia Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2018
2	PT Royal Prima Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2018
3	PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2018
4	PT Arkadia Digital Media Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2018
5	PT Natura City Development Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2018
6	PT Mega Perintis Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2018
No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
7	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2019
8	PT Hotel Fitra Internasional Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2019
9	PT Darmi Bersaudara Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2019
10	PT Bima Sakti Pertiwi Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2019
11	PT DMS Propertindo Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2019
12	PT Bhakti Agung Propertindo Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2019
13	PT Trinitan Metals dan Minerals Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2019
14	PT Sinergi Inti Plastindo Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2019
15	PT Mulia Boga Raya Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2019
16	PT Ifishdeco Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2019
17	PT Repower Asia Indonesia Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2019
18	PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2019
19	PT Putra Rajawali Kencana Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2020
20	PT Makmur Berkah Amanda Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2020
21	PT Esta Multi Usaha Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2020
22	PT Karya Bersama Anugerah Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2020
23	PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2020
24	PT Boston Furniture Industries Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2020

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan telah menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014. Berikut adalah uraian mengenai ketentuan anggaran dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta No. 28/2020.

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

Ketentuan Mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan antara lain adalah melakukan usaha dalam bidang (i) Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap, parfum dan kosmetik; (ii) Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya; dan (iii) Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan yang tidak dapat diklasifikasikan lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

Industri kosmetik (termasuk pasta gigi), mencakup usaha pembuatan kosmetik, seperti tata rias muka, wangi wangian atau parfum, produk perawatan rambut seperti shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit seperti krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur, produk untuk kebersihan badan seperti sabun mandi, deodorant, garam mandi dan obat perontok bulu, krim cukur dan kosmetik tradisional. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas, termasuk produk pengkilap gigi dan perekat gigi;

1. Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tissue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengkilap dan krim untuk barang dari kulit, pengkilap dan krim untuk kayu, pengkilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok.
2. Perdagangan besar kosmetik, mencakup usaha perdagangan besar kosmetik seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya; dan
3. Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran, mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.

Selain itu, untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Jasa pengurusan transportasi (JPT), mencakup usaha pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara;
2. Pergudangan dan penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersil;
3. Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta, mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik aset non finansial dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. Kegiatan

yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) aset non finansial yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, *trade mark* dan *service mark*, *brand name*, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian *franchise*/waralaba dan aset non finansial yang tak berwujud lainnya;

4. Industri produk farmasi untuk manusia, mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen Kesehatan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspense, sabun antiseptic serta benang bedah. Termasuk industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal dan obat kontrasepsi hormonal, industri alat-alat diagnosa medis, termasuk uji kehamilan, industri substansi diagnosa in-vivo radioaktif, industri farmasi bioteknologi dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik;
5. Perdagangan besar farmasi, mencakup usaha perdagangan besar farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan;
6. Perdagangan besar obat tradisional atau jamu, mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu;
7. Industri kertas tissue, mencakup usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, facial tissue, toilet tissue, lens tissue, sapu tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin dan napkin untuk bayi dan cangkir, piring dan baki dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, tampon dan sebagainya dan kertas sigaret dan cork tipping paper; dan
8. Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton, mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file kantor dan barang sejenisnya.

Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Perubahan Permodalan

Perseroan, dengan memperhatikan UUPT serta peraturan dan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan dan perundang-undangan di bidang pasar modal, serta peraturan dari Bursa Efek dimana saham Perseroan akan dicatatkan, dapat mengubah permodalan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan persetujuan RUPS. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit) dilakukan dengan (i) penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham dengan wajib memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada setiap pemegang saham Perseroan sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya, atau (ii) dengan penambahan modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, (iii) mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan pada waktu diperolehnya persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar, dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, peraturan perundang-undangan, peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, peraturan OJK, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

2. Penyetoran modal dapat dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; (ii) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; (iii) memperoleh persetujuan dari RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iv) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; (v) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (vi) dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
3. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dan apabila penambahan tersebut mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: (i) telah memperoleh persetujuan dari RUPS untuk menambah modal dasar, yang menyetujui untuk menambah modal dasar; (ii) telah memperoleh persetujuan Menkumham; (iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham; (iv) dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasar, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu dua bulan setelah jangka waktu butir (iii) tidak terpenuhi, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan dari Menkumham atas penurunan modal dasar tersebut; dan (v) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (i), termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar berkenaan dengan penurunan kembali modal dasar sebagaimana dimaksud dalam butir (iv).
4. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

Ketentuan Yang Mengatur Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

1. RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
2. Dalam RUPS Tahunan, (i) Direksi mengajukan perhitungan tahunan/laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik dan laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal; (ii) diputuskan penggunaan laba Perseroan; (iii) diputuskan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, yang wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris; (vi) bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris, sedangkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris; (v) dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pengesahan laporan tahunan dan perhitungan tahunan/laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada

anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut.

3. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: (i) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara; atau (ii) Dewan Komisaris.
4. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS apabila (i) telah diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, (ii) oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; dan (iii) usulan tersebut telah diterima oleh penyelenggara RUPS sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
5. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara untuk membicarakan dan memutuskan mata acara untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik (e-RUPS) yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan Perseroan tetap wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
8. Dalam hal pelaksanaan e-RUPS, Perseroan tetap perlu mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Yang Mengatur Hak Preferensi dan Pembatasan Yang Terdapat Pada Masing – Masing Jenis Hak Atas Saham

1. Hak dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen;
 - a. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada KSEI atas saham dalam Penitipan Kolektif pada KSEI dan seterusnya KSEI tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
 - b. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada KSEI.

- c. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada KSEI paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
- d. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

2. Hak suara

Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali apabila pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

3. Hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi

Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. Likuidator wajib memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing.

Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi Perseroan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, dan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.
2. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta

menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk (i) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank); (ii) menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan; (iii) melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi izin yang berwenang; (iv) mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk kepentingan pihak lain/badan hukum lain; (v) mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan nilai kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan, harus dengan persetujuan tertulis dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas merek dan paten yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) maupun sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
4. Setiap usulan untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atau setiap usulan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu pendirian Perseroan, dan pembubaran Perseroan harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan berikut:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundang yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

2. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan, kantor dan halaman yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas, surat berharga dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi wajib untuk memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris. Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dapat memimpin RUPS.

Ketentuan Penting Lainnya Terkait Pemegang Saham:

Setelah Pernyataan Efektif, Perseroan akan tunduk pada peraturan-peraturan OJK yang mengatur mengenai perubahan pengendalian Perseroan, penggabungan usaha, akuisisi atau restrukturisasi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 74/2016, POJK No. 9/2018 dan POJK No. 17/2020.

Berdasarkan POJK No. 11/2017, setiap pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor dalam Perseroan, wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. Kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham Perseroan untuk pihak sebagaimana dimaksud berlaku atas setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% dari saham yang disetor dalam Perseroan baik dalam 1 atau beberapa transaksi. Laporan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sesuai dengan anjuran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (social distancing) dan menghindari keramaian guna meminimalkan penyebaran virus *Corona* (Covid-19), maka mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran umum akan dilakukan secara online, dengan prosedur sebagai berikut:

- I. Pemesanan saham hanya dapat dilakukan melalui website IPO BAE. Langkah pemesanan adalah sebagai berikut:
 - a. Masuk ke halaman: <http://www.bimaregistra.co.id/ipo>
 - b. Ketik Nomer Sub Rekening Efek anda di kolom ID ACC dan klik Search untuk pencarian nama
 - c. Kemudian akan tampil rincian data lengkap atas nama Sub Rekening yang dicari. Bila informasi sesuai, lanjut mengisi kolom;
 - i. Jumlah Pemesanan (dalam lembar)
 - ii. Nomor Telepon (harus tersedia WA pada nomor tersebut)
 - iii. Email
 - iv. Nomer Rekening untuk *refund* dana.
 - d. Setelah anda klik Submit akan muncul kode QR yang harus anda simpan dan informasi jumlah pemesanan, jumlah dana yang harus dibayarkan serta nomer Rekening Pembayaran IPO.
 - e. Bila anda ragu apakah pemesanan anda telah tercatat atau belum, anda dapat mengulangi proses diawal.
 - f. 1 (satu) pemesan hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
 - g. Operasional *website* pukul 09.00 - 12.00 WIB.
- II. Pemesan mencetak FPPS, menandatangani, dan mencoret pilihan pada FPPS.
- III. Pemesanan akan ditolak jika: 1) nama pada nomor sub-rekening efek dengan KTP yang ditunjukkan berbeda; 2) informasi dalam sub-rekening efek berbeda dengan informasi dalam KTP.
- IV. Pembayaran pemesanan saham tidak dapat dilakukan menggunakan *Mobile Banking*, *ATM Transfer*, dan Pembayaran *Vitual Account*.
- V. Pemesan yang tidak mencantumkan No FPPS dan Nama Pemesan pada bukti pembayaran akan ditolak.
- VI. Masa Penawaran dilakukan pada tanggal 8-11 Desember 2020.
- VII. Setelah melakukan pembayaran, menyiapkan fotocopy KTP/Paspor dan mengisi FPPS, pemesan melakukan proses *upload* dokumen dengan langkah sebagai berikut :
 - a. Masuk ke halaman: <http://www.bimaregistra.co.id/ipo>
 - b. Ketik Nomer Sub Rekening Efek anda di kolom ID ACC dan klik *Search*
 - c. Kemudian akan tampil kode QR yang pada bagian bawahnya ada tombol *upload*.
 - d. Lakukan proses *upload* dokumen sesuai dengan kolomnya masing-masing (maksimal besaran file 10MB)
- VIII. Setelah melakukan proses *upload* akan ada pemberitahuan melalui media WhatsApp mengenai pemesanan, apakah sudah lengkap atau belum.
- IX. Jika belum lengkap, anda harus mengulangi proses *upload*.
- X. Kelengkapan data FPPS, Slip Pembayaran serta fotokopi KTP/Paspor ini agar dapat dilengkapi dan diupload selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB
- XI. Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permintaan informasi secara online, baik melalui telpon maupun email. BAE tidak akan melayani pertanyaan ataupun permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.
- XII. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas.

Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permintaan informasi secara online, baik melalui telpon maupun email. BAE tidak akan melayani pertanyaan ataupun permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.

Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
 - 2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham – saham dalam penitipan kolektif;
 - 3) KSEI, Perseroan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - 4) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI;
 - 5) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - 6) Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - 7) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perseroan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - 8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - 9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh Perseroan dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - 10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu pada tanggal 8-11 Desember 2020. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

6. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 15 Desember 2020.

7. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Nama Bank: **PT. Bank Victoria International Tbk**
Cabang: **Graha BIP**
Nomor Rekening: **0810003359**
Atas Nama: **PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia**

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama Pihak Ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Pembayaran menggunakan cek/pemindahbukuan/ giro sudah harus "*in-good fund*" pada hari terakhir masa Penawaran Umum untuk Penjamin Emisi Efek, nasabah ritel dan nasabah institusi lokal. Untuk nasabah institusi internasional yang menerima penjatahan pasti dapat melakukan pembayaran dan "*in-good fund*" paling lambat pada Tanggal Distribusi.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama Pihak Ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Pembayaran menggunakan cek/pemindahbukuan/ giro sudah harus "*in good fund*" pada hari terakhir masa Penawaran Umum untuk Penjamin Emisi Efek, nasabah ritel dan nasabah institusi, kecuali untuk nasabah institusi internasional yang menerima penjatahan pasti.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

8. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan fotokopi dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

9. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku..

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*).

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 15 Desember 2020.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- 2) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk juga jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- 3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham yang Terafiliasi, yaitu:
 - a) Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - c) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 1% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- 1) Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek dari: (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum, (ii) direktur,

komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga, dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

- (i) Pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
- (ii) Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa efek, maka sisa efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

2) Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham sesuai butir 8.B.1) diatas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (i) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Metode Penjatahan Lain

- para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh **1 (satu) sampai dengan 100 (seratus)** satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
- apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah **1 (satu) sampai 100 (seratus)** satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Sehubungan metode penjatahan yang digunakan pada Penawaran Umum ini adalah metode penjatahan lain, Manajer penjatahan telah mengajukan Surat Permohonan untuk menggunakan Metode Penjatahan Lain dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan Nomor surat 180/DIR-MASID/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dan telah mendapatkan Surat Persetujuan Menggunakan Metode Penjatahan Lain dari OJK dengan Nomor Surat S-157/PM.22/2020 tanggal 17 November 2020.

10. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan :

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;

- c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di BEI mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di BEI mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku tanpa diperlukan keputusan dan/atau penetapan Pengadilan Negeri dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali karena alasan seluruh hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi, maka para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian akibat penjatahan saham atau penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada para pemesan sehubungan dengan pembelian Saham Yang Ditawarkan Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.

Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda sebagai berikut:

- a. Untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga jasa giro pada Bank Penerima, yaitu sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun dari jumlah uang pengembalian pemesanan yang belum dikembalikan kepada pemesan, yang dihitung dari 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pengembalian, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender
- b. Pembayaran denda keterlambatan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan yang mengalami keterlambatan pembayaran.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

12. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diunduh melalui website BAE Perseroan dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

District 8, Treasury Tower
Lantai 50, SCBD Lot 28,
Jl Jend. Sudirman Kav. 52-54,
Jakarta Selatan 12190
Telepon : (021) 5088 7000
Faksimili : (021) 5088 70001
E-mail : ipo@miraeasset.co.id
www. miraeasset.co.id

Selain di Kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") dapat diperoleh di Gerai Penawaran Umum yang bertempat di PT Bima Registra, Satrio Tower, 9th Floor A2, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref No: 157/6975314-0003/WCA-KM/XII/20

3 Desember 2020

Kepada: **PT Victoria Care Indonesia Tbk**

Jalan Puri Ayu 1, Puri Lingkar Dalam Blok T No.8
Puri Indah Financial Tower 154/6975314-0003/WCA-KM/XI/20
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan
Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

Witara Cakra Advocates (WCA) in
association with White & Case LLP
Sampoerna Strategic Square
North Tower, Level 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930
T +62 21 29927000

U.p.: Direksi

Dengan hormat,

Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Saham Perdana oleh PT Victoria Care Indonesia Tbk

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yang bertandatangan di bawah ini, **Kristo Molina, S.H.**, Rekan pada kantor hukum Witara Cakra Advocates (“WCA”), terdaftar sebagai Advokat dengan Nomor 07.10513 dan juga terdaftar sebagai Konsultan Hukum, Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Nomor Pendaftaran STTD.KH-92/PM.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan telah terdaftar pada Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan Nomor anggota 200817, selaku konsultan hukum independen yang telah ditunjuk oleh PT Victoria Care Indonesia Tbk. (“Perseroan”) berdasarkan surat Perseroan Nomor 024A/SKL/HRD/VCI/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, untuk melakukan uji tuntas (selanjutnya disebut “Uji Tuntas”) terhadap Perseroan dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut “Laporan Uji Tuntas”) dan memberikan pendapat dari segi hukum mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di bidang pasar modal (“Pendapat dari Segi Hukum”), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (“Penawaran Umum Perdana”) sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 1.008.000.000 (satu miliar delapan juta) lembar saham baru biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah). Dari 1.008.000.000 (satu miliar delapan juta) lembar saham baru tersebut, seluruhnya akan ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana (“Saham Yang Ditawarkan”) dengan harga penawaran sebesar Rp100,00 per saham (“Harga Penawaran”).

Penawaran Umum Perdana atas Saham Yang Ditawarkan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”), yang bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan berdasarkan ketentuan POJK 42/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah). Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada BEI (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tertanggal 25 September 2020, bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mengambil keputusan untuk

Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau “**Program ESA**”) dengan mengalokasikan sebanyak 7,778% (tujuh koma tujuh tujuh delapan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana atau sebesar 78.398.000 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu) saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana, persentase kepemilikan masyarakat akan menjadi sebanyak 15,027% (lima belas koma nol dua puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, seluruh saham Perseroan akan dicatitkan pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) berdasarkan persetujuan prinsip pencatatan Efek bersifat Ekuitas dari BEI Nomor S-06987/BEI.PP3/11-2020 tanggal 11 November 2020.

Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Victoria Care Indonesia Nomor 28 tanggal 25 September 2020 dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0066461.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 serta telah terdaftar di Daftar Perseroan Nomor AHU-0161751.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 September 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (a) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0391263 tanggal 25 September 2020 serta (b) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0391264 tanggal 25 September 2020, keduanya telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0161751.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 (“**Akta No. 28/2020**”). Sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dana hasil Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi dengan biaya emisi efek dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana akan digunakan untuk:

- a. sekitar 26% (dua puluh enam persen) akan dialokasikan untuk pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan untuk mengembangkan fasilitas pergudangan Perseroan; dan
- b. sekitar 74% (tujuh puluh empat persen) akan dialokasikan untuk modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana secara berkala kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (“**POJK 30/2015**”). Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”).

Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan untuk mengembangkan fasilitas pergudangan Perseroan dengan menggunakan sekitar 26% (dua puluh enam persen) dari dana Penawaran Umum Perdana sebagaimana disebutkan bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur di dalam diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”) karena nilai transaksi adalah lebih kecil dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan (berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020. Namun demikian pembelian aset tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”) karena Perseroan berencana melakukan pembelian aset tetap dari yang saat ini dimiliki oleh Tuan Billy Hartono Salim (yang merupakan pihak yang mengendalikan Perseroan).

Untuk setiap penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas yang merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan/atau mengandung benturan kepentingan dan/atau merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan-peraturan tersebut.

Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan keadaan Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, terhitung sejak tanggal didirikannya sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dan dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan maupun fotokopi yang kami terima dari Perseroan, serta pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau karyawan Perseroan (sebagaimana relevan), yang hasilnya dimuat dalam Laporan Uji Tuntas atas Perseroan yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum, serta dengan tunduk pada kualifikasi dan asumsi yang kami sebutkan di bagian akhir dari Pendapat dari Segi Hukum kami, maka Pendapat dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

A. Perseroan

- A.1. Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum di Indonesia dengan nama PT Victoria Care Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian No. 32, tanggal 20 April 2006 yang dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00267 HT.01.01-TH.2006 tanggal 8 September 2006, telah didaftarkan dengan No. TDP. 090115122663 pada buku daftar di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara di bawah nomor agenda 1477/BH 09.01/IX/2006 tanggal 27 September 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 98 tanggal 8 Desember 2006 dan TBNRI No. 12916 Tahun 2006 ("**Akta Pendirian Perseroan**") dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta No. 28/2020 yang juga memuat keseluruhan anggaran dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar Perseroan**"). Akta No. 28/2020, memuat persetujuan para pemegang saham Perseroan antara lain untuk :

1. perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;
2. peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp285.000.000.000 (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah);
3. pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk setiap saham menjadi Rp50,00 (lima puluh Rupiah) untuk setiap saham, dan sehubungan dengan hal tersebut mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan;
4. persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat, dengan harga penawaran saham dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan pihak-pihak terkait, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, termasuk POJK dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia (di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan);
5. pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan masing-masing saham dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) dan selanjutnya menawarkan/menjual Saham Yang Ditawarkan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di bidang Pasar Modal, termasuk POJK dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia (di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan);

6. pelaksanaan Program ESA (*Employee Stock Allocation*) sebanyak-banyaknya 7,778% dari jumlah seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum;
7. pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses Penawaran Umum tersebut di atas;
8. pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilakukannya Penawaran Umum, yang terdiri atas saham-saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum dan saham-saham yang telah dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan pada BEI (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan KSEI;
9. perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) selama masa jabatan mereka, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham yang tertuang dalam Akta No. 28/2020 dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK;
10. pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada (i) menetapkan penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum tersebut, (ii) untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, serta (iii) mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan KSEI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum kepada masyarakat; dan
11. perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan antara lain berdasarkan (a) Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (b) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan (c) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”), dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU 40/2007**”), perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka sebagaimana disetujui Akta No. 28/2020 tersebut di atas berlaku sejak dilaksanakan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta No.28/2020 telah memenuhi ketentuan Peraturan IX.J.1, POJK 15/2020, dan POJK 33/2014.

Akta Pendirian Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Akta No.28/2020 telah dibuat secara sah dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta No.28/2020, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang:

1. Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap, parfum dan kosmetik;
2. Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya; dan
3. Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan yang tidak dapat diklasifikasikan lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Industri kosmetik (termasuk pasta gigi), yang mencakup usaha pembuatan kosmetik, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut seperti shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit seperti krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur, produk untuk kebersihan badan seperti sabun mandi, deodorant, garam mandi dan obat perontok bulu, krim cukur dan kosmetik tradisional. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas, termasuk produk pengkilap gigi dan perekat gigi;
2. Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, yang mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tissue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengkilap dan krim untuk barang dari kulit, pengkilap dan krim untuk kayu, pengkilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok;
3. Perdagangan besar kosmetik, yang mencakup usaha perdagangan besar kosmetik seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya; dan
4. Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran, yang mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.

Selain itu, untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi (JPT), yang mencakup usaha pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara;
2. Kegiatan usaha pergudangan dan penyimpanan, yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersil;
3. Kegiatan usaha sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak

cipta, yang mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik aset non finansial dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. Kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) aset non finansial yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, *trade mark* dan *service mark*, *brand name*, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian *franchise*/waralaba dan aset non finansial yang tak berwujud lainnya;

4. Kegiatan usaha industri produk farmasi untuk manusia, yang mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen Kesehatan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspense, sabun antiseptic serta benang bedah. Termasuk industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal dan obat kontrasepsi hormonal, industri alat-alat diagnosa medis, termasuk uji kehamilan, industri substansi diagnosa in-vivo radioaktif, industri farmasi bioteknologi dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik;
5. Kegiatan usaha perdagangan besar farmasi, yang mencakup usaha perdagangan besar farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan;
6. Kegiatan usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu, yang mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu;
7. Kegiatan usaha industri kertas tissue, yang mencakup usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, facial tissue, toilet tissue, lens tissue, sapu tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin dan napkin untuk bayi dan cangkir, piring dan baki dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, tampon dan sebagainya dan kertas sigaret dan cork tipping paper; dan
8. Kegiatan usaha industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton, yang mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file kantor dan barang sejenisnya.

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud di atas adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Peraturan IX.J.1 Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan perizinan yang dimiliki oleh Perseroan.

- A.3. Sebagaimana tercantum dalam Akta 28/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat sebelum Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		%
		Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		500.000.000.000	10.000.000.000	
1.	PT Sukses Sejati Sejahtera	284.919.000.000	5.698.380.000	99,97%
2.	Luhur Dino Herlambang	81.000.000	1.620.000	0,03%
Modal Ditempatkan		285.000.000.000	5.700.000.000	100,00%
Saham Portepel		215.000.000.000	4.300.000.000	

Setiap perubahan struktur permodalan Perseroan dan/atau perubahan kepemilikan saham Perseroan dalam waktu 3 (tiga) tahun sebelum tanggal Pendapat dari Segi Hukum (serta segala penyetoran untuk modal ditempatkan dan disetor) adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, pengendali dari Perseroan adalah Billy Hartono Salim dan *ultimate beneficial owner* dari Perseroan adalah Anne Vabilia Salim, serta Perseroan telah menyampaikan informasi mengenai *ultimate beneficial owner* Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Perseroan telah memenuhi kewajiban mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang pencatatannya telah sesuai dengan UU 40/2007.

- A.4. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum, susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah diangkat oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No.28/2020, yaitu sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Billy Hartono Salim
 Direktur : Sumardi Widjaja
 Direktur : Rosid Sujono
 Direktur : Henny Soetanto

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Luhur Dino Herlambang
 Komisaris : Luhur Iwan Hernadi
 Komisaris Independen : Drs. Herbudianto

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk persyaratan berdasarkan POJK 33/2014. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

A.5. Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/SK-KOM/VCI/IX/2020 tanggal 28 September 2020, dengan susunan anggota Komite Audit untuk masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat yaitu:

1. Ketua : Drs. Herbudianto;
2. Anggota : Yustinus Linardi Ridjab; dan
3. Anggota : Wardiman Wijaya.

Komite Audit Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagai panduan pelaksanaan tugas Komite Audit yang tertuang dalam Piagam Komite Audit yang ditandatangani Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 28 September 2020.

A.6. Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan mengangkat David Wilyanto sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan dan Lokita Elisabeth Cecilia sebagai anggota Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/SK-DIR/VCI/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

Unit Audit Internal Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagai panduan pelaksanaan tugas Unit Audit Internal yang tertuang dalam Piagam Audit Internal yang ditandatangani Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 28 September 2020.

A.7. Dalam rangka peningkatan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 34/2014**”), Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/SK-KOM/VCI/IX/2020 tanggal 28 September 2020, dengan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat yaitu:

1. Ketua : Drs. Herbudianto;
2. Anggota : Luhur Dino Herlambang; dan
3. Anggota : Luhur Iwan Hernadi.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai panduan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan POJK 34/2014 yang tertuang dalam Piagam Komite Nominasi & Remunerasi yang ditandatangani Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 28 September 2020.

A.8. Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Alfonsa Sheila Widyatna sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 007/SK-DIR/VCI/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

A.9. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan menjalankan kegiatan operasional pada 1 (satu) kantor pusat dan 5 (lima) kantor cabang.

A.10. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dan juga perizinan di bidang lingkungan hidup dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut dan juga

perizinan di bidang lingkungan hidup tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini kecuali sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Registrasi Permohonan Elektronik No. JSHS6G yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Perseroan telah mengajukan permohonan TDG untuk gudang Perseroan di KO Semanan Megah, Jakarta Barat, dan selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan No. Registrasi 20101198 tanggal 10 Oktober 2020 melalui sistem dalam jaringan DPMPTSP Kota Bandung, Perseroan sedang dalam proses verifikasi berkas untuk permohonan TDG untuk gudang Perseroan yang terletak di Kota Bandung. Berdasarkan UU 7/2014 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) juncto PP 33/2019 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) juncto Permendag 90/2014 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) apabila Perseroan tidak memiliki TDG Perseroan dapat dikenakan sanksi peringatan tertulis, penutupan gudang untuk waktu tertentu dan/atau denda paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan belum pernah mendapat teguran ataupun sanksi apapun, baik lisan maupun tertulis, dari instansi pemerintah terkait sehubungan dengan belum diperolehnya TDG untuk gudang-gudang Perseroan di KO Semanan Megah dan Kota Bandung. Mengingat hal tersebut, dan juga bahwa pada saat ini Perseroan telah memulai proses untuk memperoleh TDG tersebut, Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa belum diperolehnya TDG tersebut tidak akan berdampak secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perseroan bermaksud untuk tetap melangsungkan kegiatan usaha seperti sedia kala; dan

2. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, sehubungan dengan izin dan lisensi yang disebutkan di bawah ini, Perseroan sedang dalam proses untuk (i) melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian peralatan terkait, dan/atau (ii) mengikutsertakan petugas terkait dalam pelatihan dan/atau sertifikasi terkait di Lembaga K3 terkait:
 - (i) Izin Pemakaian / Pengesahan Penggunaan Bejana Tekanan dan Tangki Timbun. Perseroan mengestimasi bahwa Perseroan akan mendapatkan sertifikat terkait pada tanggal 15 Desember 2020;
 - (ii) Izin Pemakaian / Pengesahan Pesawat Tenaga dan Produksi. Perseroan mengestimasi bahwa Perseroan akan mendapatkan sertifikat terkait pada tanggal 15 Desember 2020;
 - (iii) Lisensi Operator K3 di bidang Bejana Tekanan dan Tangki Timbun Perseroan mengestimasi bahwa Perseroan akan mendapatkan sertifikat terkait pada tanggal 15 Februari 2021;
 - (iv) Lisensi Teknisi K3 di bidang Bejana Tekanan dan Tangki Timbun, Perseroan mengestimasi bahwa Perseroan akan mendapatkan sertifikat terkait pada tanggal 15 Februari 2021;
 - (v) Lisensi Teknisi K3 di bidang Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Angkat dan Angkut, dan Listrik. Perseroan mengestimasi bahwa Perseroan akan mendapatkan sertifikat terkait pada tanggal 15 Februari 2021; dan
 - (vi) Sertifikasi Juru Las (*welder*) di bidang Bejana Tekanan dan Tangki Timbun.

Perseroan mengestimasikan bahwa Perseroan akan mendapatkan sertifikat terkait pada tanggal 15 Februari 2021.

Apabila Perseroan lalai atau tidak memiliki izin-izin atau memperoleh lisensi sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Ketentuan K3 Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam UU Keselamatan Kerja (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan/atau sesuai UU Ketenagakerjaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) antara lain berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan/atau pencabutan izin.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan belum pernah mendapat teguran ataupun sanksi apapun, baik lisan maupun tertulis, dari instansi pemerintah terkait sehubungan dengan belum diperolehnya izin dan lisensi terkait K3 tersebut di atas. Mengingat hal tersebut, dan juga bahwa pada saat ini Perseroan telah memulai proses untuk memperoleh izin dan/atau lisensi K3 tersebut, Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa belum diperolehnya izin dan/atau lisensi K3 tersebut tidak akan berdampak secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perseroan bermaksud untuk tetap melangsungkan kegiatan usaha seperti sedia kala.

- A.11. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi semua kewajiban-kewajiban berdasarkan izin-izin penting dan material yang dimiliki oleh Perseroan, dan/atau sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali pelaporan LKPM Kantor Pusat, Kantor Cabang Jakarta Barat dan Kantor Cabang Semarang untuk periode Triwulan I Tahun 2020. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan secara sistem sudah tidak dapat lagi memasukkan data pelaporan LKPM untuk Kantor Pusat, Kantor Cabang Jakarta Barat dan Kantor Cabang Semarang untuk periode Triwulan I Tahun 2020. Apabila Perseroan tidak menyampaikan LKPM, berdasarkan Pasal 32 Peraturan BKPM 7/2018 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif secara berurutan berupa (a) peringatan tertulis atau secara daring, (b) pembatasan kegiatan usaha, (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau perizinan penanaman modal dan/atau fasilitas penanaman modal yang ada. Pengenaan sanksi poin (a) sampai dengan (c) dapat mengakibatkan pemblokiran hak akses untuk mengurus perizinan dan fasilitas lainnya secara daring. Dalam hal Perseroan memperoleh surat peringatan dari BKPM atau sanksi administratif lainnya dari BKPM, berdasarkan surat Pernyataan Direksi Perseroan, Perseroan berkomitmen untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak BKPM agar Perseroan dapat melakukan penyampaian LKPM untuk periode Triwulan I Tahun 2020.
- A.12. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki dan menguasai aset tetap dengan rincian sebagai berikut:
1. Aset tetap yang dimiliki Perseroan
Aset tetap berupa kepemilikan atas bidang tanah dengan alas hak berupa 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) dengan total luas kurang lebih 29.954m²;
 2. Aset tetap yang dikuasai Perseroan
Aset tetap berupa unit apartemen dengan alas hak berupa 6 (enam) Perjanjian Pengikatan Jual Beli, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

- a. 5 (lima) unit apartemen yang terletak di *The Windsor* dengan alas hak berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan total luas keseluruhan kurang lebih 559m². Berdasarkan Surat Keterangan dari PT Antilope Madju Puri Indah selaku pengembang ("AMPI") No. 4162/AMPI-RE/HK/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, menyatakan bahwa pengurusan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun ("SHMSRS") atas nama AMPI telah selesai dan akan dilakukan proses akta jual beli;
- b. 21 (dua puluh satu) unit kantor di Puri Indah Financial Tower dengan alas hak berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan total luas keseluruhan kurang lebih 3.112,24m². Berdasarkan Surat Keterangan AMPI, No. 4161/AMPI-RE/HK/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, menyatakan bahwa pengurusan SHMSRS sedang dalam proses permohonan penerbitan akta pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan estimasi proses pertelaan dan pengurusan SHMSRS atas nama AMPI akan selesai pada tahun 2022.

Aset tetap Perseroan berupa tanah dan bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan tersebut telah didukung oleh dokumen yang sah dan pemilikannya dan/atau penguasaannya telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hak-hak Perseroan atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas bidang-bidang tanah dan bangunan tersebut masih berlaku.

Sampai tanggal Pendapat Segi Hukum ini, (i) bidang tanah di bawah ini telah dijaminan kepada PT Bank Central Asia Tbk dengan hak tanggungan untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan (ii) unit apartemen di bawah ini telah dijaminan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan hak tanggungan untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BRI (sebagaimana didefinisikan di bawah ini):

Jaminan Hak Tanggungan/Kuasa Memberikan Hak Tanggungan sehubungan dengan Perjanjian Kredit BCA

- a. SHGB No. 8643/ Semanan berdasarkan Akta Hak Tanggungan No. 279/2018 tanggal 11 Juli 2018;
- b. SHGB No. 8645/ Semanan berdasarkan Akta Hak Tanggungan No. 281/2018 tanggal 11 Juli 2018;
- c. SHGB No. 8646/ Semanan berdasarkan Akta Hak Tanggungan No. 282/2018 tanggal 11 Juli 2018;
- d. SHGB No. 8644/ Semanan berdasarkan Akta Hak Tanggungan No. 280/2018 tanggal 11 Juli 2018;
- e. SHGB No. 8647/Semanan berdasarkan Akta Hak Tanggungan No. 283/2018 tanggal 11 Juli 2018;
- f. SHGB No. 03086 berdasarkan Akta Hak Tanggungan No. 404/2018 tanggal 4 Juni 2018;
- g. SHGB No. 3177 berdasarkan Akta Hak Tanggungan No. 405/2018 tanggal 4 Juni 2018;
- h. Apartemen the Puri Indah Financial Tower Unit 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1101, 1102, 1103, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, dan 1105.

Jaminan Hak Tanggungan/Kuasa Memberikan Hak Tanggungan sehubungan dengan

Perjanjian-Perjanjian Kredit BRI

- a. Apartemen the Windsor unit 1583;
- b. Apartemen the Windsor unit 1585;
- c. Apartemen the Windsor unit 1586;
- d. Apartemen the Windsor unit 1571; dan
- e. Apartemen the Windsor unit 1572.

Direksi Perseroan memiliki keyakinan atas kemampuan membayar utang Perseroan kepada kreditur sehingga Perseroan berkeyakinan dampak dilakukannya eksekusi atas material Perseroan adalah kecil.

- A.13. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, seluruh merek yang dimiliki dan digunakan untuk usaha Perseroan di Indonesia adalah berdasarkan 25 sertifikat merek yang seluruhnya masih berlaku dan terdaftar atas nama Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama Merek	Nomor Pendaftaran
1.	Sixsence	IDM000362913
2.	Sixsence	IDM000390364
3.	Victoria	IDM000342562
4.	Herborist	IDM000363199
5.	Herborist	IDM000621519
6.	Herborist	IDM00170539
7.	Herborist	IDM000470827
8.	Herborist	IDM000666804
9.	Iria	IDM000216216
10.	Miranda	IDM000216124
11.	Miranda	IDM000244079
12.	Nuface	IDM000362689
13.	Nuface	IDM000362166
14.	Nuface	IDM000224145
15.	Nuface	IDM000250150
16.	CBD	IDM000637400
17.	FHM	IDM000218888
18.	Fajari	IDM000334095
19.	Beauty café	IDM000621150
20.	Beauty café	IDM000168436
21.	Body Scent	IDM000240864
22.	Body Scent	IDM000621151
23.	Basic	IDM000062966
24.	Omah Herborist	IDM000531685

No.	Nama Merek	Nomor Pendaftaran
25.	Omah Herborist	IDM000646747

Merek-merek di atas tidak dalam kondisi dibebankan atau dijaminkan untuk menjamin kewajiban pembayaran utang Perseroan.

A.14. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki aset bergerak material berupa mesin dan peralatan material yang digunakan untuk produksi Perseroan. Seluruh aset material berupa mesin yang dimiliki dan dikuasai Perseroan tersebut telah didukung oleh dokumen yang sah dan pemilikannya dan penguasaannya telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagian aset material berupa mesin yang dimiliki dan dikuasai Perseroan tersebut sedang dijaminkan dengan jaminan fidusia kepada Bank Central Asia untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 tanggal 4 Mei 2018, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00286950.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018.

A.15. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki perlindungan asuransi yang masih berlaku terhadap harta kekayaannya yang bersifat material dan penting terhadap kegiatan usaha Perseroan seperti diantaranya asuransi *Property All Risks and Earth Quake*. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan, nilai pertanggungan masing-masing asuransi yang dimiliki Perseroan tersebut cukup dan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup kerugian atas risiko yang dipertanggungjawabkan sebagaimana tercantum dalam masing-masing polis asuransi terkait.

A.16. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menandatangani 1 (satu) perjanjian peminjaman (hutang) dengan PT Bank Central Asia Tbk, sebagaimana telah diubah terkait dengan pemberian pinjaman rekening koran dan kredit investasi ("**Perjanjian Kredit BCA**") dan 2 (dua) perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk terkait dengan pemberian kredit pemilikan rumah ("**Perjanjian-Perjanjian Kredit BRI**").

Perjanjian Kredit BCA dan Perjanjian-Perjanjian Kredit BRI yang telah ditandatangani oleh Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut. Perseroan tidak memperoleh fasilitas kredit selain dari PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia berdasarkan perjanjian-perjanjian yang disebutkan di atas.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk yang membebaskan Perseroan dari beberapa persyaratan negatif dan *financial covenants* terkait yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan perubahan status kelembagaan Perseroan menjadi perusahaan terbuka dan larangan pembagian dividen, serta merugikan hak-hak pemegang saham publik melalui penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1333/2020 tanggal 8 Oktober 2020.

A.17. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat memiliki dampak yang material terhadap usaha Perseroan, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan yang bersangkutan.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana, dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

- A.18. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak yang berelasi dengan Perseroan, yaitu (i) Perjanjian Penunjukan Distributor Produk PT Natura Pesona Mandiri dengan PT Natura Pesona Mandiri, (ii) Perjanjian Produksi Kosmetik dengan PT Natura Pesona Mandiri, (ii) Perjanjian Sewa Menyewa dengan Billy Hartono Salim, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 12 Oktober 2020 dengan Billy Hartono Salim ("**Perjanjian Jual Beli Bangunan SHGB 03088/Ngaliyan**")

Seluruh perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak afiliasi tersebut adalah sah, mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut serta masih berlaku. Sifat dari perjanjian dan/atau transaksi tersebut adalah terkait kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha Perseroan, dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan (kecuali Perjanjian Jual Beli Bangunan SHGB 03088/Ngaliyan yang ditandatangani Perseroan untuk rencana pembelian sebidang tanah dan bangunan untuk pergudangan dari Billy Hartono Salim) dan perjanjian dan/atau transaksi tersebut telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana sehingga dikecualikan berdasarkan Peraturan POJK 42/2020.

- A.19. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan:

1. telah memenuhi kewajiban ketenagakerjaan yang material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. telah memiliki peraturan perusahaan yang mengikat Perseroan dan karyawan Perseroan yang berlaku sampai dengan 8 November 2020 serta Perseroan saat ini sedang menunggu diterbitkannya lembar pengesahan pembaharuan peraturan perusahaan Perseroan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait;
3. telah mengikutsertakan karyawan Perseroan dalam program BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; dan
4. telah memenuhi kewajiban pembayaran upah karyawan Perseroan sesuai dengan upah minimum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan:

Dalam hal Perseroan belum memperoleh lembar pengesahan pembaharuan peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud di atas tersebut, Perseroan dapat dianggap belum mengajukan pembaharuan peraturan perusahaan dan berdasarkan UU Ketenagakerjaan, Perseroan dapat dikenakan denda maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

- A.20. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan

yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau menerima somasi yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana yang akan dilakukan oleh Perseroan.

B. Penawaran Umum

- B.1. Penerbitan saham baru Perseroan yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta No.28/2020.
- B.2. Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini akan memberikan hak yang sama kepada pemegangnya dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan/atau dimiliki oleh pemegang saham Perseroan pada saat dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.
- B.3. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani:
 - 1. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Victoria Care Indonesia Tbk, antara Perseroan dan PT Bima Registra No. 31 tanggal 29 September 2020 dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang disuplemen dan/atau diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek No. 34 tanggal 26 November 2020, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta;
 - 2. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Victoria Care Indonesia Tbk, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek No. 30 tanggal 29 September 2020, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang disuplemen dan/atau diubah berdasarkan (i) Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Victoria Care Indonesia Tbk, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek No. 20 tanggal 12 November 2020, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan (ii) Akta Addendum-II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Victoria Care Indonesia Tbk, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek No. 33 tanggal 26 November 2020, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta; dan
 - 3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan Nomor Pendaftaran SP-065/SHM/KSEI/0920 tanggal 23 Oktober 2020, antara Perseroan dan KSEI.

Seluruh perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana tersebut adalah sah, mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut serta masih berlaku.

- B.4. Dana hasil Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi dengan biaya emisi efek dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana, seluruhnya akan digunakan untuk:
 - 1. sekitar 26% (dua puluh enam persen) akan dialokasikan untuk pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan untuk mengembangkan fasilitas pergudangan Perseroan; dan

2. sekitar 74% (tujuh puluh empat persen) akan dialokasikan untuk modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana secara berkala kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK 30/2015. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui RUPS.

Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan untuk mengembangkan fasilitas pergudangan Perseroan dengan menggunakan sekitar 26% (dua puluh enam persen) dari dana Penawaran Umum Perdana (i) bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur di dalam diatur dalam POJK 17/2020 karena nilai transaksi adalah lebih kecil dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan (berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020), dan (ii) merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur di dalam POJK 42/2020 karena Perseroan berencana melakukan pembelian aset tetap dari yang saat ini dimiliki oleh Billy Hartono Salim (yang merupakan pihak yang mengendalikan Perseroan).

Untuk setiap penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas yang merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan/atau mengandung benturan kepentingan dan/atau merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan-peraturan tersebut.

- B.5. Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan tidak bertentangan dengan Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum mengingat seluruh saham yang ditawarkan di dalam Penawaran Umum Perdana adalah saham baru atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan.
- B.6. Pelaksanaan Program ESA, sepanjang terkait dengan jumlah saham yang dialokasikan untuk Program ESA, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.7 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- B.7. Pengungkapan dalam beberapa bagian dalam Prospektus sejauh terkait dengan aspek hukum Perseroan adalah benar dan sesuai dengan pengungkapan pada Laporan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum.

C. Kualifikasi dan Asumsi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

C.1. Kualifikasi

1. Pendapat dari Segi Hukum ini disusun untuk memenuhi keperluan Perseroan berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana;
2. dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, untuk pemeriksaan sehubungan dengan data dan/atau informasi yang ada/terjadi didasarkan pada setiap data dan/atau

informasi yang ada sampai dengan 3 Desember 2020 (“**Batas Waktu Penerimaan Dokumen**”);

3. kami tidak melakukan penilaian (a) ketaatan dan kebenaran atas pembayaran pajak dan (b) komersial dan keuangan dari Perseroan dan para pemegang sahamnya; mengenai perpajakan, kami hanya melakukan pemeriksaan atas telah disampaikannya surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan pajak penghasilan badan dan pajak atas tanah dan bangunan Perseroan;
4. sehubungan dengan tanah dan perizinan yang terkait dengan tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan, kami hanya melakukan pemeriksaan terhadap tanah yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang. Untuk menghindari keragu-raguan, kami tidak memberikan pendapat dari segi hukum atas penguasaan dan/atau penggunaan/pengusahaan tanah oleh Perseroan selain dari tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan;
5. uraian dan penjelasan yang diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas dan oleh karenanya Pendapat dari Segi Hukum ini semata-mata berdasarkan hukum dan praktek yang berlaku di Negara Republik Indonesia sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen, dan kami tidak mendasarkan uraian dan penjelasan tersebut pada atau membuat penafsiran menurut hukum dan praktek yang berlaku di negara lain selain Negara Republik Indonesia;
6. sehubungan dengan Pendapat dari Segi Hukum kami terkait dengan keterlibatan perkara Perseroan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan standar Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) sesuai dengan Keputusan HKHPM KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 *juncto* Surat Edaran HKHPM No. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 tentang Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, kami hanya kami hanya melakukan penelitian mandiri atas keterlibatan mereka dalam perkara hukum dalam instansi peradilan di Indonesia melalui situs web dari masing-masing instansi peradilan terkait dan kami mendasarkannya kepada pernyataan-pernyataan tertulis dan lisan yang kami peroleh dan terima dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
7. Sehubungan dengan pemeriksaan perkara di situs web dari masing-masing instansi peradilan terkait, perlu diketahui bahwa (i) tidak ada jaminan bahwa informasi dalam *website* lembaga peradilan terkait adalah informasi terkini yang secara berkala dilakukan pemutakhiran oleh peradilan terkait; dan (ii) di Indonesia belum memiliki lembaga penyedia informasi publik yang dapat diandalkan untuk memperoleh informasi secara komprehensif tentang keterlibatan Perseroan maupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas sengketa hukum/perselisihan pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
8. untuk fakta-fakta yang tidak diungkapkan secara tertulis oleh Perseroan kepada kami tetapi bersifat material bagi Pendapat dari Segi Hukum ini maupun bagian-bagian yang terkandung di dalamnya, kami mendasarkan pendapat kami pada konfirmasi-konfirmasi, pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diterima oleh kami sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
9. berdasarkan UU 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan. Selanjutnya dengan berlakunya UU 40/2007, Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan yang dimaksudkan untuk memuat data tentang

perseroan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UU 40/2007. Namun, berdasarkan ketentuan dalam 29 UU 40/2007, Daftar Perseroan yang diselenggarakan Menkumham tidak dapat dikaitkan dengan Daftar Perusahaan yang didaftarkan di Kantor Daftar Perusahaan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan. Dalam Laporan Uji Tuntas, kami terdapat perubahan anggaran dasar Perseroan yang dibuat setelah berlakunya UU 40/2007 yang tidak dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan karena perubahan anggaran dasar tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham yang menjadi alasan tidak diterimanya pendaftaran dalam Daftar Perusahaan oleh pejabat yang berwenang, walaupun UU 3/1982 belum dicabut dan masih berlaku. Selanjutnya, berdasarkan Uji Tuntas kami menemukan beberapa perubahan Anggaran Dasar Perseroan UU 40/2007 yang tidak didaftar berdasarkan UU 3/1982 sebagaimana kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas. Berdasarkan UU 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00. Namun sepanjang pengetahuan kami sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, kami tidak pernah mengetahui adanya kasus dimana instansi terkait menerapkan sanksi tersebut pada perusahaan-perusahaan yang lalai dari kewajiban berdasarkan untuk menyelenggarakan kewajiban Daftar Perusahaan berdasarkan UU 3/1982 sehingga kami menganggapnya sebagai hal yang tidak bersifat material dan/atau mengganggu kondisi keuangan atau usaha Perseroan.

C.2. Asumsi

1. setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan mengenai Perseroan kepada kami adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
2. setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan mengenai Perseroan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan dan/atau salinan adalah lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan dokumen aslinya, dan dokumen aslinya tersebut adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan dan telah dibuat dan ditandatangani oleh orang (-orang) yang berhak dan berwenang berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
3. semua tanda tangan, meterai, coretan/koreksi dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah asli, sah dan berlaku;
4. terkait dengan persetujuan pasangan dalam rangka pengalihan saham (apabila ada), kami mendasarkan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum kami berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam dokumen pengalihan saham yang dibuat oleh para pihak baik dalam bentuk akta notaris maupun perjanjian bawah tangan. Apabila tidak ada keterangan mengenai persetujuan pasangan dalam dokumen pengalihan saham yang terkait, kami mengasumsikan bahwa pemegang saham yang melakukan pengalihan telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pasangannya atau

pemegang saham yang melakukan pengalihan tidak memerlukan adanya persetujuan terlebih dahulu dari pasangannya;

5. semua tanda tangan, meterai, coretan/koreksi dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan atau salinan adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya, dan tanda tangan, meterai, coretan serta tanda yang terdapat dalam dokumen aslinya tersebut adalah asli, sah dan berlaku;
6. setiap dokumen konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang kami terima atau peroleh dari pihak Perseroan mengenai Perseroan baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, termasuk konfirmasi, pernyataan atau keterangan dari Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan adalah benar dan menggambarkan situasi dan kondisi yang terakhir serta sesuai dengan kenyataan;
7. Dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dalam bentuk asli maupun fotokopi, dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami maupun diberikan dari pihak ketiga kepada Perseroan yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak ada dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan yang tidak disediakan kepada kami yang dapat mengakibatkan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum ini menjadi tidak akurat dan menyesatkan serta telah diberikan oleh Instansi Pemerintah dalam hal izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran, yang diwakili oleh orang(-orang) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan dan/atau menandatangani dokumen tersebut; dan
8. setiap pernyataan atau jaminan yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami untuk keperluan penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini, baik dalam bentuk asli atau dalam bentuk fotokopi, adalah benar dan sesuai dengan kenyataan.

D. Lain-lain

Istilah-istilah yang digunakan di dalam Pendapat dari Segi Hukum ini (apabila belum didefinisikan di atas) memiliki arti sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

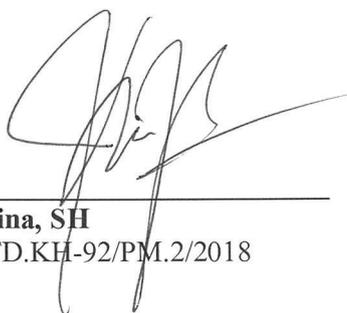
- | | |
|-----------------------|---|
| Ketentuan K3 | : Permenaker 8/2020 juncto Permenaker 37/2016 juncto Permenaker 38/2016 juncto Permenaker 6/2017 juncto Permenaker 12/2015. |
| Permen LHK 8/2013 | : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan. |
| Peraturan BKPM 7/2018 | : Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. |

- Permenaker 6/2017 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator.
- Permenaker 8/2020 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- Permenaker 12/2015 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja (sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.33 Tahun 2015).
- Permenaker 37/2016 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun.
- Permenaker 38/2016 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi.
- Permendag 25/2020 : Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2020 tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.
- Permendag 90/2014 : Peraturan Menteri Perdagangan No. 90/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang (sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 16/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016).
- PP 27/2012 : Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- PP 33/2019 : Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Gedung Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang.
- UU 28/2002 : Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- UU Keselamatan Kerja : Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- UU Ketenagakerjaan : Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Demikianlah Pendapat dari Segi Hukum ini kami persiapkan berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang independen, tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan, tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini. Pendapat dari Segi Hukum ini menggantikan setiap Pendapat dari Segi Hukum yang telah kami tujukan kepada Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana.

Hormat kami,

WITARA CAKRA ADVOCATES



Kristo Molina, SH

Nomor STTD.KH-92/PM.2/2018

Tembusan:

- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
- Direktorat Hukum OJK;
- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil OJK; dan
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK
("PERUSAHAAN")
TANGGAL 31 JULI 2020 DAN UNTUK PERIODE
TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 JULI 2020 DAN 2019, DAN TANGGAL 31
DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN**

**DIRECTORS' STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR
FINANCIAL STATEMENTS OF
PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK
("THE COMPANY")
AS OF JULY 31, 2020 AND FOR
THE SEVEN-MONTH PERIODS ENDED
JULY 31, 2020 AND 2019, AND
AS OF DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi / *For and on the behalf of the Board of Directors,*

Kami yang bertanda tangan dibawah ini / *We, the undersigned:*

- | | |
|---|---|
| 1. Nama / <i>Name</i> | : Billy Hartono Salim |
| Alamat kantor / <i>Office address</i> | : Puri Indah Financial Tower Lt. 10-11, Puri Lingkar Dalam Blok T-8, Kembangan, Puri Indah, Jakarta Barat 11610 |
| Alamat domisili sesuai KTP / <i>Domicile as Stated in ID Card</i> | : Citra Garden 2 Blok F-2/25, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat |
| Nomor Telepon / <i>Phone Number</i> | : 021 - 54368111 |
| Jabatan / <i>Position</i> | : Direktur Utama / <i>President Director</i> |
| 2. Nama / <i>Name</i> | : Henny Soetanto |
| Alamat kantor / <i>Office address</i> | : Puri Indah Financial Tower Lt. 10-11, Puri Lingkar Dalam Blok T-8, Kembangan, Puri Indah, Jakarta Barat 11610 |
| Alamat domisili sesuai KTP / <i>Domicile as Stated in ID Card</i> | : Kalinci III No. 6, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat |
| Nomor Telepon / <i>Phone Number</i> | : 021 - 54368111 |
| Jabatan / <i>Position</i> | : Direktur / <i>Director</i> |

Menyatakan bahwa / *state that:*

- | | |
|--|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan; | 1. <i>We take the responsible for the preparation and presentation of financial statements of the Company;</i> |
| 2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia; | 2. <i>The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK");</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information in the financial statements of the Company has been completely and properly disclosed;</i> |
| b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The financial statements of the Company do not contain any improper material information or facts and do not omit any material information or facts;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan. | 4. <i>We are responsible for internal control system of the Company.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus, this statement is made truthfully.

Jakarta, 19 Oktober 2020 / *October 19, 2020*



PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK
SKEAEAHF722514671
6000
EMASRUBURUPIAH

Billy Hartono Salim
Direktur Utama/President Director

Henny Soetanto
Direktur/Director

PT. VICTORIA CARE INDONESIA

HO : Puri Indah Financial Tower Lt. 10-11, Puri Lingkar Dalam Blok T-8, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610. Telp.: +62 21 5436 8111 (Hunting)
FACTORY : Kawasan Industri Candi Blok SA No. 8, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Semarang, Telp.: +62 24 7463 3311, Fax: +62 24 7463 3308

Halaman ini sengaja dikosongkan

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 02036/2.1032/AU.1/04/1561-1/1/X/2020

Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Victoria Care Indonesia Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Victoria Care Indonesia Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019 dan 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 02036/2.1032/AU.1/04/1561-1/1/X/2020

The Shareholders, and the Boards of Commissioners and Directors
PT Victoria Care Indonesia Tbk

We have audited the accompanying financial statements of PT Victoria Care Indonesia Tbk (the "Company"), which comprise the statements of financial position as of July 31, 2020 and December 31, 2019 and 2018, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the seven-month period ended July 31, 2020 and the years ended December 31, 2019 and 2018, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free of material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audits to obtain reasonable assurance whether such financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. G2C36/2.1032/AU.1/04/1561-1/1/X/2020 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyedakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Victoria Care Indonesia Tbk tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019 dan 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. G2C36/2.1032/AU.1/04/1561-1/1/X/2020 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Victoria Care Indonesia Tbk as of July 31, 2020 and December 31, 2019 and 2018, and its financial performance and cash flows for the seven-month period ended July 31, 2020 and the years ended December 31, 2019 and 2018, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 02036/2.1032/AU.1/04/1561-1/1/X/2020 (lanjutan)

Hal-hal lain

Informasi keuangan Perusahaan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2020 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, tidak diaudit atau tidak direviu.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("Penawaran Umum"), serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 01996/2.1032/AU.1/04/1561-1/1/IX/2020 bertanggal 28 September 2020 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Juli 2020 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan Perusahaan di bawah ini. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut di atas dengan pengungkapan tambahan tertentu.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 02036/2.1032/AU.1/04/1561-1/1/X/2020 (continued)

Other matters

The financial information of the Company for the seven-month period ended July 31, 2019, which are presented as corresponding figures to the financial statements as of July 31, 2020 and for the seven-month period then ended, were neither audited nor reviewed.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority ("Public Offering"), and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

We have previously issued Independent Auditors' Reports No. 01996/2.1032/AU.1/04/1561-1/1/IX/2020 dated September 28, 2020 on the financial statements of the Company as of July 31, 2020 and for the seven-month period then ended, and as of December 31, 2019 and 2018, and for the years then ended, prior to the reissuance of the financial statements of the Company mentioned below. In connection with the proposed Public Offering, the Company reissued the above-mentioned financial statements with certain additional disclosures.

Purwanto, Sungkoro & Surja



Benediktio Salim, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1561/Public Accountant Registration No. AP.1561

19 Oktober 2020/October 19, 2020

No. : 00392/2.0959/AU.1/04/1316-1/1/X/2020

**Laporan Auditor Independen
Independent Auditors' Report**

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi
PT Victoria Care Indonesia**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Victoria Care Indonesia ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab manajemen atas laporan
keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Gani Sigiro & Handayani
Sampoerna Strategic Square
South Tower Level 25
Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan 12930
Indonesia

T +62 (21) 5795 2700
F +62 (21) 5795 2727

**The Stockholders, Board of Commissioners
and Directors
PT Victoria Care Indonesia**

We have audited the accompanying financial statements of PT Victoria Care Indonesia ("The Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2017, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended December 31, 2017, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

**Management's responsibility for the
financial statements**

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Gani Sigiro & Handayani

Halaman 2**Tanggung jawab auditor (lanjutan)**

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Victoria Care Indonesia tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Page 2**Auditors' responsibility (continued)**

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Victoria Care Indonesia as of December 31, 2017, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Halaman 3**Penekanan suatu hal**

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 25 atas laporan keuangan, manajemen menyajikan kembali laporan keuangan PT Victoria Care Indonesia pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 sehubungan dengan reklasifikasi akun dan menyajikan pengungkapan tambahan sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan. Informasi komparatif yang relevan juga disajikan kembali agar sesuai dengan saldo tahun 2017. Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen kami No. A-420/GSH/18/SB tanggal 30 November 2018 dengan opini tanpa modifikasi. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Sebelum laporan ini seperti yang telah dijelaskan di atas, kami telah menerbitkan kembali Laporan Auditor Independen No. 00371/2.0959/AU.1/04/1316-1/1/IX/2020 tanggal 28 September 2020 atas laporan keuangan PT Victoria Care Indonesia tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dengan penekanan suatu hal. Dalam kaitannya dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan, PT Victoria Care Indonesia menerbitkan kembali laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan peraturan pasar modal. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan sebelumnya dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan kembali kecuali yang diungkapkan dalam Catatan 31 sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan.

Other matters

Laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain, yang laporannya tertanggal 16 Juni 2017 dengan opini wajar tanpa pengecualian sebelum penyajian kembali.

Page 3**Emphasis of matter**

As disclosed in Note 25 to the financial statements, management restated PT Victoria Care Indonesia financial statements as of and for the year ended December 31, 2017 in relation with reclassifications of accounts and presented additional disclosures in relation to the proposed initial public offering of the equity securities of the Company. The relevant comparative information were also restated to conform to the 2017 balances. We previously have issued our independent auditors' report No. A-420/GSH/18/SB dated November 30, 2018 expressed an unmodified opinion. Our opinion is not modified in relation to this matter.

Prior to this report as mentioned above, we have previously reissued Independent Auditors' Report No. 00371/2.0959/AU.1/04/1316-1/1/IX/2020 dated September 28, 2020 on the financial statements of PT Victoria Care Indonesia as of December 31, 2017 and for the year ended, with emphasis on a matter. In the event of the proposed initial public offering of the equity securities of the Company, PT Victoria Care Indonesia has reissued the said financial statements to be adjusted to the prevailing capital market regulations. There is no material difference between the previous financial statements and the reissued financial statements except for those described in Note 31 regarding the reissuance of the financial statements.

Other matters

The financial statements of the Company as of December 31, 2016 and for the year then ended, were audited by other independent auditor, whose report dated June 16, 2017 expressed an unqualified opinion before restatement.

Gani Sigiro & Handayani

Registered public accountants. License No. 682/KM.1/2015

Member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered independently by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.

www.grantthornton.co.id

Halaman 4

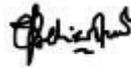
Page 4

Other matters (lanjutan)

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Other matters (continued)

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.



Setiawati Budiman, CPA
Ijin Akuntan Publik No. AP. 1316
(*License of Public Accountant No. AP. 1316*)

19 Oktober 2020

October 19, 2020

Gani Sigiro & Handayani

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020, dan
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of July 31, 2020, and
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2f,2p,5, 14,29	4.721.480.097	2.744.102.486	24.598.248.037	4.597.496.092	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	2p,5, 14,29 2p,3,4,	-	-	-	25.000.000.000	Restricted time deposit
Piutang usaha - neto	6,14,29					Trade receivables - net
Pihak ketiga		178.513.573.765	155.178.433.053	144.316.866.979	135.953.186.081	Third parties
Pihak berelasi	2e,8a	4.550.252.609	1.636.653.820	3.060.463.831	1.651.866.990	Related parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2p,29 2g,3,	202.508.611	103.106.000	91.136.000	86.115.518	Other receivables - third parties
Persediaan - neto	7,14,23	182.872.852.961	178.947.067.421	126.533.196.949	113.733.910.163	Inventories - net
Pajak dibayar di muka	2n,16a 2e,2p, 8b,29	-	516.185.145	-	758.799.125	Prepaid taxes
Piutang pihak berelasi		-	-	18.415.160.500	79.310.731.006	Due from related parties
Biaya dibayar di muka dan uang muka - bagian lancar	2h,4,9	36.172.973.382	50.358.731.355	48.914.988.640	16.094.825.222	Prepayments and advances - current portion
Total Aset Lancar		407.033.641.425	389.484.279.280	365.930.060.936	377.186.930.197	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Biaya dibayar di muka dan uang muka - setelah dikurangi bagian lancar	2h,4,9	5.471.841.440	21.695.809.007	30.879.708.278	1.200.729.670	Prepayments and advances - net of current portion
Aset takberwujud - neto	2k,2l,3, 10	53.556.227.583	50.000.000.000	-	-	Intangible assets - net
Aset tetap - neto	2i,2l,3, 11,14 2l,2s,3,	280.095.691.283	280.513.212.364	184.471.018.018	155.069.739.461	Fixed assets - net
Aset hak-guna - neto	4,12 2j,2l,2q,	24.307.393.407	-	-	-	Right-of-use assets - net
Properti investasi	3,13,30	30.762.722.484	30.762.722.484	30.762.722.484	27.302.722.484	Investment properties
Aset pajak tangguhan - neto	2n,3,4,16f	7.162.090.435	6.208.656.715	4.686.196.309	4.790.417.515	Deferred tax assets - net
Aset tidak lancar lainnya	2p,29	818.764.287	894.914.628	441.066.600	331.006.900	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar		402.174.730.919	390.075.315.198	251.240.711.689	188.694.616.030	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET		809.208.372.344	779.559.594.478	617.170.772.625	565.881.546.227	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2020, dan
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As of July 31, 2020, and
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS						LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	2p, 14, 29,33	90.805.510.139	138.955.190.080	181.410.214.771	192.802.313.161	Short-term bank loans
Utang usaha	2p, 15, 29,33					Trade payables
Pihak ketiga		21.213.503.501	55.160.936.286	46.897.068.815	38.601.919.457	Third parties
Pihak berelasi	2e, 8c	5.233.876.551	1.710.109.063	1.088.448.770	3.096.119.422	Related parties
Utang lain-lain	2p, 29, 33					Other payables
Pihak ketiga		453.093.006	1.518.246.132	731.251.455	1.341.796.777	Third parties
Pihak berelasi	2e, 8d	2.476.811.021	-	-	-	Related parties
Uang muka pelanggan - pihak ketiga	2m	1.269.670.060	-	-	-	Advance from customers - third parties
Utang kepada pihak berelasi	2p, 2e, 8e, 29	-	-	-	525.000.000	Due to a related party
Utang pajak	2n, 16b 2p, 17, 8h,	30.134.096.218	10.787.539.677	21.156.835.444	19.031.534.548	Taxes payable
Beban akrual	8i, 29, 33	29.378.227.255	36.592.655.417	31.665.919.884	19.433.458.880	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	2o, 2p, 3, 17, 29, 33	5.332.767.596	6.590.523.066	4.516.127.303	3.751.628.043	Short-term employee benefits liability
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank jangka panjang	2p, 18, 29, 33	6.888.969.564	6.637.601.516	-	1.702.757.271	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	2p, 19, 29, 33	5.058.283.375	4.675.611.653	4.040.360.711	2.508.121.508	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	2p, 2s, 3, 4, 12, 29, 33	2.117.860.634	-	-	-	Lease liabilities
Total Liabilitas Jangka Pendek		200.362.668.920	262.628.412.890	291.506.227.153	282.794.649.067	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :						Long-term liabilities - net of current maturities:
Utang bank jangka panjang	2p, 18, 29, 33	73.694.313.291	77.766.465.987	-	-	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	2p, 19, 29, 33	5.978.352.881	7.238.418.431	7.865.202.921	7.443.293.645	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	2p, 2s, 3, 4, 12, 29, 33	313.009.129	-	-	-	Lease liabilities
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang	2o, 2p, 3, 20	19.270.476.601	15.238.683.191	12.498.512.517	11.362.572.947	Long-term employee benefits liability
Total Liabilitas Jangka Panjang		99.256.151.902	100.243.567.609	20.363.715.438	18.805.866.592	Total Non-Current Liabilities
TOTAL LIABILITAS		299.618.820.822	362.871.980.499	311.869.942.591	301.600.515.659	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS						EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham						Share capital - par value Rp1,000,000 per share
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 285.000 saham pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019 (31 Desember 2018 dan 2017: 35.000 saham)	21	285.000.000.000	285.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	Authorized, issued and fully paid - 285,000 shares as of July 31, 2020 and December 31, 2019 (December 31, 2018 and 2017: 35,000 shares)
Uang muka setoran modal	21	-	-	250.000.000.000	-	Deposit for future stock subscription
Saldo laba	4	229.862.066.559	135.225.631.885	23.463.001.345	233.148.124.424	Retained earnings
Rugi komprehensif lain		(5.272.515.037)	(3.538.017.906)	(3.162.171.311)	(3.867.093.856)	Other comprehensive loss
Ekuitas Neto		509.589.551.522	416.687.613.979	305.300.830.034	264.281.030.568	Net Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		809.208.372.344	779.559.594.478	617.170.772.625	565.881.546.227	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Juli 2020 dan 2019, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Seven-Month Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ Seven-Month Periods Ended July 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
		2020	2019 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2019	2018	2017	
PENJUALAN NETO	2m,8f,22, 32	617.968.096.221	447.194.198.484	797.791.022.080	594.728.187.831	524.168.376.959	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2m,8g,23 32	(309.219.541.697)	(208.197.506.950)	(368.295.871.126)	(287.161.395.553)	(249.395.449.459)	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO		308.748.554.524	238.996.691.534	429.495.150.954	307.566.792.278	274.772.927.500	GROSS PROFIT
Beban penjualan dan pemasaran	2m,8h,8i, 24	(117.255.701.410)	(103.028.142.284)	(190.177.338.534)	(148.501.537.023)	(122.730.888.662)	<i>Selling and marketing expenses</i>
Beban umum dan administrasi	2m,25	(51.674.104.855)	(35.907.554.547)	(68.874.478.563)	(57.588.772.095)	(46.998.732.777)	<i>General and administrative expenses</i>
Pendapatan lainnya	2m,11,13	1.239.839.054	686.831.390	1.822.406.379	4.865.478.341	4.346.479.529	<i>Other income</i>
Beban lainnya	2m	(1.506.569.336)	(2.024.717.812)	(3.269.519.179)	(1.897.381.716)	(21.248.874)	<i>Other expenses</i>
LABA OPERASI		139.552.017.977	98.723.108.281	168.996.221.057	104.444.579.785	109.368.536.716	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	2m,32	9.080.721	28.606.641	14.418.318	162.060.786	171.292.944	<i>Finance income</i>
Beban keuangan	2m,14,18, 26,32	(11.923.469.874)	(9.633.411.789)	(18.232.594.888)	(15.997.014.215)	(21.038.170.806)	<i>Finance costs</i>
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		127.637.628.824	89.118.303.133	150.778.044.487	88.609.626.356	88.501.658.854	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
Beban pajak penghasilan - neto	2n,16c, 16e,32	(30.558.372.933)	(23.162.428.566)	(39.015.413.947)	(23.294.749.435)	(21.368.522.989)	<i>Income tax expense - net</i>
LABA PERIODE BERJALAN		97.079.255.891	65.955.874.567	111.762.630.540	65.314.876.921	67.133.135.865	INCOME FOR THE PERIOD
Penghasilan komprehensif lain							Other comprehensive income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							<i>Items that will not be reclassified to profit or loss:</i>
Laba (rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	2o,20	(2.223.714.270)	(372.128.431)	(501.128.793)	939.896.727	(2.554.336.480)	<i>Re-measurement gain (loss) on employee benefits liability</i>
Pajak penghasilan terkait	2n	489.217.139	93.032.108	125.282.198	(234.974.182)	638.584.120	<i>Income tax effect</i>
Penghasilan (rugi) komprehensif lain periode berjalan setelah pajak		(1.734.497.131)	(279.096.323)	(375.846.595)	704.922.545	(1.915.752.360)	Other comprehensive income (loss) for the period, net of tax
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		95.344.758.760	65.676.778.244	111.386.783.945	66.019.799.466	65.217.383.505	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD
LABA PER SAHAM DASAR	2v,28,35	17,03	11,57	19,61	11,46	11,78	BASIC EARNINGS PER SHARE

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Periode Tujuh Bulan
 yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2020 dan 2019, dan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 For the Seven-Month Periods Ended
 July 31, 2020 and 2019, and
 For the Years Ended
 December 31, 2019, 2018 and 2017
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid share capital	Uang muka setoran modal/ Deposit for future stock subscription	Saldo laba/ Retained earnings	Rugi komprehensif lain/ Other comprehensive loss	Ekuitas neto/ Net equity	
Saldo tanggal 1 Januari 2017		35.000.000.000	-	166.014.988.559	(1.951.341.496)	199.063.647.063	Balance as of January 1, 2017
Laba tahun berjalan		-	-	67.133.135.865	-	67.133.135.865	Income for the year
Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak		-	-	-	(1.915.752.360)	(1.915.752.360)	Other comprehensive loss for the year, net of tax
Saldo tanggal 31 Desember 2017		35.000.000.000	-	233.148.124.424	(3.867.093.856)	264.281.030.568	Balance as of December 31, 2017
Dividen tunai	27	-	-	(25.000.000.000)	-	(25.000.000.000)	Cash dividends
Uang muka setoran modal	21	-	250.000.000.000	(250.000.000.000)	-	-	Deposit for future stock subscription
Laba tahun berjalan		-	-	65.314.876.921	-	65.314.876.921	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak		-	-	-	704.922.545	704.922.545	Other comprehensive income for the year, net of tax
Saldo tanggal 31 Desember 2018		35.000.000.000	250.000.000.000	23.463.001.345	(3.162.171.311)	305.300.830.034	Balance as of December 31, 2018
Peningkatan modal saham	21	250.000.000.000	(250.000.000.000)	-	-	-	Increase in share capital
Laba periode berjalan		-	-	65.955.874.567	-	65.955.874.567	Income for the period
Rugi komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak		-	-	-	(279.096.323)	(279.096.323)	Other comprehensive loss for the period, net of tax
Saldo tanggal 31 Juli 2019 (Tidak Diaudit)		285.000.000.000	-	89.418.875.912	(3.441.267.634)	370.977.608.278	Balance as of July 31, 2019 (Unaudited)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Untuk Periode Tujuh Bulan
yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2020 dan 2019, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Seven-Month Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid share capital	Uang muka setoran modal/ Deposit for future stock subscription	Saldo laba/ Retained earnings	Rugi komprehensif lain/ Other comprehensive loss	Ekuitas neto/ Net equity	Balance as of December 31, 2018
Saldo tanggal 31 Desember 2018	35.000.000.000	250.000.000.000	23.463.001.345	(3.162.171.311)	305.300.830.034	Balance as of December 31, 2018
Peningkatan modal saham	250.000.000.000	(250.000.000.000)	-	-	-	Increase in share capital
Laba tahun berjalan	-	-	111.762.630.540	-	111.762.630.540	Income for the year
Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	-	-	-	(375.846.595)	(375.846.595)	Other comprehensive loss for the year, net of tax
Saldo tanggal 31 Desember 2019	285.000.000.000	-	135.225.631.885	(3.538.017.906)	416.687.613.979	Balance as of December 31, 2019
Penyesuaian saldo awal atas penerapan PSAK 71, setelah pajak	-	-	(2.442.821.217)	-	(2.442.821.217)	Beginning balance adjustments for implementation of PSAK 71, net of tax
Laba periode berjalan	-	-	97.079.255.891	-	97.079.255.891	Income for the period
Rugi komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak	-	-	-	(1.734.497.131)	(1.734.497.131)	Other comprehensive loss for the period, net of tax
Saldo tanggal 31 Juli 2020	285.000.000.000	-	229.862.066.559	(5.272.515.037)	509.589.551.522	Balance as of July 31, 2020

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Juli 2020 dan 2019, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Seven-Month Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ Seven-Month Periods Ended July 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
	2020	2019 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2019	2018	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	604.722.033.002	437.720.896.927	787.273.886.347	582.262.831.021	509.367.531.579	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok	(324.578.587.077)	(202.895.490.556)	(386.013.890.720)	(274.421.783.156)	(237.591.100.602)	Payments to suppliers
Pembayaran untuk kegiatan usaha	(90.081.019.373)	(83.877.160.969)	(141.994.973.459)	(163.713.564.275)	(77.931.605.032)	Payments for operating activities
Pembayaran kepada karyawan	(82.780.629.379)	(68.266.935.174)	(115.645.473.402)	(94.424.207.742)	(72.370.825.982)	Payments to employees
Kas diperoleh dari operasi	107.281.797.173	82.681.310.228	143.619.548.766	49.703.275.848	121.473.999.963	Cash generated from operations
Penerimaan dari (pembayaran untuk): Pajak penghasilan	(24.218.231.639)	(35.425.210.853)	(50.601.348.172)	(16.895.694.453)	(18.223.592.657)	Cash receipts from (payments for): Income taxes
Lainnya	(527.575.278)	(1.541.736.330)	(3.197.120.206)	(1.890.993.638)	1.661.985.627	Others
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	82.535.990.256	45.714.363.045	89.821.080.388	30.916.587.757	104.912.392.933	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap	(9.646.728.470)	(7.501.918.711)	(34.284.986.385)	(34.055.298.818)	(29.886.727.065)	Acquisition of fixed assets and advance payment for purchases of fixed assets
Pembelian perangkat lunak	(3.710.846.174)	-	-	-	-	Purchase of software
Perolehan aset hak guna	(61.111.111)	-	-	-	-	Acquisition of right-of-use assets
Penerimaan dari penjualan aset tetap	72.350.000	1.500.000	1.102.500.000	1.037.000.000	440.720.000	Proceeds from sale of fixed assets
Pencairan (penempatan) deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	25.000.000.000	(25.000.000.000)	Withdrawal (placement) of restricted time deposit
Pembelian merek dagang	-	-	(43.857.150.534)	-	-	Purchase of trademarks
Penerimaan (pembayaran) piutang kepada pihak berelasi	-	-	18.415.160.500	60.895.570.506	(53.629.485.667)	Receipt (disbursement) of due from related parties
Penambahan uang muka merek dagang	-	-	-	(6.142.849.466)	-	Addition in advance payment for trademarks
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(13.346.335.755)	(7.500.418.711)	(58.624.476.419)	46.734.422.222	(108.075.492.732)	Net cash provided by (used in) investing activities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Juli 2020 dan 2019, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)
For the Seven-Month Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ Seven-Month Periods Ended July 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
		2020	2019 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2019	2018	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari							Proceeds from
utang bank jangka pendek	14	-	-	-	-	25.000.000.000	short-term bank loans
Penerimaan utang bank jangka panjang		-	-	13.138.863.340	-	-	Proceeds from long-term bank loans
Pembayaran beban bunga		(11.763.666.368)	(9.398.200.231)	(16.836.900.065)	(15.871.288.333)	(19.938.863.404)	Interest paid
Pembayaran utang pembiayaan konsumen		(3.062.466.715)	(2.478.272.118)	(4.771.775.573)	(3.684.114.040)	(3.486.950.008)	Payments of consumer financing payables
Pembayaran utang bank jangka panjang	18	(3.881.688.933)	-	(770.912.531)	(1.702.757.271)	(6.811.029.080)	Payments of long-term bank loans
Pembayaran liabilitas sewa	12	(354.774.933)	-	-	-	-	Payments of lease liabilities
Pembayaran provisi utang bank		-	(125.000.000)	(1.355.000.000)	-	(1.006.530.000)	Payments of bank loan provisions
Pembayaran utang bank jangka pendek	14	-	-	-	(75.000.000.000)	-	Payments of short-term bank loans
Pembayaran dividen kas	27	-	-	-	(25.000.000.000)	-	Payments of cash dividend
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		(19.062.596.949)	(12.001.472.349)	(10.595.724.829)	(121.258.159.644)	(6.243.372.492)	Net cash provided by (used in) financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		50.127.057.552	26.212.471.985	20.600.879.140	(43.607.149.665)	(9.406.472.291)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		(136.211.087.594)	(156.811.966.734)	(156.811.966.734)	(113.204.817.069)	(103.798.344.778)	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE		(86.084.030.042)	(130.599.494.749)	(136.211.087.594)	(156.811.966.734)	(113.204.817.069)	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE TERDIRI DARI:							CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD CONSISTS OF:
Kas dan setara kas	5	4.721.480.097	2.981.641.847	2.744.102.486	24.598.248.037	4.597.496.092	Cash and cash equivalents
Cerukan	14	(90.805.510.139)	(133.581.136.596)	(138.955.190.080)	(181.410.214.771)	(117.802.313.161)	Overdraft
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE		(86.084.030.042)	(130.599.494.749)	(136.211.087.594)	(156.811.966.734)	(113.204.817.069)	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD

Tambahan informasi arus kas disajikan dalam Catatan 34.

Supplementary cash flow information is presented in Note 34.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Victoria Care Indonesia Tbk ("Perusahaan") adalah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Marina Soewana, S.H., No. 32 tanggal 20 April 2006. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-00267.HT.01.01.Tahun 2006 tanggal 8 September 2006.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 20 tanggal 13 Agustus 2019 mengenai perubahan ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0054385.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 20 Agustus 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan bergerak dalam bidang industri pengolahan dan distribusi produk kosmetik dan perlengkapan mandi.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan pabriknya berlokasi di Semarang. Perusahaan memulai kegiatannya secara komersial pada tahun 2007.

PT Sukses Sejati Sejahtera merupakan entitas induk dan PT Gemilang Tunggal Prakarsa merupakan entitas induk terakhir Perusahaan.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT Victoria Care Indonesia Tbk ("the Company") is a limited liability company established in Indonesia based on Notarial Deed No. 32 of Marina Soewana, S.H., on April 20, 2006. The Company's deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. W7-00267.HT.01.01.Tahun 2006 dated September 8, 2006.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 20 dated August 13, 2019 of Rudy Siswanto, S.H., concerning the changes of the Company's scope of activities. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0054385.AH.01.02.TAHUN 2019 dated August 20, 2019.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities comprise of manufacturing and distribution of cosmetics and toiletries products.

The Company is domiciled in Jakarta and the factory is based in Semarang. The Company started its commercial operations in 2007.

PT Sukses Sejati Sejahtera is the parent entity and PT Gemilang Tunggal Prakarsa is the ultimate parent entity of the Company.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Juli 2020/ July 31, 2020</u>
<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris Utama :	Luhur Dino Herlambang
Komisaris :	Luhur Iwan Hernadi
<u>Direksi</u>	
Direktur Utama :	Billy Hartono Salim
Direktur :	Sumardi Widjaja
Direktur :	Rosid Sujono
Direktur :	Henny Soetanto

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

<u>Komisaris</u>			
Komisaris :	Djunaidi Immanuel	:	
<u>Direksi</u>			
Direktur Utama :	Billy Hartono Salim	:	
Direktur :	Luhur Dino Herlambang	:	

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan personil manajemen kunci.

Pada tanggal 31 Juli 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Perusahaan mempunyai masing-masing 2.155, 2.223, 1.889 dan 1.435 karyawan (tidak diaudit).

c. Penerbitan Laporan Keuangan Interim

Laporan keuangan interim tanggal 31 Juli 2020 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 19 Oktober 2020. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim tersebut.

1. GENERAL (continued)

b. Boards of Commissioners and Directors and Employees

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of July 31, 2020, and December 31, 2019 is as follows:

	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
		<u>Board of Commissioners</u>
Luhur Dino Herlambang :	Djunaidi Immanuel :	President Commissioner Commissioner
		<u>Board of Directors</u>
Billy Hartono Salim :	Sumardi Widjaja :	President Director Director
Rosid Sujono :	Henny Soetanto :	Director Director

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2018 and 2017 is as follows:

		<u>Commissioner</u>
		Commissioner
		<u>Board of Directors</u>
		President Director Director

The Company's Boards of Commissioners and Directors are the key management personnel.

As of July 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company has 2,155, 2,223, 1,889 and 1,435 employees, respectively (unaudited).

c. Issuance of the Interim Financial Statements

The interim financial statements as of July 31, 2020 and for the seven-month period then ended are completed and authorized for issuance by the Company's Board of Directors on October 19, 2020. The Company's Directors who signed the Directors' Statement are responsible for the fair preparation and presentation of such interim financial statements.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan interim disusun sesuai dengan PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" dan PSAK No. 3, "Laporan Keuangan Interim".

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan basis akrual, menggunakan dasar akuntansi biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Tahun buku Perusahaan adalah 1 Januari - 31 Desember.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of financial statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Board of the Indonesian Institute of Accountants, and Regulation No. VIII.G.7 on "Financial Statements Presentation and Disclosures for Issuers and Public Companies" issued by Financial Services Authority ("OJK"). These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

The interim financial statements have been prepared in accordance with PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements" and PSAK No. 3, "Interim Financial Statements".

The financial statements, except statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis, using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies for those accounts.

The statement of cash flows presents cash receipts and payments classified into operating, investing and financing activities. The cash flows from operating activities are prepared using the direct method.

The financial reporting period of the Company is January 1 - December 31.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah, which is the functional currency of the Company.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Perusahaan telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk tahun periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material berlaku efektif 1 Januari 2020.

Amendemen ini mengklarifikasi definisi materi dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang lebih jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, berlaku efektif 1 Januari 2020.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* yang sukses antara *International Accounting Standards Board* ("IASB") dan *Financial Accounting Standards Board* ("FASB"), mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting principles

The Company has applied a number of amendments and improvements to accounting standards that are relevant to its financial reporting and effective for annual periods beginning on or after January 1, 2020 as follow:

- Amendments to PSAK 1 and PSAK 25: Definition of Material, effective January 1, 2020.

This amendment clarifies the definition of material with the aim of harmonizing the definitions used in the conceptual framework and some relevant PSAKs. In addition, it also provides clearer guidance regarding the definition of material in the context of reducing over disclosure due to changes in the threshold of the material definition.

- PSAK 71: Financial Instruments, effective January 1, 2020.

This PSAK provides classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting in information that are more timely, relevant and understandable to users of the financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introducing a more general requirement based on management's judgment.

- PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, effective January 1, 2020.

This PSAK is a single standard that is a joint project between the *International Accounting Standards Board* ("IASB") and the *Financial Accounting Standards Board* ("FASB"), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to perform analysis before recognizing the revenue.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Perusahaan telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk tahun periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 sebagai berikut: (lanjutan)

- PSAK 73: Sewa, berlaku efektif 1 Januari 2020.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 (dua) pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah.

Perusahaan telah menerapkan standar Akuntansi baru dan penyesuaian atau amendemen tersebut sejak 1 Januari 2020. Perusahaan tidak melakukan penyajian kembali atas informasi komparatif tahun 2019 atas penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" dan PSAK 73 "Sewa", oleh karena itu informasi komparatif tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan informasi keuangan yang disajikan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020. Perbedaan yang timbul dari penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" telah dibebankan ke saldo laba pada tanggal 1 Januari 2020. Sedangkan untuk PSAK 73 "Sewa", Perusahaan telah mencatat aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020. Dampak penerapan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan" dan PSAK 73 "Sewa" pada tanggal 1 Januari 2020 di ungkapkan pada Catatan 4, dampak atas penerapan standar baru dan penyesuaian atau amendemen lainnya tidak material terhadap laporan keuangan interim.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting principles (continued)

The Company has applied a number of amendments and improvements to accounting standards that are relevant to its financial reporting and effective for annual periods beginning on or after January 1, 2020 as follow: (continued)

- PSAK 73: Leases, effective January 1, 2020.

This PSAK establishes the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease. There are 2 (two) optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.

The Company has implemented new Accounting standards and such adjustments or amendments since January 1, 2020. The Company did not restate comparative information in 2019 on the implementation of PSAK 71 "Financial Instruments" and PSAK 73 "Leases", therefore comparative information for 2019 cannot be compared to financial information presented for the seven-month period ended July 31, 2020. Differences arising from the implementation of PSAK 71 "Financial Instruments" have been charged to the retained earnings on January 1, 2020. As for PSAK 73 "Leases", the Company has recorded right-of-use assets and lease liabilities as of January 1, 2020. The impact of the application of PSAK 71 "Financial Instruments" and PSAK 73 "Leases" on January 1, 2020 were disclosed in Note 4, the impact on the application of new standards and adjustments or other amendments is not material to the interim financial statements.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Klasifikasi lancar dan tidak lancar

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:

- i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset lancar dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

d. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Current and non-current classification

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i. expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii. held primarily for the purpose of trading,
- iii. expected to be realised within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i. expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii. held primarily for the purpose of trading,
- iii. due to be settled within 12 months after the reporting period, or
- iv. there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets are classified as non-current assets and deferred tax liabilities are classified as non-current liabilities.

d. Foreign currency transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
1 Euro Eropa/Rupiah	17.252	15.589	16.560	16.174	European Euro 1/Rupiah
1 Franc Swiss/Rupiah	16.050	14.366	14.710	13.842	Swiss Franc 1/Rupiah
1 Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS")/Rupiah	14.653	13.901	14.481	13.548	United States Dollar ("US Dollar") 1/Rupiah
1 Dolar Singapura/Rupiah	10.656	10.321	10.603	10.134	Singapore Dollar 1/Rupiah
1 Yuan Tiongkok/Rupiah	2.094	1.991	2.110	2.073	Chinese Yuan 1/Rupiah
1 Dolar Hong Kong/Rupiah	1.891	1.785	1.849	1.733	Hong Kong Dollar 1/Rupiah
1 Peso Filipina/Rupiah	298	274	276	271	Philippine Peso 1/Rupiah

e. Transaksi dengan pihak berelasi

Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi. Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan merupakan pihak tidak berelasi.

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan terdiri dari kas, bank dan deposito jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo antara 3 (tiga) bulan atau kurang pada saat penempatan dan tidak dibatasi penggunaannya, dan mana yang memiliki risiko tidak signifikan dari perubahan nilai.

Untuk keperluan laporan arus kas, kas dan setara kas sebagaimana yang didefinisikan di atas, setelah dikurangi dengan cerukan yang belum dilunasi. Pada laporan posisi keuangan, cerukan disajikan bersama sebagai utang bank jangka pendek dalam liabilitas jangka pendek.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Foreign currency transactions and balances (continued)

As of July 31, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the rates of exchange used are as follows:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
1 Euro Eropa/Rupiah	17.252	15.589	16.560	16.174	European Euro 1/Rupiah
1 Franc Swiss/Rupiah	16.050	14.366	14.710	13.842	Swiss Franc 1/Rupiah
1 Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS")/Rupiah	14.653	13.901	14.481	13.548	United States Dollar ("US Dollar") 1/Rupiah
1 Dolar Singapura/Rupiah	10.656	10.321	10.603	10.134	Singapore Dollar 1/Rupiah
1 Yuan Tiongkok/Rupiah	2.094	1.991	2.110	2.073	Chinese Yuan 1/Rupiah
1 Dolar Hong Kong/Rupiah	1.891	1.785	1.849	1.733	Hong Kong Dollar 1/Rupiah
1 Peso Filipina/Rupiah	298	274	276	271	Philippine Peso 1/Rupiah

e. Transactions with related parties

The Company has transactions with related parties as defined in PSAK 7: Related Party Disclosures.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties. Significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes to the financial statements.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the financial statements are unrelated parties.

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the statement of financial position comprise cash on hand, cash in banks and short-term deposits with an original maturity of 3 (three) months or less at the time of placements and not restricted to use, and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents as defined above, net of outstanding overdraft. In the statement of financial position, overdrafts are shown within short-term bank loans in current liabilities.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto.

Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang, dan yang meliputi seluruh biaya pembelian, konversi dan biaya lain-lain yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut sampai ke lokasi dan kondisi saat ini. Barang jadi dan barang dalam proses termasuk alokasi biaya pabrikasi tetap dan variabel sebagai tambahan biaya bahan baku dan tenaga kerja.

Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Cadangan untuk keusangan dan/atau penurunan nilai persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan penilaian dari setiap persediaan pada akhir tahun, dan estimasi jumlah tiap item persediaan adalah sebesar nilai realisasinya.

h. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya menggunakan metode garis lurus, dan disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar sesuai sifatnya masing-masing.

i. Aset tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value.

Cost is determined using the weighted average method, and comprises all costs of purchase, conversion and other costs incurred in bringing the inventory to its present location and condition. Finished goods and work in process include an appropriate allocation of fixed and variable factory overhead in addition to direct materials and labor.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated cost of completion and the estimated cost necessary to make the sale.

A provision for obsolescence and/or decline in value of inventory is determined on the basis of review of physical condition and the valuation of each inventory item at year end, and estimated amount the individual inventory items are expected to realize.

h. Prepayments

Prepayments are amortized and charged to operations over their beneficial periods using the straight-line method, and are presented as current asset or non-current asset based on their nature.

i. Fixed assets

All fixed assets are initially recognized at cost, which comprises the purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where they are intended to be used.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset tetap (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset-aset tersebut.

Estimasi masa manfaat aset adalah sebagai berikut:

	Tahun/Years
Bangunan dan prasarana	4 - 20
Kendaraan	4
Perlengkapan kantor	4
Peralatan pabrik	4
Peralatan laboratorium	4

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba atau rugi untuk tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di-reviu oleh manajemen Perusahaan, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Perusahaan manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Fixed assets (continued)

Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation of fixed assets begins when the asset is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets.

The estimated useful lives of the assets are as follows:

	Tahun/Years	
Bangunan dan improvements	4 - 20	Building and improvements
Kendaraan	4	Vehicles
Perlengkapan kantor	4	Office supplies
Peralatan pabrik	4	Factory equipment
Peralatan laboratorium	4	Laboratory equipment

The carrying amount of an item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the profit or loss of the year when the item is derecognized.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets are reviewed by the management of the Company, and adjusted prospectively, if appropriate, at each reporting period.

Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset tetap (lanjutan)

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan karena manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar hak atas tanah tersebut dapat diperbarui atau diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB, dan HP diakui sebagai bagian dari akun "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomi tanah.

Jumlah tercatat aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

j. Properti investasi

Properti yang dimiliki untuk penghasilan sewa jangka panjang dan/atau untuk peningkatan modal, dan yang tidak digunakan oleh Perusahaan, diklasifikasikan sebagai properti investasi. Properti investasi juga termasuk properti yang sedang dibangun atau dikembangkan untuk digunakan di masa depan sebagai properti investasi.

Properti investasi pada awalnya dicatat pada biaya perolehan, termasuk biaya transaksi terkait dan biaya pinjaman yang berlaku.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Fixed assets (continued)

Land is stated at cost and not depreciated as the management believes that it is probable the titles of land rights can be renewed or extended upon expiration.

Legal cost of land rights in the form of Business Usage Rights ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Usage Rights ("Hak Pakai" or "HP") when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and not amortized. Meanwhile the extension or the legal renewal costs of land rights in the form of HGU, HGB and HP were recognized as part of "Fixed Assets" account in the statement of financial position and were amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicates that their carrying values may not be fully recoverable.

j. Investment properties

A property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that is not occupied by the Company, is classified as investment property. Investment property also includes property that is being constructed or developed for future use as an investment property.

Investment properties are measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable borrowing costs.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Properti investasi (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, properti investasi dicatat pada nilai wajar. Properti investasi yang sedang dikembangkan kembali untuk digunakan terus-menerus sebagai properti investasi atau yang pasarnya menjadi kurang aktif diukur pada nilai wajar. Properti investasi dalam pembangunan diukur pada nilai wajar jika nilai wajar tersebut dianggap dapat ditentukan secara andal. Properti investasi dalam pembangunan yang nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal, tetapi jika perusahaan mengharapkan bahwa nilai wajar properti akan dapat ditentukan dengan andal ketika pembangunan selesai, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai sampai nilai wajarnya dapat ditentukan secara andal atau pembangunan selesai - mana yang lebih awal.

Biaya yang terjadi selanjutnya dikapitalisasi ke jumlah tercatat aset hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan terkait dengan pengeluaran akan mengalir ke Perusahaan dan biaya tersebut dapat diukur dengan andal. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada saat terjadi. Ketika bagian dari properti investasi diganti, jumlah tercatat dari bagian yang diganti dihentikan pengakuannya.

Perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau pada saat properti investasi tersebut tidak digunakan secara permanen dan sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari pelepasannya.

Transfer dilakukan ke (atau dari) properti investasi hanya jika ada perubahan penggunaan. Untuk transfer dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, biaya yang dianggap untuk akuntansi selanjutnya adalah nilai wajar pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang diduduki pemilik menjadi properti investasi, Perusahaan memperhitungkan properti tersebut sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam aset tetap sampai dengan tanggal perubahan yang digunakan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Investment properties (continued)

After initial recognition, an investment property is carried at fair value. Investment property that is being redeveloped for continuing use as investment property or for which the market has become less active continues to be measured at fair value. Investment property under construction is measured at fair value if the fair value is considered to be reliably determinable. Investment properties under construction for which the fair value cannot be determined reliably, but for which the company expects that the fair value of the property will be reliably determinable when construction is completed, are measured at cost less impairment until the fair value becomes reliably determinable or construction is completed - whichever is earlier.

Subsequent expenditure is capitalised to the asset's carrying amount only when it is probable that future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred. When part of an investment property is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognized.

Changes in fair values are recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Investment properties are derecognized when either they have been disposed of or when the investment properties are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from its disposal.

Transfers are made to (or from) investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owner-occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owner-occupied property becomes an investment property, the Company accounts for such property in accordance with the policy stated under fixed assets up to the date of change in use.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada pengakuan awal sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset takberwujud yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal, tidak termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, tidak dikapitalisasi dan pengeluaran terkait tercermin dalam laba rugi pada periode ketika pengeluaran terjadi.

Masa manfaat aset takberwujud dinilai baik terbatas atau tidak terbatas.

Aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan dinilai untuk penurunan nilai setiap ada indikasi bahwa aset takberwujud tersebut mungkin mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas dikaji paling lambat pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan dalam masa manfaat yang diharapkan atau pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset dianggap memodifikasi periode atau metode amortisasi, sebagaimana mestinya, dan diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi. Beban amortisasi atas aset takberwujud dengan umur terbatas diakui dalam laba rugi dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset takberwujud.

Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji untuk penurunan setiap tahun, baik secara individu atau pada tingkat unit penghasil kas. Penilaian masa manfaat yang tidak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah masa manfaat yang tidak terbatas tetap dapat didukung. Jika tidak, perubahan dalam masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas dilakukan secara prospektif.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset takberwujud diukur sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset dan diakui dalam laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Intangible assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is their fair value at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and accumulated impairment losses. Internally generated intangibles, excluding capitalised development costs, are not capitalised and the related expenditure is reflected in profit or loss in the period in which the expenditure is incurred.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite.

Intangible assets with finite lives are amortised over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortisation period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite life is recognized in the statement of profit or loss in the expense category that is consistent with the function of the intangible assets.

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortised, but are tested for impairment annually, either individually or at the cash-generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in the statement of profit or loss when the asset is derecognized.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset takberwujud (lanjutan)

Merek dagang

Perusahaan melakukan pembayaran di muka untuk membeli merek dagang. Merek dagang telah diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun oleh instansi pemerintah terkait dengan opsi pembaruan pada akhir periode ini. Hak atas merek dapat diperbarui dengan sedikit biaya kepada Perusahaan. Dengan demikian, merek dagang tersebut dinilai memiliki masa manfaat yang tidak terbatas.

Ringkasan kebijakan yang diterapkan pada aset takberwujud Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Merek Dagang/ Trademarks
Umur manfaat	Tak terbatas/ <i>Indefinite</i>
Metode amortisasi	Tidak diamortisasi/ <i>No amortisation</i>
Diperoleh melalui	Akuisisi/ <i>Purchase</i>

I. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui sebagai laba atau rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Intangible assets (continued)

Trademarks

The Company made upfront payments to purchase trademarks. The trademarks have been granted for a period of 10 (ten) years by the relevant government agency with the option of renewal at the end of this period. The trademark rights may be renewed at little cost to the Company. As a result, those trademarks are assessed as having an indefinite useful life.

A summary of the policies applied to the Company's intangible assets are as follows:

	Perangkat Lunak/ Software	
	4 tahun/ <i>years</i>	<i>Useful life</i>
	Garis lurus/ <i>Straight-line</i>	<i>Amortisation method</i>
	Akuisisi/ <i>Purchase</i>	<i>Acquired through</i>

I. Impairment of non-financial assets

At the end of each annual reporting, the Company assesses whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit's ("CGU") fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized as profit or loss in consistent expense categories with the functions of the impaired asset.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

1. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh pengali penilaian atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya.

Pembalikan rugi penurunan nilai diakui sebagai laba atau rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

1. Impairment of non-financial assets (continued)

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years.

Reversal of an impairment loss is recognized as profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Pengakuan pendapatan dan beban

Sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

Perusahaan menelaah pengaturan pendapatannya melalui kriteria tertentu untuk menentukan apakah bertindak sebagai prinsipal atau agen. Perusahaan berkesimpulan bahwa Perusahaan bertindak sebagai prinsipal dalam semua pengaturan pendapatan.

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Perusahaan diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya.

Pendapatan/beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE"), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Revenue and expense recognition

Before January 1, 2020

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Taxes ("VAT").

The Company assesses its revenue arrangements against specific criteria in order to determine if it is acting as principal or agent. The Company has concluded that it is acting as the principal in all of its revenue arrangements.

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Sale of goods

Revenue from sales arising from physical delivery of the Company's products is recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer, which generally coincide with their delivery and acceptance.

Interest income/expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the effective interest rate ("EIR"), which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Sesudah 1 Januari 2020

Pada 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Untuk penjualan barang, kewajiban pelaksanaan umumnya terpenuhi, dan pendapatan diakui, pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan (pada suatu titik waktu).

Penerimaan kas dari pelanggan sehubungan dengan transaksi penjualan yang belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan, dicatat sebagai bagian dari "Uang Muka Pelanggan" dalam laporan posisi keuangan.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Revenue and expense recognition (continued)

After January 1, 2020

On January 1, 2020, the Company has adopted PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

For sale of goods, performance obligation is typically satisfied, and revenue is recognized, when the control of goods has been transferred to the customer (a point in time).

Cash received from customer related to the sales transactions which have not fulfilled the criteria for revenue recognition are recorded as part of "Advances from Customers" in the statement of financial position.

Expenses recognition

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Perpajakan

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari pendapatan atau beban lainnya.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Taxation

Current tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Tax Expense - Current" in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company also presented interest/penalty, if any, as part of other income or expense.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Company reassesses unrecognized deferred tax assets. The Company recognizes a previously unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Taxation (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the statements of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

Value Added Tax ("VAT")

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- *When the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authority, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- *When receivables and payables are stated with the amount of VAT included.*

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Imbalan kerja karyawan

Perusahaan mempunyai program dana pensiun manfaat pasti dan program imbalan jangka panjang lainnya untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat.

Perusahaan juga mencatat penyisihan manfaat tambahan selain program dana pensiun tersebut di atas untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("Undang-undang Tenaga Kerja"). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "Projected Unit Credit".

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

- i) ketika program amendemen atau kurtailmen terjadi; dan
- ii) ketika Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Perusahaan mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun "Beban Pokok Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

- i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (*curtailment*) tidak rutin, dan
- ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Employee benefits

The Company has a defined benefit retirement plans and other long-term benefits program covering all their qualified permanent employees.

The Company also provides additional provisions on top of the benefits provided under the above-mentioned defined contribution pension programs in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

- i) the date of the plan amendment or curtailment, and
- ii) the date the Company recognizes related restructuring costs.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Company recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of Goods Sold" and "General and Administrative Expenses" as appropriate in the statement of profit or loss and other comprehensive income:

- i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains and losses on curtailments and non-routine settlements, and
- ii) Net interest expense or income.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

i. Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, dan (c) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain - pihak ketiga, piutang dari pihak berelasi dan aset tidak lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menggunakan 2 (dua) metode untuk mengklasifikasikan aset keuangan, yaitu model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ("SPPI").

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Perusahaan menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

i. Financial assets

Initial recognition and measurement

The Company classifies its financial assets into the following category: (a) financial assets measured at fair value through profit or loss, (b) financial assets measured at fair value through other comprehensive income, and (c) financial assets measured at amortised cost.

The Company's financial assets consist of cash and cash equivalents, restricted time deposits, trade receivables, other receivables - third parties, due from related parties and other non-current assets classified as financial assets at amortized cost. The Company has no financial assets measured at fair value through profit or loss and other comprehensive income.

The Company used 2 (two) methods to classify its financial assets, based on the Company's business model in managing the financial assets, and the contractual cash flow of the financial assets ("SPPI").

SPPI Test

As a first step of its classification process, the Company assesses the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test.

Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortisation of the premium/discount).

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengujian SPPI (lanjutan)

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Perusahaan menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada *Fair Value through Profit or Loss* ("FVTPL").

Penilaian model bisnis

Perusahaan menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Perusahaan mengelola kelompok atas keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Perusahaan tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

SPPI Test (continued)

The most significant elements of interest within an arrangement are typically the consideration for the time value of money and credit risk. To make the SPPI assessment, the Company applies judgment and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.

In contrast, contractual terms that introduce a more than *de minimis* exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured as *Fair Value through Profit or Loss* ("FVTPL").

Business model assessment

The Company determines its business model at the level that best reflects how it manages the Company's financial assets to achieve its business objective.

The Company's business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:

- How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel;
- The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular the way those risks are managed;

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Model bisnis Perusahaan tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti: (lanjutan)

- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Perusahaan.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "worst case" atau "stress case". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Perusahaan tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Business model assessment (continued)

The Company's business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as: (continued)

- How business managers are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected);
- The expected frequency, value, and timing of sales are also important aspects of the Company's assessment.

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking "worst case" or "stress case" scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realised in a way that is different from the Company's original expectations, the Company does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.

Financial assets are measured at amortized cost if the financial asset is managed in a business model aimed at owning a financial asset in order to obtain a contractual cash flow and the contractual requirements of a financial asset that on a given date increases the cash flow solely from the principal and interest payments ("SPPI") of the amount owed.

At initial recognition, the financial assets measured at amortized cost are recognized at the fair value plus the transaction fee and subsequently measured at amortized cost by using the effective interest rate.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan Keuangan". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "Kerugian penurunan nilai".

Sebelum 1 Januari 2020, Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) pinjaman yang diberikan dan piutang, (c) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan (d) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Perusahaan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Perusahaan mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Business model assessment (continued)

Interest income from financial assets measured at amortized cost is recorded in the statements of profit and loss and other comprehensive income and is recognized as "Finance Income". When a decline in value occurs, the impairment loss is recognized as a deduction of the recorded value of the financial asset and is acknowledged in the financial statements as "Impairment loss".

Before January 1, 2020, the Company classified its financial assets into these categories: (a) financial assets measured at fair value through profit or loss, (b) loans and receivables, (c) financial assets held to maturity, and (d) financial assets available for sale. This classification depends on the purpose of acquiring such financial assets. Management determines the classification of such financial assets at the beginning of its recognition.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or specified payments and have no quotes on the active market, except:

- intended by the Company for sale in the near future, which is classified as held for trading, as well as which at the time of initial recognition is determined to be measured at fair value through profit or loss;
- which at the time of initial recognition is set as available for sale; or
- in the case of the Company may not obtain substantial initial investment unless caused by a decrease in the quality of loans provided and receivables.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"). Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim dan dilaporkan sebagai "Pendapatan Keuangan". Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Kerugian penurunan nilai".

Metode Suku Bunga Efektif ("SBE")

SBE adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. SBE adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SBE, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari aset keuangan FVTPL.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Business model assessment (continued)

At the time of initial recognition, loans and receivables are recognized at their fair value plus transaction fees and are further measured on amortized acquisition costs using the Effective Interest Rate ("EIR") method. Income from financial assets in the category of loans and receivables is recorded in the interim statements of income and other comprehensive income and is reported as "Finance Income". In the event of impairment, impairment losses are reported as a deduction from the carrying value of the financial assets in loan and receivables and are recognized in the statements of profit and loss and other comprehensive income as "Impairment loss".

Effective Interest Method ("EIR")

EIR is a method of calculating the amortised cost of a financial asset and of allocating interest income over the relevant period. The EIR is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the EIR, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount of financial assets on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest rate basis for financial instruments other than those financial assets at FVTPL.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi (*incurred loss*) sesuai PSAK 55 "Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran" dengan pendekatan Kerugian Kredit Ekspektasian ("ECL"). Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan (*simplified*) dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian yaitu kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*lifetime*).

Sebelum 1 Januari 2020, bukti objektif penurunan nilai aset keuangan termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

The adoption of PSAK 71 "Financial Instrument" changed the method of calculating impairment from incurred loss in accordance with PSAK 55 "Financial Instrument: Recognition and Measurement" to Expected Credit Loss ("ECL"). The Company adopted the simplified expected credit loss approach which is using lifetime expected credit loss.

Before January 1, 2020, objective evidence of impairment of financial assets could include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or
- it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation; or
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

For certain categories of financial assets, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company's past experience of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

ii. Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss or financial liabilities at amortized cost. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, utang kepada pihak berelasi, beban akrual, liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek, utang bank jangka panjang, liabilitas sewa dan utang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Pada tanggal pelaporan, akrual beban bunga dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan atau kerugian harus diakui dalam laba rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai "Beban Keuangan" dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

ii. Financial liabilities (continued)

Initial recognition and measurement (continued)

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

The Company's financial liabilities consist of short-term bank loans, trade payables, other payables, due to a related party, accrued expenses, short-term employee benefits liability, long-term bank loans, lease liabilities and consumer financing payables classified as financial liabilities at amortized cost. The Company has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Subsequent measurement

After initial recognition, interest-bearing financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the EIR method.

At the reporting dates, accrued interest expenses is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortisation process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in "Finance Costs" in profit or loss.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

iii. Reklasifikasi instrumen keuangan

Perusahaan diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika Perusahaan mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan dan Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Perusahaan seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. Selain itu, Perusahaan perlu membuktikan adanya perubahan tersebut kepada pihak eksternal.

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah: (a) perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar), (b) hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan, dan (c) pengalihan aset keuangan antara bagian dari Perusahaan dengan model bisnis berbeda.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

ii. Financial liabilities (continued)

Derecognition

A financial liability is derecognized when it is extinguished, that is when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

iii. Reclassification of financial instruments

The Company is allowed to reclassify the financial assets owned if the Company changes the business model for the management of financial assets and the Company is not allowed to reclassify the financial liabilities.

Changes in the business model should significantly impact the Company's operational activities such as acquiring, releasing or ending a line of business. In addition, the Company needs to prove the change to external parties.

The following are not considered as change in business model: (a) the change of intention relates to certain financial assets (even in situations of significant changes in market conditions), (b) temporary loss of certain markets for financial assets, and (c) the transfer of financial assets between parts of the Company and different business models.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

iv. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini daripada bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan, atau kebangkrutan.

v. Pengukuran nilai wajar

Perusahaan mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan pada nilai wajar, dan aset dan liabilitas yang diakuisisi pada kombinasi bisnis. Perusahaan juga mengukur jumlah terpulihkan dari UPK tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- i. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- ii. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

iv. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the Company has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously. A right to offset must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency, or bankruptcy.

v. Fair value measurement

The Company initially measures financial instruments at fair value, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations. It also measures certain recoverable amounts of the CGU using fair value less cost of disposal ("FVLCD").

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- i. in the principal market for the asset or liability, or*
- ii. in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Company.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Perusahaan mengukur investasi properti dengan nilai wajar masing-masing tanggal pelaporan.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Fair value measurement of non-financial assets

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

The Company measures investment properties at fair value at each reporting date.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hirarki nilai wajar berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

- i) Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- ii) Level 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- iii) Level 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*) baik secara langsung atau tidak langsung.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terdapat perpindahan antara Level dalam hirarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

r. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Fair value measurement of non-financial assets (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.
- ii) Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
- iii) Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

r. Provision

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Sewa

Sebelum 1 Januari 2020

Perusahaan mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lessee, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya, pada tanggal pengakuan awal.

Sewa Pembiayaan - sebagai Lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa. Sewa tersebut dikapitalisasi sejak awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.

Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung pada laba rugi.

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan selama masa pakai aset yang diestimasi berdasarkan umur manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian tersebut, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan atau masa sewa. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi jual dan sewa kembali ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.

Sewa Operasi - sebagai Lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban di tahun berjalan pada operasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Lease

Before January 1, 2020

The Company classifies leases based on the extent to which risks and rewards incidental to the ownership of a leased asset are vested upon the lessor or the lessee, and the substance of the transaction rather than the form of the contract, at inception date.

Finance Lease - as Lessee

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. Such leases are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased assets or, if lower, at the present value of the minimum lease payments.

Minimum lease payments are apportioned between the financial charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of liability. Financial charges are charged directly to profit or loss.

If there is a reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the end of the lease term, then, the leased assets are depreciated over their estimated useful lives. If not, then the capitalized leased assets are depreciated over the shorter of the useful lives of the assets or the lease term. Gain or loss on a sale and finance leaseback transaction is deferred and amortized over the lease term.

Operating Lease - as Lessee

A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. Accordingly, the related lease payments are recognized as expense in the current year operations using the straight-line method over the lease term.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Sewa (lanjutan)

Sesudah 1 Januari 2020

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 73 "Sewa", yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai "sewa operasi". Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau diamendemen, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Pada tanggal inisiasi suatu kontrak, Perusahaan menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasi, Perusahaan menilai apakah:

- a) Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasi - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- b) Perusahaan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- c) Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Perusahaan memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
 - Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Perusahaan mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Lease (continued)

After January 1, 2020

From 1 January 2020, the Company has adopted PSAK 73 "Leases", which sets the requirements for recognition of lease liabilities in relation to leases which had previously been classified as "operating leases". This policy is applied to contracts entered into or amended, on or after January 1, 2020.

At inception of a contract, the Company assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether:

- a) The contract involves the use of an identified asset - this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;
- b) The Company has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- c) The Company has the right to direct the use of the identified asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Company has the right to direct the use of the asset if either:
 - The Company has the right to operate the asset; or
 - The Company designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Sewa (lanjutan)

Sesudah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pada tanggal insepasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Lease (continued)

After January 1, 2020 (continued)

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Company recognises a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use assets is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, use the incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable.

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant interest rate on the outstanding balance of the liabilities.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Sewa (lanjutan)

Sesudah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sewa jangka-pendek dan sewa aset bernilai-rendah

Perusahaan memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai-rendah. Perseroan mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

t. Informasi segmen

Segmen adalah komponen yang dapat dibedakan dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

u. Peristiwa setelah tanggal pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang memberikan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian), jika ada, dicerminkan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang bukan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan, jika material.

v. Laba per saham dasar

Labanya per saham dihitung dengan membagi laba tahun/periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dan disetor penuh selama tahun/periode yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Lease (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Short-term leases and leases of low-value assets

The Company has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Company recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

t. Segment information

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

u. Events after the reporting date

Events after the report date that provide additional information about the Company's financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Events that are not adjusting events are disclosed in the Notes to the financial statements, when material.

v. Basic earnings per share

The amount of earnings per share is calculated by dividing the income for the year/period attributable to owners of the company by the weighted-average number of shares issued and fully paid during the year/period.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari penjualan barang dan jasa yang diberikan.

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks dan perubahan peraturan perpajakan, jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas pendapatan dan beban pajak yang telah dicatat.

Estimasi juga diperlukan dalam menentukan cadangan untuk pajak penghasilan badan. Transaksi dan perhitungan tertentu yang selama kegiatan usaha normal selalu dikenakan pajak.

Perusahaan mengakui liabilitas untuk masalah pajak penghasilan badan berdasarkan perkiraan apakah tambahan pajak penghasilan badan akan jatuh tempo.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates, and assumptions that affect the reported amount of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Determination of functional currency

The functional currency of the Company is the currency of the primary economic environment in which the Company operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services.

Taxation

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Estimate is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2p.

Sewa

Sewa Operasi

Sebelum 1 Januari 2020, Perusahaan mempunyai perjanjian-perjanjian sewa dimana Perusahaan bertindak sebagai lessee untuk beberapa sewa outlet dan gudang. Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat yang signifikan dari aset sewa yang dialihkan berdasarkan PSAK 30, "Sewa", yang mensyaratkan Perusahaan untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai "Sewa Operasi". Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau diamendemen, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Classification of financial assets and financial liabilities

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Notes 2p.

Leases

Operating Leases

Before January 1, 2020, the Company has several leases whereas the Company acts as lessee in respect of several outlets and warehouses rental. The Company evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased assets are transferred based on PSAK 30, "Leases", which requires the Company to make judgement and estimates of the transfer of risks and rewards related to the ownership of asset.

From January 1, 2020, the Company has adopted PSAK 73, which sets the requirement for recognition of lease liabilities in relation to leases which had previously been classified as 'operating leases'. This policy is applied to contracts entered into or amended, on or after January 1, 2020.

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Cadangan atas penurunan nilai piutang usaha

Sebelum 1 Januari 2020

Perusahaan mengevaluasi akun-akun tertentu yang diketahui bahwa beberapa pelanggannya tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui untuk mencatat provisi spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for impairment of trade receivables

Before January 1, 2020

The Company evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company uses judgment based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company is expected to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Cadangan atas penurunan nilai piutang usaha (lanjutan)

Sesudah 1 Januari 2020

Perusahaan menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL atas piutang usaha. Tarif provisi didasarkan pada hari yang lewat jatuh tempo untuk mengelompokkan pelanggan ke segmen yang memiliki pola kerugian serupa. Matriks provisi awalnya berdasarkan tarif default yang diamati Perusahaan secara historis. Perusahaan akan mengkalibrasi matriks tersebut untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi kedepan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah default di sektor usaha Perusahaan, tingkat default historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tarif *default* yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi ke depan dianalisa kembali.

Penilaian korelasi antara tingkat default yang dapat diamati secara historis, taksiran kondisi ekonomi dan ECL adalah estimasi yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan taksiran kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili aktual *default* pelanggan yang sebenarnya di masa depan.

Cadangan atas penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan

Penyisihan atas penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Allowance for impairment of trade receivables (continued)

After January 1, 2020

The Company uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns. The provision matrix is initially based on the Company's historical observed default rates. The Company will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the Company's industry sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

Allowance for decline in market values and obsolescence of inventories

Allowance for decline in market values and obsolescence of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi pajak tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak masa depan.

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya dan metode unit produksi. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Amortisasi aset takberwujud

Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor yang relevan, antara lain, kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya amortisasi masa depan mungkin direvisi.

Penyusutan aset hak-guna

Biaya perolehan aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset hak-guna antara 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and tax losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Depreciation of fixed assets

The costs of fixed assets and investment properties are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these assets to be within 4 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

Amortisation of intangible assets

The Company performed review of the useful lives of the intangible assets periodically, based on relevant factors, among others, technical condition and technological development in the future. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future amortisation charges could be revised.

Depreciation of right-of-use assets

The costs of right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these leased assets to be within 2 (two) to 10 (ten) years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Nilai wajar properti investasi

Nilai wajar properti investasi ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dengan menggunakan sejumlah asumsi. Metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar aset tersebut ditentukan dengan penggunaan pendekatan data pasar dan/atau pendekatan biaya. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai wajar aset.

Pensiun dan imbalan kerja

Pengukuran kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya.

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Fair value of investment properties

The fair value of investment properties is determined using the valuation techniques that are determined using a number of assumptions. Method and assumptions used in determining the fair value of the assets was determined using market data approach and/or cost approach. Any changes on these assumptions will impact the amount of the assets' fair value.

Pension and employee benefits

The measurement of the Company's obligations and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the financial position with a corresponding debit or credit to other comprehensive income the the period in which they occur.

While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual results or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan

Penurunan nilai timbul saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari transaksi penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dipadukan dengan penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell or its value in use. The fair value less costs to sell is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the specific risks to the asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, the Company uses an appropriate valuation model to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators. The value in use calculation is based on a discounted cash flow model.

Income tax

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the final tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. DAMPAK PENERAPAN - PSAK 71 DAN 73

Dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan dari penerapan pertama kali dari PSAK 71 dan PSAK 73 adalah sebagai berikut:

PSAK 71

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan klasifikasi baru aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020:

Catatan/Notes	Klasifikasi Berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019/ Classification based on PSAK 55 December 31, 2019	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020/ Classification based on PSAK 71 January 1, 2020	Saldo berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019/ Balance based on PSAK 55 December 31, 2019	Saldo berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020/ Balance based on PSAK 71 January 1, 2020
<u>Aset keuangan/Financial assets</u>				
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	2.744.102.486	2.744.102.486
Piutang usaha/ Trade receivables	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	156.815.086.873	153.557.991.917
Piutang lain-lain - pihak ketiga/ Other receivables - third parties	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	103.106.000	103.106.000
Aset tidak lancar lainnya/ Other non-current assets	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortised cost	894.914.628	894.914.628
<u>Liabilitas keuangan/Financial liabilities</u>				
Utang bank jangka pendek/ Short-term bank loans	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	138.955.190.080	138.955.190.080
Utang usaha/ Trade payables	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	56.871.045.349	56.871.045.349
Utang lain-lain/ Other payables	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	1.518.246.132	1.518.246.132

4. IMPLEMENTATION IMPACT - PSAK 71 AND 73

The impact to the Company's financial statements for the first time adoption of PSAK 71 and PSAK 73 are as follows:

PSAK 71

Classification of financial assets and liabilities

The table below shows the classification of financial assets and liabilities according to PSAK 55 and the new classification of financial assets and liabilities in accordance with PSAK 71 as of January 1, 2020:

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
 Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Juli 2020 dan 2019, dan
 Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
 Periods Ended
 July 31, 2020 and 2019, and
 As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
 for the Years then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. DAMPAK PENERAPAN - PSAK 71 DAN 73 (lanjutan)

Dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan dari penerapan pertama kali dari PSAK 71 dan PSAK 73 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

PSAK 71 (lanjutan)

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan klasifikasi baru aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020: (lanjutan)

Catatan/Notes	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019/ Classification based on PSAK 55 December 31, 2019	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020/ Classification based on PSAK 71 January 1, 2020	Saldo berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019/ Balance based on PSAK 55 December 31, 2019	Saldo berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020/ Balance based on PSAK 71 January 1, 2020
<u>Liabilitas keuangan/Financial liabilities (lanjutan)/(continued)</u>				
Beban akrual/ Accrued expenses	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	36.592.655.417	36.592.655.417
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek/ Short-term employee benefits liability	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	6.590.523.066	6.590.523.066
Utang bank jangka panjang/ Long-term bank loans	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	84.404.067.503	84.404.067.503
Utang pembiayaan konsumen/ Consumer financing payables	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	11.914.030.084	11.914.030.084

4. IMPLEMENTATION IMPACT - PSAK 71 AND 73 (continued)

The impact to the Company's financial statements for the first time adoption of PSAK 71 and PSAK 73 are as follows: (continued)

PSAK 71 (continued)

Classification of financial assets and liabilities (continued)

The table below shows the classification of financial assets and liabilities according to PSAK 55 and the new classification of financial assets and liabilities in accordance with PSAK 71 as of January 1, 2020: (continued)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. DAMPAK PENERAPAN - PSAK 71 DAN 73 (lanjutan)

Dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan dari penerapan pertama kali dari PSAK 71 dan PSAK 73 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

PSAK 71 (lanjutan)

Dampak dari penerapan PSAK 71 terhadap laporan posisi keuangan:

	Saldo sebelum penerapan PSAK 71/ <i>Balance before implementation PSAK 71</i>	Klasifikasi dan pengukuran/ <i>Classification and measurement</i>	Kerugian kredit ekspektasian/ <i>Expected credit loss</i>	Saldo setelah penerapan PSAK 71/ <i>Balance after implementation PSAK 71</i>	
Aset					Assets
Aset Lancar					Current Assets
Kas dan setara kas	2.744.102.486	-	-	2.744.102.486	Cash and cash equivalents
Piutang usaha					Trade receivables
Pihak ketiga - neto	155.178.433.053	-	(3.257.094.956)	151.921.338.097	Third parties - net
Pihak berelasi	1.636.653.820	-	-	1.636.653.820	Related parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	103.106.000	-	-	103.106.000	Other receivables - third parties
Persediaan - neto	178.947.067.421	-	-	178.947.067.421	Inventories - net
Pajak dibayar di muka	516.185.145	-	-	516.185.145	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka - bagian lancar	50.358.731.355	-	-	50.358.731.355	Prepayments and advances - current portion
Total Aset Lancar	389.484.279.280	-	(3.257.094.956)	386.227.184.324	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar					Non-Current Assets
Biaya dibayar di muka dan uang muka - setelah dikurangi bagian lancar	21.695.809.007	-	-	21.695.809.007	Prepayments and advances - net of current portion
Aset takberwujud - neto	50.000.000.000	-	-	50.000.000.000	Intangible assets - net
Aset tetap - neto	280.513.212.364	-	-	280.513.212.364	Fixed assets - net
Properti investasi	30.762.722.484	-	-	30.762.722.484	Investment properties
Aset pajak tangguhan - neto	6.208.656.715	-	814.273.739	7.022.930.454	Deferred tax assets - net
Aset tidak lancar lainnya	894.914.628	-	-	894.914.628	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar	390.075.315.198	-	814.273.739	390.889.588.937	Total Non-Current Assets
Total Aset	779.559.594.478	-	(2.442.821.217)	777.116.773.261	Total Assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas Jangka Pendek					Current Liabilities
Utang bank jangka pendek	138.955.190.080	-	-	138.955.190.080	Short-term bank loans
Utang usaha					Trade payables
Pihak ketiga	55.160.936.286	-	-	55.160.936.286	Third parties
Pihak berelasi	1.710.109.063	-	-	1.710.109.063	Related parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	1.518.246.132	-	-	1.518.246.132	Other payables - third parties
Utang pajak	10.787.539.677	-	-	10.787.539.677	Taxes payable
Beban akrual	36.592.655.417	-	-	36.592.655.417	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	6.590.523.066	-	-	6.590.523.066	Short-term employee benefits liability
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank jangka panjang	6.637.601.516	-	-	6.637.601.516	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	4.675.611.653	-	-	4.675.611.653	Consumer financing payables
Total Liabilitas Jangka Pendek	262.628.412.890	-	-	262.628.412.890	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang					Non-Current Liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi dengan bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					Long-term liabilities - net of current maturities:
Utang bank jangka panjang	77.766.465.987	-	-	77.766.465.987	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	7.238.418.431	-	-	7.238.418.431	Consumer financing payables
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang	15.238.683.191	-	-	15.238.683.191	Long-term employee benefits liability
Total Liabilitas Jangka Panjang	100.243.567.609	-	-	100.243.567.609	Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas	362.871.980.499	-	-	362.871.980.499	Total Liabilities

4. IMPLEMENTATION IMPACT - PSAK 71 AND 73 (continued)

The impact to the Company's financial statements for the first time adoption of PSAK 71 and PSAK 73 are as follows: (continued)

PSAK 71 (continued)

Impact on the adoption of PSAK 71 to the statement of financial position:

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. DAMPAK PENERAPAN - PSAK 71 DAN 73 (lanjutan)

Dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan dari penerapan pertama kali dari PSAK 71 dan PSAK 73 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

PSAK 71 (lanjutan)

Dampak dari penerapan PSAK 71 terhadap laporan posisi keuangan: (lanjutan)

	Saldo sebelum penerapan PSAK 71/ <i>Balance before implementation PSAK 71</i>	Klasifikasi dan pengukuran/ <i>Classification and measurement</i>	Kerugian kredit ekspektasian/ <i>Expected credit loss</i>	Saldo setelah penerapan PSAK 71/ <i>Balance after implementation PSAK 71</i>	
Ekuitas					Equity
Modal saham	285.000.000.000	-	-	285.000.000.000	Share capital
Saldo laba	135.225.631.885	-	(2.442.821.217)	132.782.810.668	Retained earnings
Rugi komprehensif lain	(3.538.017.906)	-	-	(3.538.017.906)	Other comprehensive loss
Ekuitas Neto	416.687.613.979	-	(2.442.821.217)	414.244.792.762	Net Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	779.559.594.478	-	(2.442.821.217)	777.116.773.261	Total Liabilities and Equity

PSAK 73

Tabel berikut menyajikan dampak atas penerapan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020:

	1 Januari 2020/January 1, 2020			
	Sebelum penyesuaian/ <i>Before adjustment</i>	Penyesuaian PSAK 73/ <i>PSAK 73 adjustments</i>	Setelah penyesuaian/ <i>After adjustment</i>	
Aset				Assets
Biaya dibayar di muka dan uang muka - bagian lancar	50.358.731.355	(8.126.061.510)	42.232.669.845	Prepayments and advances - current portion
Biaya dibayar di muka dan uang muka - setelah dikurangi bagian lancar	21.695.809.007	(16.000.000.000)	5.695.809.007	Prepayments and advances - net of current portion
Aset hak-guna - neto	-	26.759.122.043	26.759.122.043	Right-of-use assets - net
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas sewa - jangka pendek	-	(1.881.724.882)	(1.881.724.882)	Lease liabilities - current
Liabilitas sewa - jangka panjang	-	(751.335.651)	(751.335.651)	Lease liabilities - non-current

4. IMPLEMENTATION IMPACT - PSAK 71 AND 73 (continued)

The impact to the Company's financial statements for the first time adoption of PSAK 71 and PSAK 73 are as follows: (continued)

PSAK 71 (continued)

Impact on the adoption of PSAK 71 to the statement of financial position: (continued)

PSAK 73

The following table presents the impact of the implementation of PSAK 73 on January 1, 2020:

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri atas:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Kas					Cash on hand
Rupiah	278.807.990	229.605.633	190.423.142	318.017.758	Rupiah
Yuan Tiongkok	32.732.852	536.729	2.361.034	16.548.842	Chinese Yuan
Dolar Hong Kong	8.396.955	7.928.430	8.212.519	1.473.286	Hong Kong Dollar
Dolar AS	5.275.082	5.004.362	868.860	10.973.880	US Dollar
Franc Swiss	322.127	297.371	294.195	286.532	Swiss Franc
Euro Eropa	172.525	155.886	165.598	161.736	European Euro
Peso Filipina	10.438	9.602	11.454.995	-	Philippine Peso
Dolar Singapura	-	8.772.629	-	-	Singapore Dollar
Sub-total	325.717.969	252.310.642	213.780.343	347.462.034	Sub-total
Bank					Cash in banks
Rupiah					Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	1.606.212.997	1.128.130.687	23.341.069.344	1.676.843.182	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	260.834.966	377.753.141	268.814.959	2.154.135.347	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	248.187.568	230.572.039	176.429.625	174.561.710	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mega Tbk	9.145.640	213.180.596	6.380.428	63.452.302	PT Bank Mega Tbk
Dolar AS					US Dollar
PT Bank Central Asia Tbk	2.271.380.957	7.700.325	91.773.338	166.852.155	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	-	14.189.362	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sub-total	4.395.762.128	1.957.336.788	23.884.467.694	4.250.034.058	Sub-total
Deposito berjangka					Time deposit
Rupiah					Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	-	534.455.056	500.000.000	-	PT Bank Central Asia Tbk
Total (tidak termasuk cerukan)	4.721.480.097	2.744.102.486	24.598.248.037	4.597.496.092	Total (excluding overdraft)

Suku bunga tahunan deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Rupiah	-	4,50%	4,25% - 5,00%	-	Rupiah

Pada tanggal 31 Juli 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang ditempatkan kepada pihak berelasi.

The annual interest rates on time deposit per annum are as follow:

As of July 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, there are no cash and cash equivalents balances placed to any related party.

Pada tanggal 31 Juli 2020, dan 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

As of July 31, 2020, and December 31, 2019 and 2018, no cash and cash equivalents balances are restricted for use.

Pada tanggal 31 Desember 2017, terdapat deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya yang dijadikan jaminan atas utang bank yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 14) dan disajikan sebagai "Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya" dalam laporan posisi keuangan. Suku bunga tahunan deposito berjangka tahun 2017 adalah 5,00%

As of December 31, 2017, there was time deposit balance which is restricted for use as collateral for bank loan obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 14) and is presented as "Restricted Time Deposit" in the statement of financial position. The annual interest rates on time deposit in 2017 was 5.00%.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri atas:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Rupiah					Rupiah
Pihak ketiga	183.738.305.207	157.181.114.480	144.316.866.979	135.953.186.081	Third parties
Dikurangi cadangan atas kerugian penurunan nilai	(5.224.731.442)	(2.002.681.427)	-	-	Less allowance for impairment losses
Pihak ketiga - neto	178.513.573.765	155.178.433.053	144.316.866.979	135.953.186.081	Third parties - net
Pihak berelasi (Catatan 8a)	4.550.252.609	1.636.653.820	3.060.463.831	1.651.866.990	Related parties (Note 8a)
Piutang usaha - neto	183.063.826.374	156.815.086.873	147.377.330.810	137.605.053.071	Trade receivables - net

Rincian piutang usaha pihak ketiga berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
PT Koko Pratama	8.596.143.929	2.075.320.559	5.415.840.015	5.378.323.175	PT Koko Pratama
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	7.632.339.993	7.586.380.388	8.972.581.071	5.968.495.805	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
CV Mitra Sekawan	6.799.039.426	10.022.597.908	3.941.683.447	5.586.331.616	CV Mitra Sekawan
PT Borneo Sukses Raya Kaltim	6.616.458.230	2.849.088.284	2.956.691.276	4.077.680.598	PT Borneo Sukses Raya Kaltim
PT Indomarco Prismatama	6.247.451.387	8.641.331.050	5.207.146.962	1.451.653.896	PT Indomarco Prismatama
PT Laris Sukses Abadi	5.873.477.847	4.436.003.870	3.660.411.042	3.499.607.580	PT Laris Sukses Abadi
PT Parmon Prima Lestari	5.317.892.722	8.398.605.153	8.299.955.449	5.547.565.217	PT Parmon Prima Lestari
PT Surya Indotama Express	5.079.111.696	1.237.279.574	1.009.936.571	-	PT Surya Indotama Express
CV Bumi Angkasa Sejahtera	4.357.777.330	3.064.905.300	4.114.383.804	3.894.997.006	CV Bumi Angkasa Sejahtera
Gusti Ngurah Anom	3.394.613.448	3.534.023.568	2.264.291.414	2.004.384.493	Gusti Ngurah Anom
PT Sinar Sahabat Inti Makmur	3.176.194.410	1.638.639.077	1.458.944.701	1.294.893.249	PT Sinar Sahabat Inti Makmur
PT Indah Papua Mandiri	2.911.752.427	1.646.574.405	826.890.270	1.810.902.828	PT Indah Papua Mandiri
PT Midi Utama Indonesia Tbk	2.735.725.802	1.971.937.827	1.488.790.660	1.183.947.195	PT Midi Utama Indonesia Tbk
PD Traco Kencana	2.543.936.569	1.723.481.332	2.823.553.771	2.258.000.959	PD Traco Kencana
PT Sukses Karya Agung	2.491.951.766	2.328.743.763	1.049.684.168	2.845.724.353	PT Sukses Karya Agung
PT Sukses Jaya Indah	2.447.923.196	659.485.959	558.777.013	1.055.200.367	PT Sukses Jaya Indah
CV Mitra Abadi	2.339.999.582	1.729.249.173	1.168.164.964	2.331.149.938	CV Mitra Abadi
PT Glorienta Panca Henna	2.247.764.604	1.332.069.401	1.457.278.435	1.953.074.340	PT Glorienta Panca Henna
PT Gosyen Retail Indonesia	2.218.996.459	-	-	-	PT Gosyen Retail Indonesia
CV Cahaya Makmur Abadi	2.211.560.917	1.573.680.690	2.670.242.566	3.292.668.582	CV Cahaya Makmur Abadi
CV Idaman	1.958.361.567	1.580.377.655	-	-	CV Idaman
UD Multi Guna Abadi	1.891.017.510	780.851.947	1.228.990.434	1.744.370.398	UD Multi Guna Abadi
CV Laut Selatan Jaya	1.837.558.133	1.301.588.087	2.022.018.685	1.663.844.087	CV Laut Selatan Jaya
PT Harja Gunatama Lestari	1.832.613.297	1.274.309.945	1.171.408.366	972.666.622	PT Harja Gunatama Lestari
CV Samudra Jaya Abadi (sebelumnya CV Samudra Sejahtera)	1.688.895.755	1.333.793.118	911.212.094	1.399.157.039	CV Samudra Jaya Abadi (formerly CV Samudra Sejahtera)
CV Langgeng Sejahtera	1.469.339.733	2.569.448.528	1.909.836.749	1.207.838.295	CV Langgeng Sejahtera
PT Naga Swalayan	1.464.162.304	697.516.164	446.779.773	354.809.362	PT Naga Swalayan
PT Akur Pratama	1.379.543.545	1.617.228.730	1.427.463.959	1.189.408.896	PT Akur Pratama
PT Napolo Panutan Abadi	1.297.296.488	3.161.242.282	2.641.464.212	2.227.522.402	PT Napolo Panutan Abadi
PT Idola Cahaya Semesta	1.245.634.548	796.938.691	606.601.189	643.826.486	PT Idola Cahaya Semesta
PT Trans Retail Indonesia	1.203.175.710	2.896.887.104	5.574.634.096	2.791.191.892	PT Trans Retail Indonesia
PT Terus Jaya Abadi	1.174.279.704	2.157.075.710	2.101.003.399	2.305.535.228	PT Terus Jaya Abadi
PT Saudara Sejati Sejahtera	1.110.282.457	972.155.312	873.503.241	610.405.045	PT Saudara Sejati Sejahtera
PT Sumber Indah Lestari	1.102.966.609	812.778.576	571.876.259	456.062.367	PT Sumber Indah Lestari
UD. Mitra Arislan	605.616.589	317.897.780	2.975.960.222	2.621.903.287	UD. Mitra Arislan
PT Hero Supermarket Tbk	244.394.670	1.638.226.701	2.842.859.337	5.321.966.485	PT Hero Supermarket Tbk
PT Inti Dufree Promosindo	46.349.606	1.366.115.135	406.462.890	-	PT Inti Dufree Promosindo
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	76.946.705.242	65.457.287.734	57.259.544.475	55.008.076.993	Others (below Rp1 billion each)
Total	183.738.305.207	157.181.114.480	144.316.866.979	135.953.186.081	Total

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Belum jatuh tempo	113.075.502.953	96.394.239.523	89.564.296.005	94.131.998.905	Not past due
Lewat jatuh tempo					Overdue
1 sampai 30 hari	44.052.035.466	42.131.081.803	40.897.652.341	29.640.069.935	1 to 30 days
31 sampai 60 hari	13.908.698.278	11.420.137.720	8.544.162.017	6.360.602.078	31 to 60 days
61 sampai 90 hari	7.609.030.783	4.374.040.405	2.120.412.945	2.204.673.301	61 to 90 days
Lebih dari 90 hari	9.643.290.336	4.498.268.849	6.250.807.502	5.267.708.852	More than 90 days
Total	188.288.557.816	158.817.768.300	147.377.330.810	137.605.053.071	Total
Dikurangi cadangan atas kerugian penurunan nilai	(5.224.731.442)	(2.002.681.427)	-	-	Less allowance for impairment losses
Neto	183.063.826.374	156.815.086.873	147.377.330.810	137.605.053.071	Net

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2020/ Seven-Month Period Ended July 31, 2020			
Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Total/Total	
Saldo awal	2.002.681.427	-	2.002.681.427
Penyesuaian saldo awal - dampak penerapan PSAK 71	-	3.257.094.956	3.257.094.956
Penyisihan selama periode berjalan	-	1.967.636.486	1.967.636.486
Pembalikan selama periode berjalan	(610.728.918)	-	(610.728.918)
Penghapusan	(1.391.952.509)	-	(1.391.952.509)
Saldo akhir	-	5.224.731.442	5.224.731.442

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019/ Year Ended December 31, 2019			
Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Total/Total	
Saldo awal	-	-	-
Penyisihan selama tahun berjalan	2.002.681.427	-	2.002.681.427
Pembalikan selama tahun berjalan	-	-	-
Penghapusan	-	-	-
Saldo akhir	2.002.681.427	-	2.002.681.427

Berdasarkan hasil penelaahan individual dan kolektif atas saldo piutang usaha pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Berdasarkan hasil penelaahan individual dan kolektif atas saldo piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, manajemen Perusahaan berkeyakinan seluruh piutang usaha dapat ditagihkan, sehingga cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha belum diperlukan.

Pada tanggal 31 Desember 2017, piutang usaha sebesar Rp85.000.000.000 dijadikan jaminan atas utang bank yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 14).

7. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri atas:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Barang jadi (Catatan 23)	98.312.501.530	101.373.096.663	61.815.352.496	65.507.276.369	Finished goods (Note 23)
Bahan baku	41.876.664.978	43.779.069.726	35.389.103.555	20.250.307.769	Raw materials
Bahan pembungkus	37.615.716.540	28.717.629.806	24.656.613.573	24.513.933.429	Packaging materials
Barang dalam proses (Catatan 23)	5.522.291.749	5.077.271.226	4.672.127.325	3.462.392.596	Work in process (Note 23)
Total	183.327.174.797	178.947.067.421	126.533.196.949	113.733.910.163	Total
Cadangan atas keusangan persediaan	(454.321.836)	-	-	-	Allowance for obsolescence of inventories
Neto	182.872.852.961	178.947.067.421	126.533.196.949	113.733.910.163	Net

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

The movements of allowance for impairment losses on trade receivables are as follows:

Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2020/ Seven-Month Period Ended July 31, 2020			
Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Total/Total	
Saldo awal	2.002.681.427	-	2.002.681.427
Penyesuaian saldo awal - dampak penerapan PSAK 71	-	3.257.094.956	3.257.094.956
Penyisihan selama periode berjalan	-	1.967.636.486	1.967.636.486
Pembalikan selama periode berjalan	(610.728.918)	-	(610.728.918)
Penghapusan	(1.391.952.509)	-	(1.391.952.509)
Saldo akhir	-	5.224.731.442	5.224.731.442

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019/ Year Ended December 31, 2019			
Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Total/Total	
Saldo awal	-	-	-
Penyisihan selama tahun berjalan	2.002.681.427	-	2.002.681.427
Pembalikan selama tahun berjalan	-	-	-
Penghapusan	-	-	-
Saldo akhir	2.002.681.427	-	2.002.681.427

Based on the individual and collective assessment on the outstanding receivables as of July 31, 2020, and December 31, 2019, the Company's management believes that the allowance for impairment losses of trade receivables is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

Based on the individual and collective assessment on the outstanding receivables as of December 31, 2018 and 2017, the Company's management believes that all trade receivables are collectible, therefore allowance for impairment losses of trade receivables were not necessary.

As of December 31, 2017, trade receivables amounting to Rp85,000,000,000 were pledged as collateral for bank loans obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 14).

7. INVENTORIES

This account consists of:

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERSEDIAAN (lanjutan)

Mutasi cadangan atas keusangan persediaan adalah sebagai berikut:

	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2020/ Seven-Month Period Ended July 31, 2020
Saldo awal	-
Penyisihan selama periode berjalan	454.321.836
Pembalikan selama periode berjalan	-
Penghapusan	-
Saldo akhir	454.321.836

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal 31 Juli 2020, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa cadangan atas keusangan persediaan adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian penurunan nilai yang mungkin timbul dari tidak terpulihkannya persediaan yang lambat pergerakannya.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa persediaan dapat digunakan dan cadangan atas keusangan persediaan belum diperlukan.

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam "Beban Pokok Penjualan" masing-masing sebesar Rp287.090.672.208, Rp190.056.934.647, Rp334.850.244.392, Rp265.628.962.529 dan Rp235.343.339.494.

Pada tanggal 31 Juli 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, persediaan milik Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu kepada PT Asuransi Wahana Tata dan PT Asuransi Astra Buana dengan nilai keseluruhan pertanggungan masing-masing sebesar Rp175.430.000.000, Rp146.380.000.000, Rp81.915.000.000 dan Rp82.385.000.000. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa nilai tersebut cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2017, persediaan sebesar Rp70.000.000.000 dijadikan jaminan atas utang bank yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 14).

7. INVENTORIES (continued)

The movements of allowance for obsolescence of inventories are as follows:

	Beginning balance
	Provision during the period
	Reversal during the period
	Write-off
	Ending balance

Based on the review of the condition of inventories as of July 31, 2020, the Company's management believes that the allowance for obsolescence of inventories is adequate to cover possible losses that may arise from non-recoverability of slow-moving inventories.

Based on the review of the condition of inventories as of December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company's management believes that all inventories are usable and allowance for obsolescence of inventories are not necessary.

For the seven-month periods ended July 31, 2020 and 2019, and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, the cost of inventories recognized as expenses and included in "Cost of Goods Sold" amounted to Rp287,090,672,208, Rp190,056,934,647, Rp334,850,244,392, Rp265,628,962,529 and Rp235,343,339,494, respectively.

As of July 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, inventories of the Company are covered by insurance against losses by fire and other risks under blanket policies from PT Asuransi Wahana Tata and PT Asuransi Astra Buana with a total insurance coverage totalling to Rp175,430,000,000, Rp146,380,000,000, Rp81,915,000,000 and Rp82,385,000,000, respectively. The Company's management believes that the above coverage is sufficient to cover possible losses arising from those risks.

As of December 31, 2017, inventories amounting to Rp70,000,000,000 were pledged as collateral for bank loans obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 14).

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi tertentu. Perusahaan melakukan transaksi berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang disepakati bersama dengan pihak-pihak berelasi. Saldo akun-akun yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Sifat Transaksi/ Nature of Transaction
CV Victoria Care Indonesia	Entitas sepengendali/Under common control	Penjualan persediaan/Sales of inventories
PT Natura Pesona Mandiri	Entitas sepengendali/Under common control	Penjualan dan pembelian persediaan dan royalti/Sales and purchases of inventories and royalty
PT Sumber Sawit Sejahtera	Entitas yang memiliki manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan (sampai dengan 30 Juli 2020)/Entity which has the same key management with the Company (until July 30, 2020)	Utang/Loan
Dewan Komisaris dan Direksi/Boards of Commissioners and Directors	Manajemen kunci/Key management	Utang kepada pihak berelasi, royalti, sewa gudang dan kompensasi manajemen kunci/Due to a related party, royalty, warehouse rent and key management compensation

Rincian saldo dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Piutang usaha (Catatan 6)

	Saldo/Balance		Persentase terhadap Total Aset (%)/ Percentage to Total Assets (%)		
	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
PT Natura Pesona Mandiri	4.550.252.609	714.621.990	0,56	0,09	PT Natura Pesona Mandiri
CV Victoria Care Indonesia	-	922.031.830	-	0,12	CV Victoria Care Indonesia
Total	4.550.252.609	1.636.653.820	0,56	0,21	Total

	Saldo/Balance		Persentase terhadap Total Aset (%)/ Percentage to Total Assets (%)		
	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
PT Natura Pesona Mandiri	2.789.580.589	1.516.645.246	0,45	0,27	PT Natura Pesona Mandiri
CV Victoria Care Indonesia	270.883.242	135.221.744	0,04	0,02	CV Victoria Care Indonesia
Total	3.060.463.831	1.651.866.990	0,49	0,29	Total

8. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS

In the normal course of business, the Company engages in trade and financial transactions with certain related parties. The Company engaged in the transactions under agreed terms and conditions with its related parties. The significant account balances and transactions with related parties are as follows:

The nature of relationships with the related parties is as follows:

The details of related parties balances are as follows:

a. Trade receivables (Note 6)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Rincian saldo dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

b. Piutang pihak berelasi

	Saldo/Balance	
	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
PT Sumber Sawit Sejahtera	18.415.160.500	18.423.514.500
PT Natura Pesona Mandiri	-	60.887.216.506
Total	18.415.160.500	79.310.731.006

Piutang pihak berelasi dari PT Sumber Sawit Sejahtera dan PT Natura Pesona Mandiri merupakan pinjaman tanpa bunga untuk keperluan modal kerja yang diberikan oleh Perusahaan.

Piutang pihak berelasi dari PT Sumber Sawit Sejahtera dan PT Natura Pesona Mandiri telah diterima masing-masing pada tanggal 20 Desember 2019 dan 28 Desember 2018.

c. Utang usaha (Catatan 15)

	Saldo/Balance	
	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
PT Natura Pesona Mandiri	5.233.876.551	1.710.109.063

	Saldo/Balance	
	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
PT Natura Pesona Mandiri	1.088.448.770	3.096.119.422

d. Utang lain-lain

	Saldo/Balance	
	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
CV Victoria Care Indonesia	2.476.811.021	-

e. Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan memiliki utang kepada komisaris sebesar Rp525.000.000, yang dicatat sebagai "Utang kepada Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan.

8. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS

The details of related parties balances are as follows:

b. Due from related parties

	Persentase terhadap Total Aset (%) Percentage to Total Assets (%)		
	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
PT Sumber Sawit Sejahtera	2,98	3,26	PT Sumber Sawit Sejahtera
PT Natura Pesona Mandiri	-	10,76	PT Natura Pesona Mandiri
Total	2,98	14,02	Total

Due from related parties of PT Sumber Sawit Sejahtera and PT Natura Pesona Mandiri represent non-interest bearing loan for working capital provided by the Company.

Amounts due from PT Sumber Sawit Sejahtera and PT Natura Pesona Mandiri have been fully collected on December 20, 2019 and December 28, 2018, respectively.

c. Trade payables (Note 15)

	Persentase terhadap Total Liabilitas (%) Percentage to Total Liabilities (%)		
	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
PT Natura Pesona Mandiri	1,75	0,47	PT Natura Pesona Mandiri

	Persentase terhadap Total Liabilitas (%) Percentage to Total Liabilities (%)		
	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
PT Natura Pesona Mandiri	0,35	1,03	PT Natura Pesona Mandiri

d. Other payables

	Persentase terhadap Total Liabilitas (%) Percentage to Total Liabilities (%)		
	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
CV Victoria Care Indonesia	0,83	-	CV Victoria Care Indonesia

e. As of December 31, 2017, the Company had outstanding balance of due to commissioner amounting to Rp525,000,000, which was recorded as "Due to a Related Party" in the statement of financial position.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

f. Penjualan neto (Catatan 22)

	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal/ Seven-Month Periods Ended		Persentase terhadap Penjualan Neto (%)/ Percentage to Net Sales (%)		
	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Juli 2019/ (Tidak Diaudit)/ July 31, 2019 (Unaudited)	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Juli 2019 (Tidak Diaudit)/ July 31, 2019 (Unaudited)	
PT Natura Pesona Mandiri	52.881.084.813	4.523.377.583	8,56	1,01	PT Natura Pesona Mandiri
CV Victoria Care Indonesia	1.976.184.718	1.073.176.127	0,32	0,24	CV Victoria Care Indonesia
Total	54.857.269.531	5.596.553.710	8,88	1,25	Total

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal/ Years Ended		Persentase terhadap Penjualan Neto (%)/ Percentage to Net Sales (%)		
	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
PT Natura Pesona Mandiri	7.545.087.533	4.391.917.811	0,95	0,74	PT Natura Pesona Mandiri
CV Victoria Care Indonesia	4.637.195.159	1.265.079.298	0,58	0,21	CV Victoria Care Indonesia
Total	12.182.282.692	5.656.997.109	1,53	0,95	Total

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal/ Year Ended	Persentase terhadap Penjualan Neto (%)/ Percentage to Net Sales (%)	
	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
PT Natura Pesona Mandiri	5.146.489.252	0,98	PT Natura Pesona Mandiri
CV Victoria Care Indonesia	715.777.072	0,14	CV Victoria Care Indonesia
Total	5.862.266.324	1,12	Total

8. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)

The details of related parties transactions are as follows:

f. Net sales (Note 22)

f. Pembelian (Catatan 23)

	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal/ Seven-Month Periods Ended		Persentase terhadap Pembelian (%)/ Percentage to Purchases (%)		
	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Juli 2019/ (Tidak Diaudit)/ July 31, 2019 (Unaudited)	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Juli 2019 (Tidak Diaudit)/ July 31, 2019 (Unaudited)	
PT Natura Pesona Mandiri	81.527.160.340	9.888.009.690	28,06	4,85	PT Natura Pesona Mandiri

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal/ Years Ended		Persentase terhadap Pembelian (%)/ Percentage to Purchases (%)		
	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
PT Natura Pesona Mandiri	16.964.187.103	12.774.640.869	4,39	4,63	PT Natura Pesona Mandiri

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal/ Year Ended	Persentase terhadap Pembelian (%)/ Percentage to Purchase (%)	
	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
PT Natura Pesona Mandiri	11.515.077.373	4,62	PT Natura Pesona Mandiri

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi

g. Billy Hartono Salim

Perjanjian Lisensi

Pada tanggal 2 Januari 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Lisensi dengan Billy Hartono Salim sehubungan dengan hak untuk menggunakan merek Victoria, Herborist, Miranda, Nuface, Iria dan Sixsence untuk periode dari tanggal 2 Januari 2014 hingga 1 Januari 2019. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan akan membayar kepada Billy Hartono Salim biaya royalti sebesar 0,50% dari penjualan bersih produk-produk terkait.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, beban royalti terkait perjanjian ini adalah masing-masing sebesar Rp5.607.685.670 dan Rp2.105.649.207, yang dicatat sebagai bagian dari "Beban Penjualan dan Pemasaran" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya (Catatan 24), dan bagian yang belum dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.990.245.546 dan Rp2.105.649.207 yang disajikan sebagai bagian dari "Beban Akrual" dalam laporan posisi keuangan (Catatan 17).

Sewa Gudang

Berdasarkan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 65 tanggal 28 Februari 2019, Perusahaan menyewa gudang yang terletak di Semarang, Jawa Tengah milik Billy Hartono Salim untuk jangka waktu sejak 28 Desember 2018 sampai dengan 27 Desember 2028 sebesar Rp20.000.000.000, yang telah dibayarkan seluruhnya dan dicatat sebagai bagian dari "Aset Hak-guna" pada tanggal 31 Juli 2020 dan "Biaya Dibayar Di Muka dan Uang Muka" pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Beban sewa terkait perjanjian ini adalah masing-masing sebesar Rp1.166.666.667 untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan 2019, dan Rp2.000.000.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Beban tersebut disajikan sebagai bagian dari "Beban Pokok Penjualan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya.

8. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)

Significant agreements with related parties

g. Billy Hartono Salim

License Agreement

On January 2, 2014, the Company entered into License Agreement with Billy Hartono Salim with regard to the rights of using the brands Victoria, Herborist, Miranda, Nuface, Iria and Sixsence for a period from January 2, 2014 until January 1, 2019. Under the agreement, the Company shall pay to Billy Hartono Salim a royalty fee at the rate of 0.50% from the net sales of the related products.

For the years ended December 31, 2018 and 2017, royalty expenses related to this agreement amounted to Rp5,607,685,670 and Rp2,105,649,207, respectively, which was recorded as part of "Selling and Marketing Expenses" in the statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 24), and the portion which has not been paid as of December 31, 2018 and 2017 amounting to Rp2,990,245,546 and Rp2,105,649,207, respectively which are presented as part of "Accrued Expenses" in the statement of financial position (Note 17).

Warehouse Rent

Based on Notarial Deed of Rudy Siswanto, S.H., No. 65 dated February 28, 2019, the Company rents warehouse located in Semarang, Central Java owned by Billy Hartono Salim for a time period from December 28, 2018 and December 2028 amounting to Rp20,000,000,000, which was fully paid and was recorded as part of "Right-of-use Assets" as of July 31, 2020 and "Prepayments and Advances" as of December 31, 2019 and 2018.

Rent expenses related to this agreement amounting to Rp1,166,666,667 for the seven-month periods ended July 31, 2020 and 2019, respectively, and Rp2,000,000,000 for the year ended December 31, 2019. Those expenses are presented as part of "Cost of Goods Sold" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

h. PT Natura Pesona Mandiri

Perjanjian Lisensi

Pada tanggal 2 Januari 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pemakaian Merek Dagang dengan PT Natura Pesona Mandiri sehubungan dengan hak untuk menggunakan merek Victoria, Herborist, Miranda, Nuface, Iria dan Sixsence untuk periode dari tanggal 2 Januari 2019 hingga 1 Januari 2024. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan akan membayar kepada PT Natura Pesona Mandiri biaya royalti sebesar 0,50% dari penjualan bersih produk-produk terkait.

Berdasarkan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 10, 37 dan 53 masing-masing tanggal 5 Desember 2019, 17 Desember 2019 dan 20 Desember 2019, Perusahaan mengadakan perjanjian pengalihan hak atas merek dagang Victoria, Herborist, Miranda, Nuface, Iria, Sixsence dan CBD dari PT Natura Pesona Mandiri sebesar total Rp50.000.000.000 yang telah dibayar seluruhnya (Catatan 10). Dengan demikian, Perjanjian Pemakaian Merek Dagang tanggal 2 Januari 2019 tidak berlaku dan Perusahaan tidak berkewajiban membayar biaya royalti kepada PT Natura Pesona Mandiri.

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, beban royalti terkait perjanjian ini adalah masing-masing sebesar RpNihil, Rp2.243.657.037 dan Rp3.998.580.200, yang dicatat sebagai bagian dari "Beban Penjualan dan Pemasaran" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya (Catatan 24), dan bagian yang belum dibayarkan pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar RpNihil dan Rp1.998.580.201 yang disajikan sebagai bagian dari "Beban Akrua" dalam laporan posisi keuangan (Catatan 17).

8. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)

Significant agreements with related parties (continued)

h. PT Natura Pesona Mandiri

License Agreement

On January 2, 2019, the Company entered into Trademarks License Agreement with PT Natura Pesona Mandiri with regard to the rights of using the brands Victoria, Herborist, Miranda, Nuface, Iria and Sixsence for a period from January 2, 2019 until January 1, 2024. Under the agreement, the Company shall pay to PT Natura Pesona Mandiri a royalty fee at the rate of 0.50% from the net sales of the related products.

Based on Notarial Deed of Rudy Siswanto, S.H., No. 10, 37 and 53 dated December 5, 2019, December 17, 2019 and December 20, 2019, respectively, the Company entered into agreement on transfer of Victoria, Herborist, Miranda, Nuface, Iria, Sixsence and CBD trademarks rights from PT Natura Pesona Mandiri at the total amount of Rp50,000,000,000 which had been fully paid (Note 10). Therefore, the Trademarks License Agreement dated January 2, 2019 is no longer valid and the Company is not liable to pay royalty fees to PT Natura Pesona Mandiri.

For the seven-month periods ended July 31, 2020 and 2019, and for the years ended December 31, 2019, royalty expenses related to this agreement amounted to RpNil, Rp2,243,657,037 and Rp3,998,580,200, respectively, which were recorded as part of "Selling and Marketing Expenses" in the statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 24), and the portion which has not been paid as of July 31, 2020 and December 31, 2019 amounting to RpNil and Rp1,998,580,201, respectively which are presented as part of "Accrued Expenses" in the statement of financial position (Note 17).

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

i. PT Natura Pesona Mandiri (lanjutan)

Perjanjian Penunjukan Distributor

Pada tanggal 31 Januari 2020, Perusahaan dan PT Natura Pesona Mandiri menandatangani Perjanjian Penunjukan Distributor Nomor 001/PPD/VCI-HO/01/2020, dimana PT Natura Pesona Mandiri menunjuk Perusahaan sebagai distributor untuk menjual dan mendistribusikan produk milik PT Natura Pesona Mandiri dengan merek Bali Boat, Secret Garden dan Bali Dancer, yang berlaku sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Pada tanggal 2 Maret 2020, Perusahaan dan PT Natura Pesona Mandiri menandatangani Perjanjian Penunjukan Distributor Nomor 001/PPD/VCI-HO/03/2020, dimana PT Natura Pesona Mandiri menunjuk Perusahaan sebagai distributor untuk menjual dan mendistribusikan produk milik PT Natura Pesona Mandiri dengan merek Secret Clean, yang berlaku sejak 1 Maret 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Saldo dan transaksi terkait perjanjian ini dicatat sebagai bagian dari "Utang Usaha - pihak berelasi" dan "Beban Pokok Penjualan".

Perjanjian Kerja Sama - Produksi Produk Pembersih Tangan dan Antiseptik

Pada tanggal 5 Maret 2020, Perusahaan dan PT Natura Pesona Mandiri menandatangani Perjanjian Kerja Sama No. 005/VCI/HRGA-PKS/MKT/III/2020 terkait produksi produk pembersih tangan, dimana Perusahaan akan memproduksi gel dan cairan pembersih tangan merek Secret Clean milik PT Natura Pesona Mandiri untuk jangka waktu sejak 6 Maret 2020 sampai dengan 6 Maret 2021.

8. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)

Significant agreements with related parties (continued)

i. PT Natura Pesona Mandiri (continued)

Distributor Appointment Agreement

On January 31, 2020, the Company and PT Natura Pesona Mandiri signed Distributor Appointment Agreement Number 001/PPD/VCI-HO/01/2020, where PT Natura Pesona Mandiri appointed the Company as a distributor to sell and distribute PT Natura Pesona Mandiri's products with brand Bali Boat, Secret Garden and Bali Dancer, which are valid since January 1, 2020 until December 31, 2020.

On March 2, 2020, the Company and PT Natura Pesona Mandiri signed Distributor Appointment Agreement Number 001/PPD/VCI-HO/03/2020, where PT Natura Pesona Mandiri appointed the Company as a distributor to sell and distribute PT Natura Pesona Mandiri's products with brand Secret Clean, which is valid since March 1, 2020 until December 31, 2020.

Balances and transactions related to this agreement are recorded as part of "Trade Payables - related parties" and "Costs of Goods Sold".

Cooperation Agreement - Production of Hand Sanitizer Products and Antiseptic

On March 5, 2020, the Company and PT Natura Pesona Mandiri entered into Cooperation Agreement No. 005/VCI/HRGA-PKS/MKT/III/2020 related to the production of hand sanitizer products, where the Company will produce hand sanitizer gel and liquid with brand Secret Clean owned by PT Natura Pesona Mandiri for a period of time from March 6, 2020 until March 6, 2021.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

i. PT Natura Pesona Mandiri (lanjutan)

Perjanjian Kerja Sama - Produksi Produk Pembersih Tangan dan Antiseptik (lanjutan)

Berdasarkan addendum pertama perjanjian pada tanggal 16 Maret 2020, jangka waktu perjanjian ini diperpanjang sampai dengan tanggal 6 Maret 2025. Kemudian, berdasarkan addendum kedua pada tanggal 17 April 2020, objek perjanjian ditambah dengan produksi sabun cuci tangan dan antiseptik cair dengan merek Secret Clean.

Saldo dan transaksi terkait perjanjian ini dicatat sebagai bagian dari "Piutang Usaha - pihak berelasi" dan "Penjualan Neto".

Kompensasi Manajemen Kunci

Kompensasi bruto untuk manajemen kunci untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan 2019, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp5.473.428.951, Rp2.280.984.000, Rp12.394.074.248, Rp5.179.398.700 dan Rp4.324.480.300, yang merupakan imbalan jangka pendek.

9. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA

Akun ini terdiri atas:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Biaya dibayar di muka					
Promosi	6.011.297.283	9.292.975.731	10.892.994.033	714.670.927	Prepayments Promotion
Sewa	1.226.118.268	25.597.404.076	24.443.993.151	1.471.701.389	Rent
Asuransi	733.648.809	623.113.301	427.079.847	442.726.864	Insurance
Lain-lain	281.491.590	237.758.451	565.376.364	548.412.360	Others
Uang muka					Advances
Pembelian persediaan	30.085.139.653	32.235.247.280	35.863.924.513	12.917.313.682	Purchase of inventories
Pembelian aset tetap	3.307.119.219	4.068.041.523	1.458.479.544	1.200.729.670	Purchase of fixed assets
Pembelian merek dagang	-	-	6.142.849.466	-	Purchase of trademarks
Total	41.644.814.822	72.054.540.362	79.794.696.918	17.295.554.892	Total
Dikurangi bagian lancar	(36.172.973.382)	(50.358.731.355)	(48.914.988.640)	(16.094.825.222)	Less current portion
Bagian tidak lancar	5.471.841.440	21.695.809.007	30.879.708.278	1.200.729.670	Non-current portion

8. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)

Significant agreements with related parties (continued)

i. PT Natura Pesona Mandiri (continued)

Cooperation Agreement - Production of Hand Sanitizer Products and Antiseptic (continued)

Based on first amendment dated March 16, 2020, the agreement period is extended until March 6, 2025. Then, based on second amendment dated April 17, 2020, the agreement's object is added to produce hand soap and liquid antiseptic with brand Secret Clean.

Balances and transactions related to this agreement are recorded as part of "Trade Receivables - related parties" and "Net Sales".

Key Management Compensation

The amount of gross compensation to the key management for the seven-month periods ended July 31, 2020 and 2019, and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, amounted to Rp5,473,428,951, Rp2,280,984,000, Rp12,394,074,248, Rp5,179,398,700 and Rp4,324,480,300, respectively, which represent short-term benefits.

9. PREPAYMENTS AND ADVANCES

This account consists of:

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TAKBERWUJUD

Akun ini terdiri atas:

Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2020/ Seven-Month Period Ended July 31, 2020			
	Merek Dagang/ Trademarks	Perangkat Lunak/ Software	Total/Total
Biaya perolehan			Cost
Saldo awal	50.000.000.000	-	50.000.000.000
Penambahan	-	3.710.846.174	3.710.846.174
Saldo akhir	50.000.000.000	3.710.846.174	53.710.846.174
Akumulasi amortisasi			Accumulated amortisation
Saldo awal	-	-	-
Penambahan (Catatan 25)	-	(154.618.591)	(154.618.591)
Saldo akhir	-	(154.618.591)	(154.618.591)
Nilai buku neto	50.000.000.000	3.556.227.583	53.556.227.583
			Beginning balance
			Additions
			Ending balance
			Beginning balance
			Additions (Note 25)
			Ending balance
			Net book value
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019/ Year Ended December 31, 2019			
	Merek Dagang/ Trademarks	Perangkat Lunak/ Software	Total/Total
Biaya perolehan			Cost
Saldo awal	-	-	-
Penambahan	50.000.000.000	-	50.000.000.000
Saldo akhir	50.000.000.000	-	50.000.000.000
Akumulasi amortisasi			Accumulated amortisation
Saldo awal	-	-	-
Penambahan	-	-	-
Saldo akhir	-	-	-
Nilai buku neto	50.000.000.000	-	50.000.000.000
			Beginning balance
			Additions
			Ending balance
			Beginning balance
			Additions
			Ending balance
			Net book value

Berdasarkan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 10, 37 dan 53 masing-masing tanggal 5 Desember 2019, 17 Desember 2019 dan 20 Desember 2019, Perusahaan mengadakan perjanjian pengalihan merek dagang Victoria, Herborist, Miranda, Nuface, Iria, Sixsence dan CBD dari PT Natura Pesona Mandiri sebesar total Rp50.000.000.000 yang telah dibayar seluruhnya (Catatan 8).

Hak untuk menggunakan merek dagang tersebut yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dapat diperbaharui dengan sedikit atau tanpa biaya, sehingga dianggap memiliki umur manfaat tidak terbatas.

10. INTANGIBLE ASSETS

This account consists of:

Based on Notarial Deed of Rudy Siswanto, S.H., No. 10, 37 and 53 dated December 5, 2019, December 17, 2019 and December 20, 2019, respectively, the Company entered into agreement on transfer of trademarks of Victoria, Herborist, Miranda, Nuface, Iria, Sixsence and CBD from PT Natura Pesona Mandiri at the total amount of Rp50,000,000,000 which had been fully paid (Note 8).

Right to use those trademarks as granted by Directorate General of Intellectual Property Rights on behalf of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia which can be renewed at little or no cost, therefore are determined to have an indefinite useful life.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Pada tanggal 6 Juli 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Implementasi Perangkat Lunak Oracle E-Business Suite dengan PT Metrodata Electronics Tbk. Perangkat lunak ini telah selesai diimplementasi pada bulan Juni 2020.

Beban amortisasi perangkat lunak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp154.618.591 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban Umum dan Administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya (Catatan 25).

Pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019, tidak ada aset takberwujud yang kepemilikannya digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman.

Pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset takberwujud.

10. INTANGIBLE ASSETS (continued)

On July 6, 2019, the Company entered into Oracle E-Business Suite Software Implementation Agreement with PT Metrodata Electronics Tbk. This software was completely implemented in June 2020.

The amortisation expense of software for the seven-month period ended July 31, 2020 is amounting to Rp154,618,591 and was recorded as part of "General and Administrative Expenses" in the statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 25).

As of July 31, 2020 and December 31, 2019, none of the intangible assets are used as collateral for loans.

As of July 31, 2020 and December 31, 2019, the Company's management believes that there is no event or change in circumstances that may indicate any impairment on intangible assets.

11. ASET TETAP

Akun ini terdiri atas:

11. FIXED ASSETS

This account consists of:

Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2020/ Seven-Month Period Ended July 31, 2020					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan					
<u>Keperilikan langsung</u>					<u>Acquisition cost</u>
Tanah	136.462.509.601	-	-	-	136.462.509.601
Bangunan dan prasarana	135.966.211.244	1.134.249.977	-	-	137.100.461.221
Kendaraan	29.026.864.697	3.398.913.820	(120.000.000)	-	32.305.778.517
Perlengkapan kantor	24.754.799.368	5.109.554.208	(1.089.155)	-	29.863.264.421
Peralatan pabrik	26.155.429.025	2.988.192.955	-	-	29.143.621.980
Peralatan laboratorium	242.799.995	-	-	-	242.799.995
Total biaya perolehan	352.608.613.930	12.630.910.960	(121.089.155)	-	365.118.435.735
Akumulasi depresiasi					
<u>Keperilikan langsung</u>					<u>Accumulated depreciation</u>
Bangunan dan prasarana	20.202.219.153	4.439.704.619	-	-	24.641.923.772
Kendaraan	16.824.522.398	3.236.583.005	(120.000.000)	-	19.941.105.403
Perlengkapan kantor	12.902.012.057	4.186.248.678	(363.052)	-	17.087.897.683
Peralatan pabrik	21.925.445.137	1.184.604.641	-	-	23.110.049.778
Peralatan laboratorium	241.202.821	564.995	-	-	241.767.816
Total akumulasi depresiasi	72.095.401.566	13.047.705.938	(120.363.052)	-	85.022.744.452
Nilai tercatat neto	280.513.212.364				280.095.691.283

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Akun ini terdiri atas: (lanjutan)

11. FIXED ASSETS (continued)

This account consists of: (continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019/ Year Ended December 31, 2019						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	136.462.509.601	-	-	-	136.462.509.601	Land
Bangunan dan prasarana	47.045.109.224	88.921.102.020	-	-	135.966.211.244	Building and improvements
Kendaraan	26.836.529.579	6.454.276.784	(4.263.941.666)	-	29.026.864.697	Vehicles
Perlengkapan kantor	13.439.637.267	11.380.264.373	(65.102.272)	-	24.754.799.368	Office supplies
Peralatan pabrik	23.594.656.822	2.560.772.203	-	-	26.155.429.025	Factory equipments
Peralatan laboratorium	242.799.995	-	-	-	242.799.995	Laboratory equipments
Total biaya perolehan	247.621.242.488	109.316.415.380	(4.329.043.938)	-	352.608.613.930	Total acquisition cost
Akumulasi depresiasi						Accumulated depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan dan prasarana	16.327.789.199	3.874.429.954	-	-	20.202.219.153	Building and improvements
Kendaraan	17.021.775.234	4.066.688.830	(4.263.941.666)	-	16.824.522.398	Vehicles
Perlengkapan kantor	9.127.542.716	3.839.571.613	(65.102.272)	-	12.902.012.057	Office supplies
Peralatan pabrik	20.433.915.424	1.491.529.713	-	-	21.925.445.137	Factory equipments
Peralatan laboratorium	239.201.897	2.000.924	-	-	241.202.821	Laboratory equipments
Total akumulasi depresiasi	63.150.224.470	13.274.221.034	(4.329.043.938)	-	72.095.401.566	Total accumulated depreciation
Nilai tercatat neto	184.471.018.018				280.513.212.364	Net carrying value
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018/ Year Ended December 31, 2018						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	125.928.909.601	10.533.600.000	-	-	136.462.509.601	Land
Bangunan dan prasarana	32.319.504.027	14.725.605.197	-	-	47.045.109.224	Building and improvements
Kendaraan	20.224.979.579	8.719.550.000	(2.108.000.000)	-	26.836.529.579	Vehicles
Perlengkapan kantor	10.208.374.707	3.231.262.560	-	-	13.439.637.267	Office supplies
Peralatan pabrik	21.776.070.437	1.818.586.385	-	-	23.594.656.822	Factory equipments
Peralatan laboratorium	242.235.263	564.732	-	-	242.799.995	Laboratory equipments
Total biaya perolehan	210.700.073.614	39.029.168.874	(2.108.000.000)	-	247.621.242.488	Total acquisition cost
Akumulasi depresiasi						Accumulated depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan dan prasarana	14.284.459.908	2.043.329.291	-	-	16.327.789.199	Building and improvements
Kendaraan	15.284.070.103	3.603.934.341	(1.866.229.210)	-	17.021.775.234	Vehicles
Perlengkapan kantor	6.375.766.607	2.751.776.109	-	-	9.127.542.716	Office supplies
Peralatan pabrik	19.448.754.198	985.161.226	-	-	20.433.915.424	Factory equipments
Peralatan laboratorium	237.283.337	1.918.560	-	-	239.201.897	Laboratory equipments
Total akumulasi depresiasi	55.630.334.153	9.386.119.527	(1.866.229.210)	-	63.150.224.470	Total accumulated depreciation
Nilai tercatat neto	155.069.739.461				184.471.018.018	Net carrying value

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Akun ini terdiri atas: (lanjutan)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017/ Year Ended December 31, 2017				
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan				
<i>Kepemilikan langsung</i>				
Tanah	117.403.000.000	8.525.909.601	-	125.928.909.601
Bangunan dan prasarana	40.135.290.954	16.414.088.923	-	32.319.504.027
Kendaraan	17.771.479.579	2.644.500.000	(191.000.000)	20.224.979.579
Perlengkapan kantor	6.498.178.036	3.788.826.671	(78.630.000)	10.208.374.707
Peralatan pabrik	20.511.611.347	1.929.176.690	(664.717.600)	21.776.070.437
Peralatan laboratorium	277.731.849	3.204.564	(38.701.150)	242.235.263
Total biaya perolehan	202.597.291.765	33.305.706.449	(973.048.750)	210.700.073.614
Akumulasi depresiasi				
<i>Kepemilikan langsung</i>				
Bangunan dan prasarana	12.431.937.688	1.852.522.220	-	14.284.459.908
Kendaraan	11.515.137.503	3.959.932.600	(191.000.000)	15.284.070.103
Perlengkapan kantor	4.768.545.483	1.685.851.124	(78.630.000)	6.375.766.607
Peralatan pabrik	18.863.782.825	896.738.973	(311.767.600)	19.448.754.198
Peralatan laboratorium	274.465.119	1.519.368	(38.701.150)	237.283.337
Total akumulasi depresiasi	47.853.868.618	8.396.564.285	(620.098.750)	55.630.334.153
Nilai tercatat neto	154.743.423.147			155.069.739.461

11. FIXED ASSETS (continued)

This account consists of: (continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017/ Year Ended December 31, 2017				
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
Acquisition cost				
<i>Direct ownership</i>				
				Land
			(24.229.875.850)	Building and improvements
				Vehicles
				Office supplies
				Factory equipments
				Laboratory equipments
				Total acquisition cost
Accumulated depreciation				
<i>Direct ownership</i>				
				Building and improvements
				Vehicles
				Office supplies
				Factory equipments
				Laboratory equipments
				Total accumulated depreciation
				Net carrying value

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, reklasifikasi atas biaya perolehan aset tetap terdiri dari reklasifikasi apartemen ke Properti Investasi sebesar Rp23.750.431.324 (Catatan 13) dan Biaya Dibayar Di Muka dan Uang Muka sebesar Rp479.444.526.

For the year ended December 31, 2017, reclassification of acquisition cost on fixed assets consists of reclassification of apartment building to Investment Properties amounted to Rp23,750,431,324 (Note 13) and Prepayments and Advances amounted to Rp479,444,526.

Alokasi beban penyusutan:

Depreciation expenses are allocated to:

	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ Seven-Month Periods ended July 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
	2020	2019 (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)	2019	2018	2017	
Beban pokok penjualan	2.237.502.945	1.821.243.051	3.265.502.725	2.698.249.471	2.382.531.396	Cost of goods sold General and administrative expenses (Note 25)
Beban umum dan administrasi (Catatan 25)	10.810.202.993	5.019.266.522	10.008.718.309	6.687.870.056	6.014.032.889	
Total	13.047.705.938	6.840.509.573	13.274.221.034	9.386.119.527	8.396.564.285	Total

Rincian laba penjualan aset tetap - neto adalah sebagai berikut:

The details of gain on sale of fixed assets - net are as follows:

	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ Seven-Month Periods ended July 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
	2020	2019 (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)	2019	2018	2017	
Hasil penjualan aset tetap	72.350.000	1.500.000	1.102.500.000	1.037.000.000	440.720.000	Proceeds from sale of fixed assets Net carrying amounts of fixed assets
Nilai tercatat neto aset tetap	(726.103)	-	-	(241.770.790)	(352.950.000)	
Laba penjualan aset tetap - neto	71.623.897	1.500.000	1.102.500.000	795.229.210	87.770.000	Gain on sale of fixed assets - net

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Laba penjualan aset tetap - neto dicatat sebagai bagian dari "Pendapatan Lainnya" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Perusahaan memiliki hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan ("HGB") yang akan berakhir pada tahun 2024 - 2048. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa hak atas tanah dapat diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Pada tanggal 31 Juli 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap.

Pada tanggal 31 Juli 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, nilai perolehan aset tetap Perusahaan yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp41.608.950.572, Rp38.594.791.606, Rp38.669.086.678 dan Rp28.033.420.116.

Perusahaan mengasuransikan aset tetapnya, kecuali tanah, terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu kepada PT Asuransi Wahana Tata dan PT Asuransi Astra Buana dengan nilai keseluruhan pertanggungan sebesar Rp112.058.695.296 pada tanggal 31 Juli 2020, Rp91.520.085.296 pada tanggal 31 Desember 2019, Rp78.617.727.000 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp66.352.800.000 pada tanggal 31 Desember 2017. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

Kendaraan tertentu yang dimiliki oleh Perusahaan diperoleh melalui fasilitas kredit dari pihak ketiga dan dijaminkan terhadap liabilitas terkait. Utang terkait disajikan sebagai "Utang Pembiayaan Konsumen" dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Juli 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 (Catatan 19).

Pada tanggal 31 Juli 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, beberapa tanah, bangunan dan mesin Perusahaan dijaminkan secara *cross collateral* untuk pinjaman yang diperoleh dari Perusahaan dan PT Natura Pesona Mandiri, pihak berelasi, dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 14 dan 18). Selanjutnya, jaminan ini tidak lagi dijaminkan secara *cross collateral* berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 31 Agustus 2020 (Catatan 35).

11. FIXED ASSETS (continued)

Gain on sale of fixed assets - net is recorded as part of "Other Income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the seven-month periods ended July 31, 2020 and 2019, and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017.

The Company has land rights expiring within the years of 2024 - 2048 in the form of "Building Usage Rights" (Hak Guna Bangunan ("HGB")). The Company's management believes that the term of the land rights can be extended upon expiration.

As of July 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company's management believes that there is no event or change in circumstances that may indicate any impairment in the value of fixed assets.

As of July 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, the value of the Company's fixed assets that are fully depreciated but are still being used amounted to Rp41,608,950,572, Rp38,594,791,606, Rp38,669,086,678 and Rp28,033,420,116, respectively.

The Company has insured its fixed assets, except for land, against losses from fire and other various risks under blanket policies from PT Asuransi Wahana Tata and PT Asuransi Astra Buana with a total insurance coverage totaling to Rp112,058,695,296 as of July 31, 2020, Rp91,520,085,296 as of December 31, 2019, Rp78,617,727,000 as of December 31, 2018 and Rp66,352,800,000 as of December 31, 2017. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

Certain vehicles owned by the Company was acquired through credit facility from third parties and are pledged against the related liabilities. The related liabilities are presented as "Consumer Financing Payables" in the statement of financial position as of July 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017 (Note 19).

As of July 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, some of the Company's land, building and machineries are pledged as collateral on cross collateral basis for loans obtained by the Company and PT Natura Pesona Mandiri, a related party, from PT Bank Central Asia Tbk (Notes 14 and 18). Subsequently, this collateral is no longer pledged on cross collateral basis based on Changes in Loan Agreement dated August 31, 2020 (Note 35).

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017, beberapa tanah, bangunan dan mesin Perusahaan dijaminkan untuk pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 14).

11. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2017, some of the Company's land, building and machineries were pledged as collateral for loans obtained by the Company from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 14).

12. ASET HAK GUNA DAN LIABILITAS SEWA

Rekonsiliasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

	<u>Bangunan/Buildings</u>
Aset hak-guna	
Saldo, 31 Desember 2019	-
Penyesuaian saldo atas penerapan PSAK 73 (Catatan 4)	26.759.122.043
Saldo, 1 Januari 2020	26.759.122.043
Penambahan selama periode berjalan	213.695.274
Beban penyusutan selama periode berjalan	(2.665.423.910)
Saldo akhir	24.307.393.407

12. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

The reconciliation of right-of-use assets is as follows:

	<u>Right-of-use assets</u>
Balance, December 31, 2019	-
Balance adjustment upon adoption of PSAK 73 (Note 4)	26.759.122.043
Balance, January 1, 2020	26.759.122.043
Addition during the period	213.695.274
Depreciation expense during the period	(2.665.423.910)
Ending balance	24.307.393.407

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	<u>31 Juli 2020/ July 31, 2020</u>
Liabilitas sewa	
Bagian jangka pendek	2.117.860.634
Bagian jangka panjang	313.009.129
Total	2.430.869.763

The detail of lease liabilities is as follows:

	<u>Lease liabilities</u>
Current portion	2.117.860.634
Non-current portion	313.009.129
Total	2.430.869.763

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2020/ Seven-Month Period Ended July 31, 2020</u>
Bunga atas liabilitas sewa	126.167.876
Beban penyusutan aset hak-guna	-
Beban pokok penjualan	1.166.666.669
Beban penjualan dan pemasaran (Catatan 24)	1.498.757.241
Beban terkait liabilitas sewa bernilai rendah dan jangka pendek	3.102.180.447

Amounts recognized in statement of profit or loss are as follows:

	<u>Interest on lease liabilities</u>
Depreciation of right-of-use assets	-
Cost of goods sold	1.166.666.669
Selling and marketing expenses (Note 24)	1.498.757.241
Expenses related to low value and short-term lease liabilities	3.102.180.447

Jumlah yang diakui dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut:

	<u>Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2020/ Seven-Month Period Ended July 31, 2020</u>
Jumlah kas keluar untuk	
Pembayaran liabilitas sewa	354.774.933
Pembayaran bunga	126.167.876
Total	480.942.809

Amount recognized in statement of cash flow is as follows:

	<u>Total cash outflow for</u>
Payments of lease liabilities	354.774.933
Payments of interest	126.167.876
Total	480.942.809

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET HAK GUNA DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Beberapa transaksi sewa gudang dan kantor mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Perusahaan sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Perusahaan. Perusahaan mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Perusahaan mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Perusahaan.

Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2020/ Seven-Month Period Ended July 31, 2020
Saldo, 1 Januari 2020	-
Penyesuaian saldo atas penerapan PSAK 73	2.633.060.533
Arus kas	(354.774.933)
Perubahan non-kas - penambahan	152.584.163
Saldo akhir	2.430.869.763

12. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (continued)

Some leases of warehouses and offices contain extension options exercisable by the Company before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Company. The Company assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Company reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

Summary of component of changes in the liabilities arising from leases is as follow:

	Balance, January 1, 2020 Balance adjustment upon adoption of PSAK 73 Cash flow Non-cash changes - additions
Balance, January 1, 2020	-
Balance adjustment upon adoption of PSAK 73	2.633.060.533
Cash flow	(354.774.933)
Non-cash changes - additions	152.584.163
Ending balance	2.430.869.763

13. PROPERTI INVESTASI

Properti investasi Perusahaan terdiri dari bangunan yang merupakan unit-unit apartemen. Perusahaan menerapkan nilai wajar sebagai dasar untuk mencatat properti investasi. Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Juli 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, didasarkan pada laporan valuasi KJPP Iskandar & Rekan, penilai independen, tertanggal 23 September 2020.

Rekonsiliasi nilai wajar properti investasi adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Saldo awal	30.762.722.484	30.762.722.484	27.302.722.484	-	Beginning balance
Reklasifikasi dari aset tetap (Catatan 11)	-	-	-	23.750.431.324	Reclassification from fixed assets (Note 11)
Keuntungan bersih dari pengukuran ulang nilai wajar	-	-	3.460.000.000	3.552.291.160	Net gain from re-measurement of fair value
Saldo akhir	30.762.722.484	30.762.722.484	30.762.722.484	27.302.722.484	Ending balance

Pada tanggal 31 Juli 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai properti investasi.

13. INVESTMENT PROPERTIES

The Company's investment properties consist of building which comprised of apartment units. The Company applied fair value as a basis to record the investment properties. Fair value of investment properties as of July 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, was based on valuation report of KJPP Iskandar & Rekan, an independent appraisal, dated September 23, 2020.

Reconciliation of the fair value of investment properties is as follow:

As of July 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company's management believes that there is no event or change in circumstances that may indicate any impairment in the value of investment properties.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Kenaikan nilai wajar properti investasi diakui dalam "Pendapatan Lainnya" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Selanjutnya, pada bulan September 2020, Perusahaan mengasuransikan investasi propertinya terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu kepada PT Asuransi Wahana Tata dengan nilai pertanggungan sebesar Rp2.000.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Akun ini terdiri atas:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Cerukan					Overdraft
PT Bank Central Asia Tbk	90.805.510.139	138.955.190.080	181.410.214.771	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	-	117.802.313.161	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Revolving					Revolving
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	-	75.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	90.805.510.139	138.955.190.080	181.410.214.771	192.802.313.161	Total

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 3 Mei 2018, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit No. 16 dengan PT Bank Central Asia Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa Fasilitas Kredit Lokal (Cerukan) dengan batas kredit sebesar Rp200.000.000.000 untuk keperluan modal kerja. Fasilitas ini telah berakhir pada tanggal 4 Mei 2019 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,00% per tahun.

Perjanjian ini telah mengalami perubahan dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 01 pada tanggal 1 Juli 2019, yang mengubah ketersediaan fasilitas ini menjadi sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 dan tingkat bunga diubah menjadi sebesar 9,50% per tahun.

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, beban bunga atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp6.776.136.070, Rp8.792.252.488, Rp14.753.867.116 dan Rp8.497.874.296 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

13. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

The increase on fair value of investment properties is recognized in "Other Income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2018 and 2017.

Subsequently, in September 2020, the Company has insured its investment properties against losses from fire and other various risks under blanket policies from PT Asuransi Wahana Tata with a total insurance coverage of Rp2,000,000,000. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

14. SHORT-TERM BANK LOANS

This account consists of:

PT Bank Central Asia Tbk

On May 3, 2018, the Company entered into Credit Agreement No. 16 with PT Bank Central Asia Tbk. Based on such agreement, the Company obtained a credit facility of Local Credit Facility (Overdraft) with a credit limit of Rp200,000,000,000 for the purpose of working capital requirements. The facility ended on May 4, 2019 with an interest rate of 9.00% per annum.

This agreement has been amended with Amendment of Credit Agreement No. 01 dated July 1, 2019, which change the availability of this facility to become until on August 4, 2020 and the interest rate was changed to become 9.50% per annum.

For the seven-month periods ended July 31, 2020 and 2019, and for the years ended December 31, 2019 and 2018, interest expense from this facility is amounted to Rp6,776,136,070, Rp8,792,252,488, Rp14,753,867,116 and Rp8,497,874,296, respectively, and are presented as part of "Finance Costs" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Fasilitas ini memiliki persetujuan dan persyaratan yang sama seperti yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit investasi (Catatan 18).

Fasilitas kredit ini dijamin dengan 5 (lima) Hak Milik ("HM") berlokasi di Mekarsari atas nama Billy Hartono Salim, 2 (dua) Hak Guna Bangunan ("HGB") berlokasi di Ngaliyan atas nama Perusahaan, 5 (lima) Hak Guna Bangunan ("HGB") berlokasi di Semanan atas nama Perusahaan, 1 (satu) Hak Guna Bangunan ("HGB") berlokasi di Kembangan Selatan atas nama PT Antilope Madju Puri Indah, beberapa aset seperti mesin produksi dan peralatan dan jaminan pribadi atas nama Billy Hartono Salim.

Selanjutnya, perjanjian kredit ini telah mengalami beberapa kali perubahan terkait tanggal jatuh tempo, tingkat suku bunga pinjaman dan jaminan (Catatan 35).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 6 Mei 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diaktakan dengan Akta Notaris Maria Dwi Hartati, S.H., No. 8, 9, 10 dan 11. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan amendemen No. 3 dan 4 tanggal 3 Mei 2017 terkait perpanjangan fasilitas kredit dari 6 Mei 2017 sampai 5 Mei 2018.

Perusahaan mendapatkan beberapa fasilitas kredit sebagai berikut:

- a. *General Working Capital Credit (R/K)* sebesar Rp145.000.000.000 berlaku selama 12 bulan untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja industri kosmetik termasuk pengambilalihan Fasilitas KMK pada Commonwealth Bank. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga 10,75% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah sebesar Rp117.802.313.161.

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (continued)

This facility has the same covenants and requirements as required in the credit investment facility (Note 18).

This credit facility is secured by 5 (five) Landrights ("Hak Milik" or "HM") located in Mekarsari on behalf of Billy Hartono Salim, 2 (two) Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") located in Ngaliyan on behalf of the Company, 5 (five) Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") located in Semanan on behalf of the Company, 1 (one) Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") located in Kembangan Selatan on behalf of PT Antilope Madju Puri Indah, several assets such as production machine and equipment and personal guarantee on behalf of Billy Hartono Salim.

Subsequently, this credit facility has been amended several times related to the maturity date, loan interest rate and collateral (Note 35).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On May 6, 2015, the Company entered into Credit Facility Agreements with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, which was notarized by Notarial Deed of Maria Dwi Hartati, S.H., No. 8, 9, 10 and 11. The agreements have been amended several times, most recently were based on addendum No. 3 and 4 dated May 3, 2017 regarding the extension of the credit terms from May 6, 2017 until May 5, 2018.

The Company obtained several credit facilities as follow:

- a. *General Working Capital Credit (R/K)* amounting to Rp145,000,000,000 available for 12 months used for additional working capital for cosmetic industry including the takeover of KMK Facility at Commonwealth Bank. This facility is charged with interest rate at 10.75% per annum.

As of December 31, 2017, the balance of this credit facility amounted to Rp117,802,313,161.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Perusahaan mendapatkan beberapa fasilitas kredit sebagai berikut: (lanjutan)

- b. *Working Capital Credit* (W-KMK) sebesar Rp50.000.000.000 berlaku selama 12 bulan untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja industri kosmetik termasuk pengambilalihan Fasilitas KMK pada Commonwealth Bank. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga 10,50% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah sebesar Rp50.000.000.000.

- c. Fasilitas *Treasury Line* sebesar AS\$500.000 berlaku selama 12 bulan sebagai fasilitas lindung nilai atas transaksi pembelian dalam mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan tidak menggunakan fasilitas ini.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, beban bunga atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp6.164.746.825 dan Rp18.060.340.563 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan persediaan Perusahaan senilai Rp70.000.000.000, piutang usaha senilai Rp85.000.000.000, tanah dan bangunan yang terletak di Semarang, Jakarta (Semanan) dan Bali, mesin pabrik dan jaminan pribadi oleh Billy Hartono Salim dan Djunaidi Immanuel.

Pada tanggal 23 November 2017, Perusahaan menandatangani Fasilitas Kredit Jaminan Deposito Berjangka dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Fasilitas tersebut sebesar Rp25.000.000.000 berlaku sampai dengan 19 Mei 2018 untuk digunakan dalam keperluan produktif Perusahaan. Fasilitas tersebut dikenakan tingkat suku bunga sebesar 0,50% di atas tingkat suku bunga deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan.

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah sebesar Rp25.000.000.000.

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

The Company obtained several credit facilities as follow: (continued)

- b. *Working Capital Credit* (W-KMK) amounting to Rp50,000,000,000 available for 12 months used for additional working capital for cosmetic industry including the takeover of KMK Facility at Commonwealth Bank. This facility is charged with interest rate at 10.50% per annum.

As of December 31, 2017, the balance of this credit facility amounted to Rp50,000,000,000.

- c. *Treasury Line Facility* amounting to US\$500,000 available for 12 months as hedging facility for import transactions in foreign currency.

As of December 31, 2017, the Company does not use this facility.

For the years ended December 31, 2018 and 2017, interest expense from these facilities amounted to Rp6,164,746,825 and Rp18,060,340,563, respectively, and is presented as part of "Finance Costs" in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

These credit facilities are secured by the Company's inventories of Rp70,000,000,000, trade receivables of Rp85,000,000,000, land and buildings located in Semarang, Jakarta (Semanan) and Bali, factory machineries and a personal guarantee of Billy Hartono Salim and Djunaidi Immanuel.

On November 23, 2017, the Company has entered into Time Deposit Collateral Credit Facility with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The facility amounted to Rp25,000,000,000 available until May 19, 2018, to be used for productive utilization of the Company. This facility is charged with interest rate at 0.50% above the collateral time deposit interest rate.

As of December 31, 2017, the balance of this credit facility amounted to Rp25,000,000,000.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Fasilitas ini dijamin dengan deposito berjangka milik Perusahaan senilai Rp25.000.000.000 (Catatan 5).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, beban bunga atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp232.986.111 dan Rp114.236.111 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Debt Service Coverage* lebih dari 100%
- Rasio lancar minimum 110%
- Rasio antara utang terhadap ekuitas kurang dari 200%

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

- i. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk pemegang saham, manajemen kunci, permodalan dan nilai saham.
- ii. Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- iii. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank, yang menambah risiko termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif.
- iv. Mengikat diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- v. Melunasi utang Perusahaan kepada pemegang saham.
- vi. Menyewakan obyek agunan.
- vii. Memberikan pinjaman ke perusahaan lain dan/atau grup usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan memenuhi semua persyaratan *covenant*.

Pada Mei 2018, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

This facility is secured by the Company's time deposit amounting to Rp25,000,000,000 (Note 5).

For the years ended December 31, 2018 and 2017, interest expense from this facility amounted to Rp232,986,111 and Rp114,236,111 and is presented as part of "Finance Costs" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Based on the loan agreement, the Company is required to maintain financial ratios as follow:

- *Debt Service Coverage* ratio more than 100%
- Current ratio minimum of 110%
- Debt to equity ratio not exceeding 200%

Based on the loan agreement, the Company is required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:

- i. Make changes on the Company's Article of Association, including shareholders, key managements, capital and share value.
- ii. Transfer of collateral, except inventory for in normal business transaction.
- iii. Obtain credit or loan facilities from bank, which increase risks including but not limited to derivative transactions.
- iv. Commit as a loan guarantor or pledged the Company's assets to other parties.
- v. Pay-off the Company's loan to shareholders.
- vi. Rent out collaterals.
- vii. Providing loans to other companies and/or business groups.

As of December 31, 2017, the Company has fulfilled all covenant requirements.

In May 2018, the Company has fully paid all credit facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Pembayaran yang dilakukan untuk utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	50.000.000.000	-
Kredit Modal Kerja	-	-	25.000.000.000	-
Kredit Agunan Deposito	-	-	-	-
Total	-	-	75.000.000.000	-

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Working Capital Loan
Deposit Collateral Loan

Total

15. UTANG USAHA

Utang usaha merupakan utang atas pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan untuk operasi Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Rupiah				
Pihak ketiga	21.213.503.501	55.160.936.286	46.897.068.815	38.601.919.457
Pihak berelasi (Catatan 8c)	5.233.876.551	1.710.109.063	1.088.448.770	3.096.119.422
Total	26.447.380.052	56.871.045.349	47.985.517.585	41.698.038.879

Rupiah
Third parties
Related party (Note 8c)

Total

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Belum jatuh tempo	18.136.145.718	36.290.888.314	26.527.657.762	26.615.462.120
Lewat jatuh tempo				
1 sampai 30 hari	4.993.140.801	11.656.297.311	12.757.675.161	9.525.431.957
31 sampai 60 hari	1.057.729.236	2.049.148.937	2.238.614.515	1.258.028.485
61 sampai 90 hari	934.801.133	776.289.128	1.603.517.564	416.162.779
Lebih dari 90 hari	1.325.563.164	6.098.421.659	4.858.052.583	3.882.953.538
Total	26.447.380.052	56.871.045.349	47.985.517.585	41.698.038.879

Not past due
Overdue
1 to 30 days
31 to 60 days
61 to 90 days
More than 90 days

Total

Pada tanggal 31 Juli 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tidak terdapat jaminan yang diberikan Perusahaan atas utang usaha di atas.

As of July 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017, there were no collateral provided by the Company for the above trade payables.

16. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Pajak pertambahan nilai	-	516.185.145	-	-
Pajak penghasilan dibayar di muka - Pasal 25	-	-	-	758.799.125
Total	-	516.185.145	-	758.799.125

Value added tax
Prepayment of corporate income tax - Article 25

Total

16. TAXATION

a. Prepaid taxes

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang pajak

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Pajak penghasilan - Pasal 4(2)	158.912.381	182.721.558	2.111.842.970	22.634.135	Income Tax - Article 4(2)
Pajak penghasilan - Pasal 21	424.493.844	2.547.339.756	1.773.782.035	2.491.436.710	Income Tax - Article 21
Pajak penghasilan - Pasal 23	954.318.918	217.240.027	536.883.859	29.301.893	Income Tax - Article 23
Pajak penghasilan - Pasal 25	1.149.604.445	1.457.513.661	8.470.356.787	-	Income Tax - Article 25
Pajak penghasilan - Pasal 29					Income Tax - Article 29
Periode 2020	12.456.665.452	-	-	-	Period 2020
Tahun 2019	-	6.368.176.465	-	-	Year 2019
Tahun 2018	-	14.548.210	14.663.481	-	Year 2018
Tahun 2017	-	-	7.169.926.642	12.715.703.060	Year 2017
Pajak pertambahan nilai	14.990.101.178	-	1.079.379.670	3.772.458.750	Value added tax
Total	30.134.096.218	10.787.539.677	21.156.835.444	19.031.534.548	Total

c. Manfaat (beban) pajak penghasilan

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Tarif pajak yang baru tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan mulai sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut yaitu 31 Maret 2020.

Rincian manfaat (beban) pajak penghasilan neto Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ Seven-Month Periods ended July 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
	2020	2019 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2019	2018	2017	
<u>Dibebankan ke laba rugi</u>						<u>Charged to profit or loss</u>
Beban pajak kini	(30.208.315.775)	(23.971.495.352)	(40.412.592.155)	(23.425.502.411)	(22.471.685.000)	Current tax expense
Manfaat (beban) pajak tangguhan	(350.057.158)	809.066.786	1.397.178.208	130.752.976	1.103.162.011	Deferred tax benefits (expense)
Beban pajak penghasilan - neto	(30.558.372.933)	(23.162.428.566)	(39.015.413.947)	(23.294.749.435)	(21.368.522.989)	Income tax expense - net

16. TAXATION (continued)

b. Taxes payable

c. Corporate income tax benefits (expense)

On March 31, 2020, the Government issued a Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2020 which stipulates, among others, reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishments entities from previously 25% to become 22% for fiscal years 2020 and 2021 and 20% starting fiscal year 2022 and onwards, and further reduction of 3% for corporate income tax payers that fulfill certain criteria.

The new tax rates will be used as reference to measure the current and deferred tax assets and liabilities starting from the enactment date of the new regulation on March 31, 2020.

The details of the Company's net income tax benefits (expense) are as follow:

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

16. TAXATION (continued)

- d. Rekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan, taksiran penghasilan kena pajak dan perhitungan beban pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

- d. Reconciliation of income before income tax, estimated taxable income and calculation of corporate income tax expense were as follows:

	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ Seven-Month Periods ended July 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
	2020	2019 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2019	2018	2017	
Laba sebelum pajak penghasilan	127.637.628.824	89.118.303.133	150.778.044.487	88.609.626.356	88.501.658.854	Income before income tax
Beda temporer:						Temporary differences:
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.808.079.140	1.104.231.892	2.239.041.881	2.075.836.297	1.794.829.508	Employee benefits liability
Penyusutan aset tetap	2.792.418.184	1.390.766.537	2.601.989.397	2.119.814.367	2.745.415.264	Depreciation of fixed assets
Penyusutan aset hak guna	22.704.193	-	-	-	-	Depreciation of right-of-use assets
Penyisihan (pembalikan) penurunan nilai piutang usaha	(35.044.941)	953.164.083	2.002.681.427	-	-	Provision (reversal) impairment of trade receivables
Penyisihan cadangan keusangan persediaan	454.321.836	-	-	-	-	Provision for allowance for obsolescence of inventories
Kenaikan investasi properti	-	-	-	(3.460.000.000)	(3.552.291.160)	Increase in investment properties
Laba penjualan aset tetap	(3.750.000)	(20.405.682)	(1.063.510.195)	(692.083.333)	-	Gain on sale of fixed assets
Beda temporer - neto	5.038.728.412	3.427.756.830	5.780.202.510	43.567.331	987.953.612	Temporary differences - net
Beda tetap:						Permanent differences:
Pendapatan bunga	(9.080.721)	(28.606.641)	(48.873.375)	(162.060.786)	(171.292.944)	Interest income
Pendapatan sewa	(13.500.000)	(13.500.000)	(13.500.000)	(13.500.000)	-	Rent Income
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	4.656.749.736	3.382.028.086	5.154.494.997	5.224.376.743	568.420.614	Non-deductible expenses
Beda tetap - neto	4.634.169.015	3.339.921.445	5.092.121.622	5.048.815.957	397.127.670	Permanent differences - net
Penghasilan kena pajak	137.310.526.251	95.885.981.408	161.650.368.619	93.702.009.644	89.886.740.136	Taxable income
Beban pajak kini dengan tarif pajak yang berlaku	30.208.315.775	23.971.495.352	40.412.592.155	23.425.502.411	22.471.685.000	Income tax expense at applicable tax rate
Pajak penghasilan dibayar di muka:						Prepayment of corporate income tax:
Pasal 22	(8.703.123.052)	(7.896.669.826)	(15.783.216.134)	(5.865.808.338)	(2.144.575.440)	Article 22
Pasal 23	(77.568.348)	(71.541.706)	(72.359.510)	(54.981.926)	-	Article 23
Pasal 25	(8.970.958.923)	(10.901.271.741)	(18.188.840.046)	(17.490.048.666)	(7.611.406.500)	Article 25
Utang pajak penghasilan badan	12.456.665.452	5.102.012.079	6.368.176.465	14.663.481	12.715.703.060	Corporate income tax payable

Jumlah penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk tahun 2019, 2018 dan 2017 seperti yang disebutkan di atas dan utang PPh terkait telah dilaporkan oleh Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan ("SPT") pajak penghasilan badan tahun 2019, 2018 dan 2017 ke Kantor Pajak.

The amounts of the Company's taxable income and current income tax expense for 2019, 2018 and 2017, as stated in the foregoing, and the related income tax payables have been reported by the Company in its 2019, 2018 and 2017 Annual Tax Return ("SPT") as submitted to the Tax Office.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

- e. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku dan beban pajak penghasilan:

	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ Seven-Month Periods ended July 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
	2020	2019 (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)	2019	2018	2017	
Laba sebelum pajak penghasilan	127.637.628.824	89.118.303.133	150.778.044.487	88.609.626.356	88.501.658.854	Income before income tax
Pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	28.080.278.341	22.279.575.783	37.694.511.122	22.152.406.589	22.125.414.713	Income tax expense at applicable tax rate
Perbedaan tetap neto dengan tarif pajak yang berlaku	1.019.517.183	834.980.363	1.273.030.405	1.262.203.991	99.281.879	Net permanent differences at applicable tax rate
Penyesuaian saldo aset pajak tangguhan	-	47.872.420	47.872.420	(119.861.145)	(856.173.603)	Adjustment on deferred tax assets balance
Penyesuaian saldo aset pajak tangguhan - perubahan tarif pajak	1.458.577.409	-	-	-	-	Adjustment on deferred tax balance - changes in tax rate
Beban pajak penghasilan	30.558.372.933	23.162.428.566	39.015.413.947	23.294.749.435	21.368.522.989	Income tax expenses

16. TAXATION (continued)

- e. Reconciliation between income before income tax multiplied by the applicable tax rate and income tax expenses:

f. Aset pajak tangguhan

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Liabilitas imbalan kerja karyawan	3.900.063.631	3.809.670.797	3.124.628.127	2.840.643.237	Employee benefits liability
Aset tetap	3.378.537.868	3.651.388.351	3.314.640.972	2.837.847.068	Fixed assets
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	1.149.440.917	500.670.357	-	-	Allowance for impairment of trade receivables
Cadangan keusangan persediaan	99.950.804	-	-	-	Allowance for obsolescence of inventories
Aset hak-guna	34.236.168	-	-	-	Right-of-use assets
Aset takberwujud	2.319.279	-	-	-	Intangible assets
Liabilitas pajak tangguhan Properti investasi	(1.402.458.232)	(1.753.072.790)	(1.753.072.790)	(888.072.790)	Deferred tax liability Investment properties
Aset pajak tangguhan - neto	7.162.090.435	6.208.656.715	4.686.196.309	4.790.417.515	Deferred tax assets - net

f. Deferred tax assets

17. BEBAN AKRUAL DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK

Rincian beban akrual adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Promosi	26.910.745.617	29.640.688.652	22.282.549.029	14.666.558.968	Promotion
Bunga	488.783.114	574.587.128	-	-	Interest
Listrik, air dan telepon	264.226.514	251.025.614	160.451.504	187.790.353	Electricity, water and telephone
Royaliti (Catatan 8)	-	1.998.580.201	2.990.245.546	2.105.649.207	Royalty (Note 8)
Lain-lain	1.714.472.010	4.127.773.822	6.232.673.805	2.473.460.352	Others
Total	29.378.227.255	36.592.655.417	31.665.919.884	19.433.458.880	Total

17. ACCRUED EXPENSES AND SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

The details of accrued expenses are as follow:

Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek

Akun ini terdiri dari akrual beban gaji dan tunjangan karyawan.

Short-term employee benefits liability

This account consist of accrual of employees' salaries and benefits.

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	5.332.767.596	6.590.523.066	4.516.127.303	3.751.628.043	Short-term employee benefits liability

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. UTANG BANK JANGKA PANJANG

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
PT Bank Central Asia Tbk	81.234.871.877	85.116.560.810	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	-	1.702.757.271	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	81.234.871.877	85.116.560.810	-	1.702.757.271	Total
Dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	(651.589.022)	(712.493.307)	-	-	Less unamortized transaction cost
Neto	80.583.282.855	84.404.067.503	-	1.702.757.271	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(6.888.969.564)	(6.637.601.516)	-	(1.702.757.271)	Less current maturities
Bagian jangka panjang	73.694.313.291	77.766.465.987	-	-	Non-current portion

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 1 Juli 2019 antara Perusahaan dan PT Bank Central Asia Tbk, Perusahaan memperoleh beberapa Fasilitas Kredit jangka panjang dengan perincian sebagai berikut:

1. Fasilitas Kredit Investasi 1 (K11) dengan batas Rp73.000.000.000 dalam rangka pembelian tanah dan bangunan di *Puri Indah Financial Tower* lantai 10 dan 11 di Jalan Puri Lingkar Dalam blok T8, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Realisasi K11 maksimum 86% dari surat penawaran PT Antilope Madju Puri Indah, perusahaan pengembang, dengan jumlah maksimum Rp73.000.000.000 (mana yang lebih rendah). Fasilitas ini dibayar secara cicilan bulanan selama sepuluh tahun tanpa masa tenggang sejak penarikan pertama. Fasilitas ini tersedia untuk penarikan dalam waktu enam bulan sejak perjanjian ditandatangani.

Pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019, saldo pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp68.539.324.794 dan Rp71.265.204.164.

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, beban bunga atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp3.559.796.481 dan Rp1.042.396.079 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

18. LONG-TERM BANK LOANS

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
PT Bank Central Asia Tbk	81.234.871.877	85.116.560.810	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	-	1.702.757.271	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	81.234.871.877	85.116.560.810	-	1.702.757.271	Total
Dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	(651.589.022)	(712.493.307)	-	-	Less unamortized transaction cost
Neto	80.583.282.855	84.404.067.503	-	1.702.757.271	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(6.888.969.564)	(6.637.601.516)	-	(1.702.757.271)	Less current maturities
Bagian jangka panjang	73.694.313.291	77.766.465.987	-	-	Non-current portion

PT Bank Central Asia Tbk

Based on Amendment of Credit Agreement No. 01 dated July 1, 2019 between the Company and PT Bank Central Asia Tbk, the Company obtained certain long-term Credit Facilities with details as follows:

1. Investment Credit Facility 1 (K11) with limit of Rp73,000,000,000 for purpose of buying land and building in Puri Indah Financial Tower 10th and 11th floors on Puri Lingkar Dalam street block T8, Kembangan Selatan, West Jakarta. Realization of K11 is maximum 86% from offering letter of PT Antilope Madju Puri Indah, the developer, with the maximum amount of Rp73,000,000,000 (whichever is lower). The facility is repayable in monthly installment for ten years without grace period since the first withdrawal. This facility is available for withdrawal within six month since the agreement was signed.

As of July 31, 2020 and December 31, 2019, the outstanding loan of this facility amounted to Rp68,539,324,794 and Rp71,265,204,164, respectively.

For the seven-month period ended July 31, 2020 and for the year ended December 31, 2019, interest expense from this facility are Rp3,559,796,481 and Rp1,042,396,079, respectively and is presented as part of "Finance Costs" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 1 Juli 2019 antara Perusahaan dan PT Bank Central Asia Tbk, Perusahaan memperoleh beberapa Fasilitas Kredit jangka panjang dengan perincian sebagai berikut: (lanjutan)

2. Fasilitas Kredit Investasi 2 (KI2) dengan batas Rp17.500.000.000 untuk pembiayaan interior, mekanik, listrik, furnitur dan workstation di *Puri Indah Financial Tower* lantai 10 dan 11 di Jalan Puri Lingkar Dalam blok T8, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Realisasi KI2 maksimum 81% dari dokumen pendukung seperti bukti penerimaan/faktur/penagihan dari pemasok atau kontraktor berdasarkan Rencana Anggaran Biaya akhir dengan jumlah maksimum Rp17.500.000.000 (mana yang lebih rendah). Fasilitas ini dibayar secara cicilan bulanan selama tujuh tahun tanpa masa tenggang sejak penarikan pertama. Fasilitas ini tersedia untuk penarikan dalam waktu enam bulan sejak perjanjian ditandatangani.

Pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019, saldo pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp12.043.958.061 dan Rp13.138.863.339.

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, beban bunga atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp693.577.959 dan RpNihil dan dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

18. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (continued)

Based on Amendment of Credit Agreement No. 01 dated July 1, 2019 between the Company and PT Bank Central Asia Tbk, the Company obtained certain long-term Credit Facilities with details as follows: (continued)

2. *Investment Credit Facility 2 (KI2) with limit of Rp17,500,000,000 for purpose of financing interior, mechanical, electrical, furniture and workstation in Puri Indah Financial Tower 10th and 11th floors on Puri Lingkar Dalam street block T8, Kembangan Selatan, West Jakarta. Realization of KI2 is maximum 81% from supporting document such as receipt/invoice/billing evidence from supplier or contractor based on final RAB (Rencana Anggaran Biaya) with the maximum amount of Rp17,500,000,000 (whichever is lower). The facility is repayable in monthly installment for seven years without grace period since the first withdrawal. This facility is available for withdrawal within six month since the agreement was signed.*

As of July 31, 2020 and December 31, 2019, the outstanding loan of this facility amounted to Rp12,043,958,061 and Rp13,138,863,339, respectively.

For the seven-month period ended July 31, 2020 and for the year ended December 31, 2019, interest expense from this facility are Rp693,577,959 and RpNil, respectively and is presented as part of "Finance Costs" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan berupa tanah dalam bentuk hak guna bangunan yang berlokasi di Semarang, Jakarta (Semanan), Bali dan Kembangan Selatan, mesin-mesin tertentu dan jaminan pribadi Billy Hartono Salim sebesar Rp344.360.000.000. Jaminan ini bersifat *cross collateral* dengan fasilitas atas nama PT Natura Pesona Mandiri (Catatan 8).

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:

- EBITDA dibagi bunga ditambah Cicilan harus lebih dari 1
- Rasio Utang terhadap Ekuitas tidak boleh lebih dari 1
- Rasio lancar harus lebih atau sama dengan 1

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

- i. Memperoleh pinjaman dari pihak lain atau bank atau bertindak sebagai penjamin atau menjaminkan aset kepada pihak lain.
- ii. Melakukan akuisisi, merger, likuidasi atau merubah bentuk usaha.
- iii. Mengubah komposisi manajemen atau pemegang saham.
- iv. Membagikan dividen.
- v. Melakukan investasi apa pun yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis.
- vi. Mentransfer/menjual/melepaskan merek Victoria, Miranda, Herborist, Sixsence, Nuface, Iria Goat's Milk dan Secret Garden ke pihak lain.

Fasilitas kredit ini memiliki klausula *Jointly and Severally Borrower* dan *cross defaults* atas nama Perusahaan dan PT Natura Pesona Mandiri.

Selanjutnya, fasilitas ini dan jaminannya tidak lagi *cross default* dan *cross collateral* berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 31 Agustus 2020 (Catatan 35).

Pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019, Perusahaan sudah memenuhi semua persyaratan *covenant*.

18. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (continued)

The facility is secured with collaterals in form of land with use of building rights located in Semarang, Jakarta (Semanan), Bali and Kembangan Selatan, certain machineries and a personal guarantee of Billy Hartono Salim at the amount of Rp344,360,000,000. These collaterals are cross collateralized with facilities obtained by PT Natura Pesona Mandiri (Note 8).

Based on the loan agreement, the Company is required to maintain financial ratios as follow:

- a. EBITDA divided by interest plus Installment shall be more than 1
- b. Debt to Equity ratio shall not exceed 1
- c. Current ratio shall be more or equal to 1

Based on the loan agreement, the Company is required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:

- i. Obtain loan from another parties or bank or act as a guarantor or pledge the assets to another parties.
- ii. Conduct acquisition, merger, liquidation or to change entity's legal form.
- iii. Change the composition of management or shareholders.
- iv. Distribute dividends.
- v. Make any investment not related to business activity.
- vi. Transfer/sell/relinquish the brands of Victoria, Miranda, Herborist, Sixsence, Nuface, Iria Goat's Milk and Secret Garden to other parties.

This credit facility has a *Jointly and Severally Borrower* clause and *cross defaults* on behalf of the Company and PT Natura Pesona Mandiri.

Subsequently, this facility and its collaterals are no longer *cross default* and *cross collateral* based on Changes in Loan Agreement dated August 31, 2020 (Note 35).

As of July 31, 2020 and December 31, 2019, the Company has fulfilled all covenant requirements.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 6 Mei 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diaktakan dengan Akta Notaris Maria Dwi Hartati, S.H., No. 8, 9, 10 dan 11. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan amendemen No. 3 dan 4 tanggal 3 Mei 2017 terkait perpanjangan fasilitas kredit dari 6 Mei 2017 sampai 5 Mei 2018.

Perusahaan mendapatkan fasilitas *Investment Credit Facility (Take Over)* sebesar Rp20.785.516.396 berlaku sampai dengan 18 April 2018 sebagai pengambilalihan Fasilitas *Investment Credit* pada Commonwealth Bank. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga 10,75% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah sebesar Rp1.702.757.271.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, beban bunga atas fasilitas ini sebesar Rp587.273.882 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pembayaran yang dilakukan untuk utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
PT Bank Central Asia Tbk	3.881.688.933	770.912.531	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	1.702.757.271	6.811.029.080
Total	3.881.688.933	770.912.531	1.702.757.271	6.811.029.080

PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Total

18. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On May 6, 2015, the Company entered into Credit Facility Agreements with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, which was notarized by Notarial Deed of Maria Dwi Hartati, S.H., No. 8, 9, 10 and 11. The agreements have been amended several times, most recently were based on addendum No. 3 and 4 dated May 3, 2017 regarding the extension of the credit terms from May 6, 2017 until May 5, 2018.

The Company obtained Investment Credit Facility (Take Over) amounting to Rp20,785,516,396 available until April 18, 2018 as the takeover of Investment Credit Facility at Commonwealth Bank. This facility is charged with interest rate at 10.75% per annum.

As of December 31, 2017, the balance of this credit facility amounted to Rp1,702,757,271.

For the year ended December 31, 2017, interest expense from this facility is amounting to Rp587,273,882 and is presented as part of "Finance Costs" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Payments of long-term bank loans are as follow:

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
 Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
 31 Juli 2020 dan 2019, dan
 Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
 Periods Ended
 July 31, 2020 and 2019, and
 As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
 for the Years then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian pembiayaan konsumen yang mengharuskan pembayaran dalam berbagai tanggal antara tahun 2018 hingga 2024.

Rincian pembayaran minimum masa depan dari utang pembiayaan konsumen berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Pihak ketiga				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.452.639.412	5.054.588.827	6.029.057.104	6.925.598.224
PT Astra Sedaya Finance	3.974.022.586	3.402.456.812	1.910.965.697	993.378.548
PT BCA Finance Indonesia	1.674.851.094	2.008.227.778	2.089.703.333	569.729.306
PT Dipo Star Finance	935.123.164	1.448.756.667	1.573.083.118	812.357.196
PT Antilope Madju Puri Indah	-	-	302.754.380	605.508.805
PT Toyota Astra Finance	-	-	-	44.843.074
Total	11.036.636.256	11.914.030.084	11.905.563.632	9.951.415.153
Dikurangi bagian jangka pendek	(5.058.283.375)	(4.675.611.653)	(4.040.360.711)	(2.508.121.508)
Bagian jangka panjang	5.978.352.881	7.238.418.431	7.865.202.921	7.443.293.645

Third parties
 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 PT Astra Sedaya Finance
 PT BCA Finance Indonesia
 PT Dipo Star Finance
 PT Antilope Madju Puri Indah
 PT Toyota Astra Finance
 Total
 Less current portion
 Long-term portion

Nilai kini dari jadwal pembayaran utang pembiayaan konsumen berdasarkan tahun jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The present values of the scheduled payments of the consumer financing payables by the year of maturity are as follows:

31 Juli 2020/July 31, 2020

	Pembayaran Utang Pembiayaan Konsumen Minimum/ Minimum Consumer Financing Payables Payment	Komponen Bunga/ Interest Component	Nilai Kini/ Present Value	
Dalam 1 tahun	6.093.633.449	(1.035.350.074)	5.058.283.375	Within 1 year
Dalam 2 - 5 tahun	6.902.117.656	(923.764.775)	5.978.352.881	Within 2 - 5 years
Total	12.995.751.105	(1.959.114.849)	11.036.636.256	Total

31 Desember 2019/December 31, 2019

	Pembayaran Utang Pembiayaan Konsumen Minimum/ Minimum Consumer Financing Payables Payment	Komponen Bunga/ Interest Component	Nilai Kini/ Present Value	
Dalam 1 tahun	5.772.494.120	(1.096.882.467)	4.675.611.653	Within 1 year
Dalam 2 - 5 tahun	8.541.179.452	(1.302.761.021)	7.238.418.431	Within 2 - 5 years
Total	14.313.673.572	(2.399.643.488)	11.914.030.084	Total

31 Desember 2018/December 31, 2018

	Pembayaran Utang Pembiayaan Konsumen Minimum/ Minimum Consumer Financing Payables Payment	Komponen Bunga/ Interest Component	Nilai Kini/ Present Value	
Dalam 1 tahun	4.996.259.726	(955.899.015)	4.040.360.711	Within 1 year
Dalam 2 - 5 tahun	9.379.687.292	(1.514.484.371)	7.865.202.921	Within 2 - 5 years
Total	14.375.947.018	(2.470.383.386)	11.905.563.632	Total

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Nilai kini dari jadwal pembayaran utang pembiayaan konsumen berdasarkan tahun jatuh tempo adalah sebagai berikut: (lanjutan)

31 Desember 2017/December 31, 2017

	Pembayaran Utang Pembiayaan Konsumen Minimum/ Consumer Financing Payables Payment	Komponen Bunga/ Interest Component	Nilai Kini/ Present Value	
Dalam 1 tahun	3.371.038.100	(862.916.592)	2.508.121.508	Within 1 year
Dalam 2 - 5 tahun	9.321.954.858	(1.878.661.213)	7.443.293.645	Within 2 - 5 years
Total	12.692.992.958	(2.741.577.805)	9.951.415.153	Total

Tingkat bunga per tahun

Interest rates per annum

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Rupiah	3,61% - 13,25%	6,80% - 15,46%	3,61% - 13,25%	4,69% - 13,25%	Rupiah

Kewajiban ini dijamin dengan kendaraan yang dibeli dengan menggunakan hasil dari pinjaman terkait (Catatan 11). Perjanjian pembiayaan konsumen membatasi Perusahaan, antara lain, untuk menjual dan mengalihkan hak hukum atas aset yang dibeli.

These obligations are secured by the vehicles purchased using the proceeds from the related loans (Note 11). The consumer financing agreements restrict the Company, among others, to sell and transfer the legal title of the assets purchased.

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN JANGKA PANJANG

Perusahaan memberikan imbalan kerja bagi karyawannya berdasarkan ketentuan penyisihan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Juli 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Sentra Jasa Aktuaria, aktuaris independen, masing-masing dalam laporannya tanggal 1 September 2020, 19 Februari 2020, 19 Juni 2019 dan 29 Juni 2018, dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*.

20. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

The Company provides benefits for its employees based on the provisions of Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003.

The Company recorded the liability for employee benefits as of July 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017 based on the calculation performed by PT Sentra Jasa Aktuaria, an independent actuary, in its report dated September 1, 2020, February 19, 2020, June 19, 2019 and June 29, 2018, respectively, using the *projected-unit-credit* method.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
JANGKA PANJANG (lanjutan)

Asumsi utama yang digunakan untuk menentukan liabilitas imbalan kerja berdasarkan laporan aktuaris adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Tingkat diskonto	4,27% - 8,15%	5,42% - 8,19%	8,37%	6,97%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	Salary increment rate
Tingkat mortalitas	TMI 2019	TMI'11	TMI'11	TMI'11	Mortality rate
Usia pensiun	55 tahun/years old	55 tahun/years old	55 tahun/years old	55 tahun/years old	Retirement age
Tingkat pengunduran diri		6% untuk karyawan usia di bawah 30 tahun dan menurun hingga 0% pada usia 53 tahun/ 6% for employees before age of 30 years old and will linearly decrease until 0% at the age of 53 years old			Resignation rate
Tingkat kecacatan		10% dari tingkat kematian/10% of mortality rate			Disability rate

20. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY
(continued)

The principal assumptions used in determining the employees' benefits liability are as follows:

a. Beban imbalan kerja karyawan neto

a. Net employees' benefits expenses

	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ Seven-Month Periods ended July 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
	2020	2019 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2019	2018	2017	
Biaya jasa kini	1.192.818.852	949.512.036	1.647.712.349	1.373.377.730	1.261.517.457	Current service cost
Beban bunga	627.830.500	610.239.874	1.046.125.497	791.971.334	583.515.459	Interest cost
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya	3.249.788	1.471.282	2.195.335	(8.330.517)	14.900.412	Other long-term employee benefits
Beban imbalan kerja karyawan neto	1.823.899.140	1.561.223.192	2.696.033.181	2.157.018.547	1.859.933.328	Net employees' benefits expenses

b. Liabilitas imbalan kerja karyawan

b. Employees' benefits liability

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The movement in the present value of employees' benefits liability is as follows:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Saldo awal	15.238.683.191	12.498.512.517	11.362.572.947	7.013.406.959	Beginning balance
<u>Perubahan yang dibebankan ke laba rugi</u>					<u>Changes charged to profit or loss</u>
Biaya jasa kini	1.192.818.852	1.647.712.349	1.373.377.730	1.261.517.457	Current service cost
Beban bunga	627.830.500	1.046.125.497	791.971.334	583.515.459	Interest cost
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	3.249.788	2.195.335	(8.330.517)	14.900.412	Other long-term employee benefits
Beban imbalan kerja karyawan neto	1.823.899.140	2.696.033.181	2.157.018.547	1.859.933.328	Net employees' benefits expenses
<u>Perubahan yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain</u>					<u>Changes charged to other comprehensive income</u>
Rugi (laba) aktuarial:					Actuarial losses (gains):
Perubahan asumsi demografis	7.499.728	-	-	-	Changes in demographic assumptions
Perubahan asumsi keuangan	193.556.097	674.447.101	(1.514.273.830)	1.214.652.020	Changes in financial assumptions
Penyesuaian pengalaman	2.022.658.445	(173.318.308)	574.377.103	1.339.684.460	Experience adjustments
Sub-total	2.223.714.270	501.128.793	(939.896.727)	2.554.336.480	Sub-total
Imbalan kerja yang dibayar	(15.820.000)	(456.991.300)	(81.182.250)	(65.103.820)	Benefit paid
Saldo akhir	19.270.476.601	15.238.683.191	12.498.512.517	11.362.572.947	Ending balance

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
JANGKA PANJANG (lanjutan)

Pada tanggal 31 Juli 2020, perubahan satu poin persentase terhadap tingkat diskonto yang diasumsikan akan memiliki dampak sebagai berikut:

	Tingkat Diskonto/ Discount Rates		Kenaikan Gaji di Masa Depan/ Future Salary Increases		
	1% Kenaikan/ Increase	1% Penurunan/ Decrease	1% Kenaikan/ Increase	1% Penurunan/ Decrease	
Pengaruh pada nilai kini kewajiban imbalan pasti	(1.659.242.684)	1.924.143.526	2.057.495.715	(1.791.005.128)	Impact on present value of defined benefits obligation
Pengaruh pada biaya jasa kini	(114.590.515)	134.568.394	144.106.142	(123.669.911)	Impact on current service cost

As of July 31, 2020, a one percentage point change in the assumed rate of discount rate would have the following effects:

Pada tanggal 31 Desember 2019, perubahan satu poin persentase terhadap tingkat diskonto yang diasumsikan akan memiliki dampak sebagai berikut:

	Tingkat Diskonto/ Discount Rates		Kenaikan Gaji di Masa Depan/ Future Salary Increases		
	1% Kenaikan/ Increase	1% Penurunan/ Decrease	1% Kenaikan/ Increase	1% Penurunan/ Decrease	
Pengaruh pada nilai kini kewajiban imbalan pasti	(1.345.750.269)	1.561.772.008	1.673.784.210	(1.456.359.311)	Impact on present value of defined benefits obligation
Pengaruh pada biaya jasa kini	(165.153.222)	194.294.612	208.647.971	(178.651.669)	Impact on current service cost

As of December 31, 2019, a one percentage point change in the assumed rate of discount rate would have the following effects:

Pada tanggal 31 Desember 2018, perubahan satu poin persentase terhadap tingkat diskonto yang diasumsikan akan memiliki dampak sebagai berikut:

	Tingkat Diskonto/ Discount Rates		Kenaikan Gaji di Masa Depan/ Future Salary Increases		
	1% Kenaikan/ Increase	1% Penurunan/ Decrease	1% Kenaikan/ Increase	1% Penurunan/ Decrease	
Pengaruh pada nilai kini kewajiban imbalan pasti	(1.054.249.521)	1.215.085.730	1.302.229.920	(1.141.645.319)	Impact on present value of defined benefits obligation
Pengaruh pada biaya jasa kini	(135.156.408)	158.985.691	170.843.273	(146.264.252)	Impact on current service cost

As of December 31, 2018, a one percentage point change in the assumed rate of discount rate would have the following effects:

Pada tanggal 31 Desember 2017, perubahan satu poin persentase terhadap tingkat diskonto yang diasumsikan akan memiliki dampak sebagai berikut:

	Tingkat Diskonto/ Discount Rates		Kenaikan Gaji di Masa Depan/ Future Salary Increases		
	1% Kenaikan/ Increase	1% Penurunan/ Decrease	1% Kenaikan/ Increase	1% Penurunan/ Decrease	
Pengaruh pada nilai kini kewajiban imbalan pasti	(1.060.023.751)	1.226.181.059	1.297.791.941	(1.136.150.169)	Impact on present value of defined benefits obligation
Pengaruh pada biaya jasa kini	(127.181.550)	148.624.237	157.533.360	(136.264.097)	Impact on current service cost

As of December 31, 2017, a one percentage point change in the assumed rate of discount rate would have the following effects:

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
JANGKA PANJANG (lanjutan)

Jatuh tempo kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Dalam 12 bulan mendatang	2.580.526.765	244.995.745	458.839.000	-	Within the next 12 months
Antara 1 sampai 2 tahun	1.213.450.318	1.970.395.795	124.365.518	450.328.713	Between 1 and 2 years
Antara 2 sampai 5 tahun	3.099.193.263	3.102.513.093	2.899.922.779	2.903.081.618	Between 2 and 5 years
Lebih dari 5 tahun	138.663.016.061	102.297.210.889	138.382.998.362	87.194.186.035	Beyond 5 years
Total	145.556.186.407	107.615.115.522	141.866.125.659	90.547.596.366	Total

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Juli 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah 14,59 tahun, 14,31 tahun, 9,08 tahun dan 10,06 tahun.

20. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY
(continued)

The maturity profile of defined benefit obligation is as follows:

The average duration of the benefit obligation as of July 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017 was 14.59 years, 14.31 years, 9.08 years and 10.06 years, respectively.

21. MODAL SAHAM

Komposisi kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Amount	Name of Shareholders
PT Sukses Sejati Sejahtera	284.919	99,97	284.919.000.000	PT Sukses Sejati Sejahtera
Bpk. Luhur Dino Herlambang	81	0,03	81.000.000	Bpk. Luhur Dino Herlambang
Total	285.000	100,00	285.000.000.000	Total

21. SHARE CAPITAL

The composition of the Company's shareholders and their share ownership as of July 31, 2020 and December 31, 2019 are as follows:

Komposisi kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Amount	Name of Shareholders
PT Sukses Sejati Sejahtera	34.990	99,97	34.990.000.000	PT Sukses Sejati Sejahtera
Bpk. Luhur Dino Herlambang	10	0,03	10.000.000	Bpk. Luhur Dino Herlambang
Total	35.000	100,00	35.000.000.000	Total

The composition of the Company's shareholders and their share ownership as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Berdasarkan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 60 tanggal 31 Desember 2018, pemegang saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp285.000.000.000 yang terdiri dari 285.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp250.000.000.000 diambil dari saldo laba pada tanggal 31 Desember 2018 dan disajikan sebagai "Uang muka setoran modal" pada tanggal 31 Desember 2018. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004390.AH.01.02 tanggal 28 Januari 2019 dan direklasifikasi menjadi modal saham pada laporan posisi keuangan (Catatan 34).

Based on Notarial Deed No. 60 of Rudy Siswanto, S.H., dated December 31, 2018, the Company's shareholders have approved the increase of issued and fully paid-up capital to become Rp285,000,000,000 which consisted of 285,000 shares with par value of Rp1,000,000 per share. The issued and fully paid-up capital of Rp250,000,000,000 were taken from the retained earnings as of December 31, 2018 and was presented as "Deposit for future stock subscription" as of December 31, 2018. This deed has been approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under its Decision Letter No. AHU-0004390.AH.01.02 dated January 28, 2019 and was reclassified to share capital in the statement of financial position (Note 34).

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. PENJUALAN NETO

Rincian penjualan neto adalah sebagai berikut:

	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ Seven-Month Periods ended July 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
	2020	2019 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2019	2018	2017	
Pihak berelasi - Lokal	57.175.090.698	5.694.009.240	12.420.792.582	5.670.597.671	5.872.732.135	Related parties - Local
Dikurangi:						Less:
Diskon dan retur penjualan	(2.317.821.167)	(97.455.530)	(238.509.890)	(13.600.562)	(10.465.811)	Sales discount and return
Penjualan neto - pihak berelasi (Catatan 8f)	54.857.269.531	5.596.553.710	12.182.282.692	5.656.997.109	5.862.266.324	Net sales - related parties (Note 8f)
Pihak ketiga						Third parties
Lokal	785.341.790.592	622.676.225.180	1.098.383.404.383	838.638.439.768	732.025.835.365	Local
Ekspor	2.588.782.416	294.634.831	2.271.855.569	650.448.470	297.545.430	Export
Penjualan bruto	787.930.573.008	622.970.860.011	1.100.655.259.952	839.288.888.238	732.323.380.795	Gross sales
Dikurangi:						Less:
Diskon dan retur penjualan	(201.433.433.889)	(162.668.834.138)	(283.125.288.274)	(226.789.574.195)	(197.442.795.702)	Sales discount and return
Rabat dan bonus	(23.386.312.429)	(18.704.381.099)	(31.921.232.290)	(23.428.123.321)	(16.574.474.458)	Rebate and bonus
Penjualan neto - pihak ketiga	563.110.826.690	441.597.644.774	785.608.739.388	589.071.190.722	518.306.110.635	Net sales - third parties
Total penjualan neto	617.968.096.221	447.194.198.484	797.791.022.080	594.728.187.831	524.168.376.959	Total net sales

Untuk tujuh bulan periode yang berakhir pada 31 Juli 2020 dan 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tidak ada pelanggan yang secara individu memiliki jumlah transaksi melebihi 10% dari penjualan neto.

The details of net sales are as follows:

For the seven-month period ended July 31, 2020 and 2019, and for the years then ended December 31, 2019, 2018 and 2017, no individual customer had a total transaction of more than 10% of net sales.

23. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut

	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ Seven-Month Periods ended July 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
	2020	2019 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2019	2018	2017	
Pemakaian bahan baku	81.691.088.943	65.147.846.524	120.682.510.864	89.765.577.002	66.006.755.921	Raw materials consumption
Pemakaian bahan pembungkus	47.690.624.384	45.815.348.938	87.363.248.444	62.236.559.649	46.874.614.783	Packaging materials consumption
Upah langsung	10.368.780.684	8.570.034.226	15.344.936.638	9.884.897.956	6.943.716.839	Direct labor
Beban tidak langsung	12.650.129.851	10.953.853.301	18.910.977.898	14.067.004.526	10.523.294.966	Factory overhead
Total beban produksi	152.400.623.862	130.487.082.989	242.301.673.844	175.954.039.133	130.348.382.509	Total production costs
Barang dalam proses						Work in process
Awal periode	5.077.271.226	4.672.127.325	4.672.127.325	3.462.392.596	1.754.941.676	Beginning of period
Akhir periode (Catatan 7)	(5.522.291.749)	(5.363.784.937)	(5.077.271.226)	(4.672.127.325)	(3.462.392.596)	End of period (Note 7)
Beban pokok produksi	151.955.603.339	129.795.425.377	241.896.529.943	174.744.304.404	128.640.931.589	Cost of goods manufactured
Barang jadi						Finished goods
Awal periode	101.373.096.663	61.815.352.496	61.815.352.496	65.507.276.369	60.626.470.457	Beginning of period
Pembelian	154.203.343.225	88.368.752.533	165.957.085.350	108.725.167.276	125.635.323.782	Purchase
Akhir periode (Catatan 7)	(98.312.501.530)	(71.782.023.456)	(101.373.096.663)	(61.815.352.496)	(65.507.276.369)	End of period (Note 7)
Total beban pokok penjualan	309.219.541.697	208.197.506.950	368.295.871.126	287.161.395.553	249.395.449.459	Total cost of goods sold

23. COST OF GOODS SOLD

The details of cost of goods sold are as follows:

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)

Rincian pembelian kepada pemasok yang melebihi 10% dari total penjualan neto adalah sebagai berikut:

	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ Seven-Month Periods ended July 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,		
	2020	2019 (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)	2019	2018	2017
Nilai					
Guangzhou Biqian Daily-Used Cosmetics., Ltd., Tiongkok	88.756.924.008	85.957.363.781	164.061.194.179	104.895.003.575	132.501.848.430
PT Natura Pesona Mandiri (Catatan 8g)	81.527.160.340	9.888.009.690	16.964.187.103	12.774.640.869	11.515.077.373
Persentase					
Guangzhou Biqian Daily-Used Cosmetics., Ltd., Tiongkok	14,36%	19,22%	20,56%	17,64%	25,28%
PT Natura Pesona Mandiri	13,19%	2,21%	2,13%	2,15%	2,20%

23. COST OF GOODS SOLD (continued)

The details of purchase to individual suppliers representing more than 10% of the total net sales are as follows:

Amount
Guangzhou Biqian Daily-Used Cosmetics., Ltd., China
PT Natura Pesona Mandiri (Note 8g)
Percentage
Guangzhou Biqian Daily-Used Cosmetics., Ltd., China
PT Natura Pesona Mandiri

24. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN

Rincian beban penjualan dan pemasaran adalah sebagai berikut

	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ Seven-Month Periods ended July 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,		
	2020	2019 (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)	2019	2018	2017
Iklan dan promosi	72.248.859.670	66.632.042.766	123.700.691.119	93.798.224.653	74.441.220.614
Gaji dan tunjangan	29.982.356.273	24.547.334.441	43.588.460.900	33.173.036.078	28.635.847.333
Ekspedisi	4.581.253.145	3.513.568.680	6.812.681.163	6.357.665.665	4.500.947.883
Barang rusak	3.236.556.718	1.268.985.472	2.873.187.358	2.397.385.606	4.456.876.067
Transportasi	2.008.464.778	1.823.211.087	3.195.452.134	2.971.138.846	2.720.722.303
Perjalanan bisnis	1.525.665.148	1.811.494.849	3.725.586.597	2.604.607.633	2.425.529.080
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 12)	1.498.757.241	-	-	-	-
Pemeliharaan kendaraan	921.302.184	812.816.650	1.442.323.058	1.218.767.937	1.028.980.093
Royalti (Catatan 8)	-	2.243.657.037	3.998.580.200	5.607.685.670	2.105.649.207
Lain-lain	1.252.486.253	375.031.302	840.376.005	373.024.935	2.415.116.082
Total beban penjualan dan pemasaran	117.255.701.410	103.028.142.284	190.177.338.534	148.501.537.023	122.730.888.662

24. SELLING AND MARKETING EXPENSES

The details of selling and marketing expenses are as follows:

Advertising and promotion
Salaries and welfare
Expedition
Bad stock
Transportation
Business travel
Depreciation of right-of-use assets (Note 12)
Vehicle maintenance
Royalty (Note 8)
Others
Total selling and marketing expenses

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut

	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ Seven-Month Periods ended July 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,		
	2020	2019 (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)	2019	2018	2017
Gaji dan kompensasi karyawan lainnya	26.403.226.334	19.212.960.374	37.407.831.303	31.788.285.245	22.571.769.164
Depresiasi (Catatan 11)	10.810.202.993	5.019.266.522	10.008.718.309	6.687.870.056	6.014.032.889
Asuransi	5.198.496.784	3.770.181.524	6.792.646.107	5.459.013.328	4.882.979.495
Listrik, air dan telepon	1.304.616.653	952.021.689	1.832.715.595	1.485.637.865	1.372.329.738
Pemeliharaan	1.266.844.682	463.974.038	923.994.751	969.168.057	638.689.538
Sewa gedung	808.028.017	1.016.346.178	1.676.626.985	2.208.004.632	1.946.992.483
Peralatan kantor	738.855.870	578.661.285	1.034.652.296	863.435.655	759.818.297
Jasa profesional	691.647.493	281.373.564	1.226.679.324	1.392.554.457	456.025.000
Perjalanan bisnis	587.128.109	1.400.853.202	2.445.082.481	1.293.317.888	722.363.591
Transportasi	451.494.353	331.134.358	684.081.787	482.539.201	379.631.660
Pajak	363.697.496	998.954.024	1.333.499.475	293.100.359	5.090.706.723
Izin dan lisensi	233.202.971	226.600.000	388.289.415	847.778.699	118.253.176
Jamuan	159.996.689	94.272.449	195.420.447	282.435.468	40.205.428
Amortisasi (Catatan 10)	154.618.591	-	-	-	-
Lain-lain	2.502.047.820	1.560.955.340	2.924.240.288	3.535.631.185	2.004.935.595
Total beban umum dan administrasi	51.674.104.855	35.907.554.547	68.874.478.563	57.588.772.095	46.998.732.777

Salaries and other employees' compensation
Depreciation (Note 11)
Insurance
Electricity, water and telephone
Maintenance
Building rental
Office supplies
Professional fees
Business travel
Transportation
Taxes
Licenses and permits
Representation
Amortisation (Note 10)
Others
Total general and administrative expenses

25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

The details of general and administrative expenses are as follows:

26. BEBAN KEUANGAN

Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut

	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ Seven-Month Periods ended July 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,		
	2020	2019 (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)	2019	2018	2017
Beban bunga	11.824.570.653	9.398.200.231	17.411.487.193	15.871.288.333	19.938.863.404
Biaya bank	98.899.221	110.211.558	196.107.695	125.725.882	92.777.402
Biaya provisi pinjaman	-	125.000.000	625.000.000	-	1.006.530.000
Total beban keuangan	11.923.469.874	9.633.411.789	18.232.594.888	15.997.014.215	21.038.170.806

Interest expenses
Bank charges
Loan provision fees
Total finance cost

26. FINANCE COSTS

The details of finance costs are as follows:

27. DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 6 tanggal 10 September 2018, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai yang berasal dari laba bersih tahun 2016 sebesar Rp25.000.000.000 yang telah dibayar penuh pada bulan Desember 2018.

27. CASH DIVIDENDS

Based on Notarial Deed No. 6 of Rudy Siswanto, S.H., dated September 10, 2018, the shareholders approved the distribution of cash dividends derived from 2016 net income of Rp25,000,000,000 which had been fully paid in December 2018.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. LABA PER SAHAM DASAR

Rincian perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ Seven-Month Periods ended July 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
	2020	2019 (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)	2019	2018	2017	
Laba periode/tahun berjalan	97.079.255.891	65.955.874.567	111.762.630.540	65.314.876.921	67.133.135.865	Profit for the period/year
Jumlah rata-rata tertimbang saham	5.700.000.000	5.700.000.000	5.700.000.000	5.700.000.000	5.700.000.000	Weighted average number of shares
Laba per saham dasar	17,03	11,57	19,61	11,46	11,78	Basic earnings per share

Pada tanggal 25 September 2020, Perusahaan mengubah nilai nominal saham yang semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi sebesar Rp50 per saham, yang mengakibatkan jumlah saham beredar meningkat (Catatan 35). Untuk tujuan penghitungan laba per saham, jumlah saham yang beredar dihitung menggunakan jumlah saham yang baru.

28. BASIC EARNINGS PER SHARE

Details of earnings per share computation are as follow:

On September 25, 2020, the Company changed the par value of the shares from Rp1,000,000 per share to become Rp50 per share, which resulted increase in number of outstanding shares (Note 35). For the purpose of calculating the earning per share, the outstanding shares were calculated based on new number of shares.

29. INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi. Nilai wajar didapatkan dari kuotasi harga pasar, model arus kas diskonto dan model penentuan harga opsi yang sewajarnya.

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau sebaliknya, disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan:

Nilai wajar untuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang pihak berelasi, aset tidak lancar lainnya, utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, utang kepada pihak berelasi, beban akrual dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek mendekati nilai tercatatnya karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

29. FINANCIAL INSTRUMENTS

Fair value is defined as the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arms' length transaction, other than in a forced or liquidation sale. Fair values are obtained from quoted market prices, discounted cash flow models and option pricing models as appropriate.

Financial instruments presented in the statement of financial position are carried at the fair value, otherwise, they are presented at carrying values as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured. The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of each class of financial instruments:

The fair values of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, due from related parties, other non-current assets, short-term bank loans, trade and other payables, due to a related party, accrued expenses and short-term employee benefits liability approximate their carrying values due to short-term maturities of these financial instruments.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau sebaliknya, disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan: (lanjutan)

Nilai wajar atas utang bank jangka panjang dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

Nilai wajar atas liabilitas sewa dan utang pembiayaan konsumen dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif.

Aset keuangan tidak lancar yang tidak memiliki kuotasi harga pasar yang dipublikasikan pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal (aset tidak lancar lainnya - uang jaminan) dicatat pada biaya perolehan.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan posisi keuangan:

	31 Juli 2020/ July 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas dan setara kas	4.721.480.097	4.721.480.097	2.744.102.486	2.744.102.486	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto	183.063.826.374	183.063.826.374	156.815.086.873	156.815.086.873	Trade receivables - net
Piutang lain-lain - pihak ketiga	202.508.611	202.508.611	103.106.000	103.106.000	Other receivables - third parties
Aset tidak lancar lainnya	818.764.287	818.764.287	894.914.628	894.914.628	Other non-current assets
Total aset keuangan	188.806.579.369	188.806.579.369	160.557.209.987	160.557.209.987	Total financial assets
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	90.805.510.139	90.805.510.139	138.955.190.080	138.955.190.080	Short-term bank loans
Utang usaha	26.447.380.052	26.447.380.052	56.871.045.349	56.871.045.349	Trade payables
Utang lain-lain	2.929.904.027	2.929.904.027	1.518.246.132	1.518.246.132	Other payables
Beban akrual	29.378.227.255	29.378.227.255	36.592.655.417	36.592.655.417	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	5.332.767.596	5.332.767.596	6.590.523.066	6.590.523.066	Short-term employee benefits liability
Utang bank jangka panjang	80.583.282.855	80.583.282.855	84.404.067.503	84.404.067.503	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	11.036.636.256	11.036.636.256	11.914.030.084	11.914.030.084	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	2.430.869.763	2.430.869.763	-	-	Lease liabilities
Total liabilitas keuangan	248.944.577.943	248.944.577.943	336.845.757.631	336.845.757.631	Total financial liabilities

29. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Financial instruments presented in the statement of financial position are carried at the fair value, otherwise, they are presented at carrying values as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured. The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of each class of financial instruments: (continued)

The fair value of long-term bank loans is calculated using discounted cash flows using market interest rates.

The fair value of lease liabilities and consumer financing payables are determined by discounting cash flows at effective interest rate.

Non-current financial assets which do not have quoted prices in active markets and fair value cannot be measured reliably (other non-current assets - security deposits) are measured at cost.

The table below is a comparison of the carrying amounts and fair value of the Company's financial instruments that are carried in the statement of financial position:

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan posisi keuangan: (lanjutan)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018		31 Desember 2017/ December 31, 2017		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas dan setara kas	24.598.248.037	24.598.248.037	4.597.496.092	4.597.496.092	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	-	25.000.000.000	25.000.000.000	Restricted time deposit
Piutang usaha - neto	147.377.330.810	147.377.330.810	137.605.053.071	137.605.053.071	Trade receivables - net
Piutang lain-lain - pihak ketiga	91.136.000	91.136.000	86.115.518	86.115.518	Other receivables - third parties
Piutang pihak berelasi	18.415.160.500	18.415.160.500	79.310.731.006	79.310.731.006	Due from related parties
Aset tidak lancar lainnya	441.066.600	441.066.600	331.006.900	331.006.900	Other non-current assets
Total aset keuangan	190.922.941.947	190.922.941.947	246.930.402.587	246.930.402.587	Total financial assets
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	181.410.214.771	181.410.214.771	192.802.313.161	192.802.313.161	Short-term bank loans
Utang usaha	47.985.517.585	47.985.517.585	41.698.038.879	41.698.038.879	Trade payables
Utang lain-lain	731.251.455	731.251.455	1.341.796.777	1.341.796.777	Other payables
Utang kepada pihak berelasi	-	-	525.000.000	525.000.000	Due to a related party
Beban akrual	31.665.919.884	31.665.919.884	19.433.458.880	19.433.458.880	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	4.516.127.303	4.516.127.303	3.751.628.043	3.751.628.043	Short-term employee benefits liability
Utang bank jangka panjang	-	-	1.702.757.271	1.702.757.271	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	11.905.563.632	11.905.563.632	9.951.415.153	9.951.415.153	Consumer financing payables
Total liabilitas keuangan	278.214.594.630	278.214.594.630	271.206.408.164	271.206.408.164	Total financial liabilities

Hierarki Nilai Wajar

Aset dan liabilitas keuangan diklasifikasikan secara keseluruhan berdasarkan tingkat terendah dari masukan (*input*) yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar. Penilaian dampak signifikan dari suatu *input* tertentu terhadap pengukuran nilai wajar membutuhkan pertimbangan dan dapat mempengaruhi penilaian dari aset dan liabilitas yang diukur dan penempatannya dalam hirarki nilai wajar.

Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga yang dikuotasikan (*quoted prices*) dalam sebuah pasar yang aktif. Jika pasar untuk sebuah instrumen keuangan tidak aktif, entitas menetapkan nilai wajar dengan menggunakan metode penilaian. Tujuan dari penggunaan metode penilaian adalah untuk menetapkan harga transaksi yang terbentok pada tanggal pengukuran dalam sebuah transaksi pertukaran yang wajar dengan pertimbangan bisnis normal.

Metode penilaian termasuk penggunaan harga dalam transaksi pasar yang wajar (*arm's length*) terakhir antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan, jika tersedia, referensi kepada nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskontokan.

29. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

The table below is a comparison of the carrying amounts and fair value of the Company's financial instruments that are carried in the statement of financial position: (continued)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018		31 Desember 2017/ December 31, 2017		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas dan setara kas	24.598.248.037	24.598.248.037	4.597.496.092	4.597.496.092	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	-	25.000.000.000	25.000.000.000	Restricted time deposit
Piutang usaha - neto	147.377.330.810	147.377.330.810	137.605.053.071	137.605.053.071	Trade receivables - net
Piutang lain-lain - pihak ketiga	91.136.000	91.136.000	86.115.518	86.115.518	Other receivables - third parties
Piutang pihak berelasi	18.415.160.500	18.415.160.500	79.310.731.006	79.310.731.006	Due from related parties
Aset tidak lancar lainnya	441.066.600	441.066.600	331.006.900	331.006.900	Other non-current assets
Total aset keuangan	190.922.941.947	190.922.941.947	246.930.402.587	246.930.402.587	Total financial assets
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	181.410.214.771	181.410.214.771	192.802.313.161	192.802.313.161	Short-term bank loans
Utang usaha	47.985.517.585	47.985.517.585	41.698.038.879	41.698.038.879	Trade payables
Utang lain-lain	731.251.455	731.251.455	1.341.796.777	1.341.796.777	Other payables
Utang kepada pihak berelasi	-	-	525.000.000	525.000.000	Due to a related party
Beban akrual	31.665.919.884	31.665.919.884	19.433.458.880	19.433.458.880	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	4.516.127.303	4.516.127.303	3.751.628.043	3.751.628.043	Short-term employee benefits liability
Utang bank jangka panjang	-	-	1.702.757.271	1.702.757.271	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	11.905.563.632	11.905.563.632	9.951.415.153	9.951.415.153	Consumer financing payables
Total liabilitas keuangan	278.214.594.630	278.214.594.630	271.206.408.164	271.206.408.164	Total financial liabilities

Fair Value Hierarchy

Financial assets and liabilities are classified in their entirety based on the lowest level of input that is significant to the fair value measurements. The assessment of the significance of a particular input to the fair value measurements requires judgement, and may affect the valuation of the assets and liabilities being measured and their placement within the fair value hierarchy.

The best evidence of fair value is quoted prices in an active market. If the market for a financial instrument is not active, an entity establishes fair value by using a valuation technique. The objective of using a valuation technique is to establish what the transaction price would have been on the measurement date in an arm's length exchange motivated by normal business considerations.

Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Hierarki Nilai Wajar (lanjutan)

Jika terdapat metode penilaian yang biasa digunakan oleh para peserta pasar untuk menentukan harga dari instrumen dan metode tersebut telah didemonstrasikan untuk menyediakan estimasi yang andal atas harga yang diperoleh dari transaksi pasar yang aktual, entitas harus menggunakan metode tersebut. Metode penilaian yang dipilih membuat penggunaan maksimum dari *input* pasar dan bergantung sedikit mungkin atas *input* yang spesifik untuk entitas (*entity-specific input*). Metode tersebut memperhitungkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh peserta pasar dalam menentukan sebuah harga dan selaras dengan metode ekonomis untuk penilaian sebuah instrumen keuangan. Secara berkala, Perusahaan menelaah metode penilaian dan mengujinya untuk validitas dengan menggunakan harga dari transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi untuk instrumen yang sama (yaitu tanpa modifikasi dan pengemasan kembali) atau berdasarkan data pasar yang tersedia dan dapat diobservasi.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar pada tanggal 31 Juli 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

30. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Tabel berikut menyediakan hierarki pengukuran nilai wajar dari Perusahaan:

Pengukuran Nilai Wajar pada Akhir Periode Pelaporan Menggunakan/ Fair Value Measurement at the End of Reporting Period Using				
Total/ Total	Harga Kuotasian dalam Pasar Aktif untuk Aset yang Identik (Level 1)/ Quoted Prices in Active Markets for Identical Assets (Level 1)	Input yang Dapat Diobservasi Lain yang Signifikan (Level 2)/ Significant Observable Inputs (Level 2)	Input yang Tidak Dapat Diobservasi yang Signifikan (Level 3)/ Significant Unobservable Inputs (Level 3)	
				As of July 31, 2020
<u>Aset tidak lancar</u>				<u>Non-current assets</u>
Properti investasi	30.762.722.484	-	30.762.722.484	-
				Investment properties
				As of December 31, 2019
<u>Aset tidak lancar</u>				<u>Non-current assets</u>
Properti investasi	30.762.722.484	-	30.762.722.484	-
				Investment properties
				As of December 31, 2018
<u>Aset tidak lancar</u>				<u>Non-current assets</u>
Properti investasi	30.762.722.484	-	30.762.722.484	-
				Investment properties
				As of December 31, 2017
<u>Aset tidak lancar</u>				<u>Non-current assets</u>
Properti investasi	27.302.722.484	-	27.302.722.484	-
				Investment properties

29. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Fair Value Hierarchy (continued)

If there is a valuation technique commonly used by market participants to price the instrument and that technique has been demonstrated to provide reliable estimates of prices obtained in actual market transactions, the entity uses that technique. The chosen valuation technique makes maximum use of market inputs and relies as little as possible on entity-specific inputs. It incorporates all factors that market participants would consider in setting a price and is consistent with accepted economic methodologies for pricing financial instruments. Periodically, the Company calibrates the valuation technique and tests it for validity using prices from any observable current market transactions in the same instrument (i.e., without modification or repackaging) or based on any available observable market data.

The Company has no financial assets and financial liabilities which are measured at fair value as of July 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017.

30. FAIR VALUE MEASUREMENT

The following table provides the fair value measurement hierarchy of the Company:

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. INFORMASI SEGMENT

Untuk keperluan manajemen, Perusahaan dikelola menjadi unit bisnis berdasarkan produk yang dijual dan memiliki tiga segmen pelaporan, sebagai berikut:

- Perawatan tubuh dan antiseptik, seperti sabun mandi, krim dan losion perawatan kulit, deodoran, lulur mandi, parfum, cairan dan gel antiseptik, sabun antiseptik, cairan pembersih dan pembunuh kuman dan produk-produk lainnya yang berkaitan dengan perawatan tubuh.
- Perawatan rambut, seperti sampo, masker rambut, pewarna rambut, obat pengeriting dan pelurus rambut dan produk-produk lainnya yang berkaitan dengan perawatan rambut.
- Lain-lain, yaitu produk-produk selain produk perawatan tubuh dan rambut, seperti biji dan bubuk kopi, souvenir dan makanan ringan.

Manajemen memantau hasil operasi dari setiap unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya dan penilaian kinerja.

32. SEGMENT INFORMATION

For management purposes, the Company is organised into business units based on its products sold and has three reportable segments, as follows:

- *Body care and antiseptic, such as body soap, skin care cream and lotion, deodorant, body scrub, perfume, antiseptic liquid and gel, antiseptic soap, cleaning and disinfectant substance and other products related to body care and treatments.*
- *Hair care, such as shampoo, hair mask, hair coloring, hair curling and straightening agents and other products related to hair care and treatments.*
- *Others, which are products other than body and hair care products, such as coffee beans and powder, souvenirs and snacks.*

Management monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi mengenai segment usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

32. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Company's business segments is as follows:

Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2020/ Seven-Month Period Ended July 31, 2020					
	Perawatan Tubuh dan Antiseptik/ Body Care and Antiseptic	Perawatan Rambut/ Hair Care	Lain-lain/ Others	Total/ Total	
Penjualan bruto setelah dikurangi diskon dan retur penjualan	342.561.680.634	298.227.366.782	565.361.234	641.354.408.650	Gross sales less sales discount and return
Rabat dan bonus yang tidak dapat dialokasikan				(23.386.312.429)	Unallocated rebate and bonus
Beban pokok penjualan	(175.734.342.094)	(132.953.108.309)	(532.091.294)	(309.219.541.697)	Cost of goods sold
Hasil segmen	166.827.338.540	165.274.258.473	33.269.940	308.748.554.524	Segment results
Beban yang tidak dapat dialokasi				(169.196.536.547)	Unallocated operating expenses
Laba operasi				139.552.017.977	Income from operations
Pendapatan keuangan				9.080.721	Finance income
Beban keuangan				(11.923.469.874)	Finance costs
Laba sebelum beban pajak penghasilan				127.637.628.824	Income before income tax expense
Beban pajak penghasilan - neto				(30.558.372.933)	Income tax expense - net
Laba periode berjalan				97.079.255.891	Income for the period
Rugi komprehensif lain, setelah pajak				(1.734.497.131)	Other comprehensive loss, net of tax
Penghasilan komprehensif periode berjalan				95.344.758.760	Total comprehensive income for the period
Segmen aset				809.208.372.344	Segment assets
Segmen liabilitas				299.618.820.822	Segment liabilities
Informasi lainnya: Belanja modal				16.341.757.134	Other informations: Capital expenditures
Depresiasi dan amortisasi				13.202.324.529	Depreciation and amortisation

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi mengenai segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

32. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Company's business segments is as follows: (continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019/ Year Ended December 31, 2019					
	Perawatan Tubuh dan Antiseptik/ Body Care and Antiseptic	Perawatan Rambut/ Hair Care	Lain-lain/ Others	Total/ Total	
Penjualan bruto setelah dikurangi diskon dan retur penjualan	385.926.260.373	437.770.703.380	6.015.290.617	829.712.254.370	<i>Gross sales less sales discount and return</i>
Rabat dan bonus yang tidak dapat dialokasikan				(31.921.232.290)	<i>Unallocated rebate and bonus</i>
Beban pokok penjualan	(160.718.588.035)	(203.622.897.511)	(3.954.385.580)	(368.295.871.126)	<i>Cost of goods sold</i>
Hasil segmen	225.207.672.338	234.147.805.869	2.060.905.037	429.495.150.954	Segment results
Beban yang tidak dapat dialokasi				(260.498.929.897)	<i>Unallocated operating expenses</i>
Laba operasi				168.996.221.057	Income from operations
Pendapatan keuangan				14.418.318	<i>Finance income</i>
Beban keuangan				(18.232.594.888)	<i>Finance costs</i>
Laba sebelum beban pajak penghasilan				150.778.044.487	Income before income tax expense
Beban pajak penghasilan - neto				(39.015.413.947)	<i>Income tax expense - net</i>
Laba tahun berjalan				111.762.630.540	Income for the year
Rugi komprehensif lain, setelah pajak				(375.846.595)	<i>Other comprehensive loss, net of tax</i>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan				111.386.783.945	Total comprehensive income for the year
Segmen aset				779.559.594.478	Segment assets
Segmen liabilitas				362.871.980.499	Segment liabilities
Informasi lainnya:					<i>Other informations:</i>
Belanja modal				159.316.415.380	<i>Capital expenditures</i>
Depresiasi dan amortisasi				13.274.221.034	<i>Depreciation and amortisation</i>

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi mengenai segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

32. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Company's business segments is as follows: (continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018/ Year Ended December 31, 2018					
	Perawatan Tubuh dan Antiseptik/ Body Care and Antiseptic	Perawatan Rambut/ Hair Care	Lain-lain/ Others	Total/ Total	
Penjualan bruto setelah dikurangi diskon dan retur penjualan	301.443.722.131	309.363.352.012	7.349.237.009	618.156.311.152	<i>Gross sales less sales discount and return</i>
Rabat dan bonus yang tidak dapat dialokasikan				(23.428.123.321)	<i>Unallocated rebate and bonus</i>
Beban pokok penjualan	(131.679.314.453)	(150.334.287.614)	(5.147.793.486)	(287.161.395.553)	<i>Cost of goods sold</i>
Hasil segmen	169.764.407.678	159.029.064.398	2.201.443.523	307.566.792.278	Segment results
Beban yang tidak dapat dialokasi				(203.122.212.493)	<i>Unallocated operating expenses</i>
Laba operasi				104.444.579.785	Income from operations
Pendapatan keuangan				162.060.786	<i>Finance income</i>
Beban keuangan				(15.997.014.215)	<i>Finance costs</i>
Laba sebelum beban pajak penghasilan				88.609.626.356	Income before income tax expense
Beban pajak penghasilan - neto				(23.294.749.435)	<i>Income tax expense - net</i>
Laba tahun berjalan				65.314.876.921	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak				704.922.545	<i>Other comprehensive income, net of tax</i>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan				66.019.799.466	Total comprehensive income for the year
Segmen aset				617.170.772.625	Segment assets
Segmen liabilitas				311.869.942.591	Segment liabilities
Informasi lainnya:					<i>Other informations:</i>
Belanja modal				39.029.168.874	<i>Capital expenditures</i>
Depresiasi dan amortisasi				9.386.119.527	<i>Depreciation and amortisation</i>

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi mengenai segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

32. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Company's business segments is as follows: (continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017/ Year Ended December 31, 2017					
	Perawatan Tubuh dan Antiseptik/ Body Care and Antiseptic	Perawatan Rambut/ Hair Care	Lain-lain/ Others	Total/ Total	
Penjualan bruto setelah dikurangi diskon dan retur penjualan	252.674.736.610	284.734.688.075	3.333.426.732	540.742.851.417	Gross sales less sales discount and return
Rabat dan bonus yang tidak dapat dialokasikan				(16.574.474.458)	Unallocated rebate and bonus
Beban pokok penjualan	(116.216.211.203)	(130.424.003.958)	(2.755.234.298)	(249.395.449.459)	Cost of goods sold
Hasil segmen	136.458.525.407	154.310.684.117	578.192.434	274.772.927.500	Segment results
Beban yang tidak dapat dialokasi				(165.404.390.784)	Unallocated operating expenses
Laba operasi				109.368.536.716	Income from operations
Pendapatan keuangan				171.292.944	Finance income
Beban keuangan				(21.038.170.806)	Finance costs
Laba sebelum beban pajak penghasilan				88.501.658.854	Income before income tax expense
Beban pajak penghasilan - neto				(21.368.522.989)	Income tax expense - net
Laba tahun berjalan				67.133.135.865	Income for the year
Rugi komprehensif lain, setelah pajak				(1.915.752.360)	Other comprehensive loss, net of tax
Penghasilan komprehensif tahun berjalan				65.217.383.505	Total comprehensive income for the year
Segmen aset				565.881.546.227	Segment assets
Segmen liabilitas				301.600.515.659	Segment liabilities
Informasi lainnya:					Other informations:
Belanja modal				33.305.706.449	Capital expenditures
Depresiasi dan amortisasi				8.396.564.285	Depreciation and amortisation

Informasi Geografis

Seluruh aset produktif Perusahaan berada di Indonesia. Tabel berikut menyajikan penjualan berdasarkan lokasi pelanggan:

Geographic Information

All of the Company's productive assets are located in Indonesia. The following table presents sales based on the location of the customers:

	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ Seven-Month Periods ended July 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
	2020	2019 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2019	2018	2017	
Jawa	473.105.561.950	328.765.680.583	604.282.224.720	479.010.751.094	492.278.354.014	Java
Luar Jawa	369.411.319.340	299.604.553.837	506.521.972.245	365.298.286.345	245.620.213.486	Outside Java
Ekspor	2.588.782.416	294.634.831	2.271.855.569	650.448.470	297.545.430	Export
Penjualan bruto	845.105.663.706	628.664.869.251	1.113.076.052.534	844.959.485.909	738.196.112.930	Gross sales
Dikurangi:						Less:
Diskon dan retur penjualan	(203.751.255.056)	(162.766.289.668)	(283.363.798.164)	(226.803.174.757)	(197.453.261.513)	Sales discount and return
Rabat dan bonus	(23.386.312.429)	(18.704.381.099)	(31.921.232.290)	(23.428.123.321)	(16.574.474.458)	Rebate and bonus
Total penjualan neto	617.968.096.221	447.194.198.484	797.791.022.080	594.728.187.831	524.168.376.959	Total net sales

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajemen Risiko

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang bank jangka pendek, utang usaha dan lain-lain, beban akrual, liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek, utang pihak berelasi, utang bank jangka panjang, utang pembiayaan konsumen dan liabilitas sewa. Tujuan utama dari liabilitas keuangan ini adalah untuk mengumpulkan dana untuk operasi Perusahaan. Perusahaan juga memiliki berbagai aset keuangan seperti kas dan setara kas, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang pihak berelasi dan aset tidak lancar lainnya (uang jaminan) yang berasal langsung dari operasi Perusahaan.

Risiko utama instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko mata uang asing, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas. Penelaahan manajemen dan kebijakan yang disetujui untuk mengelola masing-masing risiko ini dijelaskan secara detail sebagai berikut:

a. Risiko mata uang asing

Risiko mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Aset dan liabilitas moneter Perusahaan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Juli 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 disajikan pada Catatan 31.

Perusahaan tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk risiko pertukaran mata uang asing. Walaupun demikian, terkait dengan hal-hal yang telah didiskusikan pada paragraf di atas, fluktuasi nilai tukar Rupiah masing-masing terhadap Dolar Amerika Serikat, Yuan Tiongkok, Dolar Hongkong, Franc Swiss, Filipina Peso, Euro Eropa dan Dolar Singapura menghasilkan lindung nilai natural terhadap risiko mata uang Perusahaan.

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Risk Management

The financial liabilities of the Company consist of short-term bank loans, trade and other payables, accrued expenses, short-term employee benefits liability, due to a related party, long-term bank loans, consumer financing payables and lease liabilities. The main purpose of these financial liabilities is to raise funds for the operations of the Company. The Company also have various financial assets such as cash and cash equivalents, restricted time deposit, trade receivables, other receivables, due from related parties and other non-current assets (security deposits) which arise directly from its operations.

The main risks arising from the Company's financial instruments are foreign exchange rate risk, credit risk, liquidity risk, and fair value and cash flow interest rate risk. The management reviews and approves policies for managing each of these risks, which are described in more detail as follows:

a. Foreign exchange rate risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates.

Monetary assets of the Company which are denominated in foreign currencies as of July 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017 are presented in Note 31.

The Company has no formal hedging policy for foreign exchange exposure. However, in relation to the matters discussed in the preceding paragraph, the fluctuations in the exchange rates between the Rupiah and each of United States dollar, Chinese Yuan, Hongkong Dollar, Swiss Franc, Philippine Peso, European Euro and Singapore Dollar provide some degree of natural hedge for the Company's foreign exchange exposure.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko (lanjutan)

b. Risiko kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Perusahaan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Untuk meringankan resiko ini, terdapat kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dibuat kepada pelanggan yang dapat dipercaya dan terbukti mempunyai sejarah kredit yang baik. Ini merupakan kebijakan Perusahaan dimana semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Untuk penjualan ekspor dan domestik, Perusahaan dapat memberikan pelanggan persyaratan kredit sampai dengan 60 hari sejak tanggal penerbitan faktur. Perusahaan memiliki kebijakan yang membatasi jumlah eksposur kredit untuk setiap pelanggan tertentu. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus-menerus untuk mengurangi eksposur Perusahaan untuk kredit macet.

Ketika pelanggan gagal melakukan pembayaran dalam jangka waktu kredit yang diberikan, Perusahaan akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Berdasarkan pada penilaian Perusahaan, ketentuan-ketentuan khusus dapat dilakukan jika piutang tersebut dianggap tak tertagih. Untuk meringankan risiko kredit, Perusahaan akan menghentikan pasokan semua produk kepada pelanggan dalam hal keterlambatan pembayaran.

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Risk Management (continued)

b. Credit risk

The Company is exposed to credit risk arising from the credit granted to its customers. To mitigate this risk, it has policies in place to ensure that sales of products are made only to creditworthy customers with proven track record or good credit history. It is the Company's policy that all customers who wish to trade on credit are subject to credit verification procedures. For export and domestic sales, the Company may grant its customers credit terms up to 60 days from the issuance of invoice. The Company has policies that limit the amount of credit exposure to any particular customer. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce the Company's exposure to bad debts.

When a customer fails to make payment within the credit term granted, the Company will contact the customer to act on the overdue receivables. Depending on the Company's assessment, specific provisions may be made if the debt is deemed uncollectible. To mitigate credit risk, the Company will cease the supply of all products to the customer in the event of late payment and/or default.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Nilai maksimum eksposur terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat piutang usaha diungkapkan pada Catatan 6. Perusahaan tidak memiliki konsentrasi risiko kredit karena piutang usahanya berhubungan dengan sejumlah besar pelanggan utama.

Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya, yang mencakup kas dan setara kas serta aset keuangan lainnya, karena wanprestasi dari pihak terkait, Perusahaan memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan investasi pada instrumen yang memiliki risiko kredit tinggi dan hanya menempatkan investasinya pada bank-bank dengan peringkat kredit yang tinggi. Nilai maksimum eksposur terhadap risiko ini adalah sebesar nilai tercatat dari aset keuangan sebagaimana diungkapkan pada Catatan 5.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi likuiditasnya.

Perusahaan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan mengelola utang yang jatuh tempo dengan mengatur kas dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup.

Perusahaan secara regular mengevaluasi proyeksi arus kas dan terus menerus menilai kondisi atas kesempatan untuk mendapatkan inisiatif penggalangan dana. Inisiatif ini termasuk utang dan pinjaman bank.

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Risk Management (continued)

b. Credit risk (continued)

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of trade receivables as shown in Note 6. The Company has no concentration of credit risk as its trade receivables relate to a large number of main customers.

With respect to credit risk arising from other financial assets, which comprise cash and cash equivalents and other financial assets, from default of the counterparty, the Company has a policy not to place investments in instruments that have a high credit risk and to put the investments only in banks with high credit ratings. The maximum exposure to this risk is equal to the carrying amounts of the above mentioned financial assets as disclosed in Note 5.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Company is not enough to cover the liabilities which become due.

The Company manage its liquidity profile to be able to finance its capital expenditure and service its maturing debts by maintaining sufficient cash, and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities.

The Company regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously assess conditions for opportunities to pursue fund-raising initiatives. These initiatives may include bank loans and borrowings.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan pembayaran kontraktual yang didiskontokan (termasuk pembayaran bunga):

	Kurang dari 1 tahun/ Below 1 year	1 - 3 tahun/ 1 - 3 years	3 - 5 tahun/ 3 - 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Total/ Total
Liabilitas jangka pendek					
Utang bank jangka pendek	90.805.510.139	-	-	-	90.805.510.139
Utang usaha	26.447.380.052	-	-	-	26.447.380.052
Utang lain-lain	2.929.904.027	-	-	-	2.929.904.027
Beban akrual	29.378.227.255	-	-	-	29.378.227.255
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	5.332.767.596	-	-	-	5.332.767.596
Sub-total	154.893.789.069	-	-	-	154.893.789.069
Liabilitas jangka panjang					
Utang bank jangka panjang	6.991.508.533	14.959.303.412	16.769.733.999	42.514.325.933	81.234.871.877
Utang pembiayaan konsumen	5.058.283.375	5.396.886.296	581.466.585	-	11.036.636.256
Liabilitas sewa	2.117.860.634	313.009.129	-	-	2.430.869.763
Sub-total	14.167.652.542	20.669.198.837	17.351.200.584	42.514.325.933	94.702.377.896
Total Liabilitas	169.061.441.611	20.669.198.837	17.351.200.584	42.514.325.933	249.596.166.965
Biaya transaksi yang belum diamortisasi					(651.589.022)
Neto					248.944.577.943

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risk Management (continued)

c. Liquidity risk (continued)

The table below summarizes the maturity profile of the Company's financial liabilities as of July 31, 2020 based on contractual discounted payments to be made (including interest payments):

Current liabilities
Short-term bank loans
Trade payables
Other payables
Accrued expenses
Short-term employee benefits liability
Sub-total
Non-current liabilities
Long-term bank loans
Consumer financing payables
Lease liabilities
Sub-total
Total Liabilities
Unamortized transaction costs
Net

Perubahan Pada Liabilitas Yang Timbul Dari Aktivitas Pendanaan

Changes In Liabilities Arising From Financing Activities

Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2020/
 Seven-Month Period Ended July 31, 2020

	Saldo awal/ Beginning balance	Penerapan PSAK 73/ Implementation PSAK 73	Penambahan/ Addition	Amortisasi biaya transaksi/ Amortisation of transaction cost	Arus kas/ Cash flow	Saldo akhir/ Ending balance
Utang bank jangka panjang	84.404.067.503	-	-	60.904.285	(3.881.688.933)	80.583.282.855
Utang pembiayaan konsumen	11.914.030.084	-	2.185.072.887	-	(3.062.466.715)	11.036.636.256
Liabilitas sewa	-	2.633.060.533	152.584.163	-	(354.774.933)	2.430.869.763
Total	96.318.097.587	2.633.060.533	2.337.657.050	60.904.285	(7.298.930.581)	94.050.788.874

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019/
 Year Ended December 31, 2019

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Amortisasi biaya transaksi/ Amortisation of transaction cost	Arus kas/ Cash flow	Saldo akhir/ Ending balance
Utang bank jangka panjang	-	72.766.116.694	(730.000.000)	12.367.950.809	84.404.067.503
Utang pembiayaan konsumen	11.905.563.632	4.780.242.025	-	(4.771.775.573)	11.914.030.084
Total	11.905.563.632	77.546.358.719	(730.000.000)	7.596.175.236	96.318.097.587

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Perubahan Pada Liabilitas Yang Timbul Dari Aktivitas Pendanaan (lanjutan)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018/ Year Ended December 31, 2018			
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Arus kas/ Cash flow	Saldo akhir/ Ending balance
Utang bank jangka panjang	1.702.757.271	-	(1.702.757.271)	-
Utang pembiayaan konsumen	9.951.415.153	5.638.262.519	(3.684.114.040)	11.905.563.632
Total	11.654.172.424	5.638.262.519	(5.386.871.311)	11.905.563.632

Long-term bank loans
Consumer financing payables

Total

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017/ Year Ended December 31, 2017			
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Arus kas/ Cash flow	Saldo akhir/ Ending balance
Utang bank jangka panjang	8.513.786.351	-	(6.811.029.080)	1.702.757.271
Utang pembiayaan konsumen	9.113.207.607	4.325.157.554	(3.486.950.008)	9.951.415.153
Total	17.626.993.958	4.325.157.554	(10.297.979.088)	11.654.172.424

Long-term bank loans
Consumer financing payables

Total

d. Risiko tingkat suku bunga atas nilai wajar dan arus kas

Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Risiko tingkat suku bunga Perusahaan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Perusahaan kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga. Saat ini, Perusahaan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risk Management (continued)

c. Liquidity risk (continued)

Changes In Liabilities Arising From Financing Activities (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018/ Year Ended December 31, 2018			
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Arus kas/ Cash flow	Saldo akhir/ Ending balance
Utang bank jangka panjang	1.702.757.271	-	(1.702.757.271)	-
Utang pembiayaan konsumen	9.951.415.153	5.638.262.519	(3.684.114.040)	11.905.563.632
Total	11.654.172.424	5.638.262.519	(5.386.871.311)	11.905.563.632

Long-term bank loans
Consumer financing payables

Total

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017/ Year Ended December 31, 2017			
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Arus kas/ Cash flow	Saldo akhir/ Ending balance
Utang bank jangka panjang	8.513.786.351	-	(6.811.029.080)	1.702.757.271
Utang pembiayaan konsumen	9.113.207.607	4.325.157.554	(3.486.950.008)	9.951.415.153
Total	17.626.993.958	4.325.157.554	(10.297.979.088)	11.654.172.424

Long-term bank loans
Consumer financing payables

Total

d. Fair value and cash flow interest rate risk

Fair value and cash flow interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

The Company's interest rate risk mainly arises from loans for working capital and investment purposes. Loans at variable rates expose the Company to fair value interest rate risk. Currently, the Company does not have a formal hedging policy for interest rate exposures.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko (lanjutan)

d. Risiko tingkat suku bunga atas nilai wajar dan arus kas (lanjutan)

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga: (lanjutan)

31 Juli 2020/July 31, 2020

	Suku Bunga Mengambang/ Floating Interest Rate		Suku Bunga Tetap/ Fixed Interest Rate		Total/ Total	
	Kurang dari atau sama dengan 1 tahun/ Less than or equal to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Kurang dari atau sama dengan 1 tahun/ Less than or equal to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year		
Utang bank jangka pendek	-	-	90.805.510.139	-	90.805.510.139	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	-	-	6.888.969.564	73.694.313.291	80.583.282.855	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	-	-	5.058.283.375	5.978.352.881	11.036.636.256	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	-	-	2.117.860.634	313.009.129	2.430.869.763	Lease liabilities
Total	-	-	104.870.623.712	79.985.675.301	184.856.299.013	Total

Pada tanggal 31 Juli 2020, berdasarkan simulasi yang rasional, jika tingkat suku bunga utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, utang pembiayaan konsumen dan liabilitas sewa, lebih tinggi/lebih rendah 50 basis poin, dengan seluruh variabel-variabel lain tidak berubah, maka laba sebelum pajak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 akan lebih rendah/lebih tinggi masing-masing sebesar Rp9.242.814.951.

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risk Management (continued)

d. Fair value and cash flow interest rate risk (continued)

The following table sets out the carrying amounts, by maturity, of the Company's financial liabilities that are exposed to interest rate risk: (continued)

As of July 31, 2020, based on a sensitivity simulation, had the interest rates of short-term bank loans, long-term bank loans, consumer financing payables and lease liabilities, been 50 basis points higher/lower, with all other variables held constant, income before tax for the seven-month period ended July 31, 2020 would have been Rp9,242,814,951 higher/lower.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan diwajibkan berdasarkan perjanjian pinjaman untuk mempertahankan tingkat modal saham yang ada. Persyaratan modal yang diberlakukan secara eksternal ini telah dipenuhi oleh entitas terkait pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Sebagai tambahan, Perusahaan juga dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007, untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Perusahaan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada tanggal 31 Juli 2020, dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang rasional.

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Capital Management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that they maintain healthy capital ratios in order to support their business and maximize shareholder value.

The Company is required under their respective loan agreements to maintain the level of existing share capital. This externally imposed capital requirement has been complied with by the relevant entities as of July 31, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017. In addition, the Company is also required by the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, effective August 16, 2007 to contribute to and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. This externally imposed capital requirements are considered by the Company at the Annual General Shareholders' Meeting.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, if necessary, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes as of July 31, 2020, and December 31, 2019, 2018 and 2017.

The Company's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Pengelolaan modal (lanjutan)

Perusahaan mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*), dengan membagi utang neto dengan ekuitas neto. Kebijakan Perusahaan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka dalam industri sejenis di Indonesia untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang rasional. Perusahaan menyertakan dalam utang neto, utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, utang pembiayaan konsumen, liabilitas sewa dikurangi kas dan setara kas. Yang dikelola sebagai modal oleh manajemen adalah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan.

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Capital Management (continued)

The Company monitors its capital using gearing ratios, by dividing net debt by the net equity. The Company's policy is to maintain its gearing ratio within the range of gearing ratios of the leading companies with similar industry in Indonesia in order to secure access to finance at a reasonable cost. The Company includes within net debt, short-term bank loans, long-term bank loans, consumer financing payables, lease liabilities less cash and cash equivalents. Capital managed by the management includes equity attributable to the majority shareholders of the Company.

	31 Juli 2020/ July 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Utang bank jangka pendek	90.805.510.139	138.955.190.080	181.410.214.771	192.802.313.161	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	80.583.282.855	84.404.067.503	-	1.702.757.271	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	11.036.636.256	11.914.030.084	11.905.563.632	9.951.415.153	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	2.430.869.763	-	-	-	Lease liabilities
Total utang	184.856.299.013	235.273.287.667	193.315.778.403	204.456.485.585	Total debts
Dikurangi kas dan setara kas	(4.721.480.097)	(2.744.102.486)	(24.598.248.037)	(4.597.496.092)	Less cash and cash equivalents
Utang neto	180.134.818.916	232.529.185.181	168.717.530.366	199.858.989.493	Net debt
Total ekuitas	509.589.551.522	416.687.613.979	305.300.830.034	264.281.030.568	Total equity
Rasio pengungkit neto	0,35	0,56	0,55	0,76	Net gearing ratio

34. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Transaksi non-kas yang signifikan:

	Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ Seven-Month Periods ended July 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,		
	2020	2019 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2019	2018	2017
Perolehan aset tetap melalui: Utang pembiayaan konsumen	2.185.072.887	3.235.624.000	4.780.242.025	5.638.262.519	4.325.157.554
Utang bank	-	-	72.766.116.694	-	-
Utang lain-lain	38.187.299	-	94.632.255	-	-
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	2.785.644.696	-	-	-	-
Peningkatan modal saham melalui kapitalisasi laba ditahan (Catatan 21)	-	250.000.000.000	250.000.000.000	-	-
Penambahan merek dagang melalui uang muka pembelian merek dagang	-	-	6.142.849.466	-	-

34. SUPPLEMENTARY INFORMATION

Significant non-cash transactions:

CASH FLOWS

Acquisition of fixed assets through:
Consumer financing payables
Bank loan
Other payables
Addition of right-of-use assets through lease liabilities
Increase in share capital through capitalization of retained earnings (Note 21)
Addition of trademarks through advance for purchase of trademarks

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Ketidakpastian Makroekonomi

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, telah terjadi penyebaran virus Covid-19 ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia yang menyebabkan ketidakpastian makro ekonomi sehubungan dengan volatilitas nilai tukar mata uang asing, harga dan permintaan. Perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar, jumlah persediaan atau situasi lainnya di luar kendali Perusahaan. Peningkatan jumlah infeksi virus Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan operasi Perusahaan. Manajemen akan terus memantau hal ini dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang.

Perubahan Perjanjian Utang Bank

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 0598/KWII/SPPJ/2020 tanggal 6 Agustus 2020 dan Akta Notaris Stefanus Yuwono Tedjosaputro, S.T., S.H., MBA., M.SIS., M.Kn., M.H., No. 100 tanggal 31 Agustus 2020, Perusahaan menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk terkait perpanjangan ketersediaan fasilitas-fasilitas kredit sampai dengan tanggal 4 November 2021 dan perubahan lainnya sebagai berikut:

- a. Perubahan jaminan fasilitas kredit menjadi berupa 2 (dua) Hak Guna Bangunan ("HGB") berlokasi di Ngaliyan atas nama Perusahaan, 5 (lima) Hak Guna Bangunan ("HGB") berlokasi di Semanan atas nama Perusahaan, 1 (satu) Hak Guna Bangunan ("HGB") berlokasi di Kembangan Selatan atas nama PT Antilope Madju Puri Indah, beberapa aset seperti mesin produksi dan peralatan, stok barang berupa barang jadi sebesar Rp50.000.000.000 dan perubahan jumlah jaminan pribadi atas nama Billy Hartono Salim menjadi sejumlah Rp281.390.000.000.
- b. Perubahan suku bunga fasilitas kredit Rekening Koran (lokal) menjadi 8,75% per tahun.

35. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE

Macroeconomic Uncertainty

As of the date of completion of this financial statements, the Covid-19 virus has spread all over the world including Indonesia, that caused uncertainty in macroeconomic related to volatility in foreign exchange rates, prices and demand. Future developments may change due to market changes, inventory levels or other situations outside the control of the Company. A significant rise in the number of Covid-19 virus infections or prolongation of the outbreak may affect Indonesia and the Company's operation. Management will continue to monitor and overcome the risks and uncertainties regard with this matter in the future.

Changes in Bank Loan Agreement

Based on Period Extension Notification Letter No. 0598/KWII/SPPJ/2020 dated August 6, 2020 and Notarial Deed of Stefanus Yuwono Tedjosaputro, S.T., S.H., MBA., M.SIS., M.Kn., M.H., No. 100 dated August 31, 2020, the Company entered into Changes of Loan Agreement with PT Bank Central Asia Tbk related to extend the availability of credit facilities until November 4, 2021 and other changes as follows:

- a. Changes of credit facility collateral to become 2 (two) Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") located in Ngaliyan on behalf of the Company, 5 (five) Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") located in Semanan on behalf of the Company, 1 (one) Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") located in Kembangan Selatan on behalf of PT Antilope Madju Puri Indah, several assets such as production machine and equipment, finished goods inventories amounted to Rp50,000,000,000 and changes in personal guarantee amount on behalf of Billy Hartono Salim to become Rp281,390,000,000.
- b. Change in interest rate of Overdraft credit facility (local) to become 8.75% per annum.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)

Persetujuan Bersyarat dari Bank terkait
Penawaran Umum Perdana saham (Initial
Public Offering (“IPO”)) dan Pembagian Dividen

Terkait rencana penawaran perdana saham, melalui surat nomor 4976/KWII-SMG/2020 tanggal 24 September 2020, Perusahaan telah memperoleh persetujuan bersyarat dari PT Bank Central Asia Tbk atas permohonan Perusahaan mengenai perubahan status kelembagaan Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan penarikan dividen sebesar 40% dari laba bersih tahun berjalan 2020 sebelum status kelembagaan Perusahaan berubah menjadi perusahaan terbuka. Persetujuan ini akan berlaku efektif apabila Perusahaan menandatangani perubahan perjanjian kredit dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal surat persetujuan dari bank.

Pada tanggal 8 Oktober 2020, Perusahaan menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit No. 1333/2020 dengan PT Bank Central Asia Tbk yang berlaku efektif sejak 9 Oktober 2020, dengan perubahan-perubahan sebagai berikut:

- a. Penambahan ketentuan perjanjian kredit sebagai berikut:
- Memberitahukan secara tertulis kepada PT Bank Central Asia Tbk maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang mengubah pemegang saham mayoritas dan pengendali serta susunan pengurus kunci.
 - Membuat dan melaksanakan kebijakan pembagian dividen Perusahaan selaku perusahaan publik sesuai dengan persetujuan dan keputusan RUPS Perusahaan.
 - Mempertahankan pengendalian dan kepemilikan saham dalam Perusahaan minimal sebesar 51% (lima puluh satu persen) secara langsung atau tidak langsung oleh keluarga Bapak Billy Hartono Salim.

35. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
(continued)

Conditional Approval from Bank related to
Initial Public Offering (“IPO”) and Payment of
Dividend

Related to the initial public offering plan, through letter number 4976/KWII-SMG/2020 dated September 24, 2020, the Company has obtained conditional approval from PT Bank Central Asia Tbk on the Company’s request pertaining to the change of the legal form of the Company from a private entity to become a public listed entity and withdrawal of dividend at the amount of 40% from net income during the year 2020 before the legal form of the Company changes to become a public listed entity. This approval will be effective once the Company signs the changes in credit agreement at the latest 14 days from the date of approval letter from bank.

On October 8, 2020, the Company entered into Changes in Loan Agreement No. 1333/2020 with PT Bank Central Asia Tbk which is effective since October 9, 2020, with changes as follow:

- a. Additional clauses on loan agreement as follow:
- Submit a written letter to PT Bank Central Asia Tbk at a maximum of 10 (ten) business days after holding the General Meeting of Shareholders (“RUPS”) which changes the majority and controlling shareholders and key management’s composition.
 - Compose and implement policy regarding the Company’s dividend distribution as a public company in accordance to the approval and decision of the Company’s RUPS.
 - Maintain the control and share ownership of the Company at a minimum of 51% directly or indirectly by Mr. Billy Hartono Salim’s family.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)

Persetujuan Bersyarat dari Bank terkait
Penawaran Umum Perdana saham (*Initial*
***Public Offering* (“IPO”)) dan Pembagian Dividen**
(lanjutan)

Pada tanggal 8 Oktober 2020, Perusahaan menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit No. 1333/2020 dengan PT Bank Central Asia Tbk yang berlaku efektif sejak 9 Oktober 2020, dengan perubahan-perubahan sebagai berikut: (lanjutan)

- b. Perubahan kondisi dimana Perusahaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:
- Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, likuidasi dan mengubah status kelembagaan, kecuali perubahan status Perusahaan menjadi perusahaan terbuka yang telah disetujui oleh PT Bank Central Asia Tbk.
 - Mengalihkan atau menjual seluruh merek produk Perusahaan (Victoria, Miranda, Herborist, Sixsence, Nuface dan Iria Goat's Milk) ke pihak lain.

Berdasarkan rapat Direksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 12 Oktober 2020, Perusahaan akan membagikan dividen tunai dari saldo laba Perusahaan sebesar Rp25.000.000.000 kepada seluruh pemegang saham Perusahaan pada tanggal tersebut. Dividen tunai ini telah dibayarkan Perusahaan kepada seluruh pemegang saham pada tanggal 15 Oktober 2020.

35. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
(continued)

Conditional Approval from Bank related to
Initial Public Offering (“IPO”) and Payment of
Dividend (continued)

On October 8, 2020, the Company entered into Changes in Loan Agreement No. 1333/2020 with PT Bank Central Asia Tbk which is effective since October 9, 2020, with changes as follow: (continued)

- b. *Changes in the conditions where the Company must obtain written approval from PT Bank Central Asia Tbk as follow:*
- *Merger, business combination, acquisition, liquidation and change in the Company’s legal entity, except the change of the Company’s legal entity to become a public company which has been approved by PT Bank Central Asia Tbk.*
 - *Transfer or sell the Company’s trademarks (Victoria, Miranda, Herborist, Sixsence, Nuface and Iria Goat’s Milk) to other parties.*

Based on meeting of Board of Directors which was approved by the Company’s Board of Commissioners dated October 12, 2020, the Company will distribute cash dividend from the Company’s retained earnings amounting to Rp25,000,000,000 to all its shareholders on the respective date. Such cash dividend was paid by the Company to its shareholder on October 15, 2020.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar

- a. Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 7 tanggal 8 September 2020, para pemegang saham menyetujui, antara lain:
- Mengubah tempat kedudukan Perusahaan yang semula di Jakarta Utara menjadi di Jakarta Barat.
 - Menambah ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan mencakup menjalankan usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga dan perdagangan besar alat laboratorium farmasi dan kedokteran.

Perubahan-perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0062034.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 9 September 2020.

- b. Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 28 tanggal 25 September 2020, para pemegang saham menyetujui, antara lain:
- Mengubah status Perusahaan yang semula perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka.
 - Mengubah nilai nominal saham yang semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi sebesar Rp50 per saham.
 - Menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan yang semula Rp285.000.000.000 menjadi Rp500.000.000.000 atau setara dengan 10.000.000.000 lembar saham.
 - Persetujuan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana saham melalui pasar modal (*Initial Public Offering* ("IPO")).

35. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
(continued)

Changes in Article of Association

- a. Based on the statement of the Company's shareholders resolution which has been notarized by the Notarial Deed of Rudy Siswanto, S.H., No. 7 dated September 8, 2020, the shareholders approved, among others:
- Change the Company's domicile from North Jakarta to West Jakarta.
 - Add the Company's scope of activities to include to running soap industry and household cleaning materials and wholesale trading of pharmaceutical and medical laboratory equipment.

The changes were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-0062034.AH.01.02.TAHUN 2020 dated September 9, 2020.

- b. Based on the statement of the Company's shareholders resolution which has been notarized by the Notarial Deed of Rudy Siswanto, S.H., No. 28 dated September 25, 2020, the shareholders approved, among others:
- Change in the Company's status which was previously a limited entity to become a listed entity.
 - Change in the par value of shares from Rp1,000,000 per share to become Rp50 per share.
 - Approve the increase of the Company's authorized capital which was previously Rp285,000,000,000 to become Rp500,000,000,000 or equal to 10,000,000,000 shares.
 - Approve the Company's plan to conduct Initial Public Offering through capital market ("IPO").

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar (lanjutan)

- b. Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 28 tanggal 25 September 2020, para pemegang saham menyetujui, antara lain: (lanjutan)
- Pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.050.000.000 lembar saham baru untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam IPO.
 - Melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*preemption right*) atas saham baru yang disyaratkan dalam anggaran dasar Perusahaan.
 - Mengubah nama Perusahaan menjadi PT Victoria Care Indonesia Tbk.
 - Menyetujui pelaksanaan *Employee Stock Allocation* ("ESA") sebanyak-banyaknya 8% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO atau sebanyak-banyaknya 84.000.000 saham.
 - Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Luhur Dino Herlambang	:
Komisaris	:	Luhur Iwan Hernadi	:
Komisaris Independen	:	Drs. Herbudianto	:

Direksi

Direktur Utama	:	Billy Hartono Salim	:
Direktur	:	Sumardi Widjaja	:
Direktur	:	Rosid Sujono	:
Direktur	:	Henny Soetanto	:

35. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
(continued)

Changes in Article of Association (continued)

- b. Based on the statement of the Company's shareholders resolution which has been notarized by the Notarial Deed of Rudy Siswanto, S.H., No. 28 dated September 25, 2020, the shareholders approved, among others: (continued)
- Issue the Company's authorized stock in a maximum quantity of 1,050,000,000 new shares to be offered to public in IPO.
 - Pass and set aside the rights of each shareholder for preemption right of new shares as required in the Company's article of association.
 - Change the Company's name to become PT Victoria Care Indonesia Tbk.
 - Approve to conduct *Employee Stock Allocation* ("ESA") with a maximum of 8% from total shares offered in IPO or at maximum 84,000,000 shares.
 - Changes in the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as follow:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
Director
Director
Director

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar (lanjutan)

- c. Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 28 tanggal 25 September 2020, para pemegang saham menyetujui, antara lain: (lanjutan)
- Mengubah seluruh anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; termasuk penyesuaian kegiatan usaha Perusahaan dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Perubahan-perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0391263 dan No. AHU-AH.01.03-0391264 tanggal 25 September 2020 dan pada tanggal yang sama perubahan-perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0066461.AH.01.02.TAHUN 2020.

35. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
(continued)

Changes in Article of Association (continued)

- c. Based on the statement of the Company's shareholders resolution which has been notarized by the Notarial Deed of Rudy Siswanto, S.H., No. 28 dated September 25, 2020, the shareholders approved, among others: (continued)
- Change the entire article of association of the Company to comply with the prevailing laws and regulations including including Bapepam-LK Regulation Number IX.J.I concerning the Principles of Articles of Association of Companies Conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies, in conjunction with Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Regulation of the Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; including adjustments to the Company's business activities and at the same time reformulating all provisions of the Company's Articles of Association.

The changes were acknowledged and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-AH.01.03-0391263 and No. AHU-AH.01.03-0391264 dated September 25, 2020 and on the the same date, changes was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-0066461.AH.01.02.TAHUN 2020.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)

Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 18 tanggal 19 September 2020, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan menyetujui, antara lain, sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan tahunan Perusahaan untuk tahun 2017, 2018 dan 2019.
- Tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2017.
- Tidak ada pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2018.
- Tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2019.

Pengoperan Merek Dagang

Berdasarkan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 22 tanggal 21 September 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian pengalihan merek dagang Omah Herborist, FHM, Fajari, Body Scent, Beauty Cafe, dan Basic dari PT Natura Pesona Mandiri sebesar total Rp27.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 24 tanggal 21 September 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian pengalihan merek dagang Herborist (beda kategori produk) dari PT Natura Pesona Mandiri sebesar total Rp3.000.000.000.

Perubahan Perjanjian Sewa Gudang dengan Billy Hartono Salim

Pada tanggal 12 Oktober 2020, Perusahaan dan Billy Hartono Salim menandatangani Addendum 1 Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 65 tanggal 28 Februari 2019 (Catatan 8g), dengan perubahan-perubahan sebagai berikut:

- Mengubah jangka waktu perjanjian sewa, yang sebelumnya sampai dengan 27 Desember 2028, menjadi sampai dengan 27 Desember 2028 atau diakhiri dengan pemberitahuan tertulis 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pengakhiran masa sewa yang dikehendaki oleh Perusahaan.

35. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
(continued)

General Meeting of Shareholders

Based on Notarial Deed of Rudy Siswanto, S.H., No. 18 dated September 19, 2020, the Company held a General Meeting of Shareholders and approved, among others, as follows:

- Approval and endorsement of the Company's annual financial statements for year 2017, 2018 and 2019.
- No distribution of dividend for year 2017.
- No distribution of cash dividend for year 2018.
- No distribution of dividend for year 2019.

Transfer of Trademarks

Based on Notarial Deed of Rudy Siswanto, S.H., No. 22 dated September 21, 2020, the Company entered into agreement for transfer of trademarks of Omah Herborist, FHM, Fajari, Body Scent, Beauty Cafe and Basic from PT Natura Pesona Mandiri at the total amount of Rp27,000,000,000.

Based on Notarial Deed of Rudy Siswanto, S.H., No. 24 dated September 21, 2020, the Company entered into agreement for transfer of trademarks of Herborist (different product's category) from PT Natura Pesona Mandiri at the total amount of Rp3,000,000,000.

Amendment on Warehouse Rent Agreement with Billy Hartono Salim

On October 12, 2020, the Company and Billy Hartono Salim signed Addendum 1 on Deed of Rental Agreement No. 65 dated February 28, 2019 (Note 8g), with changes as follow:

- Change the rental period, which was previously until December 27, 2028, to become until December 27, 2028 or terminated with written notice 10 (ten) days before the termination date of rental period as expected by the Company.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)

Perubahan Perjanjian Sewa Gudang dengan
Billy Hartono Salim (lanjutan)

Pada tanggal 12 Oktober 2020, Perusahaan dan Billy Hartono Salim menandatangani Addendum 1 Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 65 tanggal 28 Februari 2019 (Catatan 8g), dengan perubahan-perubahan sebagai berikut: (lanjutan)

- Dalam hal Perusahaan mengakhiri perjanjian sewa menyewa sebelum berakhirnya masa sewa dengan pemberitahuan tertulis, Billy Hartono Salim diwajibkan untuk mengembalikan uang sewa yang telah dibayarkan oleh Perusahaan yang akan dihitung secara proporsional atas masa sewa yang belum digunakan oleh Perusahaan.
- Apabila perjanjian sewa menyewa ini berakhir, Perusahaan wajib menyerahkan kembali segala sesuatu yang disewakannya kepada Billy Hartono Salim dalam keadaan kosong dan terpelihara baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa sewa. Atas setiap hari keterlambatan, Perusahaan akan dikenakan denda sebesar Rp3.000.000 per hari, maksimal 14 hari sejak dikenakan denda hari pertama.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan
Bangunan

Berdasarkan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 17 tanggal 12 Oktober 2020, Perusahaan melakukan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan milik Billy Hartono Salim, pihak berelasi, dengan sertifikat hak guna bangunan di kecamatan Ngaliyan, Jawa Tengah seluas 5.200 m² dengan harga Rp25.000.000.000. Pembayaran atas tanah dan bangunan tersebut harus dilakukan oleh Perusahaan paling lambat pada akhir bulan Desember 2020. Tanah dan bangunan tersebut akan diserahkan kepada Perusahaan pada saat harga jual belinya telah dibayar lunas oleh Perusahaan. Bangunan tersebut akan digunakan sebagai gudang persediaan Perusahaan.

35. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
(continued)

Amendment on Warehouse Rent Agreement
with Billy Hartono Salim (continued)

On October 12, 2020, the Company and Billy Hartono Salim signed Addendum 1 on Deed of Rental Agreement No. 65 dated February 28, 2019 (Note 8g), with changes as follow: (continued)

- In case the Company terminate the rental agreement before the end of rental period with written notice, Billy Hartono Salim is obliged to refund the rental payment paid by the Company which will be calculated proportionally over the rental period which has not been used by the Company.
- If the rental agreement ends, the Company has to return every rented item to Billy Hartono Salim in an empty and well-maintained condition, the latest by 7 (seven) days since the end of rent period. On each day of delay, the Company will be charged a penalty of Rp3,000,000 per day, with a maximum of 14 days from the day the penalty is charged.

Land and Building Sales and Purchase
Agreement

Based on Notarial Deed of Rudy Siswanto, S.H., No. 17 dated October 12, 2020, the Company entered into sales and purchase agreement of land and building owned by Billy Hartono Salim, a related party, with building usage right at Ngaliyan sub-district, Central Java comprising an area of 5,200 m² amounting to Rp25,000,000,000. The payment of such land and building should be done by the Company the latest by the end of December 2020. The land and buildings will be handed over to the Company when the selling price has been paid in full by the Company. Such building will be used as the Company's inventory warehouse.

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Juli 2020 dan untuk Periode
Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Juli 2020 dan 2019, dan
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2020 and for the Seven-Month
Periods Ended
July 31, 2020 and 2019, and
As of December 31, 2019, 2018 and 2017 and
for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini disusun sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

37. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 31 Juli 2020 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan 2019, dan tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan tanggal 31 Juli 2020 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dalam Laporan Auditor Independen No. 01996/2.1032/AU.1/04/1561-1/1/IX/2020 tertanggal 28 September 2020, dan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiuro & Handayani dalam Laporan Auditor Independen No. 00371/2.0959/AU.1/04/1316-1/1/IX/2020 tertanggal 28 September 2020. Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan yang disebut di atas, dengan beberapa tambahan pengungkapan dalam Catatan 1b, 1c, 2m, 3, 5, 8b, 10, 11, 13, 14, 24, 30, 35 dan 37.

36. THE PURPOSE OF THE PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements have been prepared solely in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in compliance with rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority.

37. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The Company previously have issued its financial statements as of July 31, 2020 and for the seven-month periods ended July 31, 2020 and 2019, December 31, 2019, 2018 and 2017 and for the years then ended. The financial statement as of July 31, 2020 and for the seven-month period then ended, and as of December 31, 2019 and 2018, and for the years then ended have been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja with Independent Auditors' Report No. 01996/2.1032/AU.1/04/1561-1/1/IX/2020 dated September 28, 2020, and the financial statements as of December 31, 2017 and for the year then ended have been audited by Public Accounting Firm Gani Sigiuro & Handayani with Independent Auditors' Report No. 00371/2.0959/AU.1/04/1316-1/1/IX/2020 dated September 28, 2020. In connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, the Company has reissue the above financial statements, with additional disclosures in Notes 1b, 1c, 2m, 3, 5, 8b, 10, 11, 13, 14, 24, 30, 35 and 37.

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK